

ANNUAL REPORT 2019

LAPORAN TAHUNAN



MENUJU TTITIK KESEIMBANGAN BARU
TUMBUH BERKELANJUTAN

TENTANG LAPORAN TAHUNAN

ABOUT ANNUAL REPORT

Laporan Tahunan PT Indra Karya (Persero) Tahun 2019 ini disusun sebagai pertanggungjawaban perusahaan kepada Pemegang Saham tentang hasil kegiatan usaha PT Indra Karya (Persero) untuk tahun buku 2019.

Laporan Tahunan PT Indra Karya (Persero) Tahun 2019 diterbitkan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pasal 66 dan pasal 67.

Dalam rangka menjalankan praktik terbaik terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), penyampaian laporan ini juga mengacu pada pedoman penyusunan Laporan Tahunan yang berlaku di Indonesia, yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan kriteria *Annual Report Award*.

Laporan Tahunan ini memuat kata “Indra Karya” dan “Perseroan” yang didefinisikan sebagai PT Indra Karya (Persero) yang menjalankan 3 (Tiga) Lini Bisnis Utama yakni *Engineering, Developer, dan Industry*.

Laporan Tahunan PT Indra Karya (Persero) tahun 2019 disajikan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di website resmi PT Indra Karya (Persero) yaitu www.indrakarya.co.id

The Annual Report of PT Indra Karya (Persero) is presented as a show of the Company's accountability to its Shareholders regarding the operational activities of PT Indra Karya (Persero) in the 2019 fiscal year.

The 2019 Annual Report of PT Indra Karya (Persero) is presented in accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, particularly articles 66 and 67.

In order to implement the best practices of the principles of Good Corporate Governance (GCG), the presentation of this annual report also refers to the guidelines to the production of annual reports applicable in Indonesia, namely Circular Letter of the Financial Services Authority No. 30/SEOJK.04/2016 on the Format and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies and the criteria of the Annual Report Award.

This Annual Report contains the words “Indra Karya” and “the Company”, which refer to PT Indra Karya (Persero), a company engaging in three primary business lines: Engineering, Developer, and Industry.

The 2019 Annual Report of PT Indra Karya (Persero) is presented in Indonesian and English using easily readable fonts and printed with good quality. This Annual Report can be viewed and downloaded on the PT Indra Karya's (Persero) official website, www.indrakarya.co.id.

DISCLAIMER

SANGGAHAN DAN BATAS TANGGUNGJAWAB

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang PT Indra Karya (Persero) serta lingkungan bisnis dimana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan ini memuat kata “Indra Karya” dan “Perseroan” yang didefinisikan sebagai PT Indra Karya (Persero) yang menjalankan 3 (Tiga) Lini Bisnis Utama yakni *Engineering, Developer, dan Industry*.

DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

This Annual Report contains statements of the Company's financial conditions, operational results, projections, plans, strategies, policies, and goals categorized as a forward-looking statement in accordance with applicable laws and regulations, with the exception of historical matters. Such statements have prospective risks and uncertainties and can result in actual developments that differ materially from what is reported.

Prospective statements in this Annual Report were made based on various assumptions about the latest and future conditions of PT Indra Karya (Persero) as well as the environment in which the Company conducts business. The Company does not guarantee that documents whose validity have been ensured will bring expected results.

This Annual Report contains the words “Indra Karya” and “the Company”, which refer to PT Indra Karya (Persero), a company that primarily engages in the fields of Engineering, Developer, and Industry.

PENJELASAN TEMA

THEME EXPLANATION

MENUJU TITIK KESEIMBANGAN BARU TUMBUH BERKELANJUTAN

Tahun 2019 merupakan tahun pertumbuhan berkelanjutan yang menggelorakan semangat menuju titik keseimbangan baru, pertumbuhan perusahaan pada hakikatnya merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan skala usaha menjadi lebih besar. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal dan pengaruh iklim industri lokal. Meningkatnya pertumbuhan pendapatan, menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu meningkatkan kinerja operasional yang pada akhirnya memperoleh laba yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

PT Indra Karya (Persero) yang bergerak di bidang usaha jasa konsultan *Engineering, Developer* dan *Industry*, bertumbuh secara berkesinambungan melalui transformasi sekaligus bersinergi dengan beberapa mitra perusahaan secara profesional. Pertumbuhan berkesinambungan ini tidak terlepas dari komitmen yang senantiasa menerapkan *Plan, Do, Check and Action* yang telah menjadi langkah tepat untuk mengantarkan PT Indra Karya (Persero) menjadi BUMN yang besar, kuat dan lincah. Upaya sinergi sesama BUMN juga dikembangkan dalam beberapa lini bisnis perusahaan.

TOWARDS A NEW BALANCE POINT GROWING SUSTAINABLE

Year 2019 was sustained growth work toward a point a new equilibrium spirit, In essence a company's growth reflects its ability to increase its operational scale further. Such growth is affected by internal and external factors as well as the local industrial climate. An increase in revenue shows how far a company can improve its operational performance, which eventually will result in a bigger profit compared to previous years.

PT Indra Karya (Persero), which engages in Engineering, Developer, and Industry, aims to grow in a sustainable manner through transformation and synergizing with its partners professionally. The Company's sustainable growth is inseparable from its commitment to always implementing Plan, Do, Check and Action, which has brought PT Indra Karya (Persero) to grow as a great, strong, and agile state-owned enterprise. Efforts to synergize with fellow state-owned enterprises are also continually developed within the Company's business lines.





KILAS KINERJA

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

KINERJA OPERASIONAL

Sepanjang Tahun 2019 Perseroan berhasil membukukan nilai kontrak sebesar Rp. 422,745 miliar, atau 79,5% dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019. Jika dibandingkan dengan RKAP Tahun 2018, maka total nilai kontrak tersebut mencapai 95,1%.

Total nilai kontrak pada tahun 2019 itu terdiri dari kontrak baru sebesar Rp. 154,167 miliar dan kontrak lanjutan senilai Rp. 268,578 miliar. Nilai kontrak baru tersebut adalah 58,1% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 265,250 miliar.

KINERJA KEUANGAN

Sepanjang tahun 2019, Perseroan mencatat penjualan sebesar Rp. 191,113 miliar atau 86,3% terhadap RKAP Tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan realisasi penjualan Tahun 2019, maka nilai penjualan itu adalah 116,0%.

Realisasi penjualan tahun 2019 terdiri dari produksi proyek lanjutan sebesar Rp. 116,309 miliar atau 93,1% terhadap anggaran Tahun 2019 dan proyek baru sebesar Rp. 74,804 miliar atau 77,4% terhadap anggaran Tahun 2019.

Dari hasil penjualan tersebut, Perseroan membukukan laba usaha sebesar Rp. 12,962 miliar dan laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 10,909 miliar. Realisasi laba bersih tersebut adalah 64,7% dari target RKAP Tahun 2019.

Perseroan memerlukan peningkatan modal kerja untuk memperlancar proses penagihan, karena proses pencairan dana memerlukan waktu 2 (dua) bulan (*by monthly*) untuk proyek yang memakai dana pinjaman sehingga *collection periode* menjadi cukup panjang. Sepanjang Tahun 2019, *collection periode* telah memakan waktu selama 109 hari.

OPERATIONAL HIGHLIGHT

In 2019, the Company managed to book Rp. 422.745 billion in contracts, or 79.5% of the target set in the 2019 Corporate Work and Budget Plan. In comparison to the 2019 Corporate Work and Budget Plan, the contract value amounted to 95.1%.

The Company's 2019 contracts consisted of Rp. 154.167 billion in new contracts and Rp. 268.578 in advanced contracts. The value of the Company's new contracts was 58.1% of its 2019 budget amounting to Rp. 265.250 billion.

FINANCIAL PERFORMANCE

In 2019, the Company posted Rp. 191.113 billion in sales, or 86.3% of the target set in the 2019 Corporate Work and Budget Plan. In comparison to sales realization in 2019, the sales value amounted to 116.0%.

The Company's 2019 sales consisted of Rp. 116.309 billion in production of advanced projects, 93.1% of the 2019 budget, and Rp. 74.804 billion in new projects, 77.4% of the 2019 budget.

From the sales, the Company posted Rp. 12.962 billion in operating profit and Rp. 10.909 billion in net profit after tax. The profit realisation was 64.7% of the target set in the 2019 Work and Budget Plan.

The Company required increased working capital to facilitate the billing process due to the disbursement of funds which took 2 (two) months (bimonthly) for projects that used loans, which resulted in a long collection period. In 2019, the Company recorded a collection period of 109 days.



PENDAHULUAN

INTRODUCTION

Tahun 2019 merupakan Tahun pertama periode pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJP) Perusahaan untuk tahun 2019-2023. Periode tersebut merupakan periode pertumbuhan bagi perusahaan dengan posisi keuangan berada pada kuadran I (*growth*). Pada kuadran I ini, Perusahaan menerapkan strategi utamanya adalah pertumbuhan, yaitu strategi yang diarahkan untuk memupuk keuntungan dengan penguatan di bidang usaha *engineering* dan pengembangan bidang usaha baru yaitu *developer* dan *industry* sebagai diversifikasi usaha. Pengembangan usaha tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) pilar bisnis yaitu:

1. *Engineering*
2. *Developer*
3. *Industry*

POSISI PERUSAHAAN

Upaya Perseroan untuk tetap memfokuskan layanan usaha pada bidang usaha Jasa Konsultan akan memperkuat bisnis inti (*core business*) Perusahaan melalui pengembangan proyek-proyek Sumber Daya Air dan Energi. Hal tersebut merupakan upaya Perseroan untuk dapat mempertahankan eksistensinya sesuai dengan harapan. Namun demikian, Perseroan tetap menjalankan kegiatan perluasan bidang usaha lain seperti jalan, jembatan, kereta api, Lintas Rel Terpadu (LRT), gedung, pengelolaan air bersih dan sebagainya.

Pemilihan bidang usaha tersebut mendorong perusahaan untuk mengembangkan pilar *Engineering* ke berbagai skema bisnis. Selain skema konvensional, Perseroan juga mengembangkan skema bisnis *Design and Build* (D&B), *Engineering, Procurement and Constructions* (EPC).

Untuk pilar *Developer*, Perseroan mengembangkan bisnis di layanan penyediaan dan pengelolaan air, sedangkan untuk pilar *industry*, Perseroan mengembangkan bisnis pada bidang usaha Air Minum Dalam kemasan (AMDK).

2019 was the first year of implementation of the Company's Long-Term Plan for the 2019-2023 period. The period marks a time of growth for the Company with its financial position in the first quadrant. In the first quadrant, the Company implements its primary strategy for growth, which is directed towards obtaining profit by strengthening its engineering business line and developing its new developer and industry business lines as part of its diversification effort. The Company's business diversification is presented in its 3 (three) business pillars, namely:

1. Engineering
2. Developer
3. Industry

THE COMPANY'S POSITION

The Company's effort to focus its business on the field of Consulting Services will strengthen its core business through the development of Water Resource and Energy projects. This is part of the Company's effort to maintain its existence as expected. Nevertheless, the Company still exercises expansions of its other operational activities such as developing roads, bridges, train, Light Rail Transit (LRT), buildings, clean water management, and others.

Such choice of business field encourages the Company to expand its Engineering pillar to various business schemes. As well as conventional schemes, the Company also engages in Design and Build (D&B) and Engineering, Procurement, and Constructions (EPC) schemes.

In regard to its Developer pillar, the Company engages in water provision and management, while in regard to its industry pillar the Company engages in the bottled drinking water business.

Tahun 2019 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk tahun 2015-2019. RPJMN merupakan strategi pembangunan dan kebijakan yang disusun sebagai tahapan untuk mencapai tujuan mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur

Dalam RPJMN ini, Pemerintah telah menetapkan beberapa isu strategis baik di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, maupun perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Penanganan isu-isu strategis ditempuh melalui program kerja tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 dengan mengangkat tema "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas".

SEKILAS KINERJA 2019

Sepanjang tahun 2019 Perseroan membukukan realisasi perolehan produksi sebesar Rp. 191,113 miliar atau 86,3% dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019 sebesar Rp. 221,57 miliar. Jika Realisasi produksi tahun 2019 dibandingkan dengan realisasi produksi tahun 2018 sebesar Rp. 164,748 miliar maka tercapai 116,0%.

Pada akhir tahun 2019 Perseroan membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 10,909 miliar, naik 8,89% bila dibandingkan dengan capaian laba bersih tahun 2018 sebesar Rp. 10,018 miliar.

2019 was the fifth year of implementation of the National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019. RPJMN is a development and policy strategy formulated as part of the effort to manifest an independent, fair, and prosperous Indonesia.

In RPJMN, the Government emphasizes several strategic issues related to politics, law, defense and security, the economy, and welfare. The handling of strategic issues is pursued through annual work programs contained in the Government Work Plan (RKP), which in 2019 with the theme "Equity Development for Quality Growth"

2019 PERFORMANCE HIGHLIGHTS

In 2019, the Company posted Rp. 191.113 billion in production realization, or 86.3% of the target of Rp. 221.57 billion set in the 2019 Work and Budget Plan. In comparison to the Company's 2018 production realization, the 2019 production realization amounted to 116.0%.

At the end of 2019, the Company posted Rp. 10.909 billion in net profit after tax, up 8.89% from Rp. 10.018 billion in net profit in 2018.



PENDAPATAN/REVENUE

Sepanjang Tahun 2019, Perseroan membukukan pendapatan Rp. 191,11 miliar, naik 16% dari Tahun 2018 sebesar Rp. 164,75 miliar
In 2019, the Company posted Rp. 191.11 billion in revenue, up 16% from Rp. 164.75 billion in 2018.

LABA BERSIH/NET INCOME

Laba bersih tahun berjalan pada Tahun 2019 tercatat Rp. 10,91 miliar, naik 8,88% dari Tahun 2018 sebesar Rp. 10,02 miliar
The Company's profit for the year in 2019 was recorded at Rp. 10.91 billion, up 8.88% from Rp. 10.02 billion in 2018.

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Hasil *assesment* untuk penerapan Tata kelola Perusahaan, Perseroan mendapat penilaian Baik dengan skor yang dicapai sebesar 80,57.

According to an assessment on implementation of Good Corporate Governance, the Company received a Good rating with a score of 80.57.



JEJAK LANGKAH MILESTONES

1961

Perusahaan didirikan dengan bidang usaha di sektor Sumber Daya Air.

The establishment of the Company with water resources as its primary field.

1982

Pemindahan Kantor Pusat PT Indra Karya (Persero) dari Malang ke Jakarta.

The relocation of PT Indra Karya's (Persero) headquarters from Malang to Jakarta.

1994

Penambahan Kantor Perwakilan PT Indra Karya (Persero) di beberapa wilayah yang tersebar secara Nasional.

Addition of Representative Offices of PT Indra Karya (Persero) in several areas spread nationally.

2012

Pemisahan Spesifikasi Sektor dan Jenis Layanan Usaha Bidang Engineering PT Indra Karya (Persero).

Separation of Sector Specifications and Types of Engineering Business Services PT Indra Karya (Persero).

2019

Pembangunan Pabrik AMDK Infresh di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP).

Infresh AMDK Factory Development in the Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) area.

PT Indra Karya (Persero) berdiri diawali dari Pelaksana dan Pengelola Proyek Brantas Jawa Timur yang dibagi menjadi 3 Perusahaan BUMN :
Kontraktor : PT Brantas Abipraya (Persero)
Operator : Perum Jasa Tirta I
Konsultan : PT Indra Karya (Persero)

PT Indra Karya (Persero) was first established for the operation and management of the Brantas Project in East Java, which was assigned to three State-owned Enterprises:

Contractor : PT Brantas Abipraya (Persero)
Operator : Perum Jasa Tirta I
Consultant : PT Indra Karya (Persero)

1972

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

The revision of the Company's Articles of Association from State Company (PN) to Limited Liability Company (PT).

1987

Perluasan bidang Usaha PT Indra Karya (Persero) di Sektor Energi Ketenagalistrikan.

The opening of the office branches of PT Indra Karya (Persero) nationally in several regions.

2001-2010

PT Indra Karya (Persero) sebagai *Lead firm* pada pengawasan dan supervisi Proyek BKT (Banjir Kanal Timur), Bendungan Jatigede, dan Proyek Semarang Flood Control.

The appointment of PT Indra Karya (Persero) as the lead firm in the supervision of the East Flood Canal, Jatigede Dam, and Semarang Flood Control projects.

2018

Diversifikasi Usaha PT Indra Karya (Persero) menjadi konsultan yang diperluas.

The expanded diversification of PT Indra Karya's (Persero) scope of business as a consultant.

DAFTAR ISI

Table Of Content

01 TENTANG LAPORAN TAHUNAN

ABOUT ANNUAL REPORT

03 PENJELASAN TEMA

THEMA EXPLANATION

04 KILAS KINERJA

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

05 POSISI PERUSAHAAN

THE COMPANY'S POSITION

06 SEKILAS KINERJA 2019

2019 PERFORMANCE HIGHLIGHTS

08 JEJAK LANGKAH

MILESTONES

09 DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENT

11 IKHTISAR KINERJA 2019

2019 PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- 12 IKHTISAR KINERJA 2019
2019 Performance Highlights
- 12 IKHTISAR KEUANGAN 2019
2019 Financial Highlights
- 15 IKHTISAR SAHAM
Share Highlights
- 15 IKHTISAR EFEK LAINNYA
Highlights of Other Securities
- 15 AKSI KORPORASI
Corporate Actions
- 15 PENGHARGAAN
Awards
- 16 SERTIFIKASI
Certifications
- 18 PERISTIWA PENTING
Important Events

23 LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

- 24 SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS
Greetings From The Board Of Commissioners
- 26 SUSUNAN DEWAN KOMISARIS
Composition Of The Board Of Commissioners
- 27 PROFIL DEWAN KOMISARIS
Profiles Of The Board Of Commissioners
- 28 LAPORAN DIREKSI
Board Of Directors Report
- 30 SUSUNAN DIREKSI
Composition Of The Board Of Directors
- 31 PROFIL DIREKSI
Board Of Directors Profiles
- 32 LEMBAR PENGESAHAN
Validity Sheet



33 PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

- 34 INFORMASI UMUM
General Information
- 35 SEJARAH PERUSAHAAN
Company History
- 38 RIWAYAT AKTE INDRA KARYA (PERSERO)
Deeds History of PT Indra Karya (Persero)
- 39 IDENTITAS PERUSAHAAN
Corporate Identity
- 40 VISI, MISI, BUDAYA DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN
Vision, Mission, Culture And Company Values
- 42 STRUKTUR ORGANISASI
Organizational Structure
- 42 KEPALA DEPARTEMEN
Head of Departement
- 48 KOMPOSISI PERMODALAN
Composition Of Capital
- 49 JARINGAN BISNIS DAN WILAYAH OPERASI
Business Network And Operational Areas
- 49 NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG
Names And Address Of Supporting Professional Agencies
- 50 ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
Subsidiaries And Associated Entities
- 50 STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN
Company Group Structure
- 50 INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN
Information On Company Website
- 51 SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources
- 52 PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM
HR Competency Development
- 52 PENGEMBANGAN KARIR
Career Development
- 53 PENILAIAN KINERJA
Performance Assessment
- 54 ANGGARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Education And Training Budget
- 55 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Research And Development
- 57 TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

59 ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT ANALYSIS AND DISCUSSION

- 60 TINJAUAN UMUM
General Overview
- 61 TINJAUAN OPERASIONAL
Operational Overview
- 62 PENJUALAN/PRODUKSI
Sales/Production
- 63 PENDAPATAN PER SEGMENT
Income Per Segment
- 64 TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL OVERVIEW
- 69 REALISASI DAN TARGET 2019
Realization And Targets In 2019
- 70 INVESTASI BARANG MODAL
Capital Goods Investment
- 71 KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL
Capital Structure Policy
- 71 RINCIAN STRUKTUR MODAL
Details Of Capital Structure
- 71 IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL
Material Commitment For Capital Goods Investment
- 72 INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SE
TELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN
*Material Information And Facts That Occurred After The
Accounting Reporting Date*
- 72 ASPEK PEMASARAN
Marketing Aspects
- 73 KEBIJAKAN DIVIDEN
Dividend Policy
- 73 PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN ATAU
MANAJEMEN
Employee/Management Stock Ownership Program
- 73 REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN
UMUM
Realization Of Proceeds From Public Offerings
- 73 INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG
MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU
TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI
*Information On Material Transactions With Conflicts Of
Interest And/Or Transactions With Affiliated Parties*
- 73 PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KINERJA
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSIPERUSAHAAN
*Changes In Legislation That Significantly Affect The
Company's Performance*
- 73 PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
Changes In Accounting Policy
- 73 INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
Information On Operational Sustainability
- 73 STRATEGI PERUSAHAAN
Company Strategy
- 72 PROSPEK USAHA
Business Prospect

- 80 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance Roadmap
- 80 PELAKSANAAN PENERAPAN GCG DI PERSEROAN
GCG Implementation In The Company
- 81 HASIL ASSESMENT
Assessment Result
- 81 REKOMENDASI ATAS ASSESMENT
Recommendations Based On Assessment
- 82 STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance Organizational Structure
- 82 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
General Meeting Of Shareholders
- 82 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 2019
2019 General Meetings of Shareholders
- 84 DEWAN KOMISARIS
Board Of Commissioners
- 91 DIREKSI
Board Of Directors
- 98 SEKRETARIS PERUSAHAAN
Corporate Secretary
- 100 SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)
Internal Supervision Unit
- 102 AUDIT EKSTERNAL
External Audit
- 102 MANAJEMEN RISIKO
Risk Management
- 106 AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
Access To Company Information And Data
- 106 SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
Whistle-Blowing System
- 110 GRATIFIKASI
Gratification
- 112 KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL
Superior Performance Criteria (SPC)
- 114 PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGARA
NEGARA
State Administration Wealth Report

115 TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- 117 PEMBIAYAAN CSR
CSR Financing
- 118 TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG EKONOMI
Corporate Social Responsibility In Economy
- 119 TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN
Corporate Social Responsibility In Environment
- 120 TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG SOSIAL,
KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN
Corporate Social Responsibility In Social And Religious Affairs And Education

112 LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL REPORT

77 TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE

- 78 PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
Implementation Of Corporate Governance
- 78 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA
Principles Of Governance
- 79 TUJUAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG
Objectives Of GCG Implementation
- 79 SOSIALISASI DAN INTERNALISASI TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK
*Socialization And Internalization Of Good Corporate
Governance*





01

IKHTISAR KINERJA 2019

2019 PERFORMANCE HIGHLIGHTS

IKHTISAR KINERJA 2019

Di tengah kondisi perekonomian global yang mulai melemah sepanjang Tahun 2019 terutama akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China, telah membawa dampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tingkat 5,17%.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun tersebut berdampak terhadap berbagai sektor usaha termasuk sektor yang menjadi kegiatan usaha Perseroan yaitu di bidang *Engineering, Developer* dan *Industry*.

Namun, berbagai upaya dan strategi yang dilakukan segenap jajaran manajemen Perseroan, pada akhirnya menghasilkan kinerja positif bahkan mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 8,88% dan laba bersih sebesar 10,91%.

2019 PERFORMANCE HIGHLIGHTS

Amid the weakening global economy throughout 2019, particularly as an impact of the trade war between the United States and China, economic growth was slowing down, which resulted in Indonesia's economic growth reaching only 5.17%.

The national economic slowdown also affected various business sectors, including those the Company engages in, namely *Engineering, Developer*, and *Industry*.

Nevertheless, the Company's thorough effort and strategies eventually resulted in positive performance, including 8.88% revenue growth and 10.91% net profit growth.

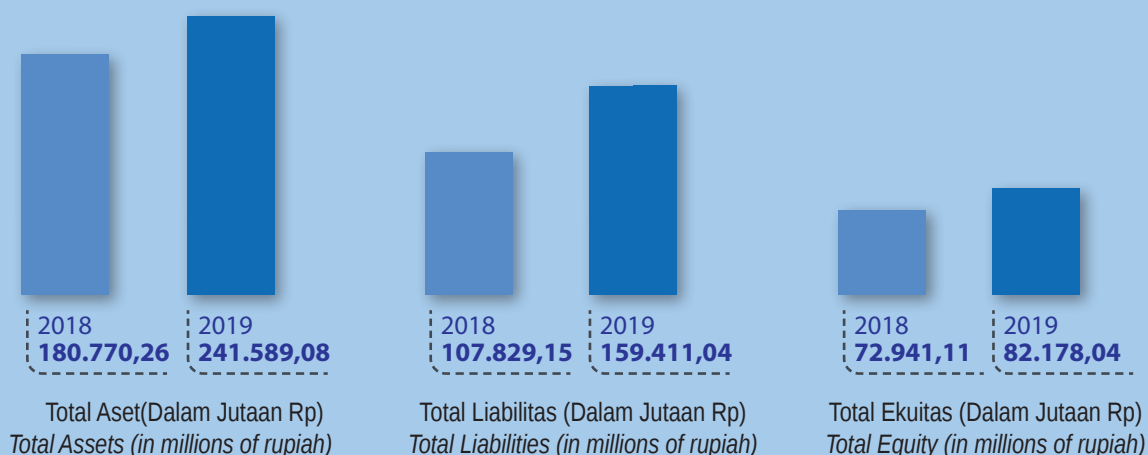
IKHTISAR KEUANGAN 2019**2019 FINANCIAL HIGHLIGHTS**

	2019	2018	
Aset Lancar			Current Assets
Kas dan Bank	42.355.149.791	25.308.022.120	Cash and Bank
Piutang Usaha	6.239.764.321	7.717.070.838	Account Receivable
Piutang lain-lain	12.803.971.356	2.667.575.934	Other receivables
Tagihan Bruto Pengguna Jasa	53.697.225.165	41.578.596.161	Gross Amount Due from Customers
Uang Muka dan Jaminan	4.526.691.841	3.109.134.572	Advances and Guarantees
Biaya Dibayar Dimuka	5.677.740.305	5.269.318.961	Prepaid Expenses
Uang Muka Pajak	439.641.453	912.324.793	Prepaid Taxes
Penugasan Jasa Konsultan dalam Pelaksanaan	1.828.880.098	2.292.556.218	Assignment of Consultant Service in Implementation
Aset Lancar	127.569.064.330	88.854.599.597	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar:			Total Non-Current Assets
Aset Ventura Bersama	22.162.899.726	3.826.367.898	Joint Venture Asset
Aset Tetap	91.670.799.729	87.852.238.760	Fixed Asset
Aset lain-lain	186.313.729	237.053.999	Other Assets
Aset Tidak Lancar	114.020.013.184	91.915.660.657	Total Non-Current Assets
Total Aset	241.589.077.514	180.770.260.254	Total Assets
Liabilitas Lancar			Current Liabilities
Utang Usaha	10.071.775.737	19.343.058.298	Trade account payable
Utang Pajak	7.299.981.537	6.118.116.806	Taxes payable
Uang Muka Proyek	16.767.488.788	14.879.810.409	Advances From Customers
Beban yang masih harus dibayar	46.575.998.843	22.096.972.732	Accrued expenses
Liabilitas Lainnya	39.347.221.725	12.794.935.902	Other payables
Liabilitas Lancar	120.062.466.630	75.232.894.147	Total Current Liabilities
Liabilitas Tidak Lancar:			
Liabilitas Imbalan Kerja	15.849.094.339	14.441.522.264	Employee Benefits Liabilities
Liabilitas Lainnya	23.499.475.578	18.154.736.649	Other payables
Liabilitas Tidak Lancar	39.348.569.917	32.596.258.913	Total non-current liabilities
Total Liabilitas	159.411.036.547	107.829.153.060	Total Liabilities
Ekuitas			Equity
Modal Saham			Stock Capital (Nominal Value of Rp.
(Nilai Nominal Rp. 1.000.000/saham)			1,000,000/share)
Modal Dasar			Authorized Capital
8.000 lembar saham			8,000 shares
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	2.000.000.000	Placed and Paid-up Capital
2.000 lembar saham			2,000 shares
Saldo Laba	22.870.313.907	12.150.580.621	Retained earnings
Pendapatan Komprehensif Lainnya	57.307.727.060	58.790.526.573	Other Comprehensive Income
Total Ekuitas	82.178.040.967	72.941.107.194	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	241.589.077.514	180.770.260.254	Total Liabilities and Equity

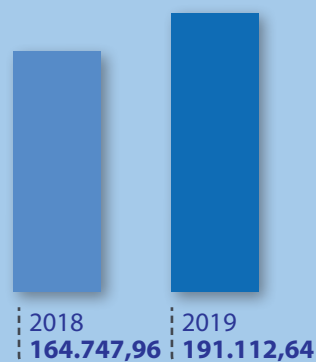
IKHTISAR DATA KEUANGAN

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Laba Per Saham dalam Rupiah)

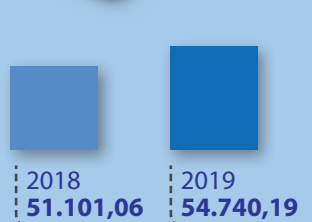
(In Millions of Rupiah, except Earnings Per Share in Rupiah)


**LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAINNYA (Per 31 Desember 2019)
(Dalam Rupiah)**
**STATEMENT OF PROFIT (LOSS) AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(As of 31 December 2019)
(In Rupiah)**

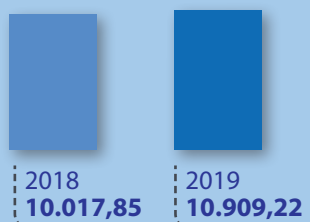
	2019	2018	
Pendapatan Usaha	191.112.636.414	164.747.962.138	Operating Revenue
Beban Pokok Pendapatan	(136.372.450.177)	(113.646.901.302)	Cost of Revenue
Laba Kotor	54.740.186.237	51.101.060.836	Gross Profit
Pendapatan Bersih Ventura Bersama	506.319.130	1.476.357.940	Net Revenue of Joint Ventures
Laba Bruto Setelah ventura Bersama	55.246.505.367	52.577.418.776	Gross Profit after Joint Ventures
Beban Usaha			Operating Expenses
Beban Umum dan Administrasi	(42.284.967.327)	(36.524.362.880)	General and Administrative Expenses
Laba (Rugi) Usaha	12.961.538.040	16.053.055.896	Operating Income (Loss)
Pendapatan (Beban) Lain-lain:			Other Gains and Losses
Beban Pinjaman	(56.378.482)	(32.458.760)	Financial Cost
Pendapatan Bunga Deposito	119.110.343	106.192.538	Deposit Interest Income
Laba (rugi) Selisih Kurs	(164.765)	-	Foreign Exchange Profit (Loss)
Beban Penurunan Nilai Piutang	(306.481.713)	(467.485.461)	Allowance for Impairment
Lain-lain Bersih	3.128.421.482	(651.793.831)	Others - Net
Jumlah Penghasilan (Beban) lain-lain	2.884.506.865	(1.045.545.514)	Total other gains and losses
Laba Sebelum Pajak penghasilan	15.846.044.905	15.007.510.382	Income Before Tax
Beban Pajak Penghasilan	(4.936.821.711)	(4.989.664.845)	Income Tax Expenses
Laba Bersih Tahun Berjalan	10.909.223.194	10.017.845.537	Net Profit for the Year
Selisih Aktuarial atas Program Manfaat Pasti	(1.482.799.513)	(1.508.039.680)	Actuarial Difference on Employee Benefits Program
Laba Komprehensif	9.426.423.681	8.509.805.857	COMPREHENSIVE INCOME
Laba Bersih per Saham	4.713.212	4.254.903	Earning Per Share



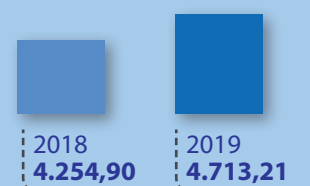
Pendapatan (Dalam Jutaan Rp)
Revenue (in millions of rupiah)



Laba Bruto (Dalam Jutaan Rp)
Gross Profit (in millions of rupiah)



Laba Bersih Tahun Berjalan (Dalam Jutaan Rp)
Net Income for the Year (in millions of rupiah)



Laba Bersih Per Saham (Dalam Jutaan Rp)
Earning Per Share (in millions of rupiah)

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR LAINNYA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (Dalam Rupiah)

STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 (In Rupiah)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

CASH FLOWS FROM OPERATIONAL ACTIVITIES

	2019	2018	
Penerimaan dari pelanggan	182.358.992.306	146.439.264.740	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(162.423.733.994)	(147.516.700.834)	Payment for suppliers and employees
Pembayaran beban pinjaman	(56.378.482)	(32.458.760)	Payment for financial cost
Penghasilan bunga deposito dan jasa giro	119.110.343	106.192.538	Deposit Interest Receipt
Pembayaran pajak	(4.936.821.711)	(4.989.664.845)	Payment for taxes
Penerimaan (pembayaran) lain – lain	(6.605.097.166)	992.610.566	Receipts (payment) - Others
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas Operasi	8.844.805.096	(5.000.756.595)	Net cash flows provided by operating activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Penerimaan pinjaman pihak III	32.096.268.644	3.085.078.034	Third-party loan receipts
-------------------------------	----------------	---------------	---------------------------

Pembayaran Dividen, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	(423.928.173)	(100.740.400)	Payment of Dividend and Partnership and Community Development Program
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas Pendanaan	31.473.096.579	2.984.337.634	Net cash flows from financing activities
Kenaikan Bersih Kas Dan Setara Kas	17.047.127.671	(2.801.823.149)	Net Increase in Cash and Cash Equivalent
Kas Dan Setara Kas:			Cash and Cash Equivalent
Awal Tahun	25.308.022.120	28.109.845.269	Beginning of the year
Akhir Tahun	42.355.149.791	25.308.022.120	End of the year
Kas dan Setara Kas akhir Tahun terdiri dari:			Cash and Cash Equivalents at the End of the Year consist of :
Kas	666.751.528	224.833.809	Cash on Hand
Bank	41.688.398.263	25.083.188.311	Cash in Bank
Jumlah	42.355.149.791	25.308.022.120	Total

RASIO-RASIO KEUANGAN**FINANCIAL RATIOS**

Rasio-rasio	2019	2018
Current Ratio	118,11%	106,25%
Cash Ratio	33,64%	35,28%
Collection periode	109 hari	109 hari
Total Aset Turnover	0,91 x	0,79 x
Debt to Total Assets	59,65%	65,98%
Solvabilitas	167,65%	151,55%
Debt to Equity Ratio	147,83%	193,98%
Return on Equity	13,73%	13,28%
Return on Assets	5,54%	4,52%

IKHTISAR SAHAM

Sampai dengan akhir tahun 2019, PT Indra Karya (Persero) tidak mencatatkan saham ke PT Bursa Efek Indonesia. Sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

SHARE SUMMARY

As of the end of 2019, PT Indra Karya (Persero) had not publicly listed its shares on the Indonesia Stock Exchange. As a result, there is no information related to the number of shares in circulation, market capitalization, highest share price, lowest share price, closing price, and the volume of shares traded.

IKHTISAR EFEK LAINNYA

Sampai dengan akhir tahun 2019, PT Indra Karya (Persero) tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalance, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

SUMMARY OF OTHER SECURITIES

As of the end of 2019, PT Indra Karya (Persero) had not issued any bond, sukuk, or convertible bond. As a result, there is no information related to the number of bond/sukuk/convertible bond in circulation, interest/yield rate, maturity date, and bond/sukuk rating.

AKSI KORPORASI 2019

Pada tahun 2019, PT Indra Karya (Persero) tidak melakukan aksi korporasi dalam bentuk penerbitan saham baru, pemecahan saham, atau penerbitan surat berharga lainnya.

CORPORATE ACTIONS IN 2019

In 2019, PT Indra Karya (Persero) did not exercise any corporate action in the form of issuance of new shares, stock split, or issuance of any other securities.

PENGHARGAAN

Pada Tahun 2019, PT Indra Karya (Persero) meraih beberapa penghargaan, antara lain :

1. PT Indra Karya (Persero) meraih *Award* dari kategori *Brand Innovation* Terbaik pada Ajang Penghargaan BUMN *Branding and Marketing Award* 2019 yang diselenggarakan oleh Majalah BUMN Track
2. Direktur Utama PT Indra Karya (Persero) meraih penghargaan sebagai *The Best CEO Strategis Initiative Collaboration* pada Ajang Penghargaan BUMN *Branding and Marketing Award* 2019 yang diselenggarakan oleh Majalah BUMN Track

AWARDS

In 2019, PT Indra Karya (Persero) won several awards, including:

1. PT Indra Karya (Persero) won an Award from the Best Brand Innovation category at the 2019 BUMN Branding and Marketing Award event organized by BUMN Track Magazine
2. The President Director of PT Indra Karya (Persero) won the award as The Best CEO Strategic Initiative Collaboration at the 2019 BUMN Branding and Marketing Award event organized by BUMN Track Magazine

SERTIFIKASI/ CERTIFICATIONS



**THE BEST CEO
STRATEGIC INITIATIVE COLLABORATION**



**BRAND INNOVATION TERBAIK
CORPORATE BRANDING BUMN**



**PROUDLY DECLARE
STATE OWNED ENTERPRISES PERFORMANCE EXCELLENCE (KPKU)**



ISO 9001 : 2015
Quality



OHSAS 18001 : 2007
Health and Safety



ISO 14001 : 2015
Environmental

PERISTIWA PENTING/ IMPORTANT EVENTS**JANUARI 2019/ JANUARY 2019**

RAPAT KERJA MANAJEMEN TAHUN 2019 DAN PENANDATANGANAN KONTRAK MANAJEMEN TAHUN 2019
MANAGEMENT MEETING 2019 AND MANAGEMENT CONTRACT SIGNING 2019

FEBRUARI 2019/ FEBRUARY 2019

PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN KEMENTERIAN BUMN ATAS PENUNJUKKAN KOMISARIS UTAMA PT INDRA KARYA (PERSERO)
SUBMISSION OF DECREE OF THE MINISTRY OF SOES ON THE APPOINTMENT OF PRESIDENT COMMISSIONER OF PT INDRA KARYA (PERSERO)

MARET 2019/ MARCH 2019

KUNJUNGAN DAN PENENADATANGANAN KERJA SAMA PT INDRA KARYA (PERSERO) DAN WAPCOS LIMITED INDIA
VISIT AND COOPERATION SIGNING BETWEEN PT INDRA KARYA (PERSERO) AND WAPCOS LIMITED INDIA

PERISTIWA PENTING/ IMPORTANT EVENTS**APRIL 2019/ APRIL 2019**

BANTUAN SARANA PENDIDIKAN YAYASAN BAITUL HIDAYAH DI LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT
BAITUL HIDAYAH FOUNDATION EDUCATIONAL FACILITIES ASSISTANCE IN LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT

MEI 2019/ MAY 2019

PENANDATANGAN MOU PT INDRA KARYA (PERSERO) DAN PT BHANDA GHARA REKSA (PERSERO)
UNTUK MENDUKUNG KEMANDIRIAN ENERGI
SIGNING OF MOU PT INDRA KARYA (PERSERO) AND PT BHANDA GHARA REKSA (PERSERO) TO SUPPORT ENERGY INDEPENDENCE

JUNI 2019/ JUNE 2019

KUNJUNGAN DELEGASI PT INDRA KARYA (PERSERO) KE NEW DELHI, INDIA
COURTESY CALL DENGAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK INDIA DAN BERTEMU DENGAN MENTERI PEKERJAAN UMUM INDIA
SERTA CEO WAPCOS LIMITED DI INDIA
DELEGATION OF PT INDRA KARYA (PERSERO) VISITING TO NEW DELHI, INDIA, FOR COURTESY CALL WITH EMBASSY OF REPUBLIC INDONESIA IN NEW DELHI AND MEETING WITH THE MINISTER OF PUBLIC WORK OF INDIA'S AND CEO of WAPCOS LIMITED

PERISTIWA PENTING/ IMPORTANT EVENTS

JULI 2019/ JULY 2019



OPENING MEETING ASSESSMENT KPKU
OPENING MEETING ASSESSMENT KPKU

AGUSTUS 2019/ AUGUST 2019



PEREKRUTAN FHCI MILLENNIALS DI KEMENTERIAN BUMN
RECRUITMENT OF FHCI MILLENNIALS AT THE MINISTRY OF BUMN

SEPTEMBER 2019/ SEPTEMBER 2019



PERGANTIAN KETUA BABINROHIS INDRA KARYA
CHANGING CHAIRMAN OF BABINROHIS INDRA KARYA

PERISTIWA PENTING/ IMPORTANT EVENTS**OKTOBER 2019/ OCTOBER 2019**

KUNJUNGAN ASISTEN DEPUTI BIDANG KAWASAN, SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN III KE KANTOR DIVISI PT INDRA KARYA (PERSERO) DI MALANG
VISIT ASISTENT DEPUTY FOR AREAS, FACILITIES AND INFRASTRUCTURE RELATIONSHIP III TO THE DIVISION OFFICE OF PT INDRA KARYA (PERSERO) IN MALANG



RAPAT KERJA NASIONAL PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2020
MEETING NATIONAL ACTION PLAN DRAFTING WORK AND BUDGET THE YEAR 2020

PERISTIWA PENTING/ IMPORTANT EVENTS

NOVEMBER 2019/ NOVEMBER 2019



PENERIMAAN PENGHARGAAN BUMN BRANDING AND MARKETING AWARD 2019
THE AWARD BUMN BRANDING AND MARKETING AWARD 2019

DESEMBER 2019/ DECEMBER 2019



PEMBERIAN BANTUAN DAN PERESMIAN TAMAN BACAAN DI DESA JATI INDAH - LAMPUNG
CHARITY AND INAUGURATION THE LIBRARY IN JATI INDAH VILLAGE - LAMPUNG



02

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT



SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS

Yang terhormat Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan, Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada akhirnya PT Indra Karya (Persero) dapat melalui tahun 2019 dengan kinerja yang baik.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah Dewan Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sepanjang Tahun 2019 sebagai bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi dengan penuh tanggungjawab sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya telah mengacu kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 yang telah ditetapkan, dan memastikan kegiatan usaha telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris juga senantiasa berupaya untuk memastikan Perseroan telah dikelola secara profesional sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam menjalankan perannya, Dewan Komisaris selalu

GREETINGS FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

To the Honorable Shareholders and all Stakeholders, Praise and Gratitude be to God Almighty for His blessings which helped PT Indra Karya (Persero) come through 2019 with a satisfying performance.

In this opportunity, kindly allow the Board of Commissioners to present a report of the exercise of its supervisory duties on the Company's policy and accomplishment as exercised by the Board of Directors in 2019 as part of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles.

The Exercise of the Board of Commissioners' Duties

The Board of Commissioners completed its supervisory and advisory duties to the Board of Directors with full responsibility as mandated by the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

In exercising its duties, the Board of Commissioners ensured that the Board of Directors, in exercising its operational activities, referred to the 2019 Corporate Work and Budget Plan as established beforehand, and ensured that the Company's operational activities complied to applicable laws and regulations.

The Board of Commissioners also consistently tries to ensure that the Company is managed professionally in the interest of its shareholders and other stakeholders. In exercising its role, the Board of Commissioners always maintains its objectivity

menjaga obyektivitas dan independensi. Oleh karena itu, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Perseroan kecuali hal-hal yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Dewan Komisaris memiliki komite-komite yang telah menjalankan tugasnya secara efektif yang meliputi Komite Audit, Komite Risiko, Investasi dan Tata Kelola. Tugas dan wewenang penunjang Dewan Komisaris telah didefinisikan dengan jelas sehingga dapat berperan secara efektif dalam membantu tugas Dewan komisaris.

Pengawasan Implementasi Strategis

Pada RKAP Tahun 2019, Direksi telah menetapkan sejumlah target beserta strategi yang akan dijalankan untuk mencapai target tersebut. Dewan Komisaris pun secara penuh telah mengawasi implementasi strategi yang dijalankan Direksi.

Fokus pengawasan utama Dewan Komisaris adalah pengembangan potensi usaha perusahaan di tengah tingginya tuntutan pelanggan terhadap kualitas produk dan layanan. Dewan komisaris memandang kegiatan usaha perusahaan di bidang *Engineering*, *Developer* dan *Industry* memiliki peluang usaha yang besar dalam memanfaatkan potensi dan keunggulan perusahaan.

Dewan Komisaris secara seksama terus memantau setiap penerapan strategi yang dijalankan oleh Direksi agar sejalan dengan RKAP dan arahan dari pemegang saham. Sejalan dengan itu, Dewan Komisaris juga meminta kepada Direksi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi informasi sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing Perseroan.

Mekanisme dan Frekuensi Pengawasan

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi telah terjalin dengan baik dengan mengedepankan prinsip saling menghormati wewenang masing-masing pihak. Dewan Komisaris secara rutin setiap bulan mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas berbagai hal terkait pengelolaan perusahaan yang dijalankan oleh Direksi dalam forum rapat gabungan. Dalam forum tersebut, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan dari Direksi mengenai pencapaian kinerja Perseroan dan berbagai kendala yang dihadapi. Dewan Komisaris dapat menyampaikan pandangan dan memberikan nasehat kepada Direksi mengenai hal tersebut. Sepanjang tahun 2019 Dewan Komisaris melaksanakan 5 (lima) kali rapat gabungan dengan Direksi.

Selain forum rapat gabungan, organ Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Risiko, Investasi dan Tata Kelola dapat melakukan rapat dengan mengundang Divisi terkait untuk membahas bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing Komite.

and independence. Therefore, the Board of Commissioners is not involved in the Company's operational decision-making process, with the exception of matters regulated and established in the Articles of Association and applicable laws and regulations.

The Board of Commissioners has committees that exercise their duties effectively, including an audit committee and a risk, investment, and governance committee. The Board of Commissioners' supporting duties and authority are clearly defined and as such can play an effective role to its overall duties.

Strategic Implementation Supervision

In the 2019 Corporate Work and Budget Plan, the Board of Directors set several targets and strategies that it would pursue to achieve the targets. The Board of Commissioners fully supervised the implementation of those strategies by the Board of Directors.

The primary focus of supervision of the Board of Commissioners is the development of the Company's business potential amid the high demand for quality of products and services from customers. The Board of Commissioners views that the Company's operational activities in the fields of Engineering, Developer, and Industry provide great business opportunities in utilizing its potential and advantages.

The Board of Commissioners thoroughly monitors the implementation of each strategy as exercised by the Board of Commissioners to ensure that it is in line with the Corporate Work and Budget Plan and direction from the shareholders. In addition, the Board of Commissioners has also asked the Board of Directors to increase the Company's human resources and information technology capacity in order to improve its competitiveness.

Mechanism and Frequency of Supervision

The relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is adequately maintained with an emphasis on mutual respect for each party's authority. The Board of Commissioners routinely holds a monthly meeting with the Board of Directors to discuss matters related to the Company's management as exercised by the Board of Directors in a joint meeting forum. In such a forum, the Board of Commissioners can request an explanation from the Board of Directors about the Company's achievements and performance as well as the obstacles it faces. The Board of Commissioners can also present its views and provide suggestions to the Board of Directors. In 2019, the Board of Commissioners held 5 (five) joint meetings with the Board of Directors.

In addition to joint meeting forums, elements of the Board of Commissioners, namely the Audit Committee and the Risk, Investment, and Governance Committee can hold a meeting by inviting the relevant division to discuss matters each committee is responsible for.

Nasehat dan Rekomendasi

Sepanjang Tahun 2019, Dewan Komisaris memberikan saran dan nasehat terkait beberapa isu strategis, meliputi:

1. Penguatan pengelolaan keuangan Perseroan, terutama untuk mengembangkan manajemen pelanggan dan piutang berbasis risiko, termasuk untuk membangun sistem pengelolaan dokumen terkait keuangan.
2. Pengembangan skema dan mekanisme investasi berbasis risiko dimulai dari tahap perencanaan strategis, implementasi hingga evaluasi kemanfaatan investasi.
3. Penguatan pengembangan bisnis dan peningkatan diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan perusahaan pada sektor *Engineering, Developer* dan *Industry* serta mendorong penguatan peran anak perusahaan dalam berkontribusi bagi pengembangan perusahaan induk secara nyata.
4. Penguatan pemasaran dan penjualan Perseroan, termasuk untuk mengembangkan sistem pemantauan dan intelijen Perseroan.
5. Penguatan pemasaran dan penjualan, termasuk pengembangan sistem pemantauan dan intelijen Perseroan.

Penilaian Kinerja Direksi

Dewan Komisaris menilai Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Evaluasi Dewan Komisaris sepanjang Tahun 2019 untuk kinerja Direksi sangat positif, ditunjukkan dengan pencapaian target RKAP tahun 2019. Dewan Komisaris mengapresiasi atas tercapainya kinerja keuangan dengan meningkatnya pendapatan dan laba bersih di tengah kondisi perekonomian yang cenderung melemah sepanjang tahun 2019.

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan perusahaan, Perseroan telah mengangkat Dewan Komisaris PT Indra Karya (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor : SSK-250/MBU/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) dan Risalah RUPS nomor: SK-39/MBU/02/2019 tanggal 4 februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris utama Perusahaan Perseroan (Persero).

Susunan Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Jarot Widyoko
- Komisaris : Teddy Poernama

Suggestions and Recommendations

In 2019, the Board of Commissioners provided suggestions and recommendations related to a number of strategic issues, including:

1. Strengthening the Company's financial management, especially to develop risk-based customer and accounts receivable management, including to establish a financial document management system.
2. Developing risk-based investment schemes and mechanisms, starting from strategic planning, implementation, and evaluation of investment expediency.
3. Strengthening the Company's business development and increasing diversification to reduce its reliance on the Engineering, Developer, and Industry sectors, and encouraging the roles of subsidiaries to contribute to the development of the parent company.
4. Strengthening the Company's marketing and sales effort, including to develop a surveillance and intelligence system.
5. Strengthening the Company's marketing and sales effort, including to develop a surveillance and intelligence system.

Assessment on the Board of Directors Performance

The Board of Commissioners believed that the Board of Directors exercised its duties and responsibilities adequately. The Board of Commissioners' evaluation of the Board of Directors' performance in 2019 showed positive results as reflected by the Company achieving the targets set in the 2019 Corporate Work and Budget Plan. The Board of Commissioners appreciated achievements in the Company's financial performance, including the increase of revenue and net profit amid the weakening economic condition throughout 2019.

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In exercising its supervisory duties, the Company has appointed the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero) based on the Decree of the Minister of BUMN Number : SSK-250 / MBU / 09/2018 on the dismissal and appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero) and Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. SK-39/MBU/02/2019 on 4 February 2019 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero).

Composition of the Board of Commissioners:

- President Commissioner : Jarot Widyoko
- Commissioner : Teddy Poernama

Jakarta, Juli 2020

Atas Nama Dewan Komisaris

On behalf of the Board of Commissioners



Ir. Jarot Widyoko, Sp-1
Komisaris Utama

President Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS

PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS



Jarot Widyoko

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Berdomisili di Indonesia. Diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-39/MBU/02/2019 tanggal 04 Februari 2019. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Universitas Gajah Mada/ (UGM) - Yogyakarta Tahun 1987 dan Pasca Sarjana dari Institut Teknologi Bandung/ (ITB) - Bandung Tahun 1992. Berkarir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian PUPR dan menjabat sebagai Pejabat Eselon II - Direktur Sungai dan Pantai pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

President Commissioner

Citizen of Indonesia, age 56. Based in Indonesia. Appointed as the Company's President Commissioner based on Decree of the Minister of State-owned Enterprises No. SK-39/MBU/02/2019 on 4 February 2019. He completed his undergraduate degree from Gadjah Mada University (UGM), Yogyakarta in 1987 and postgraduate degree from the Bandung Institute of Technology (ITB), Bandung in 1992. He worked as a Civil Servant at the Ministry of Public Works and Public Housing and served as Echelon II Official - Director of River and Beaches at the Directorate-General of Water Resources.

Posisi jabatan di PT Indra Karya (Persero)

Januari 2018 - sekarang Komisaris Utama PT Indra Karya (Persero)

Official Positions at PT Indra Karya (Persero)

January 2018 - now President Commissioner of PT Indra Karya (Persero)



Teddy Poernama

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Berdomisili di Indonesia. Diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-250/MBU/09/2018 tanggal 28 September 2018. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI - Jakarta Tahun 1995 dan Pasca Sarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) - Jakarta Tahun 2012. Berkarir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian BUMN dan menjabat sebagai Eselon III - Kepala Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi 1 pada Kedeputan Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi.

Commissioner

Citizen of Indonesia, age 48. Based in Indonesia. Appointed as the Company's Commissioner based on Decree of the Minister of State-owned Enterprises No. SK-250/MBU/09/2018 on 28 September 2018. He completed his undergraduate degree from YAI College of Economics, Jakarta in 1995 and postgraduate degree from Prof. Dr. Moestopo University, Jakarta in 2012. He worked as a Civil Servant at the Ministry of State-owned Enterprises and served as an Echelon III Official - Head of Agricultural and Pharmaceutical Industries I at the Office of the Deputy of Agricultural and Pharmaceutical Industries.

Posisi jabatan di PT Indra Karya (Persero)

Februari 2018 - sekarang Komisaris PT Indra Karya (Persero)

Official Positions at PT Indra Karya (Persero)

February 2018 - present Commissioner of PT Indra Karya (Persero)



LAPORAN DIREKSI

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa di tahun 2019, PT Indra Karya (Persero) kembali mencatat kinerja yang positif dan dapat menjalankan peran yang strategis dalam mendukung peningkatan daya saing dunia usaha di Indonesia dan berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian Indonesia.

BOARD OF DIRECTORS' REPORT

To the Honorable Shareholders and Stakeholders,

Praise and gratitude be to God Almighty for His blessings that enabled PT Indra Karya (Persero) to score positive results in 2019 and exercise its strategic role to increase the competitiveness of the business world in Indonesia and contribute to economic development in Indonesia.

Berkat lindungan serta rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Perseroan berhasil mewujudkan sejumlah rencana dan strategi kebijakan yang digariskan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sepanjang Tahun 2019.

Tinjauan Umum

Sepanjang Tahun 2019, perekonomian global dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian akibat perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang masih berlanjut. Dampak negatif dari perang dagang tersebut adalah menurunnya volume perdagangan dan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi dunia. Sebagai bagian dari perekonomian global, perekonomian nasional juga merasakan dampak perang dagang tersebut. Di tengah tekanan melemahnya pertumbuhan ekonomi global, fundamental perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik. Bank Indonesia mencatat, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2019 masih terjaga di kisaran 5,02%, meskipun angka tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 yaitu sebesar 5,17%.

Kebijakan Strategis, Kinerja Operasional Di Tahun 2019

Untuk mengantisipasi faktor eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja Perseroan, Direksi senantiasa mendorong efisiensi dan efektivitas dalam seluruh kegiatan Perseroan, yang mengacu kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019.

Sepanjang Tahun 2019 Perseroan berhasil membukukan nilai kontrak sebesar Rp. 422,745 miliar, terdiri dari kontrak baru sebesar Rp. 154,167 miliar dan Rp. 268,578 miliar nilai kontrak lanjutan. Sementara itu total nilai kontrak pada 2019 sebesar Rp. 422,745 miliar merupakan 79,5% terhadap RKAP 2019.

Sepanjang periode tersebut, Perseroan mencatat penjualan sebesar Rp. 191,113 miliar atau 86,3% terhadap anggaran tahun 2019. Realisasi penjualan itu terdiri dari produksi proyek lanjutan sebesar Rp. 116,309 miliar atau 93,1% terhadap anggaran 2019 dan proyek baru sebesar Rp. 74,804 miliar atau 77,4% terhadap anggaran tahun 2019.

Dari penjualan tersebut, Perseroan membukukan laba usaha sebesar Rp. 12,96 miliar dan laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 10,91 miliar. Realisasi laba bersih tersebut adalah 64,7% dari target RKAP tahun 2019.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di tahun 2019. Penerapan GCG bertujuan untuk memastikan Perseroan bertindak secara transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya untuk memberi nilai tambah dan menjaga kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan, dengan tetap berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Thanks to the protection and grace of God Almighty, the Company managed to realize its plans and policy strategies in accordance with the 2019 Corporate Work and Budget Plan.

General Overview

In 2019, the global economy faced great uncertainty due to the trade war between the United States and China, which is still ongoing. The negative impact of the trade war included the decline of trade volume and global economic growth. As part of the global economy, Indonesia's economy was also affected by the trade war. Amid the global economic slowdown, Indonesia's economic fundamentals still achieved adequate growth. Bank Indonesia recorded that the country's national economic growth in 2019 was maintained in the range of 5.02%, although the figure was still lower compared to the 5.17% economic growth in 2018.

Strategic Policy and Operational Performance in 2019

To anticipate external factors that could influence the company's performance, the Board of Directors consistently encouraged efficiency and effectiveness in all of the Company's activities, referring to the 2019 Corporate Work and Budget Plan.

In 2019, the Company managed to post Rp. 422.745 billion in contracts, consisting of Rp. 154.167 billion in new contracts and Rp. 268.578 billion in advanced contracts. The Rp. 422.745 billion contract value was 79.5% of the target set in the 2019 Corporate Work and Budget Plan.

Throughout the year, the Company posted Rp. 191.113 billion in sales, or 86.3% of the 2019 budget. The sales realization consisted of Rp. 116.309 billion in production of advanced projects, or 93.1% of the 2019 budget, and Rp. 74.804 billion in new projects, or 77.4% of the 2019 budget.

From the sales, the Company posted Rp. 12.96 billion in operating income and Rp. 10.91 billion in net profit after tax. The net profit realization was 64.7% of the 2019 Corporate Work and Budget Plan.

Implementation of Good Corporate Governance

The Company was committed to implementing basic principles of Good Corporate Governance in 2019. The implementation of GCG aimed to ensure that the Company acted in a transparent and responsible manner in exercising its business activities in order to provide added values to and maintain the confidence of its shareholders and all stakeholders by complying to regulations established by the Financial Services Authority (OJK).

Dalam upaya melaksanakan penerapan Tata Kelola yang baik, Perseroan telah melakukan *assesment* yang dilaksanakan oleh *assessor independen*. Dari hasil *assesment*, Perseroan memperoleh skor 80,57 dengan klasifikasi Baik.

Penutup

Direksi mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh yang diberikan dan kepercayaan yang ditunjukkan sepanjang tahun ini oleh Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan, Dewan Komisaris dan Komite Audit, serta seluruh karyawan dan mitra usaha atas kinerja yang dicapai selama tahun 2019. Semoga pencapaian ini dapat dioptimalkan agar dapat mendukung pertumbuhan pendapatan dan laba Perseroan di masa depan.

SUSUNAN DIREKSI

Dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan perusahaan, telah diangkat Direksi PT Indra Karya (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-199/MBU/06/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan PT Indra Karya (Persero).

Susunan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Direktur Utama : Milfan Rantawi

Direktur : Eko Budiono

In its effort to implement Good Corporate Governance, the Company underwent an assessment by an independent assessor. From the assessment, the Company obtained a score of 80.57 with a Good classification.

Conclusion

The Board of Directors is grateful for the full support and confidence of the Company's shareholders, stakeholders, Board of Commissioners, and Audit Committee as well as all employees and business partners for the Company's achievements in 2019. Hopefully the achievements can be improved upon in order to support the Company's revenue and profit growth in the future.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

In exercising its executive duties, the Company appointed the Board of Directors of PT Indra Karya (Persero) based on the Decree of the Minister of BUMN No. SK-199/MBU/06/2018 on 28 June 2018 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Indra Karya (Persero).

The composition of the Company's Board of Directors is as follows:

President Director : Milfan Rantawi

Director : Eko Budiono

Jakarta, Juli 2020

Atas Nama Direktur Utama

On behalf of the President Director



Ir. Milfan Rantawi, MM

Direktur Utama

President Director

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PROFILES



Milfan Rantawi, MM

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Berdomisili di Indonesia. Diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-199/MBU/06/2018 tanggal 28 Juni 2018. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" - Yogyakarta Tahun 1991 dan Pasca Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Tahun 2004.

President Director

Citizen of Indonesia, 57 years of age. Based in Indonesia. Appointed as President Director of the Company based on the Decree of the Minister of BUMN No. SK-199/MBU/06/2018 on 28 Juni 2018. Completed a bachelor's degree in University of Pembangunan Nasional "Veteran" – Yogyakarta 1991 and Post Graduate in Sekolah Tinggi Ekoomi Nusantara on 2004.

Posisi jabatan di PT Indra Karya (Persero)

June 2018 –sekarang Direktur Utama
PT Indra Karya (Persero)

Official Positions at PT Indra Karya (Persero)

June 2018 - now the President Director
PT Indra Karya (Persero)



Eko Budiono

Direktur

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Berdomisili di Indonesia. Diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-199/MBU/06/2018 tanggal 28 Juni 2018. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Universitas Brawijaya – Malang Tahun 1993.

Director

Citizen of Indonesia, 53 years of age. Based in Indonesia. Appointed as Director of the Company based on the Decree of the Minister of BUMN No. SK-199/MBU/06/2018 on 28 Juni 2018. Completed a bachelor's degree in University of Brawijaya – Malang on 1993.

Posisi jabatan di PT Indra Karya (Persero)

June 2018 – sekarang Direktur
PT Indra Karya (Persero)

Official Positions at PT Indra Karya (Persero)

June 2018 - now Director
PT Indra Karya (Persero)

LEMBAR PERNYATAAN STATEMENT SHEET

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT. Indra Karya (Persero) 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, declare that all information in the Annual Report of PT. Indra Karya (Persero) 2019 has been published in full and is fully responsible for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

This statement was made in true confidence.

Jakarta, Juli 2020

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONER



Ir. Jarot Widyoko, Sp-1
Komisaris Utama
President Commissioner



Teddy Poernama, SE, M.I.Kom, MIPR
Komisaris
Commissioner

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS



Ir. Milfan Rantawi, MM
Direktur Utama
President Director



Ir. Eko Budiono
Direktur
Director



03

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

INFORMASI UMUM / GENERAL INFORMATION

Nama Perusahaan <i>Name of Company</i>	PT Indra Karya (Persero)	PT Indra Karya (Persero)
Tanggal & Dasar Hukum pembentukan <i>Date and Legal Basis of Establishment</i>	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "INDRA KARYA" 29 Maret 1961 Akta pendirian Nomor 108 tertanggal 20 Desember 1972	Republic of Indonesia Government Regulation Number 57 of 1961 concerning the Establishment of the State Company "INDRA KARYA" March 29, 1961 Deed of establishment No. 108 dated December 20, 1972
Sektor <i>Sector</i>	Infrastruktur	Non Infrastructure
Bidang Usaha <i>Business Field</i>	Jasa Konsultansi Rekayasa (Engineering)	Engineering Consulting Services
Kepemilikan <i>Ownership</i>	Pemerintah RI 100%	Government of Indonesia, 100%
Modal dasar <i>Authorized Capital</i>	Rp. 8.000.000.000	Rp. 8.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh <i>Placed and Paid-up Capital</i>	Rp. 2.000.000.000	Rp. 2.000.000.000
Alamat <i>Address</i>	Kantor Pusat: HK Tower lantai 9 Jl Biru Laut X Kav 9 Cawang, Jakarta Timur 13340 Indonesia Telp (021) 8192636 Email: indrakarya@indrakarya.co.id Fax: (021) 8192179 Division Offices: Division of Engineering I Jl Surabaya 3A, Malang 65115 Telp. (0341) 551311 Fax (0341) 551463 Division of Engineering II Jl. Ketileng Raya 16, Semarang 50276 Telp. (024) 6725046 Fax. (024) 6725046 Division of Engineering III Jl Tebet Dalam III C No 9 Jakarta 12810 Telp (021) 228 35601 Division of Survey and Investigation Jl. Janti Barat 27- Malang 65149 Telp (0341) 362261 Fax. (0341) 324402 Division of Special Business and Investment Gudang Tertup III, Jalan Pulo Buaran Raya, Kawasan Industri JIEP, Kel. Pulo Gadung, Kec. Cakung, Jakarta Timur, 13260	Head Office: HK Tower, 9th Floor Biru Laut X St, 9th Lot, Cawang, Jakarta 13340 Indonesia Telp (021) 8192636 Email: indrakarya@indrakarya.co.id Fax: (021) 8192179 Division Offices: Division of Engineering I Jl Surabaya 3A, Malang 65115 Telp. (0341) 551311 Fax (0341) 551463 Division of Engineering II Jl. Ketileng Raya 16, Semarang 50276 Telp. (024) 6725046 Fax. (024) 6725046 Division of Engineering III Jl Tebet Dalam III C No 9 Jakarta 12810 Telp (021) 228 35601 Division of Survey and Investigation Jl. Janti Barat 27- Malang 65149 Telp (0341) 362261 Fax. (0341) 324402 Division of Special Business and Investment Gudang Tertup III, Jalan Pulo buaran Raya, Kawasan Industri JIEP, Kel. Pulo Gadung, Kec. Cakung, Jakarta Timur, 13260
Nama Dan Alamat Lembaga Penunjang <i>Name And Address Of Supporting Institution</i>	Auditor Independen: dbds&a Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Branch Office: Sentra Bisnis Harapan indah Blok SS 11 No 6-7 Jl Harapan indah Raya, Bekasi 17132-Indonesia Telp. (021) 88866199 (Hunting) Fax. (021) 88865750 Email: admin@kapdbdsda-bekasi.com	Independent Auditor: dbds&a Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Branch Office: Harapan Indah Business Centre, Block SS 11 No 6-7 Harapan Indah Raya St, Bekasi 17132 – Indonesia Telephone No.: (021) 88866199 (Hunting)



SEJARAH PERUSAHAAN

PT Indra Karya (Persero), sebelumnya bernama PN Indra Karya sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pemborongan didirikan melalui Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1961. Pada tahun 1972 menjadi Perusahaan Perseroan dengan akte notaris No.108 tahun 1972.

Pada tahun 1978 Menteri Pekerjaan Umum selaku Kuasa Pemegang Saham telah mengorganisasi dan mengubah bidang usaha perusahaan ini menjadi perusahaan jasa konsultasi rekayasa (*engineering*). Pada waktu itu, sebagai pijakan pertama dalam memasuki bidang usaha baru ini, telah dipilih bidang tenaga listrik dimana dalam segmen ini belum terjadi persaingan yang ketat.

Pada tahun 1981 Menteri Pekerjaan Umum telah melakukan usaha-usaha perkuatan terhadap perusahaan dalam rangka menunjang pengembangan industri konstruksi nasional. Perkuatan tersebut dilakukan dengan mengalihkan sejumlah tenaga ahli, teknisi, staf administrasi Proyek Induk Serbaguna Kali Brantas ke Indra Karya.

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah berupa tanah, gedung kantor, kendaraan, peralatan laboratorium, peralatan survei dan investigasi, komputer dan lain-lain telah dilakukan sejak tahun 1981 tersebut. Sejak saat itu, bidang usaha Indra Karya diperluas dengan pengembangan sumber daya air (dengan titik berat pada rekayasa bendungan bendungan besar), pekerjaan survei dan investigasi serta manajemen dan ekonomi.

PT. INDRA KARYA (PERSERO), berkedudukan di Jakarta (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang Anggaran

COMPANY HISTORY

PT Indra Karya (Persero), previously known as PN Indra Karya, is a company that engages in chartering and was established through Government Regulation No. 57 of 1961. In 1972, the company became a corporation with the issuance of Notarial Deed No. 108 of 1972.

In 1978, the Minister of Public Works, who held a power of attorney as a shareholder, organized and changed the Company's core business to engineering. At that time, as the first step of entering the new business field, electricity was chosen as the field the Company would engage in due to lack of competition.

In 1981, the Minister of Public Works carried out effort to strengthen the Company in order to support the development of the national construction industry. The strengthening effort involved transferring a number of experts, technicians, and administration staffers from the Brantas River Multipurpose Parent Project to Indra Karya.

The increase of the government's equity capital in the company in the form of land, office buildings, vehicles, laboratory equipment, surveying and investigation equipment, computers, and others also started to take place that year. Since then, Indra Karya's scope of business was expanded to water resource management (with a focus on major dam engineering), surveying and investigation works, and management and economy.

PT INDRA KARYA (PERSERO), based in Jakarta (hereinafter referred to as "the Company"), was established with a deed



Dasarnya didirikan dengan akta tertanggal 20-12-1972 (dua puluh Desember seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua), Nomor 108, yang dibuat di hadapan DIAN PARAMITA TAMZIL, Sarjana Hukum, pengganti dari DJOJO, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, kemudian diubah beberapa kali dan dimuat dalam Akta 31-03-1998 (tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), nomor 123, dibuat di hadapan IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 11-01-1999 (sebelas Januari seribu Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan), C.872.HT.01.04.TH.99 Akta tanggal 14-10-2008 (empat belas Oktober dua ribu delapan), nomor 07, dibuat di hadapan MARSUDI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 28-04-2009 (dua puluh delapan April dua ribu sembilan), nomor AHU-16237.AH.01.02.Tahun 2009 Akta 28-01-2013 (dua puluh delapan Januari dua ribu tiga belas), nomor 06, dibuat di hadapan MARSUDI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Pemberitahuan Perubahan Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 25-02-2013 (dua puluh lima Februari dua ribu tiga belas), nomor AHU-AH.01.10-06367, Akta tanggal 28-06-2013 (dua puluh delapan Juni dua ribu tiga belas), nomor 09, dibuat di hadapan MARSUDI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 10-07-2013 (sepuluh Juli dua ribu tiga belas), nomor AHU-AH.01.10-28149; Akta

dated 20-12-1972 (twentieth of December, year nineteen seventy-two) and made before DIAN PARAMITA TAMZIL, Bachelor of Law, as replacement for DJOJO, Bachelor of Law, Notary Public in Jakarta. The deed was revised a number of times and stipulated in Deed 31-03-1998 (thirty-first of March, year nineteen ninety-eight), number 123, made before IMAS FATIMAH, Bachelor of Law, Notary Public in Jakarta, and received legalization from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree 11-01-1999 (eleventh of January, year nineteen ninety-nine), C.872.HT.01.04.TH.99; Deed 14-10-2008 (fourteenth of October, year two-thousand and eight), number 7, made before MARSUDI, Bachelor of Law, Notary Public in Jakarta, and received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia through Decree 28-04-2009 (twenty-eighth of April, year two-thousand and nine), number AHU-16236.AH.01.02.Year 2009; Deed 28-01-2013 (twenty-eighth of January, year two-thousand and thirteen), number 06, made before MARSUDI, Bachelor of Law, Notary Public in Jakarta, with Notification of Change in Company Data was received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a letter dated 25-02-2013 (twenty-fifth of February, year two-thousand and thirteen), number AHU-AH.01.10-06367; Deed 28-06-2013 (twenty-eighth of June, year two-thousand and thirteen), number 09, made before MARSUDI, Bachelor of Law, Notary Public in Jakarta, with Notification of Change in Company Data received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System in the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a letter dated 10-07-2013 (tenth of July, year two-thousand and thirteen) number AHU-AH.01.10-28149; Deed 23-01-2014 (twenty-third of January, year two thousand and fourteen), number 06, made



tanggal 23-01-2014 (dua puluh tiga Januari dua ribu empat belas), nomor 06, dibuat di hadapan MARSUDI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 06-03-2014 (enam Maret dua ribu empat belas), nomor AHU-AH.01.10-08987; Akta tanggal 21-06-2016 (dua puluh satu Juni dua ribu enam belas), nomor 04, dibuat di hadapan NIA KURNIASIH. SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Keputusan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0011793.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 22-06-2016 (dua puluh dua Juni dua ribu enam belas); Akta tanggal 01-02-2018 (satu Februari dua ribu delapan belas), nomor 01, dibuat di hadapan NIA KURNIASIH. SH, Notaris di Jakarta yang pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 02-02-2018 (dua Februari dua ribu delapan belas), nomor AHU-AH.01.03-0050286; Akta tanggal 06-07-2018 (enam Juli dua ribu delapan belas) nomor 05 dibuat di hadapan NIA KURNIASIH. SH, Notaris di Jakarta yang pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 10-07-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas), nomor AHU-AH.01.03-0220197;

Akta tanggal 31-10-2018 (tiga puluh satu Oktober dua ribu delapan belas) nomor 28 dibuat di hadapan NIA KURNIASIH. SH, Notaris di Jakarta yang pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak

before MARSUDI, Bachelor of Law, Notary Public in Jakarta, with Notification of Change in Company Data received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a letter dated 06-03-2014 (sixth of March, year two-thousand and fourteen), number AHU-AH.01.10-08987; Deed 21-06-2016 (twenty-first of June, year two-thousand and sixteen), number 04, made before NIA KURNIASIH, Bachelor of Law, Notary Public in Jakarta, with Decree of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU-0011793.AH.01.02.Year 2016 on 22-06-2016 (twenty-second of June, year two-thousand and sixteen); Deed 01-02-2018 (first of February, year two-thousand and eighteen), number 01, made before NIA KURNIASIH, Bachelor of Law, Notary Public in Jakarta, with Notification of Change in Company Data received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a letter dated 02-02-2018 (second of February, year two-thousand and eighteen), number AHU-AH.01.03-0050286; Deed 06-07-2018 (sixth of July, year two-thousand and eighteen) number 05 made before NIA KURNIASIH, Bachelor of Law, Notary Public in Jakarta with changes in the Company's data received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a letter dated 10-07-2018 (tenth of July, year two-thousand and eighteen), number AHU-AH.01.03-0220197;

Deed 31-10-2018 (thirty-first of October, year two-thousand and eighteen) number 28 made before NIA KURNIASIH, Bachelor of Law, Notary Public in Jakarta with Notification of Change in Company Data received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 02-11-2018 (dua November dua ribu delapan belas), nomor AHU-AH.01.03-0259773. Akta tanggal 14-12-2018 (empat belas Desember dua ribu delapan belas), nomor 09, dibuat di hadapan NIA KURNIASIH. SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat Keputusan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0031500.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 20-12-2018 (dua puluh Desember dua ribu delapan belas) kemudian terakhir dirubah dengan Akta tanggal 12-02-2019 (dua belas Februari dua ribu sembilan belas), nomor 04, dibuat di hadapan NIA KURNIASIH. SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0086197, tanggal 13-02-2019 (tiga belas Februari dua ribu sembilan belas). Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan kepada NIA KURNIASIH. SH, Notaris, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 111 ayat 1 juncto pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Indra Karya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha jasa Konsultan *Engineering*.

RIWAYAT AKTE INDRA KARYA (PERSERO)

Indra Karya (Persero) didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 108 tertanggal 20 Desember 1972 yang kemudian diubah pada tahun 1998 dengan akta notaris Nomor 123 tanggal 31 Maret 1998, disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan SK No. C.871 HT.01.04 tanggal 11 Januari 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 10 Oktober tahun 2000 dan dilakukan perubahan yang terakhir pada tahun 2013 dengan akta notaris Nomor 9 tanggal 28 Juni 2013 karena adanya penggantian Direksi berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK-291/MBU 2013 tanggal 27 Juni 2013. Indra Karya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha jasa Konsultan *Engineering*.

Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a letter dated 02-11-2018 (second of November, year two-thousand and eighteen); Deed 14-12-2018 (fourteenth of December, year two-thousand and eighteen), number 09, made before NIA KURNIASIH, Bachelor of Law, Notary Public in Jakarta with Decree of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU-0031500.AH.01.02. Year 2018 dated 20-12-2018 (twentieth of December, year two-thousand and eighteen); and lastly Deed 12-02-2019 (twelfth of February, year two-thousand and nineteen), number 04, made before NIA KURNIASIH, Bachelor of Law, Notary Public in Jakarta, with Letter of Receipt of Notification of Change in Company Data from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU-AH.01.03-0086197, dated 13-02-2019 (thirteenth of February, year two-thousand and nineteen). The presenter, as mentioned above, informed NIA KURNIASIH, Bachelor of Law, Notary Public, that in accordance with Article 111 Section 1 juncto Article 119 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Article 27 Section 1 of Law No. 19 of 2003 on State-owned Enterprises, the Appointment and Dismissal of the Board of Directors are decided in a General Meeting of Shareholders. Indra Karya is a State-owned Enterprise that engages in engineering consulting services.

DEEDS HISTORY OF PT INDRA KARYA (PERSERO)

Indra Karya (Persero) was established with Deed of Incorporation No. 108 on 20 December 1972, which was then revised in 1998 with Notarial Deed No. 123 on 31 March 1998, authorized by the Minister of Justice with Decree No. C.871 HT.01.04 on 11 January 1999 and Additional State Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 on 10 October 2000, and was lastly revised in 2013 with Notarial Deed No. 9 on 28 June 2013 due to changes in the company's Board of Directors based on Decree of the Minister of State for State-owned Enterprises No. SK-291/MBU 2013 on 27 June 2013. Indra Karya is a State-owned Enterprise which engages in engineering consulting.

IDENTITAS PERUSAHAAN

CORPORATE IDENTITY



"Mengusung Slogan Safer-Stronger-Faster, IKA memberikan rasa aman dan nyaman pada semua layanan jasanya karena memiliki pengalaman serta keahlian di bidang sumber daya air yang andal, terus memperkuat layanan jasa pemastian melalui kecepatan layanan prima yang diberikan."

"With Safer-Stronger-Faster as its slogan, IKA aims to provide safety and comfort in all of its services owing to its reliable experience and expertise in water resources as well as to strengthen its services through timeliness and excellence."



Indra Karya :

Indra didasarkan dari Panca Indera, Kolaborasi strategis dari seluruh Panca Indera melahirkan Karya-Karya terbaik bagi Bangsa dan Negara.

Makna Logo IKA :

Huruf I & K yang melambangkan Indra Karya/ Indra Berkarya yang dibingkai.

Warna Biru ; Makna Menggambarkan core bisnis indra karya pengelolaan pengolahan sumber daya air.

Warna Putih ; Makna Menggambarkan kemurnian, kebersihan, kesederhanaan dan transparansi.

Indra Karya :

'Indra' has its roots in the word 'indera' (senses), which reflects strategic collaboration of all five senses that results in the best 'Karya' (creation) for the Nation and the State.

The meaning of IKA's logo :

Letters I and K (framed) symbolize the company's name, Indra Karya.

The color blue symbolizes Indra Karya's core business in water resource management, while the color white symbolizes purity, cleanliness, simplicity, and transparency.

VISI, MISI, BUDAYA DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN VISION, MISSION, CULTURE AND COMPANY VALUES

Dalam mewujudkan tujuan perusahaan, Indra Karya telah menetapkan Visi, Misi, Budaya dan Nilai-nilai Perusahaan sebagai berikut:

In realizing the company's objectives, Indra Karya has established the following company Vision, Mission statements, culture and Values:

VISI

Vission

"Menjadi perusahaan Engineering, Developer dan Industry Sumber Daya Air bertaraf Internasional terbaik di Asia".

"To become the best international-scale Engineering, Developer, and Industry Water resource company in Asia."

MISI

Mission

Untuk mencapai visinya Perusahaan mengemban misi sebagai berikut :

- Menyediakan jasa konsultasi yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri ataupun internasional, dan memupuk keuntungan (*profit-oriented*) dengan menyelenggarakan kegiatan usaha yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.
- Melaksanakan *Good Corporate Governance*.
- Menjadikan Tenaga Ahli PT. Indra Karya (Persero) memiliki kompetensi tinggi dan mempunyai persyaratan yang dapat diterima oleh industri jasa konsultasi bertaraf internasional dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa atas setiap penugasan.
- Turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya.
- Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dilaksanakan oleh sektor swasta dan turut aktif memberikan bimbingan/pembinaan kegiatan usaha khususnya pengusaha kecil dan koperasi.

To achieve its vision the Company has the following missions:

- *To provide high-quality and profit-oriented consulting services with strong competitiveness both in domestic and international markets by engaging in business activities that can improve the Company's value.*
- *To implement the principles of Good Corporate Governance*
- *To establish experts at PT Indra Karya (Persero) as those who are highly competent, possess requirements that can be accepted by the international consulting services industry, and can provide the best services to customers in each assignment.*
- *To exercise and support the Government's economic policy and programs as well as national development in general.*
- *To pioneer business activities that have not been done by the private sector and to actively provide business guidance, particularly to small enterprises and cooperatives.*



BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) adalah seperangkat nilai, norma, persepsi dan pola perilaku yang dianut dan dikembangkan dalam perusahaan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan harmonis dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. Perseroan mencanangkan nilai-nilai bersama PT Indra Karya (Persero) yang memupuk pola pikir, pola tindak, sikap dan perilaku insan PT Indra Karya (Persero) agar senantiasa mengacu pada upaya pencapaian sasaran dan efektif dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga mampu melakukan pengembangan diri untuk peningkatan kinerja perusahaan secara terus menerus.

Budaya perusahaan yang dikembangkan dilatarbelakangi keinginan manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan yang akan berakibat langsung pada peningkatan kejayaan perusahaan dan kesejahteraan karyawan dengan motto: **"Perusahaan Jaya, Karyawan Sejahtera"**. Nilai-nilai tersebut harus terkondisikan di dalam jiwa seluruh insan PT Indra Karya yang akan membentuk budaya perusahaan secara utuh dan merupakan totalitas pola tingkah laku serta keyakinan yang pada akhirnya tercipta budaya bisnis yang kuat.

Nilai-Nilai PT Indra Karya

- **Integrity**
Menedepankan kepentingan perusahaan, jujur dan transparan serta mengembangkan kerjasama tim untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- **New Ideas**
Senantiasa menghasilkan ide-ide baru dalam penciptaan karya baru baik produk, nilai-nilai, proses maupun system.
- **Discipline**
Menepati janji, taat hukum, peraturan, etika dan menyelesaikan setiap penugasan secara tepat mutu, waktu dan biaya.
- **Respect**
Perilaku saling menghormati baik didalam maupun diluar organisasi untuk menghargai setiap orang dengan karakteristik sikap memperlakukan orang lain dengan penghargaan dan rasa hormat, tidak mentolerir adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, mencari solusi terbaik (*win/win*) dalam segala permasalahan dan menghargai budaya dan kebiasaan local.
- **Agility**
Terus bergerak melakukan terobosan dalam mendapatkan penugasan dari berbagai pengguna jasa dan memberikan hasil dan nilai tambah terbaik serta memahami kebutuhan pengguna jasa, memberikan pelayanan terbaik untuk mencapai kepuasan pengguna jasa serta menjadikan keselamatan kerja sebagai prioritas utama dalam melaksanakan setiap aktivitas.

CORPORATE CULTURE

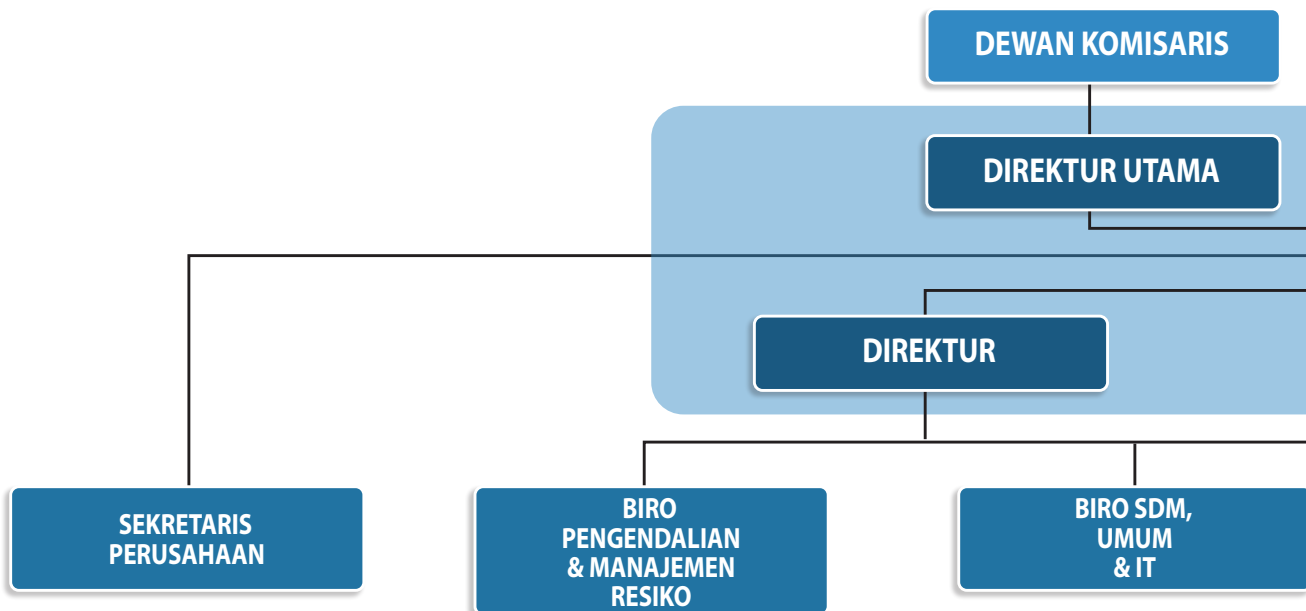
Corporate culture is a set of values, norms, perceptions, and behavioral patterns that are adhered and developed within a company to create a conducive and harmonious work environment in order to improve productivity. The Company's leaders have established common values in PT Indra Karya (Persero) that nourish the mindset, action, attitude, and behavior of the Company's personnel so that they always refer to the Company's effort to achieve its objectives and exercise their daily duties effectively in order to encourage self-development towards improving the Company's performance in a consistent manner.

The Company's culture is based on the management's desire to improve the Company's value, which will directly impact on the Company's greatness and employees' prosperity with a motto of **"Perusahaan Jaya, Karyawan Sejahtera" (Great Company, Prosperous Employees)**. Such values must be conditioned within the personnel of PT Indra Karya, which will create a solid corporate culture as a result of totality in behavioral patterns and confidence which produce a strong business culture.

Values of PT Indra Karya

- **Integrity**
Prioritizing the interest of the Company in an honest and transparent manner and developing teamwork to achieve common progress and prosperity.
- **New Ideas**
Consistently producing new ideas in creating products, values, processes, and systems.
- **Discipline**
Keeping promises, obeying the law and regulation, upholding ethics, and completing each assignment by prioritizing quality, punctuality, and cost-efficiency.
- **Respect**
Maintaining mutual respect, both inside and outside the Company, to appreciate each individual by treating them with honor and respect, tolerating no discrimination in any form, finding the best (*win-win*) solution to every issue, and appreciating local customs and habits.
- **Agility**
Always striving for breakthroughs in obtaining assignments from customers and producing the best results and added value as well as understanding customers' needs, providing the best services that meet their satisfaction, and prioritizing work safety in all activities.

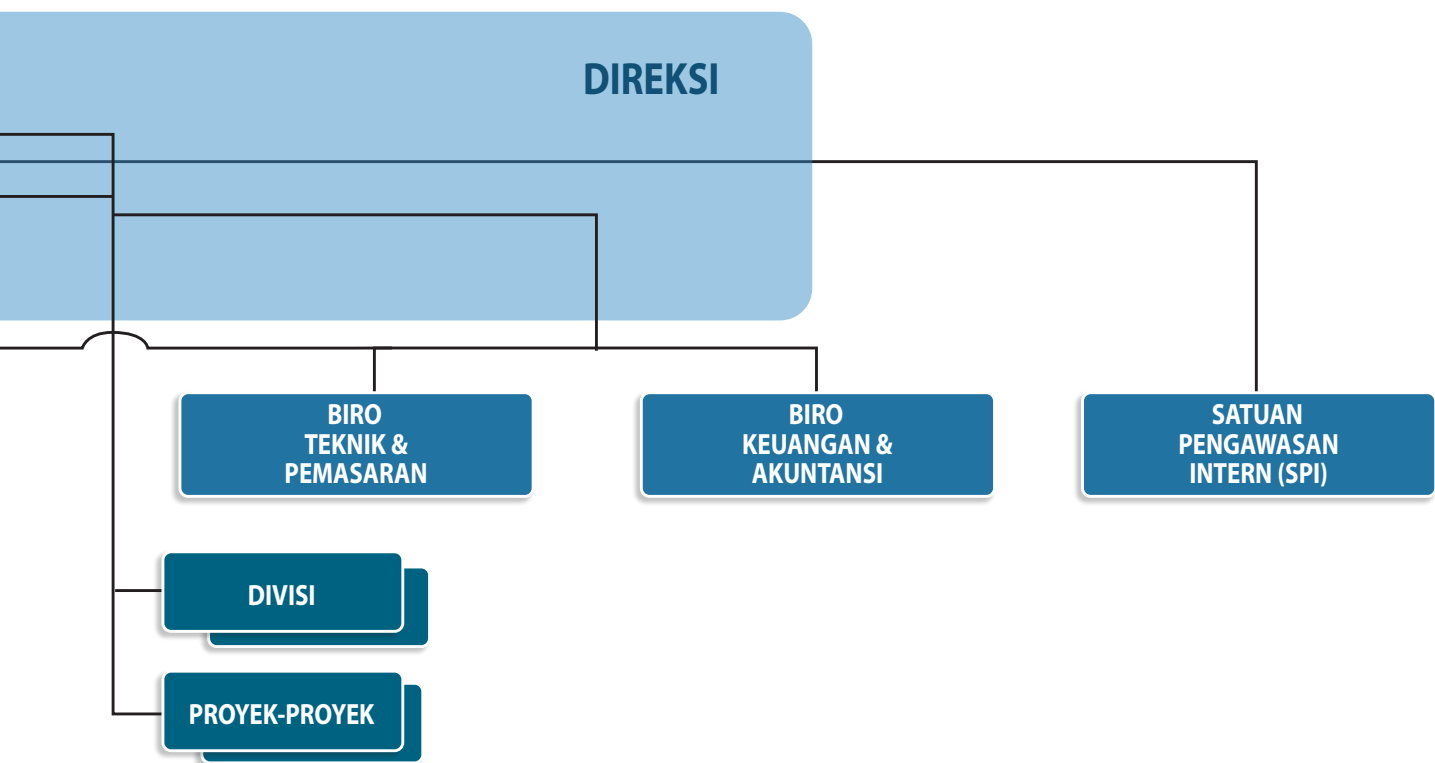
STRUKTUR ORGANISASI / ORGANISATION STRUCTURE



KEPALA DEPARTEMEN / HEAD OF DEPARTEMENT



Nama / Name	Okky Suryono
Jabatan / Position	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>
Pendidikan / Education	- Sarjana Komputer di Sekolah Tinggi Komputer Muhammadiyah, Jakarta tahun 2011 - Bachelor of Computer Science, Muhammadiyah College of Computer Science Jakarta, 2011
Menjabat sejak / Term of Office	Februari 2019 s/d sekarang <i>February 2019-present</i>



Nama / Name	Tugimin Edi Purnomo
Jabatan / Position	Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) <i>Head of the Internal Monitoring Unit</i>
Pendidikan / Education	• Sarjana Sosial-Adm Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, Bengkulu tahun 2001 • Diploma Penyelia Lingkungan Hidup, Universitas Terbuka tahun 1999 • Bachelor of Social Sciences in Public Administration, State College of Administration Bengkulu, 2001 • Diploma in Environment, Indonesia Open University, 1999
Menjabat sejak / Term of Office	Januari 2019 s/d sekarang <i>January 2019-present</i>

KEPALA DEPARTEMEN / HEAD OF DEPARTEMENT



Nama / Name	Koestjahyono SE
Jabatan / Position	Kepala Biro Pengendalian dan Manajemen Risiko <i>Head of Control and Management Risk</i>
Pendidikan / Education	• Sarjana Ekonomi Universitas Brawijaya, tahun 1990 • Bachelor of Economics, Brawijaya University, 1990
Menjabat sejak / Term of Office	Mei 2016 s/d sekarang <i>May 2016-present</i>



Nama / Name	Eva Safi'i
Jabatan / Position	Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Umum dan Informasi Teknologi <i>Head of Human Resources, General Affairs, and Information Technology, HQ</i>
Pendidikan / Education	• Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2000 • Bachelor of Engineering in Urban Planning, Diponegoro University, 2000
Menjabat sejak / Term of Office	Juni 2019 s/d sekarang <i>June 2019-present</i>



Nama / Name	Hendra Dhuadja
Jabatan / Position	Kepala Biro Teknik dan Pemasaran <i>Head of Technical and Marketing</i>
Pendidikan / Education	• Sarjana Teknik Sipil Institute Sains Dan Teknologi Nasional, Jakarta tahun 1993 • Bachelor of Engineering in Civil Engineering, National Institute of Science and Technology, 1993
Menjabat sejak / Term of Office	2015 s/d Sekarang <i>2015-present</i>

KEPALA DEPARTEMEN / HEAD OF DEPARTMENT



Nama / Name	Hari Tjahyono
Jabatan / Position	Kepala Biro Keuangan dan Akuntansi <i>Head of Finance and Accounting</i>
Pendidikan / Education	• S2 Manajemen, PPMT Malang tahun 2000 • S1 Ekonomi, Universitas Jember tahun 1999 • <i>Master of Management, PPMT Malang 2000</i> • <i>Bachelor of Economics, University of Jember 1999</i>
Menjabat sejak / Term of Office	Mei 2016 s/d sekarang <i>May 2016-present</i>



Nama / Name	Gagah Guntur Aribowo
Jabatan / Position	General Manager Divisi Engineering I <i>General Manager, Division of Engineering I</i>
Pendidikan / Education	• Studi S3 Doktor Teknik Sipil, Universitas Brawijaya Malang, tahun 2016 sd sekarang • S2 Magister Teknik Sipil, Universitas Sultan Agung Islamic, tahun 2010 • S1 Teknik Pengairan, Universitas Brawijaya, tahun 1999 • <i>Doctorate in Civil Engineering, Brawijaya University, 2016-present</i> • <i>Master of Engineering in Civil Engineering, Sultan Agung Islamic University, 2010</i> • <i>Bachelor of Engineering in Water Engineering, Brawijaya University, 1999</i>
Menjabat sejak / Term of Office	Desember 2016 s/d sekarang <i>December 2016-present</i>

KEPALA DEPARTEMEN / HEAD OF DEPARTEMENT



Nama / Name	Ferdinandus Baskoro
Jabatan / Position	<i>General Manager Divisi Engineering II</i> <i>General Manager, Division of Engineering II</i>
Pendidikan / Education	• Sarjana (S2) Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang, Jawa Tengah tahun 2020 • Sarjana (S2) Manajemen Rekayasa Konstruksi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah tahun 2019 • Sarjana (S1) Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil, Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur tahun 2001 • <i>Master of Management in Marketing Management, Faculty of Economics and Business, Stikubank University, 2020</i> • <i>Master of Engineering in Construction Engineering, Sultan Agung Islamic University, 2019</i> • <i>Bachelor of Engineering in Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Merdeka University, 2001</i>
Menjabat sejak / Term of Office	Mei 2016 - Sekarang <i>May 2016 - Present</i>



Nama / Name	HARI SAMPURNO
Jabatan / Position	<i>General Manager Divisi Engineering III</i> <i>General Manager, Division of Engineering III</i>
Pendidikan / Education	• Sarjana Teknik Sipil Universitas Brawijaya, Malang tahun 1990 • Magister Sains (M.Si) Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Universitas Muhammadiyah, Malang tahun 2006 • <i>Bachelor of Engineering in Civil Engineering, Brawijaya University, 1990</i> • <i>Master of Science in Human Resource Management, Muhammadiyah University Malang, 2006</i>
Menjabat sejak / Term of Office	Mei 2016 - Sekarang <i>May 2016 - Present</i>

KEPALA DEPARTEMEN / HEAD OF DEPARTEMENT



Nama / Name	Adrian Yulianto
Jabatan / Position	General Manager Divisi Survei dan Investigasi <i>General Manager, Division of Survey and Investigation</i>
Pendidikan / Education	• Sarjana Teknik Geologi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Yogyakarta tahun 2003 • Bachelor of Engineering in Geological Engineering, Veteran National Development University Yogyakarta, 2003
Menjabat sejak / Term of Office	Juli 2018 s/d sekarang <i>July 2018-present</i>



Nama / Name	Legowo Santoso
Jabatan / Position	General Manager Divisi Khusus dan Investasi <i>General Manager, Division of Special Business and Investment</i>
Pendidikan / Education	• Mahasiswa Program Master - Magister Manajemen (S2) Universitas Atmajaya, Jakarta tahun 2011 • S1 Ekonomi (Manajemen Keuangan dan Perbankan) STIE Swadaya, Jakarta tahun 1997 • Student of Master Program - Master of Management (S2) Atmajaya University Jakarta, 2011 • Bachelor of Economics in Financial and Banking Management, Swadaya College of Economics Jakarta, 1997
Menjabat sejak / Term of Office	2019 s/d sekarang <i>2019-present</i>

KOMPOSISI PERMODALAN

Komposisi modal perusahaan sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT. Indra Karya (Persero) No. S-310/MBU/05/2016 tanggal 23 Mei 2016 terdapat pada tabel berikut:

KOMPOSISI PERMODALAN PT. INDRA KARYA (PERSERO) / COMPOSITION OF CAPITAL OF PT. INDRA KARYA (PERSERO)

URAIAN	SAHAM (SERI A DWI WARNA)			SAHAM SERI B		KEPEMILIKAN	
JUMLAH LEMBAR SAHAM	JUMLAH (Rp.)	JUMLAH (Rp.)		JUMLAH LEMBAR SAHAM		JUMLAH (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Modal Dasar	8.000	1.000.000,00	8.000.000.000,00	7.999	1.000.000,00	7.000.000.000,00	100% Negara Republik Indonesia
Modal							
Ditempatkan Dan Disetor	2.000	1.000.000,00	2.000.000.000,00	1.999	1.000.000,00	1.999.000.000,00	
Saham dalam Portepel	6.000	1.000.000,00	6.000.000.000,00				

KEGIATAN USAHA

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan terakhir, yaitu Akta Notaris Nomor 9 tanggal 14 Desember 2018, Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang usaha jasa Konsultansi Rekayasa (*Engineering*). Dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Nilai Perseroan "INDRA" (*Integrity, New Idea, Discipline, Respect dan Agility*) diharapkan produk Perseroan memiliki kualitas tinggi dan berdaya saing kuat sehingga mendapatkan keuntungan yang selanjutnya akan meningkatkan nilai Perusahaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha jasa konsultan *engineering* dengan bidang usaha meliputi perencanaan dan supervisi sumber daya air serta bidang usaha non sumber daya air terdiri dari jalan dan jembatan, gedung dan bangunan, energi dan lain-lain.
2. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan jasa konsultan *engineering* dengan memperhatikan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
3. Jenis usaha yang disediakan oleh Indra Karya, meliputi:
 - a. Konsultan *Engineering* Sumber Daya Air, terdiri dari:
 1. Perencanaan Sumber Daya Air
 2. Supervisi Sumber Daya Air
 - b. Konsultan *Non Engineering* Sumber Daya Air, terdiri dari:

COMPOSITION OF CAPITAL

The composition of the company's capital as stated in the Decree of the Shareholders of the Company PT. Indra Karya (Persero) No. S-310 / MBU / 05/2016 dated 23 May 2016 is shown in the following table:

COMPANY ACTIVITIES

Based on the Company's latest Articles of Association, namely Notarial Deed No. 9 on 28 June 2013, the Company's primary objective is to engage in the field of engineering consulting. By implementing the principles of values INDRA (*Integrity, New ideas, Discipline, Respect, Agility*), it is hoped that the company's provide high-quality and competitive services to obtain profits in order to improve its value.

To achieve the aforementioned objective, the Company conducts the following core business activities:

1. Providing engineering consulting services for fields including water resources planning and supervision and non-water resources fields such as roads and bridges, buildings, energy, and others.
2. Engages in other activities commonly done by consulting companies in accordance to applicable laws and regulations.
3. The services provided by Indra Karya include:
 - a. Water Resources Engineering Consulting, consisting of:
 1. Water Resources Planning
 2. Water Resources Supervision
 - b. Non-Water Resources Engineering Consulting, consisting of:

1. Jalan dan jembatan
 2. Gedung dan bangunan
 3. Energi
 4. Survey dan Investigasi
 5. Dan lain-lain
- c. Usaha khusus, terdiri dari:
1. *Procurement*
 2. *Developer*
 3. Air Bersih
 4. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

1. Roads and bridges
 2. Buildings
 3. Energy
 4. Surveying and Investigation
 5. Others
- c. Special Businesses, consisting of:
1. Procurement
 2. Developer
 3. Clean Water
 4. Bottled Drinking Water

JARINGAN BISNIS DAN WILAYAH OPERASI

Wilayah Kerja

Wilayah Kerja Perseroan yang berlaku per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

- Kantor Pusat, DKI Jakarta
- Divisi *Engineering* I, Malang-Jawa Timur
- Divisi *Engineering* II, Semarang-Jawa Tengah
- Divisi *Engineering* III, DKI Jakarta
- Divisi Survei & Investigasi, Malang-Jawa Timur
- Divisi Khusus & Investasi, DKI Jakarta

BUSINESS NETWORK AND OPERATIONAL AREAS

Work Areas

The Company's Work Areas as of 31 December 2019 and 2018 were as follows:

- Headquarters, DKI Jakarta
- Engineering Division I, Malang-East Java
- Engineering Division II, Semarang-Central Java
- Engineering Division III, DKI Jakarta
- Survey & Investigation Division, Malang-East Java
- Business & Investment Division, DKI Jakarta



NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG

1. DPP INKINDO DKI Jakarta
Alamat : Jl. Pertani No. 7 Duren Tiga Pancoran RT.4, RT.5/RW.3, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760

NAMES AND ADDRESS OF SUPPORTING PROFESSIONAL AGENCIES

1. Central Board of the Indonesian National Association of Consultants (INKINDO), Jakarta Chapter
Address: No. 7 Pertani St, Duren Tiga, Pancoran, RT 4, RT 5/RW 3, Duren Tiga, Pancoran District, City of South Jakarta, Jakarta 12760

- | | |
|---|---|
| <p>2. Komite Nasional Indonesia Untuk Bendungan Besar KNI-BB Inacold
Alamat: Jl. H. Agus Salim No.69, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350</p> <p>3. Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)
Alamat : Gedung Dit.Jen. Sumber Daya Air Lt. 8, Kementerian Pekerjaan Umum, Jl. Patimura 20, Jakarta 12110</p> <p>4. Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI)
Alamat : Jl. Asmin No.45, RT.8/RW.RT. 03, Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13750</p> <p>5. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
Alamat : Menara Kadin Indonesia Lt. 3 Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950</p> | <p>2. Indonesian National Committee on Large Dams (INACOLD)
Address: No. 69 Agus Salim St, RT 8/RW 4, Gondangdia, Menteng District, City of Central Jakarta, Jakarta 10350</p> <p>3. Indonesian Association of Hydraulic Engineers (HATHI)
Address: Level 8, Directorate-General of Water Resources Building, Ministry of Public Works, No. 20 Pattimura St, Jakarta 12110</p> <p>4. Indonesian Association of Soil Engineers (HATTI)
Address: No. 45 Asmin St, RT 8/RW.RT 03, Susukan, Ciracas District, City of East Jakarta, Jakarta 13750</p> <p>5. Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN)
Address: Level 3, KADIN Indonesia Tower, Lot 2-3 No. 5 H.R. Rasuna Said St, Jakarta 12950</p> |
|---|---|

ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

PT Indra Karya (Persero) hingga saat ini tidak memiliki anak perusahaan atau entitas asosiasi.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

PT Indra Karya (Persero) hingga saat ini tidak memiliki grup perusahaan.

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

PT Indra Karya (Persero) telah menyediakan informasi kepada *stakeholders* yang salah satunya pada diakses melalui *website* Perusahaan www.indrakarya.co.id.

SUBSIDIARIES AND ASSOCIATE ENTITIES

PT Indra Karya (Persero) does not have any subsidiary nor associate entity.

COMPANY GROUP STRUCTURE

PT Indra Karya (Persero) does not have a company group.

INFORMATION ON COMPANY WEBSITE

PT Indra Karya (Persero) provides information to *stakeholders* that can be accessed through the Company's website www.indrakarya.co.id.

NAMA KANAL	ISI	CHANNEL NAME	CONTENT
Beranda	1. Pengalaman Kami 2. Sistem Manajemen Internasional 3. Layanan Produk 4. Berita Terbaru 5. Rekanan Kami	Home	1. Our Experiences 2. International Management System 3. Services and Products 4. Latest News 5. Our Partners
Perusahaan	1. Tentang Kami 2. Budaya Perusahaan: Komitmen K3 & Lingkungan 3. Pengurus Badan Usaha 4. Struktur Organisasi 5. Bidang Usaha dan Layanan	The Company	1. About Us 2. Corporate Culture: Commitment to OHS and Environment 3. Company Administration 4. Organizational Structure 5. Business Fields and Services
Publikasi	1. Berita Perusahaan 2. Artikel 3. Galeri 4. Karir 5. Pengalaman: Sumber Daya Air, Jalan, Jembatan dan Transportasi Energi, Bangunan Lainnya	Publication	1. Company News 2. Articles 3. Gallery 4. Career 5. Experiences: Water Resources, Roads, Bridges, and Other Building Energy Transportations

Kontak Kami	1. Kantor Pusat 2. Divisi <i>Engineering I</i> 3. Divisi <i>Engineering II</i> 4. Divisi <i>Engineering III</i> 5. Divisi Usaha Khusus dan Investasi 6. Divisi Survei dan Investigasi	Contact Us	1. Headquarters 2. Engineering Division I 3. Engineering Division II 4. Engineering Division III 5. Special Business and Investment Division 6. Survey and Investigation division
-------------	--	------------	--

SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset penting dalam mempertahankan keberlanjutan bisnis Perseroan. Pengembangan kualitas sumber daya manusia merupakan komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan arah strategis Perseroan dan memberikan layanan yang berkualitas bagi pelanggan.

Berikut adalah sikap Perseroan terhadap pentingnya sumber daya manusia:

- Perseroan menghargai manusia/karyawan sebagai sumber daya/aset yang paling penting karena kesungguhan mereka dalam bekerja, kreatif, menerapkan disiplin tinggi dan selalu berupaya meningkatkan pengetahuan/keahlian.
- Memberikan penghargaan yang adil kepada karyawan dan memberikan kesempatan/peluang kepada karyawan untuk maju, meningkatkan kesejahteraan dan karir untuk jangka panjang dan memberikan kepuasan individu dalam berkarya.
- Dalam hal rekrutmen untuk promosi jabatan, Perseroan mengutamakan staf internal yang berpotensi/berprestasi tinggi. Perseroan juga bisa mencari personil berkualitas tinggi dari luar Perseroan.
- Perseroan senantiasa menciptakan lingkungan yang Kondusif agar karyawan bekerja produktif yang pada gilirannya akan menciptakan produktivitas bagi Perseroan.

Jumlah sumber daya manusia atau karyawan perusahaan sampai dengan akhir bulan Desember 2019 secara total adalah 650 orang. Dari jumlah tersebut, yang merupakan karyawan tetap sebanyak 106 dan karyawan kontrak sebanyak 544 orang.

Realisasi perubahan personalia dapat dilihat pada gambar berikut ini:

HUMAN RESOURCES

The Company acknowledges that human resources are valuable assets in maintaining its operational sustainability. Human resource development is part of the Company's commitment to implement its strategic direction and provide high-quality services to its customers.

The following is the Company's attitude to the importance of human resources:

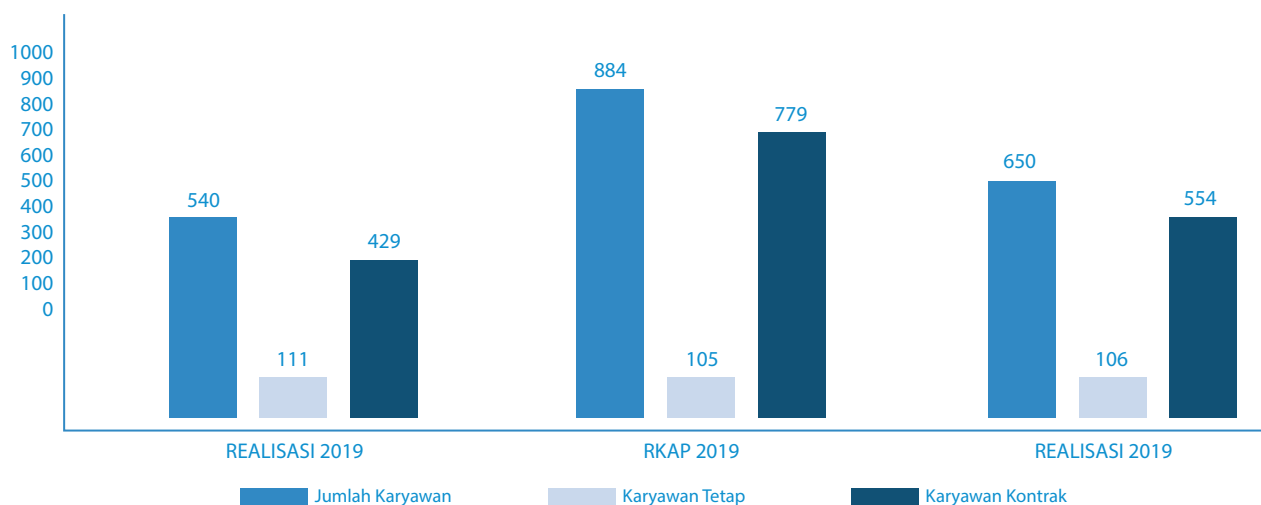
- Appreciating people and employees as the most important resources/assets through their commitment to work, creativity, effort to increase knowledge and expertise, and great discipline.
- Awarding fair rewards to employees and opportunities for them to advance and improve their welfare, long-term careers, and individual satisfaction.
- In terms of recruitment for promotion, the Company prioritizes internal staffers with great potential/achievements. It is also able to recruit high-quality personnel from outside the Company.
- The Company always strives to create a conducive work environment in order to encourage employees' productivity, which eventually will improve the Company's overall productivity.

The Company's human resources or employees as of December 2019 amounted to 650 people in total, which consisted of 106 permanent employees and 544 contract employees.

Realization of personnel changes is shown in the following image:

PERKEMBANGAN JUMLAH KARYAWAN REALIASI 2018 DAN 2019 DEVELOPMENT OF EMPLOYEES REALIZATION 2018 AND 2019

URAIAN	REALISASI 2018	RKAP	REALISASI 2019
Jumlah Karyawan	540	884	650
Tetap	111	105	106
Kontrak	429	779	544



KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2019 COMPOSITION OF EMPLOYEES BASED ON EDUCATIONAL BACKGROUNDS IN 2019

TINGKAT PENDIDIKAN EDUCATIONAL BACKGROUNDS	JUMLAH NUMBER	%
S2, S3 MASTER'S DEGREE, DOCTORATE DEGREE	40	6,15
S1 BACHELOR DEGREE	440	67,69
D3 DIPLOMA	71	10,92
SLTA SENIOR HIGH SCHOOL	90	13,85
LAIN-LAIN OTHERS	9	1,38
Jumlah Total	650	100,00

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

Sebagai bagian dari manajemen SDM, Perseroan senantiasa mendorong seluruh karyawan agar aktif mengikuti program pengembangan, seperti kegiatan pelatihan dan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh internal Perseroan maupun pihak ketiga (eksternal). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan dan kapabilitas SDM agar selalu menjadi pribadi yang berkualitas dengan kinerja terbaik. Sehingga, ke depan mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi Perseroan.

Pengembangan kompetensi SDM di Perseroan dilakukan secara berkala, dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan atau tuntutan profesi karyawan, serta disesuaikan dengan program kerja dan strategi jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan.

PENGEMBANGAN KARIER

Perseroan membuka kesempatan kepada setiap karyawan dalam meningkatkan karier melalui sistem promosi. Sistem ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, dan melihat kebutuhan serta kondisi Perseroan. Sistem promosi ini sebagai wujud pengakuan

HR COMPETENCY DEVELOPMENT

As part of HR management, the Company always encourages all employees to actively take part in development programs such as training and education activities held both internally by the Company or externally by a third party. This aims to improve their competencies, skills, and capabilities as individuals of quality with the best performance. Going forward, employees are expected to give optimal contribution to the Company.

HR competency development in the Company takes place periodically by taking into consideration employees' development needs and professional demands and making adjustments to the Company's short-term and long-term work programs and strategies.

CAREER DEVELOPMENT

The Company offers all employees opportunities to advance their careers through a promotion system. This system is exercised in accordance to a mechanism established by the Company by taking into consideration its needs and conditions. This promotion system is part of the Company's

Perseroan terhadap perkembangan karyawan yang diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dan memberi ruang untuk mengukur kelebihan dan kekurangan dari karyawan tersebut.

PENILAIAN KINERJA

Perseroan melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan secara berkala dalam setiap periode tahun buku untuk mengukur pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) masing-masing karyawan. Penilaian kinerja juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas manajemen SDM yang diterapkan dan menjadi dasar pertimbangan penetapan remunerasi, fasilitas, penghargaan, hingga kenaikan jabatan.

acknowledgement to employee development, which is expected to prompt motivation and provide employees with a space to measure their strengths and weaknesses.

PERFORMANCE ASSESSMENT

The Company conducts an assessment of employees' performance periodically in every fiscal year to measure each employee's achievements based on their Key Performance Indicators (KPIs). Performance assessments are also used to evaluate the effectiveness of the Company's implemented HR management system and serve as a base to determine remuneration, facilities, awards, and promotions.



ANGGARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Realisasi Anggaran Program Pendidikan dan Latihan Perseroan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 190 juta atau tercapai 44,50% dari target anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 427 juta.

Secara rinci Program Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

EDUCATION AND TRAINING BUDGET

The realization of the Company's Education and Training Program Budget in 2019 was recorded at Rp. 190 million, or 44.50% of the 2019 budget ceiling of Rp. 427 million.

The details of the Company's Education and Training Programs in 2019 are shown in the following table:

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REALISASI TAHUN 2018 DAN 2019
EDUCATION AND TRAINING PROGRAMS REALIZATION IN 2018 AND 2019

No.	PROGAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN EDUCATION AND TRAINING PROGRAM	REALISASI 2018 REALIZATION IN 2018		RKAP 2019 BUDGET IN 2019		REALISASI 2019 REALIZATION IN 2019	
		Jmlh Peserta No. of Participants	Biaya (Rp.) Cost (Rp.)	Jmlh Peserta No. of Participants	Biaya (Rp.) Cost (Rp.)	Jmlh Peserta No. of Participants	Biaya (Rp.) Cost (Rp.)
1.	DALAM NEGERI DOMESTIC PROGRAMS						
	Program Pendidikan Gelar: Degree Education Programs						
	- S1 Undergraduate						
	- Pasca Sarjana Postgraduate						
	Program Pendidikan NonGelar: Non-Degree Education Programs						
	- Bidang Teknis/BIM Technical/BIM			6	30	3	18
	- Bidang Manajemen Management	8	80	8	200	18	35
	- Bidang lain-lain: Other fields						
	- Aneka Dampak Lingkungan Environmental Impacts			1	12	1	12
	- Komputer/Value Engineering Computer/Value Engineering			1	5	-	-
	- Bahasa Inggris/Mandarin/Jepang English/Mandarin/Japanese language			20	50	10	25
	- Keamanan bahaya kebakaran Fire hazard and safety			-			-
	- Kursus Satuan Pengawasan Internal Internal Supervision Unit Courses			-			-
	- Perpajakan Taxation			3	12	11	53
	- Pengadaan barang dan jasa Goods and Service Procurement			-			-
	Seminar Seminars			1	3	4	8
	Penguasaan Keuangan Financial Awareness			1	-	-	-
	Komputer Computer			2	4	-	-
	Kemanan/Bahaya Kebakaran (K3)/ISO Fire Safety/Hazard (OHS)/ISO			5	18	5	3

Penguasaan Bangunan <i>Building Awareness</i>			-	-	-	-
Kursus ISO 14001:2015/SMM9001-201 ISO 14001:2015/SMM9001-201 Courses	15	18	3	12	10	20
Teknik & Energi <i>Engineering and Energy</i>			2	6	2	6
BPJS/Ketenagakerjaan <i>Social Security Administration for Employment</i>			2	6	25	5
Konsultasi Sertifikasi <i>Certification Consulting</i>		-	-	-	-	-
Seminar Asosiasi KNIBB/HATHI <i>KNIBB/HATHI Associate Seminars</i>	-	-	12	24	-	-
2. LUAR NEGERI <i>OVERSEAS PROGRAMS</i>	-	-	-	-	-	-
Program pendidikan Gelar: <i>Degree Education Program</i>	-	-	-	-	-	-
- Pasca Sarjana <i>Postgraduate</i>	-	-	-	-	-	-
Program pendidikan Non-Gelar <i>Non-Degree Education Program</i>	-	-	-	-	-	-
- Bidang Teknik <i>Technical</i>	-	-	-	-	-	-
- Bidang Manajemen <i>Management</i>	-	-	-	-	-	-
- Pelatihan dalam Pekerjaan <i>On-the-Job Training</i>	-	-	-	-	-	-
On the job training di mitra partner asing <i>On the job training with foreign partners</i>	3	55	3	45	2	5
TOTAL	26	153	70	427	91	190

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Dalam tahun 2019 kegiatan penelitian dan pengembangan telah dilakukan antara lain penyusunan SMLK3/Lingkungan, sistem manajemen mutu perusahaan, sertifikasi tenaga ahli dan lain-lain. Dari anggaran sebesar Rp. 840 juta terealisasi sebesar Rp. 496 juta atau sebesar 59,05% dari anggaran tahun 2019.

RESEARCH AND DEVELOPMENT

In 2019, the Company's research and development activities included OHS and Environment Management System arrangement, corporate quality management system, expert certification, and others. From a budget of Rp. 840 million in 2019, Rp. 496 million or 59.05% was realized.

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN REALISASI 2018 DAN 2019 RESEARCH AND DEVELOPMENT PROGRAMS REALIZATION IN 2018 AND 2019

No.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RESEARCH AND DEVELOPMENT PROGRAMS	Realisasi 2018 Realization in 2018	RKAP 2019 Budget in 2019	Realisasi RKAP 2019 Budget Realization in 2019			Keterangan Explanation
				Jumlah (Rp.) Amount (Rp.)	Mulai Start	Berakhir Finish	
1.	PENYEMPURNAAN METODE KEGIATAN USAHA IMPROVEMENT OF METHODS IN OPERATIONAL ACTIVITY						
1.	Metode Pelaksanaan kegiatan penagihan imbalan jasa untuk menekan angka "average collection periode" Service Fee Billing Method to press the "average collection period" number	-	-	-	-	-	-

2. Metode Pengendalian Kegiatan usaha /EKPP <i>Operational Activity Control Method</i>					
3. Metode Peyusunan proposal melalui web online <i>Proposal Writing Method through the Web</i>	58	-	-	-	-
4. Penyusunan dan Assesment KPKU <i>Superior Performance Appraisal Criteria Arrangement and Assessment</i>	46	125	Jan'19	Des'19	
5. Penyusunan dan Assesment GCG <i>GCG Arrangement and Assessment</i>	52	40	Jan'19	Des'19	
6. Perpanjangan biaya perijinan Perusahaan <i>Extension of the Company's Permit Cost</i>	80	190	30	Jan'19	Des'19
2. PENGEMBANGAN ORGANISASI ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT					
1. Tindak lanjut/evaluasi terhadap struktur Organisasi dan analisa jabatan <i>Follow-up/evaluation of organizational structure and position analysis</i>					
2. Sistem SMLK3 Perusahaan <i>Corporate OHS and Environment Management System</i>	14	80	21	Jan'19	Des'19
3. Penyusunan SMLK3 <i>Corporate OHS and Environment Management System Arrangement</i>	28	40	23	Jan'19	Des'19
3. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TECHNOLOGICAL AND MANAGEMENT DEVELOPMENT					
1. Pengembangan sistem penyiapan gambar teknik dengan komputer <i>Development of computerized technical image preparation system</i>	-				
2. Pengembangan program rekayasa (<i>seepage analysis, dam break analysis, WRMM, HYMOS</i>) <i>Development of engineering programs (seepage analysis, dam break analysis, WRMM, HYMOS)</i>	138				
3. Pengembangan WLAN/Wifi/Web Database <i>Development of WLAN/Wifi/Web Database Maintenance software My GL</i> <i>Maintenance of My GL Software</i> Bulanan akses internet <i>Monthly Internet Access</i>	48	36	Jan'19	Des'19	
4. Bimtek (pelaksanaan uji lab, geoteknik bendungan) <i>Technical Training (lab test, geotechnical dam)</i>	-	19	Jan'19	Des'19	
5. Bimtek (Hidrologi) <i>Technical Training (Hydrology)</i>	-	30	Jan'19	Des'19	
6. Pengembangan perpustakaan <i>Development of centralization</i>	30		Jan'19	Des'19	
7. Penyempurnaan program akuntansi perusahaan <i>Improvement of the Company's accounting program</i>	8		Jan'19	Des'19	
8. Penyempurnaan manajemen information system perusahaan <i>Improvement of the Company's information system management</i>	-				
9. Sertifikasi tenaga ahli <i>Expert certification</i>	210	150	172	Jan'19	Des'19
JUMLAH ANGGARAN BUDGET		332	840	496	



TEKNOLOGI INFORMASI

Dewasa ini, peran Teknologi Informasi (TI) tidak dapat dipisahkan dari hampir segala jenis kegiatan usaha karena kepraktisan dan efisiensi yang ditawarkannya. Setiap perusahaan seolah diwajibkan untuk menerapkan TI agar mampu menghasilkan produktivitas yang lebih baik sehingga dapat mempertahankan posisi di tengah persaingan industri yang semakin kompetitif.

PT Indra Karya (Persero) juga berusaha untuk terus menyempurnakan teknologi yang telah dimilikinya dan pengadaan peralatan berbasis TI untuk dapat memenuhi tuntutan pasar. Perusahaan pun terus meningkatkan dan mengembangkan perangkat keras maupun perangkat lunak.

Kepedulian perusahaan terhadap IT diwujudkan dengan :

1. Dapur proposal online (e-prop) yang melayani penyusunan proposal untuk pemasaran di seluruh Divisi.
2. Website perusahaan yang terkoneksi dengan portal BUMN online

INFORMATION TECHNOLOGY

The role of information technology (IT) these days is inseparable from all business activities due to the practicality and efficiency it offers. Every company is obliged to implement IT for the sake of better productivity so that the company can maintain its position amid the increasingly tougher industrial competition.

PT Indra Karya (Persero) always tries to improve its technological assets and IT-based equipment procurement to answer to market demands. The Company consistently improve and develop its hardware and software.

The Company's concern with IT manifests in :

1. An online proposal platform (e-prop) which serves proposal writing for marketing across all Divisions.
2. A company website connected to the online State-owned Enterprises portal.

3. Tersedianya online EKPP (Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Proyek) yang berbasis *web-online* sebagai wadah monitoring pelaksanaan proyek.
 4. Inisiasi penerapan *Enterprise Resource Planning* (ERP) untuk menyajikan sistem akuntansi yang terkomputerisasi sehingga tercapai efisiensi kinerja yang lebih baik.
 5. Penyempurnaan perangkat keras maupun perangkat lunak untuk pelaksanaan proyek (*engineering software & hardware*).
 6. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan penggunaan dan penerapan *Engineering Software* seperti *Building Information Modelling* (BIM) pada pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur.
3. A web-based online Project Implementation Activity Evaluation system to monitor project implementation.
 4. The implementation of enterprise resource planning (ERP) to present a computerized accounting system in order to improve performance efficiency
 5. The improvement of engineering software and hardware for project implementation
 6. Increasing the competence of Human Resources (HR) through trainings on the use and application of Engineering Software such as Building Information Modeling (BIM) in the implementation of infrastructure projects.



04

ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT ANALYSIS AND DISCUSSION



TINJAUAN UMUM

Sepanjang Tahun 2019, perekonomian global dalam kondisi melemah karena berlangsungnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Kondisi tersebut berimbas kepada pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Kondisi global juga menyebabkan Indonesia mengalami tekanan yang berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 5,02%.

Komitmen Pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, sudah dilakukan sejak lima tahun terakhir. Mengacu data Kementerian Keuangan, untuk tahun 2019, pemerintah menganggarkan Rp. 415 triliun. Angka ini mengalami kenaikan 1,04% dari anggaran tahun 2018. Sebelumnya, secara berturut-turut sejak tahun 2015 naik 65,5% menjadi sebesar Rp. 256,1 triliun, dan tahun 2016 meningkat 5,1% menjadi Rp. 269,1 triliun. Kemudian tahun 2017 bertambah 44,3% menjadi Rp. 388,3 triliun, dan tahun 2018 tumbuh 5,8% menjadi Rp. 410,7 triliun.

Alokasi anggaran infrastruktur selama tahun 2019 itu ditargetkan bisa menyelesaikan proyek pembangunan/rekonstruksi jembatan dengan panjang 27.067 km, pembangunan bandara baru sebanyak 4 unit, jaringan irigasi 162.000 hektar, pembangunan bendungan sebanyak 48 unit dan rekonstruksi pelebaran jalan sepanjang 2.007 km.

Peningkatan anggaran tersebut akan memberikan peluang yang besar bagi bisnis jasa konsultan ke depan terutama target alokasi anggaran yang menyasar sektor infrastruktur

GENERAL OVERVIEW

Throughout 2019, the global economy remained under pressure due to the trade war between the US and China, which impacted on economic growth all over the world. The condition also resulted in the weakening of Indonesia's economic growth, with the country only reaching economic growth of 5.02%.

The Government's commitment to boost economic growth through infrastructure development had manifested in the past five years. According to data from the Ministry of Finance, in 2019 the government budgeted Rp. 415 billion for infrastructure development, 1.04% higher than the 2018 budget. Previously, in 2015 the infrastructure budget was raised by 65.5% to Rp. 256.1 trillion, with a 5.1% increase in to Rp. 269.1 trillion in 2016, 44.3% to Rp. 388.3 trillion in 2017, and 5.8% to Rp. 410.7 trillion in 2018.

The 2019 infrastructure budget allocation was expected to complete the development of bridge projects are 27,067 km, 4 new airports, 162,000 hectares of irrigation network, 48 dams, and the expansion of 2,007 km of roads.

Such budget increase will provide great opportunities for the consulting services sector in the future, especially given that the target of infrastructure budget allocation that directly

untuk kepentingan hajat hidup masyarakat Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki luas wilayah yang terdiri dari 17.000 pulau dan memiliki ribuan jaringan irigasi, jalan dan jembatan yang memerlukan pembangunan rekonstruksi.

TINJAUAN OPERASIONAL

Sepanjang tahun 2019 Perseroan telah mengikuti sebanyak 221 proyek senilai Rp. 509,96 miliar. Dari jumlah tender tersebut, Perseroan memenangkan 88 proyek senilai Rp. 154,17 miliar atau sebesar 58,1% dari anggaran tahun 2019 yang mencapai Rp. 265,25 miliar.

Sementara itu nilai kontrak yang berhasil diperoleh Perseroan selama tahun 2019 mencapai Rp. 422,75 miliar yang terdiri dari kontrak proyek baru sebesar Rp. 154,17 miliar dan kontrak proyek lanjutan sebesar Rp. 268,58 miliar. Realisasi kontrak baru tersebut mencapai 58,1% dan kontrak proyek lanjutan mencapai 100,7% dari target RKAP tahun 2019. Sehingga total nilai kontrak yang dicapai Perseroan sepanjang tahun 2019 sebesar 79,5% terhadap RKAP.

impacts on the life of the Indonesian people. This is particularly important considering that Indonesia consists of 17,000 islands and has thousands of irrigation networks, roads, and bridges in need of reconstruction.

OPERATIONAL OVERVIEW

In 2019, the Company was involved in 221 project tenders worth Rp. 509.96 billion, of which it won 88 projects worth Rp. 154.17 billion, or 58% of its 2019 budget amounting to Rp. 265.25 billion.

In total, the Company obtained Rp. 422.75 billion worth of contracts in 2019, consisting of Rp. 154.17 billion in new contracts and Rp. 268.58 billion in advanced contracts, or 58.1% and 100.7% of the Company's 2019 Corporate Work and Budget Plan respectively. As a whole, the value of the Company's contracts in 2019 amounted to 79.5% of the target set in the Corporate Work and Budget Plan.

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN REALISASI 2018 DAN 2019 RESEARCH AND DEVELOPMENT PROGRAMS REALIZATION IN 2018 AND 2019

No	Uraian Description	Realisasi Tahun 2018 Realization in 2018	Anggaran Tahun 2019 2019 Budget	Realisasi Tahun 2019 Realization in 2019	% Realisasi 2019 terhadap Tahun 2018 % of Realization in 2019 against 2018 Budget	% Realisasi 2019 Terhadap Tahun 2019 % of Realization in 2019 against 2019 Budget
1	Lelang yang diikuti Auctions the Company participated in	426.325,00 (129 proyek) (129 projects)	590.074,00 (104 proyek) (104 projects)	509.956,00 (135 proyek) (135 projects)	132,52 72,58	95,74 92,78
2	Lelang yang dimenangkan Auctions won by the Company	207.236,37 (75 proyek) (75 projects)	265.250,00 (64 proyek) (64 projects)	154.167,00 (88 proyek) (88 projects)	74,39 93,33	58,12 93,33
3	% lelang yang dimenangkan: % of auctions won: Nilai Rupiah Value in Rupiah Jumlah proyek Number of Projects	48,61 58,14	44,95 61,54	30,23 39,82	56,14 68,49	60,71 64,71
4	Penunjukan Appointments	-	-	-	-	-

REALISASI PEROLEHAN KONTRAK DAN RKAP 2019 CONTRACT REALIZATION AND CORPORATE WORK AND BUDGET PLAN IN 2019 (Dalam Jutaan Rupiah / In Millions of Rupiah)

Uraian Description	Realisasi 2018 Realization in 2018	RKAP 2019 2019 Budget	Realisasi 2019 Realization in 2019	% Realisasi 2019 Terhadap RKAP 2018 % of Realization in 2019 against 2018 Budget	% Realisasi 2019 Terhadap 2019 % of Realization in 2019 against 2019 Budget
Kontrak Lanjutan Advanced Contracts	237.196	266.778	268.578	113,23	100,67
Kontrak Baru New Contracts	207.236	265.250	154.167	74,36	58,12
Total Kontrak Total Contracts	444.432	532.028	422.745	95,12	79,46

PEROLEHAN KONTRAK BARU BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN TAHUN 2019**NEW CONTRACTS BASED ON TYPE OF WORK IN 2019**

(Dalam Jutaan Rupiah / In Millions of Rupiah)

No	Uraian Description	Realisasi Tahun 2018 Realization in 2018	Anggaran Tahun 2019 Realization in 2019	Realisasi Tahun 2019 Realization in 2019	% Realisasi 2019 Terhadap Tahun 2018 % of Realization in 2019 against 2018 Budget	% Realisasi 2019 Terhadap Tahun 2019 % of Realization in 2019 against 2019 Budget
1	Desain Design	60.836	65.711	46.456	76,36	70,70
2	Survei & Investigasi Survey & Investigation	18.044	18.134	11.966	66,31	65,98
3	Studi Kelayakan Feasibility Study	41.261	15.995	32.181	77,99	201,20
4	Supervisi Supervision	81.867	150.693	49.162	60,05	32,62
5	Lain-lain Others	4.590	7.000	11.761	256,24	168,01
6	Sektor baru lainnya Other New Sectors	639	7.717	2.641	413,30	34,23
	Jumlah Total	207.236	265.250	154.167	74,39	58,12
	PPn 10% 10% VAT	20.723	26.525	15.416	74,39	58,12
	Harga Kontrak Value of Contract	227.960	291.775	169.583	74,39	58,12

PEROLEHAN KONTRAK BARU BERDASARKAN SEKTOR PEKERJAAN**NEW CONTRACTS BASED ON SECTOR OF WORK**

(Dalam Jutaan Rupiah / In Millions of Rupiah)

No	Uraian Description	Realisasi Tahun 2018 Realization in 2018	Anggaran Tahun 2019 2019 Budget	Realisasi Tahun 2019 Realization in 2019	% Realisasi 2019 terhadap Tahun 2018 % of Realization in 2019 against 2018 Budget	% Realisasi 2019 Terhadap Tahun 2019 % of Realization in 2019 against 2019 Budget
1	Sipil Civil Engineering	165.166	162.478	121.700	73,68	74,90
2	Jalan dan Jembatan Roads and Bridges	21.736	55.160	2.571	11,83	4,66
3	Energi Energy	11.428	19.925	6.649	58,18	33,37
4	Bangunan/gedung Buildings	8.267	15.610	16.269	196,78	104,22
5	Lain-lain Others	-	4.360	4.337	100,00	99,46
6	Sektor Baru Lainnya Other New Sectors	639	7.717	2.641	413,30	34,23
	Jumlah Total	207.236	265.250	154.167	74,39	58,12
	PPN 10% 10% VAT	20.723	26.525	15.416	74,39	58,12
	Harga Kontrak Value of Contract	227.960	291.775	169.583	74,39	58,12

PENJUALAN/PRODUKSI

Realisasi produksi/penjualan Perseroan pada tahun 2019 sebesar Rp. 191,113 miliar atau 86,3% terhadap anggaran tahun 2019 dan sebesar 116,0% dari realisasi produksi/penjualan tahun 2018. Realisasi produksi penjualan tersebut terdiri dari

SALES/PRODUCTION

Realization of the Company's sales/production in 2019 amounted to Rp. 191.113 billion, or 86.3% of its 2019 budget and 116.0% of its sales/production realization in 2018. The sales/production realization consisted of Rp. 116.309 billion

produksi proyek lanjutan sebesar Rp. 116.309 miliar atau 93,1% terhadap anggaran 2019 dan proyek baru sebesar Rp. 74.804 miliar atau 77,4% terhadap anggaran tahun 2019.

worth of advanced project production, or 93.1% of the 2019 budget, and Rp. 74.804 billion worth of new projects, or 77.4% of the 2019 budget.

REALIASI PENJUALAN TERHADAP RKAP 2019

REALIZATION OF SALES AGAINST WORK AND CORPORATE BUDGET IN 2019

(Dalam Jutaan Rupiah / In Millions of Rupiah)

No	Uraian Description	Realisasi Tahun 2018 Realization in 2018	Anggaran Tahun 2019 Budget	Realisasi Tahun 2019 Realization in 2019	% Realisasi 2019 terhadap Tahun 2018 % of Realization in 2019 against 2018 Budget	% Realisasi 2019 Terhadap Tahun 2019 % of Realization in 2019 against 2019 Budget
1	Proyek Lanjutan Advanced Projects	102.021	124.878	116.309	114,0	93,1
2	Proyek Baru New Projects	62.727	96.695	74.804	119,25	77,4
	Jumlah Total	164.748	221.451,9	191.113	116	86,3

PENDAPATAN PER SEGMENT

Sepanjang tahun 2019, Perseroan membukukan total pendapatan sebesar Rp. 191.112.636.414, naik dibandingkan periode tahun 2018 sebesar Rp. 164.747.962.138.

Pendapatan dari pekerjaan Supervisi sebesar Rp. 74.518.247.236 sekaligus memberikan kontribusi tertinggi terhadap total pendapatan Perseroan dibandingkan beberapa segmen lain, atau 38,99%. Kemudian kontribusi pendapatan pekerjaan Desain sebesar 34,37% atau Rp. 65.678.982.325 terhadap total pendapatan Perseroan sepanjang tahun 2019.

Sementara itu jenis Studi Kelayakan memberikan kontribusi Rp. 22.471.048.225 atau 11,76%, kontribusi pendapatan Survei dan Investigasi sebesar Rp. 16.237.932.820 atau 8,49%, dan kontribusi jenis lainnya sebesar Rp. 12.206.425.808 atau 6,39%.

INCOME PER SEGMENT

In 2019, the Company accounted Rp. 191,112,636,414 in total income, higher than Rp. 167,747,962,138 in 2018.

Income from Supervision work amounted to Rp. 74,518,247,236 and provided the highest contribution to the Company's total income with 38.99%. Design work contributed Rp. 65,678,982,325, or 34.37% of the Company's total income in 2019.

At the same time, Feasibility Study work contributed Rp. 22,471,048,225, or 11.76% of the Company's income, while Survey Investigation work contributed Rp. 16,237,932,820 or 8.49% and others contributed Rp. 12,206,425,808 or 6.39%.

KONTRIBUSI PER JENIS TERHADAP TOTAL PENDAPATAN TAHUN 2019

CONTRIBUTION PER TYPE TO TOTAL INCOME IN 2019

(Dalam Jutaan Rupiah / In Millions of Rupiah)

Segmen Pendapatan Income Segment	Pendapatan Per Segmen Income Per Segment	% Terhadap Total Pendapatan % of Total Income
Desain Design	Rp. 65.678.982.325	34,37
Survei & Investigasi Survey & Investigation	Rp. 16.237.932.820	8,49
Supervisi Supervision	Rp. 74.518.247.236	38,99
Study Kelayakan Feasibility Study	Rp. 22.471.048.225	11,76
Lainnya Others	Rp. 12.206.425.808	6,39
Jumlah Total	Rp. 191.112.636.414	100

TINJAUAN KEUANGAN

Berdasarkan evaluasi yang mengacu Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, maka diperoleh hasil bahwa kinerja Perseroan pada tahun 2019 dalam kategori "SEHAT" dengan peringkat AA dan jumlah skor 84,5. Dalam evaluasi tersebut salah satu indikator penilaian yang paling besar nilainya adalah aspek keuangan.

FINANCIAL OVERVIEW

Based on an evaluation in accordance with Decree of the Minister of State-owned Enterprises No. Kep-100/MBU/2010 on 4 June 2002 on the Indicators of State-owned Enterprises Assessment, in 2019 the Company was found to be in a "Healthy" condition with an AA rating and a score of 84.5%. The financial aspect was one of the indicators with the highest values in the evaluation.

SKOR PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN TAHUN 2019
COMPANY ASSESSMENT SCORE IN 2019

No	Aspek Penilaian <i>Aspect of Assessment</i>	Skor <i>Score</i>
1	Keuangan <i>Financial</i>	58,5
2	Operasional <i>Operational</i>	12,0
3	Administrasi <i>Administration</i>	14,0
	Jumlah <i>Total</i>	84,5

Tinjauan keuangan selanjutnya membahas tentang kinerja keuangan Perusahaan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Furthermore, this financial overview will discuss the Company's financial performance according to its Financial Report, which is presented in accordance to the Statement of Financial Accounting Standards commonly applicable in Indonesia as of the year ended on 31 December 2019.

Laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Indra Karya (Persero) tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The 2019 Financial Report of PT Indra Karya (Persero) was audited by Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Public Accounting Firm with reasonable assurance in all material aspects for the year ended on 31 December 2019, particularly regarding the Company's financial position and cashflow for the year ended on the aforementioned date, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

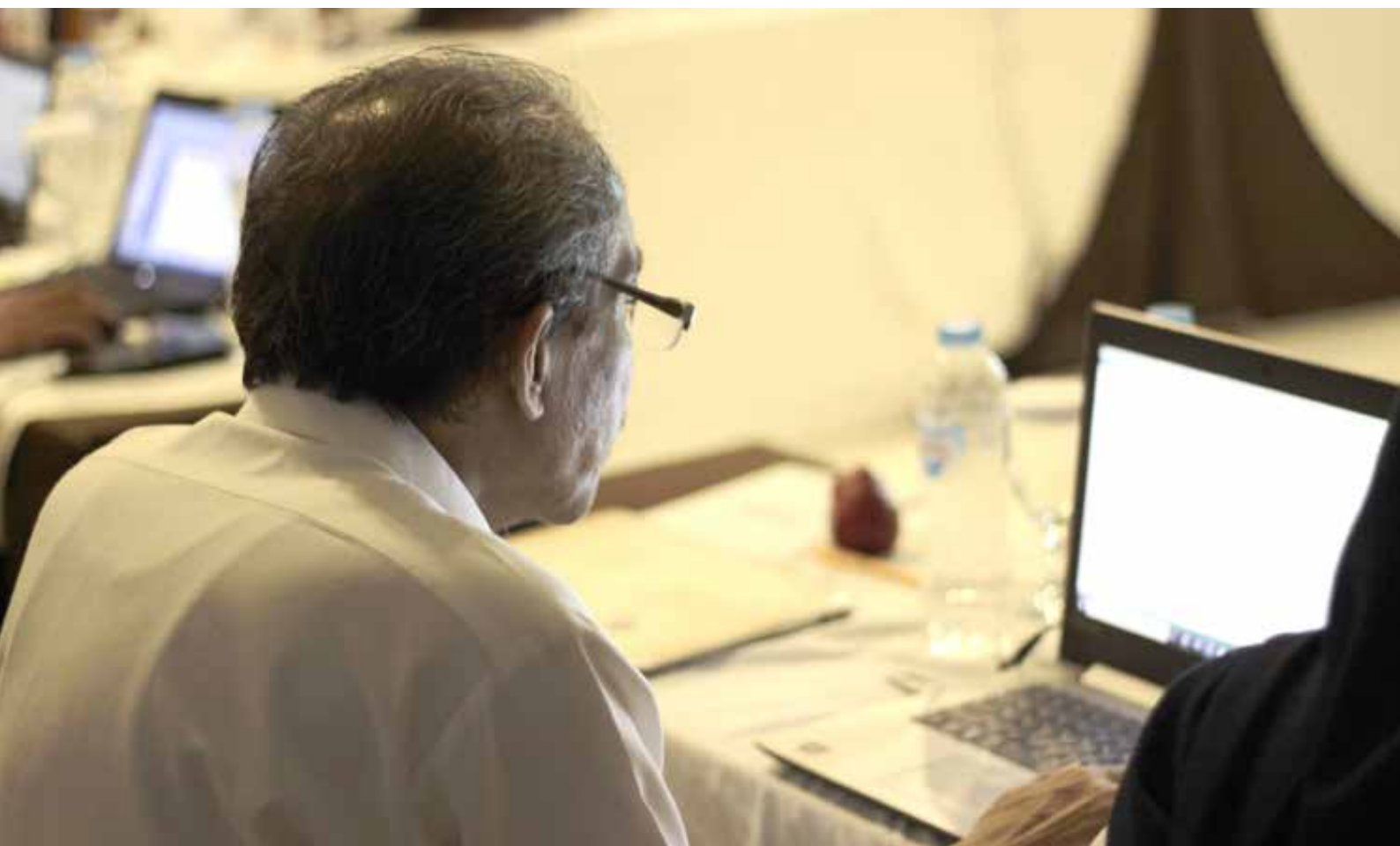
Bahasan mengenai tinjauan keuangan Perseroan akan disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019.

Discussion on the Company's financial overview will be presented by taking into consideration explanation in the notes in the Company's Financial Report as an inseparable part of the Company's 2019 Annual Report.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 (Dalam Jutaan Rupiah / In Millions of Rupiah)

Uraian	2019	2018	Description
Pendapatan:			<i>Income:</i>
Desain	65.678.982.325	53.751.515.504	<i>Design</i>
Survei & Investigasi	16.237.932.820	14.188.279.447	<i>Survey & Investigation</i>
Supervisi	74.518.247.236	72.371.791.141	<i>Supervision</i>
Studi Kelayakan	22.471.048.225	12.551.434.765	<i>Feasibility Study</i>
Lainnya	12.206.425.808	11.884.941.281	<i>Others</i>
Jumlah Pendapatan	191.112.636.414	164.747.962.138	<i>Total Income</i>

Beban Pokok Pendapatan	136.372.450.177	113.646.901.302	<i>Cost of Goods Sold</i>
Laba Kotor	54.740.186.237	51.101.060.836	<i>Gross Profit</i>
Beban Usaha	(42.284.967.327)	(36.524.362.880)	<i>Operating Expenses</i>
Laba Usaha	12.961.538.040	16.053.055.896	<i>Operating Profit</i>
Penghasilan lain	2.884.506.865	1.045.545.514	<i>Other Income</i>
Laba sebelum bunga, pajak, Depresiasi & Amortisasi (EBITDA)	17.306	15.827	<i>Earning Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization (EBITDA)</i>
Laba tahun Berjalan	10.909.223.194	10.017.845.537	<i>Net Profit for the Year</i>
Laba Komprehensif tahun berjalan	9.426.423.681	8.509.805.857	<i>Comprehensive Net Profit</i>



TOTAL PENDAPATAN

Sepanjang tahun 2019 Perseroan berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp. 191.112.636.414 atau naik 16,00% dari Rp. 164.747.962.138 yang dicapai pada tahun 2018. Meningkatnya pendapatan karena produk Perseroan yaitu desain, survei & Investigasi, supervisi, studi kelayakan secara keseluruhan mengalami kenaikan.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

Perseroan mencatat kenaikan beban pokok pendapatan menjadi Rp. 136.372.450.177 dari Rp. 113.646.901.302 terutama karena kenaikan upah tenaga kerja, sub konsultasi dan biaya operasional lapangan.

TOTAL INCOME

In 2019, the Company accounted Rp. 191,112,636,414 in operational income, 16.00% higher than Rp. 164,747,962,138 in 2018. The increase in income was due to overall increases in the Company's products, namely Design, Survey & Investigation, Supervision, and Feasibility Study.

COST OF GOODS SOLD

The Company recorded an increase in cost of goods sold to Rp. 136,372,450,177 from Rp. 113,646,901,302, especially due to increasing wages, sub-consulting fees, and field operational costs.

LABA KOTOR

Perseroan berhasil membukukan kenaikan laba kotor sebesar 7,01% menjadi Rp. 54.740.186 dari Rp. 51.101.060.836.

BEBAN USAHA

Perseroan membukukan kenaikan beban usaha menjadi Rp. 42.284.967.327 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 36.524.362.880. Meningkatnya jumlah beban usaha Perseroan karena kenaikan biaya pegawai, biaya umum & administrasi dan adanya penyusutan.

LABA USAHA

Dengan adanya kenaikan beban usaha maka laba usaha Perseroan sepanjang tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp. 12.961.538.040 dari sebelumnya Rp. 16.053.055.896.

PENGHASILAN LAIN

Sepanjang tahun 2019 Perseroan memperoleh penghasilan lain sebesar Rp. 2.884.506.865, sedangkan pada tahun 2018 Perseroan menanggung beban lain sebesar Rp. 1.045.545.514. Perseroan memperoleh penghasilan lain terutama hasil dari bunga deposito dan pendapatan lain bersih sebesar Rp. 3.128.421.482.

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN

Sepanjang tahun 2019 Perseroan berhasil membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp. 10.909.223.194, naik 8,8% dari perolehan laba bersih tahun 2018 sebesar Rp. 10.017.845.537.

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Perseroan membukukan laba bersih tahun berjalan selama tahun 2019 sebesar Rp. 9.426.423.681, naik dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp. 8.509.805.857.

LABA BERSIH PER SAHAM

Jumlah laba bersih Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 4.713.212, naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp. 4.254.903.

GROSS PROFIT

The Company managed to post a gross profit increase of 7.01% to Rp. 54,740,186 from Rp. 51,101,060,836.

OPERATING EXPENSES

The Company accounted an increase in operating expenses to Rp. 42,284,967,327 from Rp. 36,524,363,880 in the previous year. The increase was due to increasing employee costs, general and administrative expenses, and depreciation.

OPERATING PROFIT

With the increasing operating expenses, the Company's operating profit in 2019 dropped to Rp. 12,961,538,040 from Rp. 16,053,055,896 in the previous year.

OTHER INCOME

In 2019, the Company accounted Rp. 2,884,506,865 in other income, while in 2018 it accounted Rp. 1,045,545,514 in other expenses. The Company obtained other income mainly from deposit interest rates and other net income amounting to Rp. 3,128,421,482.

PROFIT FOR THE YEAR

In 2019, the Company accounted Rp. 10,909,223,194 in profit for the year, up 8.8% from Rp. 10,017,845,537 in 2018.

COMPREHENSIVE PROFIT FOR THE YEAR

The Company accounted Rp. 9,426,423,681 in net profit for the year in 2019, higher than Rp. 8,509,805,857 in 2018.

NET PROFIT PER SHARE

The Company's net income per share as of 31 December 2019 amounted to Rp. 4,713,212, up from Rp. 4,254,903 in 31 December 2018.

Posisi Keuangan	2019	2018	Financial Position
Total Aset Lancar	127.569.064.330	88.854.599.597	Total Current Assets
Total Aset Tidak Lancar	114.020.013.184	91.915.660.657	Total Non-Current Assets
Total Aset	241.589.077.514	180.770.260.254	Total Assets
Total Liabilitas Lancar	120.062.466.630	75.232.894.147	Total Current Liabilities
Total Liabilitas Tidak Lancar	39.348.569.917	32.596.258.913	Total Non-Current Liabilities
Total Liabilitas	159.411.036.547	107.829.153.060	Total Liabilities
Total Ekuitas	82.178.040.967	72.941.107.194	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	241.589.077.514	180.770.260.254	Total Liabilities and Equity

TOTAL ASSET LANCAR

Pada 31 Desember 2019 total aset lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar 47,88% menjadi Rp. 127.569.064.330 dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp. 88.854.599.597. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh melonjaknya kas dan bank sebesar Rp. 42.355.149.791

TOTAL CURRENT ASSETS

On 31 December 2019, the Company's total current assets increased by 47.88% to Rp. 127,569,064,330 from Rp. 88,854,599,597 in 2018. The increase was primarily caused by the Company's increasing cash and cash in bank amounting to Rp. 42,355,149,791, gross invoices from service users

dan tagihan bruto pengguna jasa yang mencapai Rp. 53.697.225.165 serta kenaikan piutang lain-lain menjadi sebesar Rp. 12.803.971.356.

ASET TIDAK LANCAR

Aset tidak lancar Perseroan pada akhir 2019 juga meningkat menjadi Rp. 114.020.013.184 atau naik 24,04% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp. 91.915.660.657. Kenaikan itu disebabkan terutama oleh kenaikan aset ventura bersama menjadi Rp. 22.162.899.726 dari sebelumnya Rp. 3.826.367.898. Selain itu, kenaikan total aset tidak lancar juga disebabkan oleh kenaikan aset tetap menjadi Rp. 91.670.799.729 dari Rp. 87.852.238.760 pada tahun 2018.

TOTAL ASET

Penambahan yang terjadi pada total aset lancar dan total aset tidak lancar menyebabkan total aset Perseroan pada 2019 juga melonjak menjadi Rp. 241.589.077.514 dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp. 180.770.260.254, atau naik sebesar 33,64%.

LIABILITAS LANCAR

Liabilitas lancar Perseroan pada tahun 2019 meningkat sebesar 59,58% menjadi Rp. 120.062.466.630 dari Rp. 75.232.894.147 pada tahun 2018. Peningkatan itu terutama karena melonjaknya beban yang masih harus dibayar sebesar Rp. 46.575.998.843 dari Rp. 22.096.972.732 dan kenaikan liabilitas lain yang pada tahun 2019 mencapai Rp. 39.347.221.725 sedangkan tahun 2018 sebesar Rp. 12.794.935.902.

LIABILITAS TIDAK LANCAR

Perseroan juga membukukan liabilitas tidak lancar meningkat sebesar 20,71% pada tahun 2019 menjadi Rp. 39.348.569.917 dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp. 32.596.258.913. Kenaikan liabilitas tidak lancar disebabkan oleh meningkatnya liabilitas lainnya sebesar Rp. 23.499.475.578 dari Rp. 18.154.736.649.

TOTAL LIABILITAS

Dengan meningkatnya total liabilitas lancar dan tidak lancar, maka total liabilitas Perseroan pada 2019 menjadi Rp. 159.411.036.547 sedangkan tahun 2018 tercatat Rp. 107.829.153.060.

TOTAL EKUITAS

Jumlah ekuitas Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp. 82.178.040.967 dari Rp. 72.941.107.194 pada posisi 2018 atau naik 12,66%. Kenaikan tersebut terutama karena meningkatnya saldo laba sebesar Rp. 22.870.313.907 dari posisi sebelumnya sebesar Rp. 12.150.580.621.

ARUS KAS

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas menggambarkan besarnya aliran kas yang masuk dan keluar perusahaan dalam mendanai kegiatan perusahaan dalam tahun 2019. Posisi kas pada akhir 2019 mencapai Rp. 42.355.149.791, terjadi kenaikan kas sebesar Rp. 17.047.127.671 dibandingkan akhir tahun 2018 sebesar Rp. 25.308.022.120.

amounting to Rp. 53,697,225,165, and other receivables amounting to Rp. 12,803,971,356.

NON-CURRENT ASSETS

In 2019, the Company's non-current assets also increased by 24.04% to Rp. 114,020,013,184 from Rp. 91,915,660,557 in 2018. The increase was primarily caused by an increase in joint venture assets to Rp. 22,162,899,726 from Rp. 3,826,367,898. In addition, the increase was also caused by an increase in fixed assets to Rp. 91,670,799,729 from Rp. 87,852,238,760 in 2018.

TOTAL ASSETS

Increases in the Company's total current and non-current assets caused its total assets in 2019 to grow by 33.64% to Rp. 241,589,077,514 from Rp. 180,770,260,254 in 2018.

CURRENT LIABILITIES

In 2019, the Company's current liabilities increased by 59.58% to Rp. 120,062,466,630 from Rp. 75,232,894,147 in 2018. The increase was primarily caused by increases in payable expenses to Rp. 46,575,998,843 from Rp. 22,096,972,732 in 2018 and other liabilities to Rp. 39,347,221,725 from Rp. 12,794,935,902 in 2018.

NON-CURRENT LIABILITIES

In 2019, the Company also accounted a 20.71% increase in non-current liabilities to Rp. 39,348,569,917 from Rp. 32,596,258,913 in 2018. The increase was due to an increase in other liabilities to Rp. 23,499,475,578 from Rp. 18,154,736,649.

TOTAL LIABILITIES

With the increases in total current and non-current liabilities, the Company's total liabilities in 2019 were recorded at Rp. 159,411,036,547, higher than Rp. 107,829,153,060 in 2018.

TOTAL EQUITY

The Company's total equity in 2019 increased by 12.66% to Rp. 82,178,040,967 from Rp. 72,941,107,194 in 2018. The increase was due to an increase in retained earnings to Rp. 22,870,313,907 from Rp. 12,150,580,621 in the previous year.

CASHFLOW

The Company's Statement of Cash Receipts and Payments showed the amount of cash in and out of the Company in financing its activities in 2019. The Company's 2019 cash position was recorded at Rp. 42,355,149,791 with an increase of Rp. 17,047,127,671 from Rp. 25,308,022,120 in 2018.

LAPORAN ARUS KAS 2019 DAN 2018 STATEMENT OF CASHFLOW 2019 AND 2018

Uraian	2019	2018	Description
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas Operasi	8.844.805.096	(5.000.756.595)	Net cashflow from operational activities
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas Investasi	(23.270.774.004)	(785.404.188)	Net cashflow used in investment activities
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas Pendanaan	31.473.096.579	2.984.337.634	Net cashflow from financing activities
Kenaikan Bersih Kas Dan Setara Kas	17.047.127.671	(2.801.823.149)	Net Increase in Cash and Cash Equivalents
Kas Dan Setara Kas:			Cash and Cash Equivalents
Awal Tahun	25.308.022.120	28.109.845.269	Beginning of the Year
Akhir Tahun	42.355.149.791	25.308.022.120	End of the Year
Kas dan Setara Kas akhir Tahun terdiri dari:			Cash and Cash Equivalents at the End of the Year consisting of:
Kas			
Bank	666.751.528	224.833.809	Cash on Hand
Jumlah	41.688.398.263	25.083.188.311	Cash in Bank
	42.355.149.791	25.308.022.120	Total

RASIO KEUANGAN

Perseroan senantiasa berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan laba serta menjaga kemampuannya dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya serta mendayagunakan aset agar mampu menghasilkan keuntungan. Kemampuan Perseroan tersebut di atas dapat dihitung dengan menggunakan beberapa rasio keuangan sebagai berikut:

I. Rasio Likuiditas

Rasio ini memberikan gambaran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio likuiditas yang digunakan Perseroan adalah:

1. Cash Ratio
2. Quick Ratio
3. Current Ratio

Berdasarkan rasio likuiditas tahun 2019, rasio kas (*cash ratio*) Perseroan mengalami kenaikan menjadi 35,28 dari 33,64. Sedangkan rasio lancar atau *current ratio* mengalami penurunan dari 118,11 menjadi 106,25. Perseroan mampu mempertahankan rata-rata rasio likuiditasnya di atas 1,2. Rasio lancar yang menunjukkan nilai di atas 1 kali, berarti bahwa Perseroan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk membayar utang-utang jangka pendeknya.

II. Rasio Aktivitas

1. *Collection Periode* (dalam satuan hari)
kolektibilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menagih piutang (*collection period*). Perputaran piutang pada tahun 2019 yaitu selama 109 hari, tidak berubah dari tahun 2018.
2. *Total Assets to Turn Over* {dalam satuan kali (x)}
Rasio ini menggambarkan kemampuan masing-masing komponen aktiva dalam menghasilkan pendapatan / produksi. Berdasarkan *total assets to turnover* pada tahun 2019 adalah 0,79 x, turun dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,91 x.

FINANCIAL RATIOS

The Company always makes the effort to increase revenue and profit growth and maintain its ability to fulfill its obligations and empower its assets in order to be profitable. The Company's aforementioned abilities can be calculated using the following financial ratios:

I. Liquidity Ratios

These ratios reflect the Company's ability to pay its current liabilities.

The liquidity ratios used by the Company are:

1. Cash Ratio
2. Quick Ratio
3. Current Ratio

Based on the Company's 2019 liquidity ratios, its cash ratio increased to 35.28 to 33.64 while its current ratio decreased from 118.11 to 106.25. The Company was able to maintain its average liquidity ratio above 1.2. The current ratio, which showed a number above 1 time, meant the Company had a very adequate ability to pay its current liabilities.

II. Activity Ratio

1. *Collection Period* (in number of days)
Collectability reflects the Company's ability in collecting receivables. The Company's collection period in 2019 was recorded at 109 days, same as in 2018.
2. *Total Assets to Turnover* [in number of times (x)]
This ratio reflects the ability of each asset in generating sales/production. The Company's total assets-to-turnover ratio in 2019 was recorded at 0.79 x, down from 0.91 x in 2018.

III. Rasio *Leverage* atau solvabilitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi seluruh kewajiban perusahaan, ditinjau dari aktiva perusahaan maupun modal sendiri perusahaan.

1. *Debt to Total Assets* (%)

Rasio utang terhadap aset perseroan masih menunjukkan hasil yang baik di bawah 1 kali. Artinya total hutang yang dimiliki Perseroan dapat ditutup oleh seluruh aset yang dimiliki Perseroan. Pada tahun 2019 DAR sebesar 65,98%, naik dari tahun 2018 sebesar 59,65%.

2. *Debt to Equity Ratio* (%)

Pada 2019, rasio liabilitas terhadap ekuitas adalah sebesar 193,98, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 147,83. Dengan nilai rasio liabilitas terhadap ekuitas tersebut, menunjukkan komitmen pemegang saham yang terus berusaha mengakomodir kebutuhan permodalan Perseroan melalui proporsi pembiayaan utang dan modal yang optimal.

IV. Rasio Rentabilitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan komponen aktiva menghasilkan berbagai tingkat laba serta perbandingan saldo laba terhadap pendapatan (produksi).

1. *Profit Margin* (%)

Pada tahun 2019 profit margin perseroan turun menjadi 5,71% dibandingkan tahun 2018 sebesar 6,08%.

2. *Return on Assets* (%)

Kemampuan aset Perusahaan dalam menghasilkan laba pada tahun 2019 tercatat sebesar 4,52% turun sedikit dibandingkan tahun 2018 sebesar 5,54%.

3. *Return on Equity* (%)

Sedangkan kemampuan modal dalam menghasilkan laba tahun 2019 turun menjadi 13,28 dari posisi 15,92 pada 2018.

III. Leverage or Solvability Ratio

This ratio reflects the Company to pay all of its liabilities in terms of assets and capital.

1. Debt to Total Assets Ratio (%)

The Company's debt-to-total assets ratio was still recorded below 1 time, which meant that the Company's debts were covered by its total assets. In 2019, the Company's debt-to-total assets ratio was 65.98%, up from 59.65% in 2018.

2. Debt to Equity Ratio (%)

In 2019, the Company's liabilities-to-equity ratio was recorded at 193.98, higher than 147.83 in 2018. Such a ratio reflected the commitment of the Company's shareholders to always accommodate the Company's capital needs through optimal debt financing and equity proportions.

IV. Rentability Ratio

This ratio reflects the ability of each asset component to generate various levels of profit and compare retained earnings against sales/production

1. Profit Margin (%)

In 2019, the Company's profit margin decreased to 5.71% from 6.08% in 2018.

2. Return on Assets (%)

The ability of the Company's assets to generate profit in 2019 was recorded at 4.52%, slightly down from 5.54% in 2018.

3. Return on Equity (%)

The ability of the Company's equity to generate profit in 2019 dropped to 13.28 from 15.92 in 2018.

TABEL RASIO-RASIO KEUANGAN

TABLE: FINANCIAL RATIOS

Rasio-rasio keuangan	Tahun 2019 (%)	Tahun 2018 (%)	Financial Ratios
Rasio Lancar	106,25	118,11	<i>Current Ratio</i>
Rasio Kas	35,28	33,64	<i>Cash Ratio</i>
Periode Kolektibilitas	109 H	109 H	<i>Collection Period</i>
Total aset : <i>turnover</i>	0,79 x	0,91 x	<i>Total Assets to Turn Over</i>
Rasio Total liabilitas : Total Aset	65,98	59,65	<i>Debt to Total Assets Ratio (DAR)</i>
Rasio Total Liabilitas : Total Ekuitas	193,98	147,83	<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>
Laba Bersih : Total Pendapatan	5,71	6,08	<i>Profit Margin (%)</i>
Laba bersih : Total Aset (ROA)	4,52	5,54	<i>Return On Assets (ROA)</i>
Laba bersih : Total Ekuitas (ROE)	13,28	13,73	<i>Return On Equity (ROE)</i>

REALISASI DAN TARGET 2019

Kinerja Perseroan selama tahun 2019 secara umum membaik. Pos laba/rugi maupun pos posisi keuangan seluruhnya menunjukkan pertumbuhan yang baik. Dari laporan laba/rugi, pos pendapatan, laba usaha, laba bersih tahun berjalan

REALIZATION AND TARGETS IN 2019

The Company's performance in 2019 overall showed improvements, with both profit/loss and financial posts showing adequate growth. Improvements were made in terms of statement of profit and loss, income, operating profit, and

seluruhnya mengalami kenaikan. Demikian juga dari posisi keuangan seperti total aset, total liabilitas dan total ekuitas mengalami peningkatan cukup baik.

Namun apabila dibandingkan dengan RKAP Tahun 2019, kinerja Perseroan pada umumnya berada di bawah target RKAP tersebut. Asumsi yang telah ditetapkan dalam RKAP Tahun 2019 sebagai dasar pelaksanaan, pada kenyataannya hanya sebagian yang dapat terealisasi karena banyak hal terkait dan bergantung kepada kebijakan pemerintah dan keadaan ekonomi moneter yang bersifat makro.

Perseroan pada tahun 2019 membukukan pendapatan sebesar Rp. 191.112,64 juta atau hanya 86,3% terhadap RKAP sebesar Rp. 221.451,9 juta. Sedangkan laba usaha Perseroan sebesar Rp. 12.962 juta atau hanya tercapai 52,13% dari Target RKAP sebesar Rp. 24.864 juta. Sementara itu laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 10.909 juta atau tercapai sebesar 64,7% terhadap laba bersih target RKAP tahun 2019 sebesar Rp. 16.864 juta.

INVESTASI BARANG MODAL

Perusahaan membutuhkan pembiayaan untuk berinvestasi di bidang sarana, prasarana maupun berinvestasi barang modal dalam upaya mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Di dalam kegiatan investasi barang modal pada tahun 2019, sumber dana yang digunakan untuk memenuhi kegiatan investasi tersebut berasal dari sumber internal maupun eksternal Perseroan.

Sepanjang tahun 2019, realisasi Perseroan untuk investasi barang modal sebesar Rp. 4.934 miliar. Dana tersebut untuk membeli aset berupa bangunan/gedung, peralatan survei/proyek, inventaris kantor dan kendaraan operasional.

Rincian investasi barang modal dapat dilihat pada tabel berikut:

net profit for the year, as were in terms of financial position including total assets, total liabilities, and total equity.

However, in comparison the Company's overall performance was below the target set in the 2019 Corporate Work and Budget Plan. In reality, only half of the assumptions set in the 2019 Corporate Work and Budget Plan as a base of implementation was able to be realized due to several factors related to and depending on the Government's policy and the overall macroeconomic condition.

In 2019, the Company's accounted Rp. 191,112.64 million in revenue, only 86.3% of the target set in the Corporate Work and Budget Plan amounting to Rp. 221,451.9 million, while its operating profit was recorded at Rp. 12,962 million, only 52.13% of the target set in the Corporate Work and Budget Plan amounting to Rp. 24,864 million. At the same time, the Company's net profit after tax was recorded at Rp. 10,909 million, or 64.7% of the target set in the Corporate Work and Budget Plan amounting to Rp. 16,864 million.

CAPITAL GOODS INVESTMENT

The Company requires financing in order to invest in facilities, infrastructure, and capital goods to achieve the established performance targets. In terms of capital goods investment in 2019, the Company's sources of financing came from both internal and external sources.

In 2019, the Company realized Rp. 4,934 billion for capital goods investment. The funds were used to purchase assets including buildings, survey/project equipment, office inventory, and operational vehicles.

Details of the Company's capital goods investment are shown in the following table:

REALISASI INVESTASI TAHUN 2018 DAN 2019
REALIZATION OF INVESTMENT IN 2018 AND 2019
(Dalam Jutaan Rupiah / In Millions of Rupiah)

No	Jenis Investasi Type of Investment	Realisasi 2018 Realization in 2018		RKAP 2019 2019 Corporate Work and Budget Plan		Realisasi 2019 Realization in 2019		Keterangan Information
		Jumlah Satuan Amount	Nilai (Rp.) Value	Jumlah Satuan Amount	Nilai (Rp.) Value	Jumlah Satuan Amount	Nilai (Rp.) Value	
1	Tanah Land	0		1	4.000	0	0	
2	Prasarana Infrastructure	0		1	4.000	0		
3	Bangunan/Gedung Buildings	0		0	0	1	1.977	
4	Peralatan Survei/Proyek Survey/Project Equipment	1	16	2	475	3	573	2 mesin baru & 1 alat pengujian triaxial 2 new machines & 1 triaxial testing tool

5	Investaris Kantor <i>Office Inventory</i>	21	195	54	537	36	1.323	
6	Kendaraan Operasional <i>Operational Vehicles</i>	6	2.008	2	1.030	5	1.061	Roda 4 4-wheeled vehicles
7	Lain-lain <i>Others</i>	0		0	0	0	0	
	Jumlah <i>Total</i>	28	2.219	60	10.042	45	4.934	

KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan atau proses selama periode yang disajikan.

Perseroan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio pinjaman terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara pinjaman bersih dengan modal. Pinjaman bersih adalah jumlah liabilitas berbunga sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan dikurangi dengan jumlah kas dan bank serta deposito yang dibatasi penggunaannya.

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Perseroan memiliki komposisi struktur modal 65,98% berasal dari liabilitas dan 34,02% berupa ekuitas di tahun 2019. Komposisi tersebut mengalami perubahan jika dibandingkan dengan 2018 dengan komposisi 59,65% berasal dari liabilitas dan 40,35% berupa ekuitas. Secara keseluruhan total modal Perseroan selama tahun 2019 meningkat sebesar 12,66%.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Perseroan sepanjang tahun 2019 tidak melakukan ikatan yang material terhadap investasi barang modal.

CAPITAL STRUCTURE POLICY

The Company manages and adjusts its capital structure in accordance with changes in economic conditions. In order to maintain and adjust its capital structure, the Company can choose to either adjust dividend payments to shareholders or issue new shares. There were no changes made in the objectives, policy, or process regarding the Company's capital structure during the period presented in this Annual Report.

The Company evaluates its capital structure through the gearing ratio calculated by dividing net debt by equity. Net debt is the amount of interest-bearing liabilities as presented in the statement of financial position with the amount of cash, cash in bank, and restricted deposits subtracted.

DETAILS OF CAPITAL STRUCTURE

The Company's capital structure in 2019 consisted of 65.98% liabilities and 34.02% equity. The composition only slightly changed from 2018, in which it consisted of 59.65% liabilities and 40.35% equity. Overall, the Company's total capital in 2019 increased by 12.66%.

MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

In 2019, the Company had no material commitment for capital goods investment.



INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SE TELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Selama tahun 2019, Perseroan tidak memiliki informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

ASPEK PEMASARAN**Pangsa Pasar**

- Sektor pemerintah (PUPR, Perhubungan, ESDM) 80%, Sektor BUMN 15%, dan Sektor Swasta 5%.
- Sumber pendanaan dari sektor pemerintah : APBN 70%, LOAN 25%, dan APBD 5%

Strategi Pemasaran

- Membuat kantor-kantor di kota-kota besar Indonesia dan di negara-negara Asia yang telah memiliki kerja sama dengan Perseroan
- *One Brand* AMDK dengan merek Infresh milik Perseroan bersama dengan 11 BUMN lainnya.
- Melakukan kolaborasi dengan perusahaan BUMN dan kerja sama dengan perusahaan asing.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS THAT OCCURRED AFTER THE ACCOUNTING REPORTING DATE

In 2019, the Company had no material information and facts that occurred after the accounting reporting date.

MARKETING ASPECTS**Market Share**

- Government (Ministry of Public Works and Public Housing, Ministry of Transportation, Ministry of Energy and Mineral Resources) 80% State-owned Enterprises 15%, private sector 5%
- Sources of financing from the Government: State Budget 70%, loans 25%, Regional Budget 5%

Marketing Strategies

- Opening offices in major cities in Indonesia and other Asian countries with established partnerships with the Company
- Launching a one-brand bottled water product under the brand name Infresh alongside 11 other State-owned Enterprises
- Conducting collaboration with other State-owned Enterprises and cooperation with foreign companies



KEBIJAKAN DIVIDEN

Selama tahun 2019, Perseroan tidak membagikan sebagian keuntungan atau dividen atas laba bersih yang diperoleh Perseroan sebesar Rp. 10,909 miliar.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN ATAU MANAJEMEN

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham karyawan atau *Employee Stock Ownership Program* (ESOP)

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan tidak melakukan penawaran saham maupun penerbitan obligasi sepanjang tahun 2019. Sehingga tidak ada penggunaan dana hasil penawaran umum.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGAN DUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Sepanjang tahun 2019, Perseroan tidak melakukan transaksi yang sifatnya material dan mengandung benturan kepentingan.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN

Selama tahun 2019, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan. Perseroan tetap patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Hal-hal yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Berdasarkan hasil penilaian manajemen atas kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usaha di masa yang akan datang, dapat disimpulkan bahwa Perseroan tidak memiliki hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

STRATEGI PERUSAHAAN

Strategi Korporasi yang ditetapkan adalah "Strategi Pertumbuhan" yaitu diarahkan untuk meningkatkan keuntungan dan pengembangan dalam mengejar pertumbuhan yang menjurus kepada kemampuan peningkatan laba (*profitabilitas*) serta melaksanakan pengembangan usaha. Sejumlah langkah yang akan ditempuh antara lain:

- Melakukan variasi produk *engineering* untuk sektor pengembangan sumber daya air dan energi dengan target pasar Pemerintah dan BUMN/BUMD.
- Menumbuhkan bidang usaha baru yang berhubungan dan *in-line* dengan bisnis yang digeluti saat ini, yaitu bidang

DIVIDEND POLICY

In 2019, the Company did not pay a dividend on its Rp. 10.909 billion net profit.

EMPLOYEE/MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM

Corporate has no Employee Stock Ownership Program (ESOP)

REALIZATION OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERINGS

The Company did not offer shares, nor did it issue bonds in 2019, and as such there was no realization of proceeds from public offerings.

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS WITH CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

In 2019, the Company did not conduct any material transaction with conflicts of interest.

CHANGES IN LEGISLATION THAT SIGNIFICANTLY AFFECT THE COMPANY'S PERFORMANCE

In 2019, there were no changes in legislation that significantly affected the Company's performance.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICY

In 2019, there were no changes in the accounting policy implemented by the Company. The Company remained compliant to the Financial Accounting Standards established by the Indonesian Institute of Accountants.

INFORMATION ON OPERATIONAL SUSTAINABILITY

Other matters that affect operational sustainability Based on the management's assessment of the Company's ability to ensure operational sustainability in the future, it can be concluded that the Company has no issues that could potentially have a significant impact on its operational sustainability.

COMPANY STRATEGY

The Company implements a Strategy of Growth, which is directed towards improving profitability and development to pursue growth as well as operational development. The measures pursued by the Company include:

- Ensuring a variation of engineering products for the water resource development and energy sectors with the Government and State-owned/Regionally-owned Enterprises as market targets.
- Nurturing the growth of new business fields related to and

usaha developer, Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Air Bersih.

- Mengubah aset yang tidak produktif menjadi produktif.
- Melaksanakan penyempurnaan/perbaikan organisasi dan sistem manajemen.
- Meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, perencanaan strategi dan pengawasan melekat.
- Melaksanakan riset pemasaran yang lebih efektif dan melaksanakan seleksi proyek yang *Profitable, Cashable* dan *Valuable* (PCV).
- Memperkuat posisi keuangan perusahaan dengan memperbaiki struktur permodalan dan dirasa sangat dibutuhkan dalam kelancaran operasional perusahaan

PROSPEK USAHA

Komitmen Pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur ditunjukkan dengan kenaikan alokasi anggaran setiap tahunnya dan tahun 2020 alokasi anggaran sekitar Rp. 415 miliar naik dari Rp. 410 miliar pada 2018. Pembangunan infrastruktur pun dijalankan secara masif menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Karena terjaminnya ketersediaan infrastruktur akan melepaskan Indonesia dari *middle income trap*, sesuai dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kelima untuk Tahun 2015-2019. Arah dan kebijakan utama RPJMN tersebut difokuskan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Hal tersebut menimbulkan peluang bagi perusahaan untuk tetap tumbuh.

in line with the fields the Company engages in, namely Developer, bottled water, and clean water.

- Turning unproductive assets into productive assets.
- Implementing improvements in organization and management system.
- Improving the effectiveness of decision-making, policy formulation, strategic-planning, and attached supervision.
- Conducting more effective market researches and a selection for profitable, cashable, and valuable (PCV) projects
- Strengthening the Company's financial position by improving its capital structure if necessary in order to facilitate the Company's operations

BUSINESS PROSPECT

The Government's commitment to continuing infrastructure development can be seen from the increase in budget allocation every year; in 2020, infrastructure budget allocation was set at Rp. 415 billion, up from Rp. 410 billion in 2018. Infrastructure development has been taking place massively in all regions across Indonesia. The guaranteed availability of infrastructure will free Indonesia from the middle-income trap, as targeted by National Medium-Term Development Plan (RPJMN) V 2015-2016. The primary direction of policy of RPJMN is focused on reducing development inequality between regions, which provides growth opportunities for the Company.



Peningkatan alokasi anggaran infrastruktur yang terus berlanjut menunjukkan betapa pentingnya peran sektor tersebut bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5% pada tahun 2019 kendati adanya ketidakpastian perekonomian global. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah yakin sektor infrastruktur akan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi nasional.

The continuous increase in infrastructure budget allocation shows the importance of the infrastructure sector in stabilizing Indonesia's economic growth above 5% in 2019 despite uncertainty in the global economic. In order to maintain economic growth, the Government believes that the infrastructure sector will contribute to improving the welfare of the people and national economic equality.



Sementara itu prioritas pembangunan infrastruktur masih difokuskan kepada kegiatan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi dan ketahanan pangan. Hal tersebut telah menjadi peluang usaha bagi perusahaan.

The Government's infrastructure development priority is still centered on transportation, energy, and food security, which have provided business opportunities for the Company.

Namun, peluang usaha yang ditimbulkan dari perkembangan infrastruktur tersebut, tidak seluruhnya membawa prospek yang baik bagi kegiatan usaha Perseroan ke depan karena kondisi eksternal bagaimanapun turut berpengaruh terhadap prospek Perseroan. Kondisi eksternal tersebut menyangkut sejumlah hambatan di antaranya:

- Melambatnya perekonomian global yang berimbas pada menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal itu berdampak terhadap defisit transaksi berjalan yang tertekan dan gejolak di sektor keuangan dengan merosotnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing.

However, the opportunities generated by infrastructure development do not always bring positive prospects for the Company's business activities, as external factors tend to affect the Company's prospects. Such external factors can result in various obstacles, including:

- A global economic downturn that resulted in declining economic growth in Indonesia. This would affect the country's current account deficit and dynamics in the financial sector with the rupiah exchange rate weakening against foreign currencies.

- Melemahnya nilai tukar Rupiah disebabkan oleh keluarnya sejumlah besar investor asing baik investasi langsung maupun investasi portofolio akibat kebijakan Bank Sentral atas kenaikan suku bunga obligasi pemerintah.
- Kenaikan harga komoditi impor, baik yang menjadi obyek konsumsi maupun alat produksi. Adapun kenaikan harga alat-alat produksi impor berdampak pada kenaikan harga komoditi yang diproduksi di dalam negeri, sehingga menurunkan daya beli masyarakat.
- Perubahan iklim yang sedang terjadi telah menimbulkan kekeringan di sejumlah kawasan. Kondisi ini telah mengakibatkan penurunan produksi sejumlah komoditi pangan penting yang diikuti dengan kenaikan harga.
- Gejala ekonomi dan perlambatan ekonomi global terus berlanjut di tahun 2019, ditambah ketidakpastian geopolitik diberbagai belahan dunia yang telah menimbulkan berbagai ketidakpastian.
- The weakening of the rupiah exchange caused by the exit of foreign investors, both in direct and portfolio investment, due to the Central Bank's policy of raising the government bond interest rates.
- Increasing prices of imported commodities, both as consumption objects and production tools. An increase in imported production tools would result in higher domestic commodity prices, which would cause purchasing power to decline.
- Climate change, which has caused drought in several regions. This condition has resulted in the declining production of several key food commodities followed by price increases.
- Economic turmoil and global economic downturn that continued in 2019, combined with geopolitical uncertainties in various parts of the world.



05

TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) adalah kunci utama dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan yang menjadi tujuan utama setiap perusahaan. Penerapan GCG yang sistematis, menyeluruh dan senantiasa diawasi, dapat mendorong meningkatnya kinerja dan praktik usaha yang transparan dan bertanggung jawab, sehingga memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Berlandaskan pemahaman tersebut, Perseroan memastikan penerapan GCG yang efektif adalah melalui penetapan organ GCG beserta fungsi dan wewenang masing-masing. Perseroan juga senantiasa menekankan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan bisnis di bidang jasa konsultasi rekayasa (*engineering*). Perseroan pun konsisten mengedepankan keunggulan demi tercapainya persaingan usaha yang sehat.

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang ditetapkan oleh regulator adalah bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi GCG di Perseroan dan merupakan bukti nyata upaya Perseroan dalam menjalankan prinsip kepatuhan. Perseroan juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan GCG dilakukan dengan berlandaskan pada 5 (lima) asas Pedoman Umum GCG dari Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

Kelima asas tersebut adalah: *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (tanggung jawab), *Independence* (kemandirian) dan *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran).

1. *Transparency* (Transparansi)

Perusahaan menerapkan prinsip transparansi dengan mengungkapkan informasi dan kebijakan yang material serta relevan agar kegiatan usaha Perusahaan dapat berjalan secara objektif. Pengungkapan dilakukan secara tepat waktu, disajikan dengan jelas dan melalui medium yang mudah diakses. Perusahaan tetap menyimpan rahasia Perusahaan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku tanpa mengurangi transparansi informasi.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan, maksud dan tujuan Perusahaan. Keputusan yang diambil Perusahaan selalu memperhitungkan posisi pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Untuk mendukung akuntabilitas Perusahaan, penerapan Kode Etik (*Code of Conduct*) terus digalakan kepada seluruh organ Perusahaan dan karyawan.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Good Corporate Governance (GCG) is the primary key in achieving sustainable growth, which is the primary objective of the Company. A systemic, thorough, and well-monitored implementation of GCG can encourage improvements in performance and transparent and responsible business practices, which in turn will provide added values to all shareholders and stakeholders.

Based on that understanding, the Company ensures an effective implementation of GCG by establishing GCG elements with their respective functions and authorities. The Company also always emphasizes the importance of compliance with applicable laws and regulations in engaging in the engineering consulting services sector. In addition, the Company consistently prioritizes excellence in order to create a healthy business competition.

PRINCIPLES OF GOVERNANCE

The Guidelines to the Governance of a Company set by the regulator are an inseparable part of GCG implementation in the Company and is a concrete proof of the Company's effort in implementing compliance. The Company also ensures that GCG implementation is done based on 5 (five) principles of the General Guidelines to GCG from the National Committee on Governance.

The five principles are Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness.

1. Transparency

The Company implements the principle of transparency by disclosing material and relevant information and policy to ensure that its business activities can be run objectively. Disclosure is done in a punctual manner and presented clearly through easily accessible platforms. Nevertheless, the Company still keeps certain matters confidential including office confidentiality and private rights in accordance with applicable laws and regulations without compromising transparency.

2. Accountability

The Company manages its business activities in an appropriate and well-measured manner in accordance with its interests, purposes, and objectives. All decisions made by the Company always take into account the position of shareholders and other stakeholders. To support the Company's accountability, the implementation of a Code of Conduct is consistently promoted to all elements of the Company and its employees.

3. *Responsibility* (Tanggung jawab)

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha selalu penuh dengan tanggung jawab dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan termasuk peraturan internal Perusahaan. Untuk menjadi *Good Corporate Citizen*, Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

4. *Independence* (Kemandirian)

Perusahaan senantiasa bertindak secara independen dalam melakukan kegiatan usahanya. Perusahaan memastikan tidak ada benturan kepentingan, tidak ada pihak yang mendominasi, atau tidak ada tekanan apa pun dari pihak mana pun. Sehingga Perusahaan dapat memelihara objektivitas dan independensi dalam proses pengambilan keputusan.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Perusahaan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan dan mitra bisnis dengan tingkat kesetaraan dan kewajaran yang sama. Selain itu, Perusahaan juga selalu mengupayakan pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan, mulai dari rekrutmen hingga pengembangan karier jangka panjang tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, golongan serta *gender*.

3. Responsibility

In engaging in its business activities, the Company always takes full responsibility and complies with applicable laws and regulations, including the Company's internal regulation. In order to become a Good Corporate Citizen, the Company always implements caution to protect the interests of its shareholders and stakeholders.

4. Independence

The Company always acts independently in carrying out each of its business activities. The Company ensures that there is no conflict of interest, domineering party, nor any form of pressure from any party. As such, the Company can maintain its objectivity and independence when it comes to decision-making.

5. Fairness

The Company treats all stakeholders and business partners equally and reasonably. In addition, the Company also makes the effort to provide equal opportunities to all employees, from recruitment to long-term career development, without ethnic, religious, racial, or gender discrimination.

TUJUAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG:

1. Mengoptimalkan Nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
3. Mendorong agar Organ Persero dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION

1. To optimize the values of State-Owned Enterprises so that the Company has a high-level competitiveness, both domestically and internationally, and is able to maintain its existence in a sustainable manner to achieve the purposes and objectives of State-Owned Enterprises;
2. To encourage the management of State-Owned Enterprises in a professional, efficient, and effective manner that empowers the functions and increase the independence of the Company's elements;
3. To encourage the Company's elements in making decisions and acting with good moral standing, compliance to applicable laws and regulations, and awareness regarding the social responsibilities of State-Owned Enterprises to Stakeholders and the surrounding environments;
4. To improve the contribution of State-Owned Enterprises to the national economy;
5. To create a conducive climate that encourages growing national investment.

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perusahaan mensosialisasikan Pedoman GCG Perusahaan kepada Insan INDRA KARYA sebagai dasar implementasi prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas Perusahaan. Kegiatan

SOCIALIZATION AND INTERNALIZATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The Company promotes its Guide to GCG to all elements of INDRA KARYA as a basis for implementation of GCG principles in the Company's activities. Such socialization is carried out to

sosialisasi dilakukan terhadap pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Sosialisasi terhadap pihak internal dititikberatkan pada adanya pemahaman GCG dan timbulnya kesadaran dan kebutuhan untuk menerapkan GCG secara konsisten. Sosialisasi kepada pihak eksternal ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang cara kerja yang dilaksanakan Perusahaan sesuai prinsip-prinsip GCG. Implementasi Pedoman GCG dilaksanakan secara konsisten dengan didukung adanya laporan dari masing-masing unit kerja secara berkala mengenai implementasi Pedoman dan dikaitkan dengan sistem reward dan punishment yang dikembangkan oleh Perusahaan bagi satuan kerja maupun individu Pegawai.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Indra Karya (Persero) belum menyusun roadmap penerapan GCG. Namun demikian, Perusahaan telah menetapkan tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang dari penerapan GCG di lingkungan Indra Karya (Persero). Tujuan tersebutlah yang menjadi acuan dalam penerapan GCG di Indra Karya (Persero). Tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari penerapan GCG di Indra Karya (Persero) adalah sebagai berikut :

Jangka pendek

1. Memberikan arah yang jelas bagi manajemen Perusahaan dalam mengelola Perusahaan berdasarkan praktek-praktek transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, kemandirian dan kewajiban.
2. Memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja manajemen dalam melaksanakan tata kelola Perusahaan secara baik.
3. Mengetahui secara dini kebutuhan dan posisi Perusahaan dalam memenuhi atau menanggapi kepentingan stakeholders.

Jangka panjang

1. Mengarahkan Perusahaan untuk fokus pada strategi-strategi utama.
2. Meminimalkan potensi benturan kepentingan.
3. Memberikan kepastian pengelolaan Perusahaan secara berkesinambungan.
4. Meningkatkan kepuasan pelanggan maupun stakeholders lainnya.
5. Meningkatkan komunikasi dan reputasi Perusahaan kepada Pemegang Saham maupun *Stakeholders*.

PELAKSANAAN PENERAPAN GCG di PERSEROAN

PT Indra Karya (Persero) telah menerapkan tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) untuk periode tahun 2019. Perusahaan telah menjalani proses *assesment* sebagai bukti telah dilaksanakannya penerapan GCG. *Assesment* dilakukan oleh PT Servitama Consulting sebagai *assessor* independen.

Assesment tersebut sepenuhnya mengacu kepada Surat keputusan Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S-MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

the Company's internal and external elements. Socialization to internal elements puts an emphasis on the understanding of GCG and the awareness about the need to consistently implement its principles. Socialization to external elements aim to provide an understanding on the Company's procedure in accordance with GCG principles. The implementation of the Guide to GCG is carried out consistently with support through periodic reports from each unit on the implementation of the Guide and applies a reward and punishment system developed by the Company for all work units and individual employees.

CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP

Indra Karya (Persero) has yet to produce a GCG implementation roadmap. However, the Company has established short-term and long-term goals for GCG implementation within Indra Karya (Persero). The goals serve as references in GCG implementation within the Company. The short-term and long-term goals are as follows:

Short-Term Goals

1. To provide the Company's management with clear direction to manage the Company in accordance with principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.
2. Facilitate all interested parties in evaluating the performance of the Company's management in exercising Good Corporate Governance.
3. Ensure early detection of the Company's needs and position in meeting or responding to all stakeholders' interest.

Long-Term Goals

1. Direct the Company to focus on its primary strategies.
2. Minimize potential conflict of interest.
3. Providing assurance regarding the Company's management in a sustainable manner.
4. Improving the satisfaction of customers and other stakeholders.
5. Increasing the Company's communication with and reputation to Shareholders and Stakeholders.

GCG IMPLEMENTATION IN THE COMPANY

PT Indra Karya (Persero) implemented principles of Good Corporate Governance (GCG) in 2019. The Company underwent an assessment to prove the implementation of GCG principles. The assessment was conducted by PT Servitama Consulting as an independent assessor.

The assessment fully referred to Decree of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S-MBU/2012 on the Indicators of Assessment and Evaluation on Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

Assesment GCG di PT Indra Karya (Persero) dilaksanakan berdasarkan data dan dokumen yang disediakan oleh Perseroan, hasil pengisian kuesioner, dan konfirmasi ulang serta pembahasan dengan manajemen Perseroan. Assesment tersebut dijamin tingkat objektivitas dan independensi dari konsultan assesor sehingga laporan ini tidak mendapat campur tangan, permintaan, tekanan dan/ atau paksaan dari pihak manapun juga.

Laporan hasil *assessment* GCG ini dimaksudkan dalam upaya pengungkapan praktik penerapan GCG di Perseroan sesuai dengan metodologi terpakai.

HASIL ASSESMENT

Nilai akhir penerapan GCG yang diperoleh PT Indra Karya (Persero) dalam *assessment* tahun 2019 untuk seluruh aspek penilaian mencapai **80,57** dengan klasifikasi "**Baik**", dengan capaian nilai untuk masing-masing aspek sebagai berikut:

The GCG assessment in PT Indra Karya (Persero) was conducted based on data and documents provided by the Company, questionnaire answers, repeat confirmation, and discussions with the Company's management. The assessment was guaranteed in terms of its objectivity and independence from the assessing consultant, and as a result this report is presented without any intervention, request, pressure, and/or coercion from any party.

The GCG assessment report is meant to reveal the practice of GCG implementation in the Company in accordance with applicable methods.

ASSESSMENT RESULT

The Final Result of GCG Implementation obtained by PT Indra Karya (Persero) in the 2019 Assessment for all aspects was a score of 80.57 with a "Good" classification, with scores for each aspect presented below:

No	Aspek Indikator/Parameter <i>Aspect Indicator/Parameter</i>	Bobot <i>Weight</i>	Capaian Tahun 2019 Skor <i>Score in 2019</i>	%
I	Komitmen Terhadap GCG secara berkesinambungan <i>Commitment to Sustainable GCG</i>	7,00	5,71	81,52
II	Pemegang Saham & RUPS <i>Shareholders & General Meeting of Share holders</i>	9,00	8,63	95,92
III	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	35,00	28,75	82,15
IV	Direksi <i>Board of Directors</i>	35,00	31,33	89,51
V	Pengungkapan Informasi & Transparansi <i>Information Disclosure & Transparency</i>	9,00	6,15	68,34
VI	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5,00	0,00	0,00
	Skor Keseluruhan <i>Overall Score</i>	100,00	80,57	80,57
	Klasifikasi <i>Classification</i>		BAIK GOOD	

REKOMENDASI ATAS ASSESMENT

Berdasarkan hasil *assesment* terhadap penerapan GCG tersebut, *assessor* memberikan 64 rekomendasi untuk area yang harus diperbaiki (*area of improvement*) dari 830 parameter terukur. Rekomendasi tersebut meliputi:

- Komitmen GCG : 8 rekomendasi
- Pemegang Saham : 4 rekomendasi
- Dewan Komisaris : 17 rekomendasi
- Direksi : 21 rekomendasi
- Informasi dan Transparansi : 14 rekomendasi

Dewan Komisaris dan Direksi PT Indra Karya (Persero) telah menyatakan setuju atas Hasil *Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang memperoleh skor 80,57 dan klasifikasi penilaian "Baik".

Dewan Komisaris dan Direksi PT Indra Karya (Persero) berkomitmen untuk menerapkan GCG secara konsisten

RECOMMENDATIONS BASED ON ASSESSMENT

Based on the assessment on the implementation of GCG, the assessor provided 64 recommendations for areas of improvement from 830 measurable parameters. The recommendations included:

- Commitment to GCG : 8 recommendations
- Shareholders : 4 recommendations
- Board of Commissioners : 17 recommendations
- Board of Directors : 21 recommendations
- Information and Transparency : 14 recommendations

The Board of Commissioners and Board of Directors of PT Indra Karya (Persero) have declared their approval for the result of the GCG Assessment, which produced a score of 80.57 with a "Good" classification.

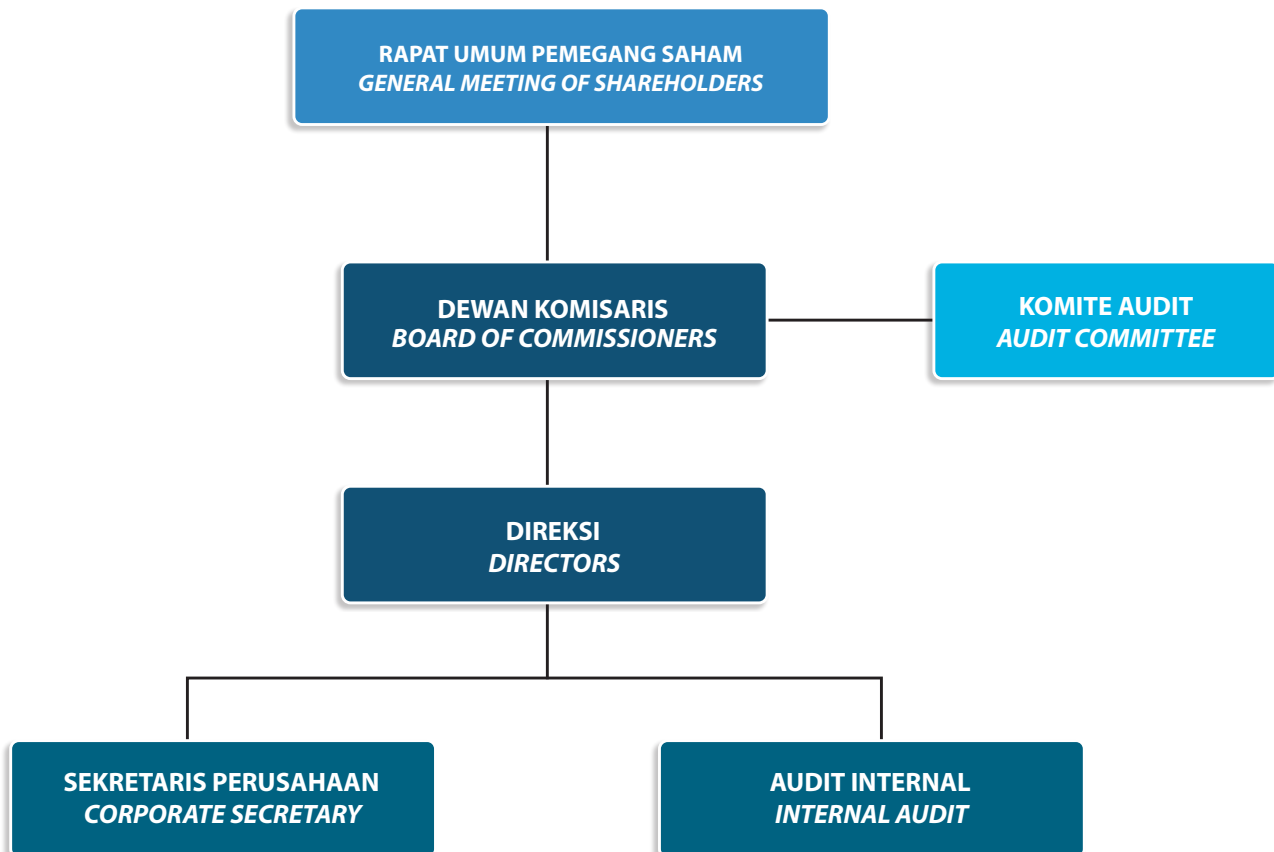
The Board of Commissioners and Board of Directors of PT Indra Karya (Persero) is committed to implementing GCG

dan berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan, juga melakukan penyelesaian *area of improvement* sesuai dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Aspek Pengujian/Indikator/Parameter Bobot.

STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam upaya menciptakan penerapan GCG yang sistematis dan terkendali, Perseroan memiliki struktur organisasi Tata Kelola Perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam penyusunan organ Tata kelola, Perseroan mengacu pada Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Perusahaan terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). Kedua jenis RUPS tersebut adalah organ Perusahaan yang memiliki kekuasaan dan kewenangan tertinggi yang tidak dimiliki Direksi atau Dewan Komisaris.

Melalui RUPS, para pemegang saham dapat melakukan pengendalian terhadap Perusahaan dan entitas anak usaha dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang

in a consistent and sustainable manner in accordance with applicable laws and regulations and resolving all areas of improvement in accordance with their respective functions, duties, authorities, and responsibilities.

CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

In order to ensure a systematic and controlled GCG implementation, the Company has a Corporate Governance organizational structure which consists of the General Meeting of Shareholders, Board of Directors, and Board of Commissioners. In establishing such elements, the Company refers to the General Requirements of Article 1 of Law No. 40 of 2007.

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

General Meetings of Shareholders in the Company consist of Annual General Meetings (AGMs) and Extraordinary General Meetings (EGMs). Both types of General Meetings are elements of the Company with the highest power and authorities not shared by the Board of Directors or the Board of Commissioners.

Through a General Meeting, shareholders can exercise control of the Company and its subsidiaries within the limits set by the law or the Articles of Association. In

atau Anggaran Dasar. Selain itu, setiap pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan secara transparan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 berikut ketentuan pasal-pasal yang mengatur terkait RUPS.

PASAL 6

1. Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, di antaranya:
 - a. Panggilan untuk RUPS, mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul-usul itu harus disediakan di kantor Perseroan sebelum RUPS diselenggarakan;
 - b. Metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan;
 - c. Informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Persero, khusus untuk Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - d. informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Persero yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;
 - e. Penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung;
2. RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS.
3. Keputusan atas mata acara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui dengan suara bulat.
4. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.
5. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

in addition, all decision-making in a General Meeting is done in a transparent manner by emphasizing the Company's interests.

Based on the Regulation of the State Minister for State Owned Enterprises Number: Per-01 / MBU / 2011, the following are the provisions of the articles governing the GMS.

ARTICLE 6

1. All shareholders are entitled to thorough explanation and accurate information about the hosting of a General Meeting, which includes:
 - a. Call for a General Meeting, including information about agenda items in the said Meeting and recommendations planned by the Board of Directors to be proposed in the Meeting, under the provision that if such information is not available by the time the Meeting is called, the information and/or recommendations must be available at the Company's office prior to the Meeting;
 - b. Method to calculate and set the salaries/honorarium and facilities and/or other benefits for all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, and details on the salaries/honorarium and facilities and/or other benefits received by members of the Board of Commissioners and Board of Directors currently in office, in particular for a General Meeting on the Company's Annual Report;
 - c. Information about details on the Company's work and budget plan and other matters planned to be implemented by the Company, especially for its Long-Term Plan and Corporate Work and Budget Plan;
 - d. Financial information and other matters related to the Company that are contained in the Annual Report and Financial Report;
 - e. Thorough explanation and accurate information about matters related to General Meeting agenda items provided before and/or during the said Meeting;
2. A General Meeting in other agenda items is entitled to make a decision as long as all Shareholders are present and/or represented in the Meeting and approve any additional agenda item.
3. Decisions made in an additional agenda item as stipulated in point (2) must be approved unanimously.
4. All General Meetings require meeting minutes which at least contain the time, agenda items, participants, developing opinions, and decisions made in the Meeting.
5. General Meeting Minutes, as stipulated in point (4), must be signed by the Chair of the Meeting and at least 1 (one) Shareholder appointed from the participants.

6. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris.
7. Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.

PASAL 7

1. Pemegang Saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud.
2. Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN 2019

Pada tahun 2019, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebanyak 1 (satu) kali, yang terdiri dari RUPS Tahunan pada tanggal 11 Januari 2019.

DEWAN KOMISARIS

Perseroan memiliki Dewan Komisaris yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha yang dilakukan Direksi, dan memberikan nasihat kepada Direksi, jika diperlukan. Dewan Komisaris juga bertugas memastikan penerapan asas-asas GCG secara menyeluruh di Perusahaan.

Ketentuan mengenai Dewan Komisaris di Perseroan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Tata Kelola Perusahaan di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Pasal 12 terkait dengan fungsi Dewan Komisaris.

FUNGSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMN maupun usaha BUMN dan memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.
4. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.
5. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyusun

6. Signatures as stipulated in point (5) are not required if the Minutes are made with a notarial deed.
7. Each shareholder is entitled to receiving a copy of General Meeting Minutes.

ARTICLE 7

1. Shareholders can make a decision outside a General Meeting under the condition that all shareholders with voting rights present their written approval and sign the decision in question.
2. The decision of Shareholders, as stipulated in point (1), has a legal power as equally binding as a decision made in a physical General Meeting.

2019 GENERAL MEETING

In 2019, the Company held 1 (one) General Meeting of Shareholders, which was an Annual General Meeting held on 11 January 2019.

BOARD OF COMMISSIONERS

The Company has a Board of Commissioners tasked with implementing a supervisory function on the management of business activities done by the Board of Directors and provide recommendations to the Board of Directors if necessary. The Board of Commissioners is also tasked with ensuring a thorough implementation of GCG principles in the Company.

Provisions regarding the Company's Board of Commissioners is established in accordance with Article 12 of Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 on Corporate Governance in State-Owned Enterprises, which stipulates the functions of a Board of Commissioners.

FUNCTIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The functions of the Board of Commissioners are as follows:

1. In carrying out its duties, the Board of Commissioners/Board of Supervisors must comply with applicable laws and regulations and/or articles of association.
2. The Board of Commissioners/Board of Supervisors is responsible for supervising the management policy and overall management of the State-Owned Enterprise and its businesses and advising the Board of Directors.
3. Supervision and advisory functions, as stipulated in article (2), are done in the interest of the State-Owned Enterprise in accordance with its purposes and objectives and not in the interest of any party or group.
4. The Board of Commissioners/Board of Supervisors creates and regulates their own division of tasks.
5. The Board of Commissioners/Board Supervisors is

rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan RKAP.

6. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS/Menteri.
7. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
8. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMN telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan.
9. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
10. Mantan anggota Direksi BUMN dapat menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan, setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi BUMN yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah menyusun pedoman kerja, yang berfungsi sebagai panduan atau pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Pedoman tersebut diatur dalam Anggaran Dasar dan GCG Manual Perusahaan, dan berisi antara lain tentang komposisi, pengangkatan dan pemberhentian, persyaratan, tanggung jawab, tugas, wewenang, dan rapat.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Komposisi Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditentukan di Perseroan sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Tata Kelola Perusahaan di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, adalah sebagai berikut:

1. Dalam komposisi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

obliged to produce its annual work and budget plan as an inseparable part of the Corporate Work and Budget Plan.

6. The Board of Commissioners/Board of Supervisors is obliged to present a report on supervisory duties that took place in the last fiscal year to the General Meeting of Shareholders/Minister.
7. The Board of Commissioners/Board of Supervisors must monitor and ensure an effective and sustainable implementation of GCG.
8. The Board of Commissioners/Board of Supervisors must ensure that the State-Owned Enterprise's Annual Report contains information about their identities, primary occupations, positions in other companies, meetings that took place in one fiscal year (including internal and joint meetings with the Board of Directors) and honorarium, facilities, and/or other benefits received by the relevant State-Owned Enterprise.
9. The Board of Commissioners/Board of Supervisors is obliged to report to the State-Owned Enterprise their/their family's ownership in the relevant State-Owned Enterprise and other companies, including any change made.
10. Former members of the Board of Directors of a State-Owned Enterprise can serve in the Board of Commissioners/Board of Supervisors of the relevant State-Owned Enterprise at least 1 (one) year after the end of their terms of office in the Board of Directors.

WORK GUIDELINES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has established work guidelines which function as a guide in the implementation of the Board's duties and obligations. The guidelines are stipulated in the Company's Articles of Association and GCG Manual and contain, among others, the Board's composition, appointment and dismissal, requirements, responsibilities, duties, authorities, and meetings.

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The composition of the Board of Commissioners/Board of Supervisors stipulated in the Company in accordance with Article 13 of Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 on Corporate Governance of State-Owned Enterprises is as follows:

1. At least 20% (twenty percents) of the Board of Commissioners/Board of Supervisors is an Independent Commissioner/Supervisor appointed in a decision.
2. The Board of Commissioners/Board of Supervisors is an assembly, and each member of the Board cannot act individually and is obliged to act on the decision made by the Board.

KOMISARIS INDEPENDEN

1. Yang dimaksud dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen adalah anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Komposisi dan kriteria anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen bagi BUMN tertentu, mengikuti regulasi di bidang usaha BUMN yang bersangkutan dan/atau regulasi di bidang pasar modal.

KOMPOSISI KOMISARIS INDEPENDEN

Hingga saat ini Perseroan tidak memiliki Komisaris Independen.

PERSYARATAN DEWAN KOMISARIS

Dalam pemilihan/pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Perseroan menetapkan persyaratan bahwa calon anggota tersebut harus:

- Mempunyai akhlak dan moral yang baik
- Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
- Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

INDEPENDENT COMMISSIONER

1. An Independent Commissioner/Supervisor is one who has no financial, management, ownership, and/or family relations with any other Commissioner/Supervisor, Director and/or controlling shareholder, and the relevant State-Owned Enterprise, which can influence their ability to act independently.
2. The composition and criteria of an Independent Commissioner/Supervisor in a State-Owned Enterprise must adhere to regulations in the relevant State-Owned Enterprise's business field and/or regulations in the capital market.

COMPOSITION OF INDEPENDENT COMMISSIONER

To this day the Company has not appointed an Independent Commissioner.

REQUIREMENTS FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

In selecting/appointing members of the Board of Commissioners, the Company has established requirements that a member must:

- Be of good moral standing.
- Be able to perform a legal action
- Has never been declared bankrupt or been a member of the Board of Directors or Board of Commissioners that was found guilty in causing a company to go bankrupt within 5 (five) years prior to appointment.
- Has never been sentenced for financial crimes within 5 (five) years prior to appointment.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAPAT DILIHAT DI TABEL BERIKUT:
THE COMPOSITION OF THE COMPANY'S BOARD OF COMMISSIONERS IS AS FOLLOWS:

Nama/Name	Jabatan/Position	Dasar Pengangkatan/ Basis of Appointment	Periode Jabatan/ Term of Office
Jarot Widyoko	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-39/MBU/02/2019 Decree of the Minister of BUMN No. SK-39/MBU/02/2019	Hingga tahun 2023 <i>Until 2023</i>
Teddy Poernama	Komisaris <i>Commissioner</i>	Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-250/MBU/09/2018 Decree of the Minister of BUMN No. SK-250/MBU/09/2018	Hingga Tahun 2023 <i>Until 2023</i>

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara rutin mengadakan Rapat Dewan Komisaris.

Berikut adalah ketentuan tentang rapat Dewan Komisaris seperti tertuang dalam Pasal 14:

1. Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Dewan

BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING

As part of its supervisory function, the Board of Commissioners routinely holds Board of Commissioners' Meetings.

The following contains provisions on the Board of Commissioners' Meetings as stipulated in Article 14:

1. A Board of Commissioners/Board of Supervisors' meeting must be held regularly at least once every month, and the Board of Directors can be invited to

Komisaris/Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi.

2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus menetapkan tata tertib Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
3. Setiap Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, apabila ada.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tersebut.
5. Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus disimpan oleh BUMN yang bersangkutan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.
6. Jumlah Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN.

the meeting.

2. Board of Commissioner/Board of Supervisors must establish order in every Board of Commissioners/Board of Supervisors' Meeting.
3. Each Board of Commissioners/Board of Supervisors' Meeting must be recorded in minutes that contain developing opinions in the meeting, whether it is a supporting, countering, or dissenting opinion; decisions/conclusion of the meeting; and reasons for the absence of a Commissioner/Supervisor if applicable.
4. Each Commissioner/Supervisor is entitled to receiving a copy of the Board of Commissioners/Board of Supervisors' Meeting minutes, whether they were present at the Meeting or not.
5. Original minutes from each Board of Commissioners/Board of Supervisors' Meeting must be kept by the relevant State-Owned Enterprises and must be available if requested by a Commissioner/Supervisor and Director.
6. The number of Board of Commissioners/Board of Supervisors' Meetings and the attendance records of each Commissioner/Supervisor MUST be contained in the State-Owned Enterprise's Annual Report.

PELAKSANAAN

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 12 kali, dengan tingkat kehadiran anggota rata-rata 95,83%.

IMPLEMENTATION

In 2019, the Board of Commissioners held 12 Board of Commissioners' Internal Meetings with an average attendance rate of 95.83%.

KEHADIRAN ANGGOTA PADA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS ATTENDANCE RECORDS IN BOARD OF COMMISSIONERS' INTERNAL MEETINGS

Nama/Name	Jabatan/Position	Jumlah Rapat/ Number of Meeting	Kehadiran/ Attendance	Persentase/ Percentage
Jarot Widyoko	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	12	11	91,67
Teddy Poernama	Komisaris <i>Commissioner</i>	12	12	100,00

RAPAT GABUNGAN

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat gabungan bersama dengan Direksi sebanyak 5 (lima) kali, dengan tingkat kehadiran rata-rata 100%.

JOINT MEETING

In 2019, the Board of Commissioners held 5 (five) joint meetings with the Board of Directors with an average attendance rate of 100%.

KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA RAPAT GABUNGAN DENGAN DIREKSI ATTENDANCE OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AT A JOINT MEETING WITH THE BOARD OF DIRECTORS

Nama/Name	Jabatan/Position	Jumlah Rapat/ Number of Meeting	Kehadiran/ Attendance	Persentase/ Percentage
Jarot Widyoko	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	5	5	100
Teddy Poernama	Komisaris <i>Commissioner</i>	5	5	100

Milfan Rantawi	Direktur Utama <i>President Director</i>	5	5	100
Eko Budiono	Direktur <i>Director</i>	5	5	100

AGENDA RAPAT KOMISARIS**AGENDA ITEMS IN BOARD OF COMMISSIONERS' MEETINGS**

Nomor No	Agenda Rapat	Meeting Agenda
1	RUPS Pengesahan RJPP Tahun 2019-2023	1. AGM to Approve 2019-2023 Corporate Long-Term Plan
2	Rapat Kerja Manajemen Penyusunan RKAP Tahun 2020	1. Management Work Meeting to Draft 2020 Corporate Work and Budget Plan

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019**IMPLEMENTATION OF BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES AND RESPONSIBILITIES IN 2019**

1. Surat Komisaris PT Indra Karya (Persero) Nomor: 006/KOM/IK/2019, tanggal 20 Maret 2019, tentang SK Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Audit; 2. Surat Komisaris PT Indra Karya (Persero) Nomor: 007/KOM/IK/2019, tanggal 28 Maret 2019, tentang Penyampaian Laporan Pengawasan Dekom Tahun 2018; 3. Surat Komisaris PT Indra Karya (Persero) Nomor: 008/KOM/IK/2019, tanggal 29 Maret 2019, tentang Tanggapan Atas Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2018 (Audited); 4. Surat Komisaris PT Indra Karya (Persero) Nomor: 009/KOM/IK/2019, tanggal 9 April 2019, tentang Persetujuan Penarikan Pinjaman; 5. Surat Komisaris PT Indra Karya (Persero) Nomor: 010/KOM/IK/2019, tanggal 12 April 2019, tentang Persetujuan Penjualan Kendaraan; 6. Surat Komisaris PT Indra Karya (Persero) Nomor: 011/KOM/IK/2019, tanggal 16 April 2019, tentang Usulan Penunjukkan KAP; 7. Surat Komisaris PT Indra Karya (Persero) Nomor: 013/ KOM/IK/2019, tanggal 25 April 2019, tentang Usulan Penetapan Remunerasi Direksi dan Dekom; 8. Surat Komisaris PT Indra Karya (Persero) Nomor: 015/KOM/IK/2019, tanggal 30 Mei 2019, tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi; 9. Surat Komisaris PT Indra Karya (Persero) Nomor: 018/KOM/IK/2019, tanggal 31 Juli 2019, tentang Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Perusahaan Semester I Tahun 2019; 10. Surat Komisaris PT Indra Karya (Persero) Nomor: 025/KOM/IK/2019, tanggal 17 Oktober 2019, tentang Persetujuan Penghapusan Aset; 11. Surat Komisaris PT Indra Karya (Persero) Nomor: 026/KOM/IK/2019, tanggal 17 Oktober 2019, tentang Persetujuan Penarikan Pinjaman; 12. Surat Komisaris PT Indra Karya (Persero) Nomor: 027/KOM/IK/2019, tanggal 31 Oktober 2019 tentang Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan III Thn 2019; 13. Surat Komisaris PT Indra Karya (Persero) Nomor: 028/KOM/IK/2019, tanggal 18 Desember 2019, tentang Persetujuan Penarikan Pinjaman.	1. Letter of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero) No. 006/KOM/IK/2019 on 20 March 2019 on the Decree on the Establishment of the Membership of the Audit Committee; 2. Letter of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero) No. 007/KOM/IK/2019 on 28 March 2019 on the Board of Commissioner's 2018 Supervision Report; 3. Letter of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero) No. 008/KOM/IK/2019 on 29 March 2019 on Response to the Company's 2018 Management Report; 4. Letter of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero) No. 009/KOM/IK/2019 on 9 April 2019 on Approval of Loan Withdrawal; 5. Letter of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero) No. 010/KOM/IK/2019 on 12 April 19 on Approval of Sales of Vehicles; 6. Letter of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero) No. 011/KOM/IK/2019 on 16 April 2019 on Recommendations Regarding a Certified Public Accounting Firm; 7. Letter of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero) No. 013/KOM/IK/2019 on 25 April 2019 on Recommendations Regarding the Board of Directors and Board of Commissioners' Remuneration; 8. Letter of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero) No. 015/KOM/IK/2019 on 30 May 2019 on Approval of Changes in the Company's Organizational Structure; 9. Letter of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero) No. 018/KOM/IK/2019 on 31 July 2019 on the Board of Commissioners' Response on the Company's Management Report in the First Half of 2019; 10. Letter of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero) No. 025/KOM/IK/2019 on 17 October 2019 on Approval of Asset Writeoff; 11. Letter of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero) No. 026/KOM/IK/2019 on 17 October 2019 on Approval of Loan Withdrawal; 12. Letter of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero) No. 027/KOM/IK/2019 on 31 October 2019 on the Board of Commissioner's Response on the Company's Management Report in the Third Quarter of 2019; 13. Letter of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero) No. 028/KOM/IK/2019 on 18 December 2019 on Approval of Loan Withdrawal;
--	--

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris adalah organ yang membantu Dewan Komisaris yang membantu menunjang pelaksanaan dan efektivitas peran Dewan Komisaris.

Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor : 013/KOM/IK/2018, tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris.

SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Secretary to the Board of Commissioners is an element that assists and help the Board in supporting the implementation and effectiveness of its roles.

The appointment of the Secretary to the Board of Commissioners is stipulated in Decree of the Board of Commissioners No.013/KOM/IK/2018 on the Appointment of the Secretary to the Board of Commissioners.

Perseroan telah mengangkat Hari Tjahjono sebagai Sekretaris Dewan Komisaris, terhitung mulai 31 Agustus 2018-30 Agustus 2021.

Fungsi dan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris meliputi:

1. Mengadministrasi undangan rapat Dewan Komisaris
2. Penghubung Dewan Komisaris dan Direksi
3. Membuat surat-surat keluar
4. Mendokumentasikan surat-surat
5. Menyiapkan bahan rapat Dewan Komisaris
6. Menyusun risalah rapat Dewan Komisaris dan tugas kesekretariatan lainnya
7. Memberikan bantuan ringkasan laporan manajemen
8. Menyiapkan bahan dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris
9. Koordinasi dengan sekretaris Perusahaan tentang hal-hal terkait dengan Dewan Komisaris dan Direksi

KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah organ yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, bertujuan membantu Dewan Komisaris dalam upaya mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan pengendalian internal, Komite Audit Perusahaan dilengkapi dengan pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit.

Susunan Komite Audit :

Ketua : Teddy Poernama

Anggota : Seno Winardi

PELAKSANAAN

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali.

TUGAS-TUGAS YANG DIJALANKAN KOMITE AUDIT PADA 2019

1. Kualitas laporan keuangan dan kecukupan serta transparansi dalam pengungkapan data keuangan dan operasional;
2. Kualitas dan objektivitas pelaksanaan audit internal dan eksternal;
3. Integritas manajemen dan sistem pengendalian internal, dan;
4. Praktik Tata Kelola Perusahaan.

The Company appointed Hari Tjahjono as Secretary to the Board of Commissioners for the 31 August 2018-30 August 2021 term.

The Functions and Duties of the Secretary to the Board of Commissioners include:

1. Administering invitations to Board of Commissioners' meetings
2. Acting as a liaison between the Board of Commissioners and the Board of Directors.
3. Writing outgoing mails
4. Documenting all mails
5. Preparing materials for Board of Commissioners' meetings
6. Writing minutes of Board of Commissioners' meetings and carrying out other secretarial duties
7. Providing assistance to summarize management reports
8. Preparing materials and information relevant to the duties of the Board of Commissioners
9. Acting in coordination with the Corporate Secretary regarding matters related to the Board of Commissioners and the Board of Directors.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is an element established by and responsible to the Board of Commissioners, whose objective is to assist the Board of Commissioners in supporting the effectiveness of the implementation of the Board's duties and supervisory functions related to the Company's financial report, internal control system, implementation of internal and external audit actions, implementation of Good Corporate Governance (GCG), and compliance to applicable laws and regulations.

In exercising its duties and responsibilities for internal control supervision, the Company's Audit Committee is equipped with work guidelines set in the Audit Committee Charter. The Audit Committee Charter and its Code of Conduct have been approved based on Decree Have been approved based on decree of the audit committee.

Composition of the audit committee :

Chair : Teddy Poernama

Member : Seno Winardi

IMPLEMENTATION

In 2019, the Audit Committee held 6 (six) joint meetings.

DUTIES CARRIED OUT BY THE AUDIT COMMITTEE IN 2019

1. Ensuring the quality of the company's financial reports as well as adequacy and transparency in the disclosure of financial and operational data;
2. Ensuring the quality and objectivity of internal and external audits;
3. Ensuring the integrity of the Company's management and internal control system, and;
4. Ensuring Good Corporate Governance practices.

Wewenang, tanggung jawab dan fungsi Komite Audit dituangkan dalam Pedoman Komite Audit. Tugas utama, komposisi, keanggotaan, rapat dan kegiatan Komite Audit diuraikan sebagai berikut:

- Melakukan *review* atas laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya yang diberikan kepada para stakeholder, termasuk proyeksi keuangan, sistem pengendalian internal dan pelaksanaan audit internal dan eksternal.
- Membina komunikasi yang baik dengan akuntan publik dan auditor internal serta melakukan *review* atas cakupan, hasil, efektivitas dan objektivitas pelaksanaan audit eksternal dan internal, juga dengan Komite Pemantau Risiko terkait proses manajemen risiko yang efektif.
- Melakukan *review* dan evaluasi terhadap kecukupan sistem pengendalian internal, termasuk pengendalian akuntansi, meminta saran auditor internal, akuntan publik dan auditor pengawasan (*supervisory auditors*).
- Melakukan *review* atas draft laporan Keuangan yang telah diaudit yang diterima oleh manajemen untuk memastikan mutu penyajian laporan keuangan, kesesuaian kebijakan akuntansi dengan penerapan sistem akuntansi, serta kecukupan dan transparansi pengungkapan data keuangan dan operasional.
- Melakukan *review* atas kesesuaian tindak lanjut temuan audit yang material yang telah diidentifikasi dan dilaporkan oleh auditor internal dan akuntan publik.
- Melakukan *review* atas kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku, meminta saran auditor internal dan akuntan publik serta melakukan *review* atas tindak lanjut terhadap keluhan yang diterima Perseroan.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bertugas mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan nominasi dan remunerasi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris serta manajemen Sumber Daya Manusia.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib yang menjabarkan tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, larangan, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, rapat, struktur organisasi dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Komite Nominasi dan Remunerasi.

KEBIJAKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 4756);

The authorities, responsibilities, and functions of the Audit Committee are stipulated in the Audit Committee's Guidelines. The primary duties, composition, membership, meetings, and activities of the Audit Committee are described as follows:

- Reviewing the Company's financial reports and other financial information presented to stakeholders including financial projections as well as the Company's internal control system and internal and external audits.
- Building adequate communications with certified public accountants (CPAs) and internal auditors and reviewing the scope, results, effectiveness, and objectivity of external and internal audits, including with the Risk Monitoring Committee in relation to effective risk management.
- Reviewing and evaluating the adequacy of the Company's internal control system, including accounting control, and requesting advice from internal auditors, CPAs, and supervisory auditors.
- Reviewing the Company's audited financial report draft received by the management to ensure the quality of the financial report presentation, the compatibility of accounting policies with the implementation of the accounting system, and adequacy and transparency in the disclosure of financial and operational data.
- Reviewing the compatibility of follow-ups to material audit findings identified and reported by internal auditors and CPAs.
- Reviewing the Company's compliance to applicable laws and regulations, requesting advice from internal auditors and CPAs, and reviewing any follow-up to all complaints received by the Company.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee is an element established by the Board of Commissioners to support the effectiveness of the implementation of the Board's duties and responsibilities related to the nomination and remuneration of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Human Resource Management.

The Nomination and Remuneration Committee has a set of guidelines and code of conduct which elaborate their duties, authorities, obligations, responsibilities, prohibitions, division of tasks, working time, work ethics, meetings, organizational structure, and duty implementation.

POLICY OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The policy of the Nomination and Remuneration Committee refers to:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (State Gazette of 2007 No. 106, Additional Gazette 4756);

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara 4297);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 Tanggal 24 Agustus 2012, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 01 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara .
6. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Indra Karya (Persero) Nomor: SK-250/MBU/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Indra Karya (Persero)
8. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Indra Karya (Persero) Nomor: SK-39/MBU/02/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan PT Indra Karya (Persero)
9. Akta Perubahan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Indra Karya Persero Nomor: 09/tanggal 14 Desember 2019, dibuat di hadapan Notaris Nia Kurniasih, SH. Jakarta.
2. Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (State Gazette 4297);
3. Government Regulation No. 45 of 2005 on the Establishment, Management, and Supervision of State-Owned Enterprises;
4. Decree of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 on 24 August 2012 on the Supporting Elements of the Board of Commissioners/ Board of Supervisors of a State-Owned Enterprise;
5. Decree of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. KEP-117/M-MBU/2002 on 01 August 2002 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices in a State-Owned Enterprise.
6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 on 1 August 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in a State-Owned Enterprise as revised with Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/2012 on 6 July 2012 on the revision of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in a State-Owned Enterprise.
7. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Indra Karya (Persero) No. SK-250/MBU/09/2018 on 28 September 2018 on the Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero).
8. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Indra Karya (Persero) No. SK-39/MBU/02/2019 on 4 February 2019 on the Dismissal and Appointment of President Commissioner of PT Indra Karya (Persero).
9. Deed of Amendment to Meeting Decision of PT Indra Karya (Persero) No. 09 on 14 December 2019 made before Notary Public Nia Kurniasih, S.H., Jakarta

SUSUNAN PENGURUS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Ketua	: Jarot Widyoko
Sekretaris	: Teddy Poernama
Anggota	: Nita Rahmawati S

DIREKSI

Direksi adalah salah satu organ tata kelola yang memiliki tanggung jawab utama pada operasional usaha dan pengelolaan organisasi di Perseroan. Direksi juga bertindak untuk mewakili Perseroan. Ketentuan mengenai Direksi di Perseroan diatur berdasarkan Salinan Peraturan Menteri Negara Badan usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

COMPOSITION OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Chair	: Jarot Widyoko
Secretary	: Teddy Poernama
Member	: Nita Rahmawati S.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is a governance element that holds the primary responsibility over business operations and organizational management in the Company. The Board of Directors also acts on behalf of the Company. Provisions on the Board of Directors in the Company are stipulated based on Copy of Regulation of Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in a State-Owned Enterprise.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penunjukan salah seorang anggota Direksi oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan.
3. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN.
4. Direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
5. Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun, yang berisi:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya;
 - b. Posisi BUMN saat ini;
 - c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJP;
 - d. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka panjang.
6. Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJP, yang memuat antara lain:
 - a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
 - b. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; dan
 - d. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/Menteri.
7. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengkaji dan memberikan pendapat atas RJP dan RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
8. Untuk memenuhi syarat akuntabilitas, keterbukaan, dan tertib administrasi, Direksi wajib:
 - a. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi,
 - b. Membuat Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. In exercising its duties, the Board of Directors must possess good faith in the interest of the State-Owned Enterprise in accordance with its purposes and objectives and ensure that the State-Owned Enterprise exercises its social responsibilities and considers the interest of its Stakeholders in accordance with applicable laws and regulations.
2. The appointment of a Director by a Board of Directors' Meeting is done within the responsibility of the implementation and monitoring of GCG in the relevant State-Owned Enterprise.
3. The Board of Directors must present information about their identities, primary occupations, positions as Commissioners in subsidiaries/joint ventures and/or other companies, meetings done in one fiscal year (internal and joint meetings with the Board of Commissioners/Board of Supervisors), salaries, facilities, and/or other benefits received by the relevant State-Owned Enterprise and its subsidiaries/joint ventures to be contained in the State-Owned Enterprise's Annual Report.
4. The Board of Directors is obliged to report to the State-Owned Enterprise regarding their or their family's ownership in the relevant State-Owned Enterprises and other companies along with any change made.
5. The Board of Directors is obliged to prepare a Long-Term Plan that contains the targets and objectives the State-Owned Enterprise seeks to achieve within 5 (five) years, which contains:
 - a. Evaluation of previous Long-Term Plans;
 - b. Current position of the State-Owned Enterprise
 - c. Assumptions used in the Long-Term Plan;
 - d. Establishment of long-term missions, targets, strategies, policies, and programs.
6. The Board of Directors is obliged to prepare the Corporate Work and Budget Plan as an annual elaboration of the Long-Term Plan, which contains:
 - a. The company's missions, operational targets, operational strategies, policies, and work programs/activities;
 - b. The company's budget with details of components for each work program/activity;
 - c. Financial projection of the company and its subsidiaries; and
 - d. Other matters that require decisions by a General Meeting/the Minister
7. The Board of Commissioners/Supervisors reviews and provides recommendations on the Long-Term Plan and Corporate Work and Budget Plan prepared by the Board of Directors before being jointly signed.
8. To meet accountability, transparency, and good administration requirements, the Board of Directors is obliged to:
 - a. Prepare a List of Shareholders, Special Lists, General Meeting Minutes, and Board of Directors' Meeting Minutes,
 - b. Prepare the Company's Annual Report and Financial Documents;

- c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen Keuangan Perusahaan dan dokumen lainnya,
 - d. Menyimpan di tempat kedudukan perusahaan, seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perusahaan, dan dokumen lainnya.
9. Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI BUMN

Persyaratan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perseroan mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tentang persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, meliputi:

A. PERSYARATAN FORMAL

Direksi Perseroan adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

B. PERSYARATAN MATERIIL

Persyaratan materiil Direksi BUMN, yaitu :

1. keahlian;
2. integritas;
3. kepemimpinan;
4. pengalaman;
5. jujur;
6. perilaku yang baik; dan
7. dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

C. PERSYARATAN LAIN

Persyaratan lain Direksi BUMN adalah sebagai berikut :

1. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
2. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/ wakil kepala daerah;
3. Tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;

- c. Maintain all of the Company's Lists, Minutes, Financial Documents, and other documents.
 - d. Keeping at the company's domicile, all registers, minutes, company financial documents, and other documents.
9. All Directors are prohibited from performing actions that contain conflict of interest and provide personal benefits, both directly and indirectly, from the relevant State-Owned Enterprises' decision-making and activities outside their legal income.

REQUIREMENTS FOR STATE-OWNED ENTERPRISE DIRECTORS

The Requirements for the Appointment and Dismissal of the Company's Board of Directors refer to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/02/2015 on the Requirements and Procedures of the Appointment and Dismissal of the Board of Directors in a State-Owned Enterprise, which include:

A. FORMAL REQUIREMENTS

A Company Director is an individual who is able to perform a legal action, except if in the last 5 (five) years they have been:

1. Declared bankrupt;
2. A member of a Board of Directors or Board of Commissioners/Board of Supervisors found guilty for causing a State-Owned Enterprise and/or the Company to be declared bankrupt;
3. Sentenced for crimes that caused financial losses to the State, a State-Owned Enterprise, the Company, and/or related to the financial sector.

B. MATERIAL REQUIREMENTS

The material requirements for a State-Owned Enterprise Director are:

1. Expertise;
2. Integrity;
3. Leadership;
4. Experience;
5. Honesty;
6. Good behavior; and
7. High dedication to advance and develop the Company.

C. OTHER REQUIREMENTS

In addition, a State-Owned Enterprise Director also must:

1. Not be an official of any political party and/or a legislative member and/or a legislative candidate. Legislative candidates or legislative members consist of members of/candidates for the House of Representatives, Regional Representatives Council, Level I Regional House of Representatives, and Level II Regional House of Representatives;
2. Not be a candidate for a regional leader/deputy leader and/or be serving as a regional leader/deputy leader;
3. Not serve as a Director in the same State-Owned Enterprise for 2 (two) successive terms;

4. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya; dan
5. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi BUMN), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter.

TATA CARA PENGANGKATAN

A. SUMBER BAKAL CALON

1. Sumber Bakal Calon Direksi BUMN berasal dari :
 - a. Direksi BUMN;
 - b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
2. Talenta BUMN yang terdiri atas :
 - a. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
 - b. Direksi anak perusahaan BUMN/perusahaan patungan BUMN;
3. Talenta Kementerian BUMN;
4. Sumber Lain yang terdiri dari :
 - a. Pejabat BUMN lain; dan
 - b. Sumber lainnya.

B. PENJARINGAN

1. Menteri, Sekretaris, Deputy Teknis, dan/atau Deputy mencari bakal calon, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bakal calon dan Talenta BUMN, diusulkan melalui Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
 - b. Menteri, Sekretaris, Deputy Teknis, dan/atau Deputy dapat menetapkan bakal calon dari Talenta BUMN tanpa usulan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas apabila dipandang memiliki prestasi yang baik.
 - c. Bakal calon dan Talenta Kementerian BUMN, diusulkan melalui Sekretaris.
 - d. Bakal calon yang berasal dari Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan/atau sumber Lain dapat mengajukan lamaran kepada atau diusulkan langsung oleh Menteri, Sekretaris, Deputy Teknis, dan/atau Deputy.
 - e. Penjaringan bakal calon diutamakan dari Talenta BUMN.
2. Khusus untuk BUMN terbuka, bakal calon dari Talenta BUMN harus diusulkan melalui Dewan Komisaris. Apabila Menteri memandang terdapat bakal calon lain yang memiliki potensi untuk menjadi anggota Direksi, namun tidak termasuk dalam daftar nama yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, Menteri dapat meminta Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian terhadap yang bersangkutan dan jika memenuhi syarat agar diusulkan kepada Menteri.
3. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputy.

DASAR PEMBERHENTIAN DIREKSI

1. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan RUPS atau Menteri dengan menyebutkan alasannya.

4. Dedicate and make their time available in order to fulfill their duties; and
5. Be physically and spiritually healthy (with no illness that can hamper their duties as a State-Owned Enterprise Director) as proven with a physician-issued certificate of health.

PROCEDURES OF APPOINTMENT

A. PROSPECTIVE CANDIDATES

1. Prospective Candidates for State-Owned Enterprise Directors are sourced from:
 - a. The State-Owned Enterprise's Board of Directors;
 - b. The State-Owned Enterprise's Board of Commissioners/ Board of Supervisors
2. Talents in a State-Owned Enterprise, consisting of:
 - a. Officials ranked one level below the Board of Directors or officials with special achievements;
 - b. Directors in the State-Owned Enterprise's subsidiaries/ joint ventures;
3. Talents in the Ministry of State-Owned Enterprises;
4. Other individuals, including:
 - a. Other State-Owned Enterprise officials; and
 - b. Individuals from other sources

B. SELECTION

1. The Minister, Secretary, Technical Deputy, and/or the Deputy will select a candidate by taking into account the following:
 - a. A prospective candidate/talent is recommended by the Board of Commissioners/Board of Supervisors
 - b. The Minister, Secretary, Technical Deputy, and/or the Deputy can determine a prospective candidate from talents in a State-Owned Enterprise without recommendations from the Board of Commissioners/ Board of Supervisors.
 - c. A prospective candidate/talent from the Ministry of State-Owned Enterprises is recommended by the Secretary.
 - d. A prospective candidate from the Board of Directors, Board of Commissioners/Board of Supervisors, and/ or other sources can submit an application or be recommended directly by the Minister, Secretary, Technical Deputy, and/or the Deputy.
 - e. Selection for candidates is prioritized for talents in a State-Owned Enterprise.
2. For State-Owned Enterprises that are public companies, prospective candidates from State-Owned Enterprise talents must be recommended by the Board of Commissioners. If the Minister views another prospective candidate with potential to serve as a Director who is not included in the list recommended by the Board of Commissioners, the Minister can ask the Board of Commissioners to conduct an assessment on the prospective candidate and recommend them to the Minister if they meet the requirements.
3. All prospective candidates are administered by the Deputy.

BASIS OF DISMISSAL OF DIRECTORS

1. A Director can be dismissed at any time based on a decision made in a General Meeting of Shareholders or by the Minister with disclosed reasons.

2. Alasan Pemberhentian antara lain:
 - a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - c. Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - d. Telah ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;
 - e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi BUMN;
 - f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. Mengundurkan diri;
 - h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS atau Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN, antara lain karena terjadinya ketidak harmonisan antar Anggota Direksi.
3. Apabila terjadi perbedaan antara ketentuan Peraturan Menteri ini dengan Anggaran Dasar BUMN mengenai alasan pemberhentian, maka yang berlaku adalah ketentuan Anggaran Dasar.
4. Jabatan Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
5. Rangkap jabatan yang dilarang sebagai mana dimaksud pada angka 4 huruf c antara lain sebagai berikut:
 - a. Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;
 - b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
 - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau
 - f. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - g. Menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - h. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
6. Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada angka 5, anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali :
 2. Reasons for dismissal include:
 - a. Inability to fulfill their obligations as previously agreed in their management contract;
 - b. Inability to perform their duties adequately;
 - c. Violation of the Company's Articles of Association and/or applicable laws and regulations;
 - d. Being named as a Suspect or Defendant in an act that causes losses to the State-Owned Enterprise and/or the State;
 - e. Conduct unbecoming of a State-Owned Enterprise Director;
 - f. Being found guilty by a court decision with a permanent force of law;
 - g. Resignation;
 - h. Other reasons considered appropriate by a General Meeting or the Minister in the interest of the State-Owned Enterprise, including disharmony within the Board of Directors.
 3. In the case of a discrepancy between the Regulation of the Minister and the State-Owned Enterprise's Articles of Association regarding reasons for dismissal, the Articles of Association take priority
 4. A Director's term in office ends upon:
 - a. Their death;
 - b. The conclusion of their term;
 - c. The Director no longer meeting requirements for the Board of Directors in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations, including by holding prohibited simultaneous and/or resigning.
 5. Prohibited simultaneous positions, as mentioned in No. 4 Point C, include:
 - a. Director in a State-Owned Enterprise, a Regionally-owned Enterprise, or a private enterprise;
 - b. Commissioner/Supervisor in a State-Owned Enterprise;
 - c. Other structural and functional positions in central and/or regional government institutions/agencies;
 - d. Other positions as stipulated in the law;
 - e. An official in a political party, legislative member, and/or a regional leader/deputy leader; and/or
 - f. Other positions that can potentially cause conflicts of interest;
 - g. A legislative candidate or candidate for regional leader/deputy leader;
 - h. Having been dismissed by a decision made in a General Meeting of Shareholders held physically, by the Minister as the General Meeting of Shareholders, or made by all shareholders circularly.
 6. In addition to holding simultaneous positions as stipulated in No. 5, Directors are prohibited from simultaneously serving as Commissioners in other companies, except:

- a. Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, dengan ketentuan hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris pada satu atau lebih anak perusahaan/perusahaan patungan maksimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN, sedangkan penghasilan lain/lebihnya diserahkan menjadi penghasilan BUMN yang bersangkutan;
- b. Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh ijin dari Menteri.
7. Direksi yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada angka masa jabatannya sebagai Direksi berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut.

KOMPOSISI DIREKSI

Anggota Direksi di tahun 2019 berjumlah 2 (dua) orang, yaitu 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Direktur.
Komposisi anggota Direksi dapat dilihat sebagai berikut:

- a. As Commissioners in the relevant State-Owned Enterprise's subsidiary/joint venture, on the condition that they are only entitled to accumulated income as Commissioners in one or more subsidiary/joint venture with a maximum amount of 30% (thirty per cent) of their salaries as Directors in the State-Owned Enterprise, while their remaining income is presented as the income of the relevant State-Owned Enterprise.
- b. As Commissioners in other companies on behalf/to represent the interest of the State-Owned Enterprise with permission from the Minister.
7. The terms of Directors who hold other positions simultaneously as stipulated in No. 6 will end starting from the start of their simultaneous positions.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

As of 2019, the Company had 2 (two) Directors, namely 1 (one) President Director and 1 (one) Director.
The composition of the Board of Directors is as follows:

KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI DAPAT DILIHAT SEBAGAI BERIKUT: THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS IS AS FOLLOWS:

Nama/Name	Posisi/Position
Milfan Rantawi	Direktur Utama/President Director
Eko Budiono	Direktur/Director

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan.

Berikut adalah ketentuan dalam rapat Direksi:

1. Direksi mengundang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
2. Direksi menetapkan tata tertib Rapat Direksi.
3. Risalah Rapat Direksi untuk setiap Rapat Direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, tetapi tidak terbatas pada pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada.
4. Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.
5. Risalah dari setiap Rapat Direksi harus disimpan oleh BUMN yang bersangkutan.
6. Jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi harus dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN.

BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

The Board of Directors' Meetings must be held periodically at least once every month.

The provisions of the Board of Directors' Meetings are as follows:

1. The Board of Directors invites the Board of Commissioners/Board of Supervisors.
2. The Board of Directors determines the code of conduct of the Meeting.
3. Minutes for each Board of Directors' Meeting must contain all matters discussed and decided in the Meeting, including but not limited to opinions developing in the Meeting including supporting opinions, countering opinions, and dissenting opinions; and reasons for the absence of a Director if applicable.
4. Each Director is entitled to receiving a copy of the Meeting Minutes, whether they were present in the Meeting or not.
5. Minutes from each Board of Directors' Meeting must be kept by the relevant State-Owned Enterprise.
6. The number of Meetings and attendance records must be contained in the State-Owned Enterprise's Annual Report.

PELAKSANAAN**Rapat Direksi**

Sepanjang tahun 2019 Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 kali. Rata-rata tingkat kehadiran dalam Rapat Direksi selama tahun 2019 sebesar 100%.

IMPLEMENTATION**Board of Directors' Meeting**

In 2019, the Board of Directors held 12 meetings with an average attendance rate of 100%.

KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI PADA RAPAT INTERNAL DIREKSI
ATTENDANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN INTERNAL MEETINGS

Nama/Name	Jabatan/Position	Jumlah Rapat/ Number of meeting	Kehadiran/ Presence	Prosentase/ Percentage
Milfan Rantawi	Direktur Utama <i>President Director</i>	12	12	100
Eko Budiono	Direktur <i>Director</i>	12	12	100

RAPAT GABUNGAN

Sepanjang tahun 2019 Perusahaan menyelenggarakan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris sebanyak 5 kali. Rata-rata tingkat kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan selama tahun 2019 sebesar 100%.

JOINT MEETINGS

In 2019, the Company held 5 joint meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners with an average attendance rate of 100%.

KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI PADA RAPAT GABUNGAN DENGAN DEWAN KOMISARIS
ATTENDANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN JOINT MEETINGS WITH THE BOARD OF COMMISSIONERS

Nama/ Name	Jabatan/ Position	Jumlah Rapat/ Number of meeting	Kehadiran/ Presence	Prosentase/ Percentage
Milfan Rantawi	Direktur Utama <i>President Director</i>	5	5	100
Eko Budiono	Direktur <i>Director</i>	5	5	100
Jarot Widyoko	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	5	5	100
Teddy Poernama	Komisaris <i>Commissioner</i>	5	5	100

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2019

Direksi telah melakukan upaya optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selama tahun 2019, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi mencakup penanganan Sistem Pengendalian Internal yang baik, menyusun strategi Perseroan yang efektif serta mempersiapkan Laporan Tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi.

IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' DUTIES AND RESPONSIBILITIES IN 2019

The Board of Directors did its utmost effort to exercise their duties and responsibilities in 2019. Throughout the year, the Board of Directors' duties and responsibilities included adequate handling of the internal control system, formulating an effective Company strategy, and preparing an Annual Report as a form of accountability.

PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2019, tidak ada perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris di dalam Perseroan.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2019, there were no changes in the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam upaya mengamankan investasi dan aset perusahaan, Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif.

Sistem pengendalian internal harus mencakup antara lain:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 - a. Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
 - b. Filosofi dan gaya manajemen;
 - c. Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya
 - d. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
2. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menilai pengelolaan risiko yang relevan.
3. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan.
4. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMN.
5. Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan adalah organ pada Direksi Utama yang menjalankan fungsi kepaniteraan dan administrasi, bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang bersifat material kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan mengedepankan prinsip keterbukaan.

Informasi yang diterbitkan oleh Sekretaris Perusahaan harus akurat, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, terbaru dan disajikan sesuai kebutuhan pihak yang berkepentingan. Sekretaris Perusahaan juga berperan mengatur dan memelihara hubungan antara Perseroan dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang baik dan dua arah.

Keberadaan Sekretaris Perusahaan di Perseroan diatur dalam Salinan Peraturan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/ 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*). Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat satu tingkat di

INTERNAL CONTROL SYSTEM

As part of the effort to secure the Company's investment and assets, the Board of Directors must implement an effective internal control system.

The internal control system must include, among others:

1. A discipline and well-structured internal control environment within the Company, which consists of:
 - a. Employees' integrity, ethical values, and competence;
 - b. Management philosophy and style;
 - c. Measures pursued by the management in exercising its authorities and responsibilities
 - d. The organization and development of human resources; and
 - e. Attention and direction carried out by the Board of Directors
2. Risk assessment, namely a process to identify, analyze, and assess relevant risk management.
3. Control activities, namely actions that take place in a controlling process over the Company's activities in every level and unit in its organizational structure regarding authorities, authorization, verification, reconciliation, assessment on professional achievements, division of tasks, and security of the Company's assets.
4. Information and communication system, namely a process to present reports on the Company's operational and financial activities and their compliance to applicable laws and regulations.
5. Monitoring, namely an assessment process on the quality of the internal control system, including the internal audit function in every level and unit of the Company's organizational structure to ensure an optimal implementation.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is an element that performs secretariat and administrative functions and is responsible for presenting material information to all stakeholders with an emphasis on the principle of transparency.

Information published by the Corporate Secretary must be accurate, transparent, accountable, up-to-date, and presented in accordance with the needs of the relevant parties. The Corporate Secretary also has a role in arranging and maintaining relations between the Company and its stakeholders through adequate two-way communication.

The position of the Corporate Secretary in the Company is stipulated in the Copy of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance. The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the

bawah Direksi yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Fungsi Sekretaris Perusahaan mencakup:

1. Sebagai pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang diberikan kewenangan untuk memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Sekretaris Perusahaan bertindak sebagai juru bicara perusahaan dan pembina fungsi komunikasi, hukum, tanggung jawab sosial perusahaan, dan kesekretariatan;
4. Sebagai kordinator penghubung (*head of liaison officer*) *shareholder & Stakeholder*; dan
5. Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS. Selanjutnya Direksi wajib menjaga dan memperkuat fungsi sekretaris perusahaan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pada tahun 2019 Perseroan telah mengangkat Okky Suryono sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 016/KPTS/IKK/2019.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

WNI, berdomisili di Indonesia. Menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Muhammadiyah Jakarta.

Pengalaman Kerja

Tahun 2019 - saat ini :	Sekretaris Perusahaan PT Indra Karya (Persero)
Tahun 2015 - 2018 :	<i>Corporate Communication</i> PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Tahun 2013 - 2015 :	<i>Corporate Communication</i> PT Sucofindo (Persero)
Tahun 2010 - 2013 :	Kordinator Surveyor Wilayah I (Sumatera, Bali, Maluku Utara, Maluku) PT Sucofindo (Persero)
Tahun 2009 - 2010 :	Ast. Training Manager PT Media Suryatama
Tahun 2005 - 2008 :	Kepala Administrasi & Library PT Perdana Makmur Agung (PMA)
Tahun 2001 - 2005 :	<i>Supervisor Service attendant</i> PT Chikara Adhiyasa

Pengalaman Profesional

Tahun 2018 - 2019 :	Co. Founder & Marketing Director PT Abhinaya Intima Sinergi (AIS)
---------------------	---

President Director in accordance with the Company's internal mechanism and with the approval of the Board of Commissioners/Board of Supervisors.

The Corporate Secretary's functions include:

1. Ensuring that the State-Owned Enterprise complies with regulations on transparency requirements in line with the principles of GCG;
2. Providing information required by the Board of Directors and the Board of Commissioners/Board of Supervisors periodically and at any time upon request;
3. Acting as a spokesperson to the Company who maintains its communicative, legal, corporate social responsibility, and secretarial functions;
4. Acting as a head liaison officer between shareholders and stakeholders, and;
5. Administering and keeping the Company's documents, including but not limited to the List of Shareholders, Special Lists, and minutes from the Board of Directors' Meetings, Board of Commissioners' Meetings, and General Meetings of Shareholders.

THE CORPORATE SECRETARY

In 2019, the Company appointed Okky Suryono as Corporate Secretary based on Decree of the Board of Directors No. 016/KPTS/IKK/2019.

THE CORPORATE SECRETARY'S PROFILE

Citizen of Indonesia, based in Indonesia. Graduated from Muhammadiyah College of Computer Science in Jakarta.

Work Experience

2019-present	:	Corporate Secretary, PT Indra Karya (Persero)
2015-2018	:	Corporate Communications, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
2013-2015	:	Corporate Communications, PT Sucofindo (Persero)
2010-2013	:	Survey Coordinator for Region I (Sumatra, Bali, North Maluku, Maluku), PT Sucofindo (Persero)
2009-2010	:	Assistant Training Manager, PT Media Suryatama
2005-2008	:	Head of Administration & Library, PT Perdana Makmur Agung (PMA)
2001-2005	:	Supervising Service Attendant, PT Chikara Adhiyasa

Professional Experience

2018-2019	:	Co-Founder & Marketing Director, PT Abhinaya Intima Sinergi (AIS)
-----------	---	---

Tahun 2016 - 2019 : Ketua Bidang *Business Development & Funding* Forum Humas BUMN

Tahun 2007 - 2009 : Ketua Bidang Sosial Yayasan Wihdatul Ummah

Tahun 2007 - 2008 : Ketua Umum Lembaga Rumah Buku Jakarta

2016-2019 : Head of Business Development & Funding, State-owned Enterprises' Public Relations Forum

2007-2009 : Head of Social Affairs, Wihdatul Ummah Foundation

2007-2008 : Chair of the Jakarta House of Books Foundation

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)

Tugas Pokok

SPI adalah organ penunjang Direktur Utama yang memiliki tugas pokok membantu Direktur Utama untuk mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur dalam pengelolaan Perseroan, dengan cara melakukan pemeriksaan, analisa dan evaluasi serta pengujian secara independen dalam rangka memberikan saran perbaikan.

SPI dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.

Tanggung Jawab SPI

1. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan Anggaran Satuan Pengawasan Intern
2. Terselenggaranya pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pengendalian keuangan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu Perusahaan
3. Terselenggaranya pemeriksaan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Unit Kerja
4. Terselenggaranya pemeriksaan terhadap Proyek & Pendapatan Hasil Usaha Unit Produksi
5. Terselenggaranya kegiatan Manajemen Resiko Perusahaan, mulai dari identifikasi, analisis hingga penetapan tindakan mitigasi dan kontrol penerapan dalam setiap aktifitas di perusahaan.

Kewenangan

1. Mengusulkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan Anggaran Kegiatan SPI
2. Melakukan pemeriksaan terhadap karyawan dan seluruh Unit Kerja serta menyampaikan temuan-temuan dan usulan rekomendasi perbaikan ke Direksi
3. Memastikan bahwa semua temuan telah ditindak lanjuti
4. Mengusulkan pemeriksaan terhadap objek-objek tertentu dan pemeriksaan khusus

Ukuran Keberhasilan

1. Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Pengawasan Intern (SPI)
2. Tercapainya target pemeriksaan/PKPT yang bersifat rutin secara tepat waktu
3. Tersusunnya Laporan Pemeriksaan yang jelas, akurat, obyektif dan berkualitas sehingga tindakan turun tangan dapat dilaksanakan pada saat yang tepat

INTERNAL SUPERVISION UNIT

Main Duties

The Internal Supervision Unit is a supporting element of the President Director which is tasked with helping the President Director in assessing the implementation of systems and procedures in the Company's management by performing independent inspections, analyses, evaluations, and assessments in order to provide recommendations.

The Internal Supervision Unit is led by a head appointed and dismissed by the President Director in accordance with the Company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners/Board of Supervisors.

Responsibilities of the Internal Supervision Unit

1. Producing the Unit's Annual Inspection Work Program and Budget
2. Inspecting the Company's financial management and control and the implementation of its quality management system
3. Inspecting the Company's Work Plan and the budget of each Work Unit
4. Inspecting the Projects & Operating Income of the Production Unit
5. Ensuring the implementation of the Company's Risk Management, from identification and analysis to mitigation effort and implementation control in each of the Company's activities.

Authorities

1. Making recommendations regarding the Unit's Annual Inspection Work Program and Activity Budget
2. Conducting inspections on all employees and Work Units and presenting all findings and recommendations for improvement to the Board of Directors
3. Ensuring that all findings are being followed-up
4. Recommending inspections on certain objects and special inspections

Measures of Success

1. Production of the Internal Supervision Unit's Work and Budget Plan
2. Implementation of routine and punctual inspection targets
3. Production of clear, accurate, objective, and high-quality Inspection Reports so follow-up actions can be done at the appropriate time

4. Terealisasi tindak lanjut temuan baik Eksternal maupun Internal dengan tuntas
5. Tindak lanjut temuan Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik/BPK, BPKP dan lain-lain)
6. Tersusunnya masukan dan saran perbaikan kepada Direktur Utama serta
7. Termonitornya tindak lanjut atas temuan yang direkomendasikan.

Kepala SPI

Perseroan pada tahun 2019 telah mengangkat T.E. Purnomo sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern berdasarkan Surat keputusan Direksi Nomor : 012/KPTS/IKA/2019.

Profil Kepala SPI

WNI, berdomisili di Indonesia. Menyelesaikan pendidikannya di Universitas Bengkulu.

Pengalaman Kerja

Tahun 2019 - saat ini	: Kepala Satuan Pengawasan Intern
Tahun 2017 - 2019	: General Manager Divisi Usaha Khusus dan Investasi
Tahun 2017	: Senior Ahli Teknik dan Pengembangan Usaha
Tahun 2013 - 2017	: <i>Manager Non Konstruksi (Realty)</i>
Tahun 2010 - 2013	: <i>Deputy General Manager Wilayah III</i>
Tahun 2008 - 2010	: <i>Manager Pengendalian Wilayah III, Jakarta</i>
Tahun 2006 - 2008	: <i>Office Manager</i> Proyek RDSC-2 (EIRTP-2)
Tahun 1999 - 2006	: <i>Office Administrator</i> PLTA Musi
Tahun 1994 - 1994	: <i>Operator Computer</i> Proyek Detail Desain Drainase Ancol
Tahun 1992 - 1993	: <i>Programmer</i> Proyek Administrasi Bantuan Luar Negeri Ditjen Cipta Karya.
Tahun 1988 - 1992	: Administrasi Teknik Proyek Mamak Dam Irrigation Project
Tahun 1986 - 1988	: Staf Pengolah Data Elektronik
Tahun 1984 - 1986	: Staf Bagian Tata Usaha
Tahun 1982 - 1984	: Staf Teknik

Pelaksanaan Tugas SPI 2019

Sepanjang tahun 2019, SPI telah menyelesaikan 9 (sembilan) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau sebesar 100% dari target dalam PKPT tahun 2019 sebanyak 9 (sembilan) LHP. Perbandingan antara target dan realisasi LHP dalam PKPT Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

4. Thorough realization of follow-up actions to findings, both externally and internally
5. Follow-up to findings from External Auditors (Public Accounting Firms, Audit Board, National Government Internal Auditor, etc.)
6. Formulation of suggestions and recommendations for improvement to the President Director, and
7. Monitoring of recommended follow-up actions to all findings.

Head of the Internal Supervision Unit

In 2019, the Company appointed T.E. Purnomo as Head of the Internal Monitoring Unit.

The Head of the Internal Supervision Unit's Profile

Citizen of Indonesia based in Indonesia. Completed his education at the University of Bengkulu.

Work Experience

2019 - present	: Head of the Internal Supervision Unit
2017 - 2019	: General Manager of the Division of Special Business and Investment
2017	: Senior Technical and Business Development Expert
2013 - 2017	: Non-Construction Manager (Realty)
2010 - 2013	: Deputy General Manager in Region III
2008 - 2010	: Control Manager in Region III, Jakarta
2006 - 2008	: Office Manager, RDSC-2 Project (EIRTP-2)
1999 - 2006	: Office Administrator, Musi Water Power Plant
1994	: Computer Operator, Ancol Detailed Drainage Design Project
1992 - 1993	: Administrative Project Programmer for International Aid, Directorate-General of Creative Works
1988 - 1992	: Technical Administration, Mamak Dam Irrigation Project
1986 - 1988	: Electronic Data Processing Staffer
1984 - 1986	: Administration Staffer
1982 - 1984	: Technical Staffer

Implementation of the Internal Supervision Unit's Duties in 2019

In 2019, the Internal Supervision Unit completed 9 (nine) Inspection Result Reports, or 100% of the target set in the Annual Supervisory Work Program. The comparison of the target and realization of the Inspection Result Reports in the Work Program in 2019 is as follows:

No	Uraian Description	LHP 2019	
		Target Obyek pemeriksaan 2019 Object of inspection in 2019	Realisasi Hasil Pemeriksaan 2019 Realization of 2019 Audit Results
1	Kantor Pusat Headquarters	1	1
2	Divisi Engineering I, Malang Division of Engineering I, Malang	2	1

3	Divisi Engineering II, Semarang <i>Division of Engineering II, Semarang</i>	1	1
4	Divisi Engineering III, Jakarta <i>Division of Engineering III, Jakarta</i>	2	2
5	Divisi Survei dan Investigasi, Malang <i>Survey and Investigation Division, Malang</i>	1	1
6	Divisi Usaha dan Khusus Investasi, Jakarta <i>Division of Special Business and Investment, Jakarta</i>	1	1
7	Pemeriksaan Khusus <i>Special Inspections</i>	1	2
	Jumlah <i>Total</i>	9	9

AUDIT EKSTERNAL

Perusahaan menunjuk Audit Eksternal untuk memastikan bahwa setiap laporan keuangan baik secara bulanan, triwulanan maupun tahunan telah disusun secara akurat, benar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku beserta perubahannya. Pelaksanaan Audit Eksternal pada umumnya dilakukan oleh Auditor Eksternal atau Akuntan Publik independen yang berasal dari luar Perseroan dan bekerja di sebuah Kantor Akuntan Publik. Hal itu untuk menjamin objektivitas hasil audit dan opini yang diberikan terkait laporan keuangan.

Persyaratan Audit Eksternal

- Memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik.
- Telah memiliki pengalaman audit di bidang jasa konsultan rekayasa (*Engineering*).
- Tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan Dewan Komisaris, Direksi dan pihak lain yang dapat mengendalikan Perseroan serta pihak lain yang memiliki kepentingan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- Terdaftar sebagai Kantor Akuntan Publik pada Otoritas Jasa Keuangan.

Di tahun 2019, Perseroan telah mempercayakan Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan, KAP memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, atas posisi keuangan PT Indra Karya (Persero) tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

MANAJEMEN RISIKO

Setiap Organisasi akan menghadapi serangkaian risiko yang dapat memberikan pengaruh atau dampak terhadap pencapaian tujuan. PT Indra Karya (Persero) atau IKA sebagai entitas bisnis yang bergerak dibidang *Engineering*, *Developer* dan *Industry* bisa terjadi kemungkinan menghadapi risiko yang berdampak terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Risiko yang dapat memberikan pengaruh atau dampak terhadap pencapaian tujuan tersebut menjangkau seluruh aktivitas perusahaan mulai dari inisiatif strategis sampai kegiatan

EXTERNAL AUDIT

The Company appoints an External Auditor to ensure that all monthly, quarterly, and annual financial reports are produced accurately in accordance with the applicable Financial Accounting Standards. External Audit is commonly conducted by an External Auditor or an Independent Public Accountant from outside the company who works for a Public Accounting Firm. This is to ensure the objectivity of audit results and opinions given on the Company's financial reports.

Requirements for External Auditor

- Has a good reputation and track records.
- Has experience in auditing in the engineering consulting services sector.
- Have no direct or indirect relations with the Board of Commissioners, Board of Directors, and other parties that can control the company as well as other parties with interest in the Company's operational activities.
- Must be registered as a Public Accounting Firm in the Financial Services Authority.

In 2019, the Company appointed Doli, Bambang, Sulistiyanto, and Dadang & Ali Public Accounting Firm to audit its Financial Report.

Based on the audit, the Public Accounting Firm provided reasonable assurance in all material aspects on PT Indra Karya's (Persero) financial position on 31 December 2019 as well as its financial performance and cashflow for the year ended on the aforementioned date in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

RISK MANAGEMENT

Every organization will face a series of risks that can influence or impact on how it achieves its objectives. As an entity that engages in Engineering, Developer, and Industry, PT Indra Karya (Persero) acknowledges the possibility of facing risks that can impact on the Company's objectives. Such risks encompass all activities within the Company, from strategic initiatives to operational activities, business process, and projects, and are declared in the organization's social, environmental, safety, security, commercial, financial, and economic terminology.

operasional, proses bisnis, proyek-proyek, dan dinyatakan ke dalam terminologi sosial, lingkungan, keselamatan, keamanan, komersial, keuangan dan ukuran ekonomis suatu organisasi.

Seluruh aktivitas Perseroan yang melibatkan risiko dimaksud harus dikelola dengan seksama. Sedangkan proses Manajemen Risiko Perusahaan (MRP) dapat membantu dalam Pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan:

1. Ketidakpastian dan kemungkinan atas kejadian, atau
 2. Keadaan (yang diinginkan atau tidak diinginkan) di masa mendatang, dan
 3. Pengaruhnya terhadap tujuan yang telah disepakati
- Perseroan telah mengidentifikasi jenis resiko sebagai berikut:

A. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi yang tidak tepat dalam pengambilan keputusan bisnis atau kurang responsifnya perusahaan terhadap perubahan eksternal. Risiko Strategik berhubungan dengan keputusan-keputusan bisnis jangka panjang seperti bisnis mana yang akan dikembangkan atau bisnis mana yang menjadi prioritas utama. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan atas strategik yang telah dicanangkan tersebut, dibutuhkan strategik bisnis yang tepat, kebutuhan sumber daya untuk pencapaian strategik, kualitas implementasi, keterpaduan saluran komunikasi, sistem operasi, jaringan distribusi dan kapasitas serta kemampuan manajerial. Oleh karena itu sebelum risiko strategik terjadi, jangan menganggap remeh risiko strategik.

B. Risiko Finansial

Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen keuangan Perusahaan adalah:

1. Risiko pasar
Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan harga pasar.
 - a. Risiko Tingkat Suku Bunga
Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan bank, deposito yang dibatasi penggunaannya, utang bank jangka pendek dan utang pembiayaan.
 - b. Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perusahaan secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan *swap* suku bunga saat ini.

All activities within the Company that involve such risks must be managed thoroughly. The Corporate Risk Management System can provide assistance in decision-making by taking into account:

1. Uncertainty and possibility of an event
 2. Circumstances (wanted or unwanted) in the future, and
 3. Their influence on the Company's approved objectives
- The Company has identified the types of risk as follows:

A. Strategic Risk

Strategic risk is caused by, among others, inappropriate determination and implementation of a strategy in decision-making or the Company's lack of response to external changes. Strategic risk is related to the Company's long-term business decisions, such as which businesses will be developed, or which businesses will be prioritized. In order to achieve the Company's strategic objectives, appropriate business strategy, resources to achieve the said strategy, quality of implementation, and the integration of communication channels, operating systems, distribution networks, and managerial capacities and abilities are required. Therefore, prior to the occurrence of strategic risk, such risk is to not be underestimated.

B. Financial Risk

The probability rates of highly potential risks to the Company's financial instruments are:

1. Market Risk
Market risk is a risk mainly caused by changing market prices.
- a. Interest Rate Risk
Interest rate risk is a risk in which the reasonable assurance or future contractual cashflow of a financial instrument will be affected by changes in the market interest rate. The Company's exposure is influenced by interest rate risk mainly in relation to cash in banks, restricted deposits, current bank loans, and financing loans.
- b. The Company strictly monitors market interest rate fluctuations and market expectations so that it can pursue measures that benefit the Company in a timely manner. The management does not deem interest rate swap as necessary at the moment.

2. Risiko kredit dan risiko likuiditas

Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional.

Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan risiko yang mencakup toleransi risiko dalam strategi mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

Risiko kredit adalah risiko dalam hal pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan.

Perusahaan dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi dan dari aktivitas pendanaan, termasuk deposito pada bank, transaksi valuta asing dan instrumen keuangan lainnya.

Risiko kredit terutama berasal dari kas di bank, piutang lainnya.

Risiko kredit yang berasal dari piutang usaha - pihak ketiga dan piutang lain-lain - pihak ketiga dikelola oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan pengendalian dari Perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan dan piutang lain-lain.

Batasan kredit ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Saldo piutang pelanggan dimonitor secara teratur oleh manajemen dan untuk bank, Perusahaan meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan pada lembaga keuangan yang bereputasi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko dalam hal Perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.

C. Risiko Operasional

Secara alami risiko operasional bertujuan untuk mengklasifikasikan risiko operasional secara homogen untuk mengidentifikasi secara spesifik tanggung jawab dan pengukuran manajemen risiko. Kategori risiko operasional menurut Silvestri, Cagno dan Trucco (2009) adalah sebagai berikut :

2. Credit Risk and Liquidity Risk

The importance of managing the probability of this risk has significantly increased considering a number of changing parameters and the volatility of financial markets, both in Indonesia and internationally.

The Board of Directors has reviewed and approved risk policy that includes risk tolerance in its strategy to manage the following types of risk:

Credit Risk is a risk in which a third-party fails to fulfill its liabilities based on financial instruments or customer contracts, which causes financial loss.

The Company faces credit risks from its operational activities and financing activities, including bank deposits, foreign currency transactions, and other financial instruments.

Credit risk mainly comes from cash in bank and other receivables.

Credit risk that comes from account receivables from third parties and other receivables from third parties is managed by the Company's management in accordance with its policy, procedures, and control system in relations to the management of customer credit risk and other receivables.

Credit limits are set for all customers based on internal assessment criteria. Customers' receivable balances are monitored regularly by the Company's management; for banks, the Company minimizes credit risk by placing funds in reputable financial institutions.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk in which the Company fails to fulfill its liabilities on the maturity date. The Company strictly evaluates and monitors all flows of cash-in and cash-out to ensure the availability of funds to repay maturing liabilities. In general, funding requirements to repay current and non-current maturing liabilities are obtained from sales to customers.

C. Operational Risk

Operational risk naturally aims to classify risks homogeneously to specifically identify the responsibilities and measurement of the risk management system. The categories of operational risk according to Silvestri, Cagno and Trucco (2009) are as follows:

- Risiko teknologi
Kelompok aktivitas dimana sumber risiko berasal dari hasil implementasi teknologi seperti tingkat *performance* aset yang rendah, kegagalan dalam implementasi teknologi.
- Risiko rantai suplai
Aktifitas yang berhubungan dengan *procurement*, *inspection* dan aktifitas logistik atau sumber daya manusia.
- Risiko proyek
Aktifitas yang berhubungan dengan mutu, waktu, biaya dan kualitas yang terkait dalam proyek.
- Risiko lingkungan
Kejadian yang memberi dampak terhadap lingkungan ketika sistem sedang beroperasi.
- Risiko kesehatan dan keselamatan kerja
Kejadian yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan kerja.
- Risiko informasi
Kejadian yang berhubungan dengan alur informasi yang terdapat dalam sebuah sistem.
- Risiko organisasi
Aktifitas-aktifitas yang berhubungan dengan lemahnya koordinasi, pembagian tugas yang tidak jelas dan konflik yang tinggi.
- Risiko manajemen
Aktifitas yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam proses manajemen dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, risiko manajemen menjadi kunci yang menggerakkan dalam manajemen risiko.
- Risiko aset dan fasilitas
Kejadian yang berhubungan dengan aset dan fasilitas yang menjadi sumber risiko.

D. Risiko Legal/Hukum

Adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan dengan risiko hukum ini, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a. Kebutuhan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
- b. Kebutuhan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru
- c. Kebutuhan memiliki satuan kerja
- d. Kebutuhan menilai dampak perubahan ketentuan/peraturan terhadap risiko hukum
- e. Kebutuhan untuk menerapkan sanksi secara konsisten dan konsekuen
- f. Kebutuhan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian-perjanjian dengan pihak lain dalam hal efektivitas

- Technological Risk
A group of activities in which the source of risk comes from implementation of technology such as low asset performance rate and failure in implementation of technology.
- Supply Chain Risk
Activities related to procurement, inspection, logistics, and human resources.
- Project Risk
Activities related to the quality, timing, and cost of a project.
- Environmental Risk
Events that result in environmental impact while a system is running.
- Occupational Health and Safety Risk
Events that impact on occupational health and safety.
- Information Risk
Events related to the flow of information in a system.
- Organizational Risk
Activities related to the lack of coordination, lack of concrete division of tasks, and high level of conflict.
- Management Risk
Activities that cause imbalance in the management and decision-making process. In this case, management risk is the key that mobilizes risk management.
- Asset and Facility Risk
Events related to assets and facilities that serve as a source of risk.

D. Legal Risk

Legal risk is caused by judicial aspects such as lawsuits, lack of supporting laws and regulations, and loopholes in agreements including failure to fulfill the validity requirements of a contract, and disobedience to applicable laws and regulations.

In terms of legal risk, matters that must be carefully considered are as follows:

- a. Requirement to have written policies and procedures
- b. Requirement for legal aspect analysis procedures for all new products and activities
- c. Requirement for a work unit
- d. Requirement for assessment of the impact of legal/regulatory changes on legal risk
- e. Requirement to implement sanctions consistently and consequently
- f. Requirement to conduct periodical reviews of contracts and agreements with other parties in terms of effectiveness

E. Risiko Marketing

- a. Persentase Biaya Promosi
Poin utama yang harus diperhatikan adalah seberapa besar persentase biaya promosi yang akan dilakukan pada bisnis perusahaan.
- b. Indeks Kepuasan Pelanggan
Indikator penting lainnya adalah mengenai kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Perusahaan menyediakan akses informasi dan data perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan dan memberikan kemudahan akses informasi mengenai aktivitas dan kinerja Perusahaan kepada pemangku kepentingan agar mengetahui kondisi Perusahaan secara jelas dan terbuka. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PT Indra Karya (Persero) menyediakan berbagai sarana informasi sebagai wujud komitmen PT Indra Karya (Persero) untuk meningkatkan transparansi perusahaan dan membentuk perangkat pelayanan Informasi Publik dalam ruang lingkup korporasi PT Indra Karya (Persero). Beberapa sarana informasi yang disediakan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut :

Website : www.indrakarya.co.id
 Instagram : www.instagram.com/pt_indrakarya
 Twitter : www.twitter.com/PT_IndraKarya
 Facebook : [www.facebook.com/PT.Indra Karya \(Persero\)](https://www.facebook.com/PT.IndraKarya(Persero))

Dalam website Perusahaan telah disajikan berbagai informasi terkini mengenai kegiatan usaha, dan berbagai hal penting yang dilaksanakan oleh Perusahaan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Sejalan dengan komitmen Perseroan dalam implementasi GCG, PT Indra Karya (Persero) senantiasa memperhatikan kepentingan setiap *stakeholders* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Dalam pelaksanaannya, sering kali muncul pengaduan pelanggaran dari pihak *stakeholders* sebagai akibat dari kurang diperhatikannya hak-hak *stakeholders* dengan baik atau bahkan kadang-kadang terabaikan oleh pihak Perseroan.

Pengaduan pelanggaran oleh *stakeholders*, apabila tidak diselesaikan dengan baik akan berpotensi merugikan *stakeholders* dan atau Perseroan sendiri.

Pedoman yang mengatur mekanisme standar dalam penanganan pengaduan pelanggaran mutlak diperlukan agar tidak terjadi perselisihan atau sengketa antara pihak *stakeholders* dan Perseroan. Sehingga tidak berlanjut pada persoalan turunnya reputasi dan kepercayaan masyarakat pada Perseroan.

E. Marketing Risk

- a. Promotional Cost Percentage
The primary points that need to be considered is the percentage of promotional costs that will be spent for the Company's business.
- b. Customer Satisfaction Index
Another important indicator is customer satisfaction or lack thereof.

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

The Company provides all stakeholders with access to information and data in order to keep them informed about the Company's condition in a clear and transparent manner. This is done in accordance with Law No. 14 on 2008 on Public Information Disclosure. Indra Karya (Persero) provides various platforms of information as a Indra Karya (Persero) of its commitment to improving transparency and establishing a public information service unit within the Company. The platforms of information provided by the Company include:

Website : www.indrakarya.co.id
 Instagram : www.instagram.com/pt_indrakarya
 Twitter : www.twitter.com/PT_IndraKarya
 Facebook : [www.facebook.com/PT. Indra Karya \(Persero\)](https://www.facebook.com/PT.IndraKarya(Persero))

The Company's website contains the latest information on its operational activities and important updates presented in both Indonesian and English.

WHISTLE-BLOWING SYSTEM

In line with the Company's commitment to implementing GCG principles, PT Indra Karya (Persero) always takes into account the interest of its stakeholders based on the principle of fairness.

In its implementation, complaints of violations often come from the Company's stakeholders as a result of their rights being ignored by the Company.

If not resolved adequately, such complaints of violations can potentially harm the stakeholders or the Company itself.

Guidelines that regulate the standard mechanism for the handling of complaints of violations are absolutely required to avoid disputes between the Company and its stakeholders, and therefore preventing degrading reputation and lack of public trust in the Company.

Untuk itu, Perseroan telah membangun sistem pelaporan pelanggaran yang dikenal dengan nama WBS (*Whistle Blowing System*).

Dalam melaksanakan WBS, Perseroan mengacu kepada kebijakan yang berlaku di tahun 2019 yakni Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor: PER-13/MBU/10/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan BUMN. Pedoman tersebut mengatur mengenai saluran pelaporan atas dugaan pelanggaran (*whistle blowing system*) terhadap dugaan adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan bagi seorang Pegawai ASN Kementerian BUMN atau pihak-pihak lainnya.

Maksud dan Tujuan WBS

Sebagai wujud komitmen penegakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Perseroan berpedoman kepada penerapan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran dari Kementerian BUMN yang memberikan kesempatan kepada pegawai di Perseroan serta pihak eksternal lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perseroan dalam penegakan fungsi sebagai Perusahaan BUMN.

Maksud

1. Menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan menangani dugaan pelanggaran di lingkungan Perusahaan BUMN.
2. Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian Negara;
3. Meningkatkan integritas pegawai di lingkungan Perseroan;
4. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Tujuan

Tujuan Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran adalah untuk memberikan acuan pelaporan dan penanganan terhadap dugaan pelanggaran di lingkungan Perusahaan BUMN yang meliputi dugaan tindak pidana korupsi dan benturan kepentingan, serta perlindungan terhadap pelapor.

Pengelola Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran

Perseroan telah membentuk Tim *Whistle Blowing System* yang memiliki tugas:

1. Menerima laporan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan Perseroan dari Pelapor;
2. Mengkoordinasikan penanganan tindak lanjut atas laporan yang masuk melalui Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran;

For that purpose, the Company has established a Whistle-Blowing System (WBS).

In implementing WBS, the Company refers to a policy applicable in 2019, namely Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of Indonesia No. PER-13/MBU/10/2015 on the Guidelines to the Management of Whistle-Blowing System in the Ministry of State-Owned Enterprises and State-Owned Enterprises. The guidelines regulate a whistle-blowing system to handle alleged or potential conflict of interest for civil servants in the Ministry of State-Owned Enterprises and other parties.

Purposes and Objective of WBS

As part of the Company's commitment to enforcing principles of Good Corporate Governance, the Company is guided by the implementation of the Whistle-Blowing System by the Ministry of State-Owned Enterprises, which provides opportunities for employees in the Company and other external parties to file reports on alleged violations based on accountable evidence and in good faith for the interest of the Company and to enforce its function as a State-Owned Enterprise.

Purposes

1. To create an organizational culture that can identify, prevent, and handle alleged violations in a State-Owned Enterprise.
2. To improve the quality of public services and prevent State losses;
3. To improve the integrity of employees in the Company;
4. To increase the implementation of a clean and commanding government.

Objective

The objective of the Guidelines of the Management of the Whistle-Blowing System is to provide references to the reporting and handling of alleged violations in a State-Owned Enterprise, which include alleged acts of corruption and conflict of interest and protection for whistleblowers.

Management of the Whistle-Blowing System

The Company has established a Whistle-Blowing System Team tasked with:

1. Receiving reports on alleged violations done by employees in the Company from Whistleblowers
2. Coordinating the follow-up action on reports received through the Whistle-Blowing System;

3. Mengkoordinasikan pemberian perlindungan terhadap Pelapor dengan instansi yang berwenang;
4. Memantau penanganan penyelesaian laporan yang masuk melalui Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran;
5. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap efektifitas Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran di perusahaan BUMN.

Perlindungan Terhadap Pelapor (*Whistleblower*)

Perseroan berkomitmen memberikan Perlindungan Terhadap Pelapor atas Dugaan Pelanggaran dengan itikad baik. Perseroan juga akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran. Maksud adanya perlindungan Pelapor adalah untuk mendorong terjadinya pelaporan Dugaan Pelanggaran dan menjamin keamanan Pelapor.

Pelapor yang menginginkan identitasnya tetap dirahasiakan diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya.

3. Coordinating protection for Whistleblowers with the authorized agencies;
4. Monitoring the handling of reports received through the Whistle-Blowing System;
5. Performing evaluation and improvement of the effectiveness of the Whistle-Blowing System in the State-Owned Enterprise.

Protection for Whistleblowers

The Company is committed to providing Protection for Whistleblowers on Alleged Violations in good faith. The Company will also comply with all applicable laws and regulations in implementing the Whistle-Blowing System. Protection for Whistleblowers aims to encourage reporting on alleged violations and ensure the safety of Whistleblowers.

Whistleblowers who prefer their identities to remain confidential will be guaranteed of the confidentiality of their private identities.



Perseroan wajib melindungi Pelapor yang beritikad baik, melalui:

1. Tersedianya fasilitas saluran pelaporan.
2. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor apabila Pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi Pelapor.
3. Jaminan keamanan informasi dan perlindungan terhadap tindakan balasan dari Terlapor atau Perseroan, yang berupa ancaman keselamatan fisik, teror psikologis, keselamatan harta, perlindungan hukum dan keamanan pekerjaan, tekanan, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan atau pangkat, pemecatan yang tidak adil, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi.
4. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada unit kerja mana tindak lanjut diserahkan. Informasi tersebut disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.

Tim Pengelola WBS hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Mekanisme Penyampaian Laporan pelanggaran

Mekanisme penyampaian laporan pelanggaran yaitu laporan dapat langsung dan/atau tidak langsung disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan, selaku Sekretaris Tim *Whistle Blowing System*.

Untuk laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran, agar kerahasiaannya lebih terjaga, Pengelola Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh Pelapor;
2. Menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas Pelapor;
3. Mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
Tidak memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama pelapor, atau hubungan pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;
4. Tidak memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa Pelapor;
5. Hindari orang lain mengetahui nama samaran (*username*), kata sandi (*password*) serta nomor registrasi pelapor.

Perseroan juga menyediakan saluran khusus bagi pelapor yang akan menyampaikan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran, yaitu:

Telepon : (021) 8192636

Website : www.indrakarya.co.id

The Company is obliged to protect Whistleblowers in good faith by:

1. Guaranteeing the availability of whistle-blowing facilities.
2. Guaranteeing the confidentiality of the Whistleblower's identity if the Whistleblower provides their identity and information that can be used to contact them.
3. Ensuring information security and protection against any act of retaliation from the Reported Party or the Company, including physical threat, psychological terror, material safety, legal protection, job security, pressure, delayed promotion, demotion, unfair dismissal, any form of harassment and discrimination, and adverse notes in personal data files.
4. Providing information of follow-up acts including when, how, and to which work unit the follow-up act is being done. Such information is presented discreetly to Whistleblowers with complete identities.

The WBS Management Team can only disclose the identity of a Whistleblower for investigation and trial requirements.

Whistle-Blowing System Mechanism

According to the whistle-blowing system mechanism, reports can directly and/or indirectly filed to the Corporate Secretary as Secretary to the Whistle-Blowing System Team.

For reports on alleged violations filed through the Whistle-Blowing System, in order to ensure the confidentiality of Whistleblowers the Management Team implements the following:

1. Creating usernames and passwords only known to the Whistleblower;
2. Creating unique names/identities without disclosing the identity of the Whistleblower;
3. Keeping adequate records on usernames and passwords; Not disclosing personal data such as the name of the whistleblower or their relations to the alleged perpetrator;
4. Not disclosing data/information that enables other people to track and discover the whistleblower;
5. Preventing other people from knowing the whistleblower's username, password, and registration number.

The Company also provides special channels for Whistleblowers who would like to present complaints/reports on alleged violations, namely:

Phone : (021) 8192636

Website : www.indrakarya.co.id

Email : indrakarya@indrakarya.co.id
Faksimili : (021) 8192179
Surat resmi ditujukan kepada Ketua Tim *Whistle Blowing System*.

Wewenang Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran

1. Melakukan penanganan atas Laporan Dugaan Pelanggaran.
2. Mengusulkan tindak lanjut penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada:
 - a. Penanggung Jawab, atas Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi; atau
 - b. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, atas Dugaan Pelanggaran Benturan Kepentingan.
3. Memberikan usulan kepada Penanggung Jawab terkait dengan adanya permintaan perlindungan dari Pelapor;
4. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Kementerian BUMN.

Penanganan Pengaduan

Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan dan/atau yang masuk melalui saluran khusus untuk laporan dugaan pelanggaran, akan segera ditindaklanjuti dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya dugaan pelanggaran. Sekretaris Perusahaan berhak melakukan komunikasi dengan Pelapor.

Pencatatan laporan dugaan pelanggaran dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Direksi, dan pelapor diwajibkan untuk melampirkan bukti-bukti terjadinya pelanggaran.

Selanjutnya, Tim *Whistle Blowing System* akan menelaah dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran, kemudian melakukan pengarsipan dokumen laporan.

Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjut

Sampai dengan akhir periode pelaporan tahun 2019, tidak ada pengaduan yang masuk dan diproses, serta tidak ada sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses.

GRATIFIKASI

Dalam upaya menciptakan lingkungan Perseroan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta terwujudnya peningkatan integritas karyawan, Direksi telah menetapkan Keputusan tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dengan Nomor: 008/KPTS/IKA/2019.

Dalam setiap bisnis, pemberian dan/atau permintaan Gratifikasi dari salah satu pihak adalah hal yang tidak bisa dihindarkan. Gratifikasi tersebut juga tidak bisa

Email : indrakarya@indrakarya.co.id
Facsimile: (021) 8192179
Official letter addressed to the Chair of the Whistle-Blowing System.

Authorities of the Whistle-Blowing System Management Team

1. Performing the handling of reports on alleged violations.
2. Providing recommendations for follow-up acts to reports on alleged violations to the:
 - a. Person in Charge on Alleged Acts of Corruption; or
 - b. Officials authorized to impose disciplinary actions on Alleged Conflicts of Interest
3. Providing recommendations to the Person in Charge regarding request for protection from the Whistleblower;
4. Performing other actions required to implement the Whistle-Blowing System in the Ministry of State-Owned Enterprises.

Handling of Complaints

Reports on alleged violations presented to the Corporate Secretary and/or through the Whistle-Blowing System will be followed-up within 14 days since the alleged violation took place. The Corporate Secretary has the right to communicate with the Whistleblower.

Records of reports on alleged violations are taken by officials appointed by the Board of Directors, and the Whistleblower is required to include evidence of violation in their report.

Subsequently, the Whistle-Blowing System Team will analyze and follow-up reports on alleged violations and archive the reporting documents.

Number of Complaints and Follow-ups

Until the end of the 2019 reporting period, no complaint was filed, and no sanction/follow-up was taken against a processed complaint.

GRATUITIES

As part of the Company's effort to create an environment that is free from Corruption, Collusion, and Nepotism and to improve the integrity of its employees, the Board of Directors issued a Decree on the Guidelines to Gratuity Control No. 008/KPTS/IKA/2019.

In every business, a gift of and/or request for gratuity from a party is often unavoidable. Such unavoidable gratuities from elements of PT Indra Karya (Persero) can potentially

dihindarkan dari insan PT Indra Karya (Persero) yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan akan mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme dalam pengambilan keputusan.

Sebagai upaya menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar tetap harmonis, Perseroan telah mengatur Pedoman Pengendalian Gratifikasi selaras dengan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dan Nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan.

Tujuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Pedoman Pengendalian Gratifikasi selain sebagai komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dan *Code of Conduct*, juga bertujuan untuk mewujudkan insan Perseroan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain itu, Pedoman itu juga mengutamakan kepatuhan pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan normal-norma yang berlaku pada masyarakat yang senantiasa mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan.

Prinsip Dasar Gratifikasi

Prinsip dasar dalam penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi adalah:

1. Penolakan Terhadap Gratifikasi
Insan PT Indra Karya (Persero) wajib menolak apabila ditawarkan dan/atau diberikan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) secara sopan dan santun serta melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Perseroan. Insan Perseroan juga dilarang memberikan atau menawarkan Gratifikasi dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, Perserorangan atau kelembagaan untuk manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi
Insan Perseroan dilarang menerima Gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung, baik inisiatif sendiri maupun orang lain dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau mempengaruhi pihak yang dimaksud untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan jabatan/wewenang.

Sanksi dan Pelanggaran

Sekretaris Perusahaan PT Indra Karya (Persero) telah mengedarkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini pada *website* Perseroan sehingga seluruh insan Perseroan dianggap mengerti dan siap menjalankan ketentuan dalam Pedoman Gratifikasi tersebut.

cause conflicts of interest and affect the independence, objectivity, and professionalism in the Company's decision-making process.

As part of the effort to maintain harmonious relations with all stakeholders, the Company has established Guidelines to Gratuity Control in accordance with the Implementation of Good Corporate Governance, Code of Conduct, and the Company's Values.

Objectives of Guidelines to Gratuity Control

The Guidelines to Gratuity Control, in addition to being part of the Company's commitment to implement the principles of GCG and Code of Conduct, also aims to ensure that the Company's elements are free from Corruption, Collusion, and Nepotism. Additionally, the Guidelines also prioritize compliance with applicable laws and regulations and adherence to prevailing norms, which put the interest of the Company above that of an individual, family, group, or faction.

Basic Principles of Gratuities

The basic principles in the Guidelines to Gratuity Control are:

1. Rejection Against Gratuities
All elements of PT Indra Karya (Persero) are obliged to reject any offer and/or gift in the form of goods/merchandise and entertainment politely as well as to report such occurrence to the Company's Gratuity Control Unit. All elements of the Company are also prohibited from giving or offering gratuities in any form to any government agency, individual, or institution as stipulated in applicable laws and regulations.
2. Acceptance and Gift of Gratuities
All elements of the Company are prohibited from receiving gratuities, both on their own initiatives or others' from all parties with business relations or competitors who seek to obtain information or matters not justified by the law, or influencing the said parties to perform/not perform an act related to positions and/or authorities.

Sanctions and Violations

The Corporate Secretary of PT Indra Karya (Persero) has published the Guidelines to Gratuity Control on the Company's website, and thus all elements in the Company are expected to understand and be ready to comply with the provisions stipulated in the Guidelines.

Bagi siapapun Insan Perseroan yang melanggar ketentuan dalam Pedoman tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan. Bahkan berpotensi dikenakan tindak pidana suap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL

Penerapan KPKU dilatar belakangi oleh tuntutan Kementerian BUMN kepada Perusahaan agar mampu meningkatkan daya saing dengan berpedoman pada KPKU. Dalam rangka implementasi KPKU, Perusahaan dapat menilai semua elemen di perusahaan tersebut yang berpengaruh pada pengelolaan perusahaan, peningkatan proses, dan peningkatan hasil PT Indra Karya (Persero) yang telah menerapkan Penilaian Kinerja Unggul untuk pertama kalinya pada tahun 2019 berdasarkan Surat Kementerian BUMN No.S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 (KPKU). Implementasinya dapat kita lihat dari pelaksanaan penilaian kinerja kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN.

Any element in the Company who violates any provision in the Guidelines will receive a sanction in accordance with applicable provisions in the Company. In addition, they can also be charged with receiving bribes in accordance with applicable laws and regulations.

SUPERIOR PERFORMANCE CRITERIA (SPC)

The implementation of SPC is based on the Ministry of State-owned Enterprises' demand that the Company be able to improve its competitiveness with guidance from SPC. With the implementation of SPC, the Company can assess all of its elements that affect the management, process improvement, and result improvement of PT Indra Karya (Persero). The Company implemented SPC for the first time in 2019 in accordance with Letter of the Ministry of State-owned Enterprises No. S-08/S.MBU/2013 on 16 January 2013 (SPC). The implementation took place in the form of a performance assessment for the Board of Commissioners and the Board of Directors exercised by a team appointed by the Ministry of State-owned Enterprises.



Evaluasi kinerja KPKU didasarkan pada 2 (dua) dimensi penilaian, yaitu proses dan hasil Faktor yang digunakan untuk menilai proses adalah ADLI. Sementara faktor yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil perusahaan adalah Level, Trend, Comparison dan Integration (LeTCI). Hasil skor atas penilaian penerapan KPKU dan kategorinya adalah sebagai berikut :

SPC evaluation is based on two assessment dimensions, namely process and results. The factor used to assess process is ADLI, while the factor used to assess results is Level, Trend, Comparison, and Integration (LeTCI). Scores of the SPC implementation and its categories are as follows:

Skala Skor Scale Score	Kategori Category
876-1.000	World Class Leader
776-875	Benchmark Leader
676-775	Industri Leader
576-675	Emerging Industry Leader
476-575	Good Performance
376-475	Early Improvement
276-375	Early Result
0-275	Early Development

PENILAIAN KPKU 2019

Hasil KPKU 2019 adalah sebagai berikut :

RESULTS OF 2019 SPC

The results of the 2019 SPC are as follows:

kategori Category	skor maksimal Maximum score (1)	persentase Percentage (2)	skor (nominal) Score (nominal) (3=1x2)
KATEGORI 1: KEPEMIMPINAN CATEGORY 1: LEADERSHIP			
1.1 Kepemimpinan Senior Senior Leadership	70	40	28,00
1.2 Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan Governance and Social Responsibility	50	35	17,50
KATEGORI 2: STRATEGI CATEGORY 2: STRATEGY			
2.1 Pengembangan Strategi Strategy Development	45	40	18,00
2.2 Implementasi Strategi Implementation of the Strategy	40	35	14,00
KATEGORI 3: PELANGGAN CATEGORY 3: CUSTOMER			
3.1 Suara Pelanggan Customer Voice	40	35	14,00
3.2 Keterikatan (Engagement) Pelanggan Customer Engagement	45	35	15,75
KATEGORI 4: PENGUKURAN, ANALISIS DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN CATEGORY 4: MEASUREMENT, ANALYSIS AND KNOWLEDGE MANAGEMENT			
4.1 Pengukuran, Analisis dan Perbaikan Kinerja Perusahaan Measurement, Analysis and Improvement of Company Performance	45	35	15,75
4.2 Manajemen Pengetahuan, Pengelolaan Informasi dan Teknologi Informasi Knowledge Management, Information Management and Information Technology	45	35	15,75
KATEGORI 5: TENAGA KERJA CATEGORY 5: LABOR			
5.1 Lingkungan Tenaga Kerja Labor Environment	40	35	14,00
5.2 Keterikatan (Engagement) Tenaga Kerja Workforce Engagement	45	40	18,00
KATEGORI 6: OPERASIONAL CATEGORY 6: OPERATIONAL			
6.1 Proses Kerja Work Process	45	35	15,75
6.2 Efektivitas Operasional Operational Effectiveness	40	35	14,00
KATEGORI 7: DIMENSI HASIL CATEGORY 7: DIMENSIONS OF RESULTS			
7.1 Hasil/Kinerja Produk dan Proses Results/Product and Process Performance	120	30	36,00
7.2 Hasil/Kinerja Fokus Pelanggan Customer Focus/Results	80	35	28,00
7.3 Hasil/Kinerja Fokus Tenaga Kerja Work Focus Results/Performance	80	35	28,00
7.4 Hasil/Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola Results/Performance of Leadership and Governance	80	35	28,00
7.5 Hasil/Kinerja Finansial dan Pasar Financial and Market Results/Performance	90	35	31,50
Jumlah Total	1.000		352,00
kategori Category			

PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan bahwa KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berkaitan dengan itu Peraturan diatas, mengamatkan pula bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah memegang jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat.

Kebijakan Pelaporan LHKPN

Berdasarkan pasal 2 UU No.28 tahun 1999, penyelenggara yang wajib melapor LHKPN adalah Pejabat Negara yang sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundangan yang berlaku dan pejabat yang memiliki fungsi strategis. Menindaklanjuti Undang Undang tersebut, Berdasarkan kebijakan tersebut ditetapkan jabatan-jabatan struktural di lingkungan INDRA KARYA yang diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (selanjutnya disebut LHKPN), yaitu:

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Sekretaris Perusahaan;
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern;
5. GM Pengendalian dan Manajemen Risiko;
6. GM SDM, Umum dan IT;
7. GM Teknik dan Pemasaran;
8. GM Keuangan dan Akuntansi

Penyampaian Laporan

Pada tahun buku 2018, seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan PT Indra Karya (Persero) telah menyampaikan kewajibannya.

STATE ADMINISTRATION WEALTH REPORT

In accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission, the Corruption Eradication Commission (KPK) is authorized to exercise prevention measures or effort, including by mandating registration and examining State Administration Wealth Report. The aforementioned law makes it mandatory for that all elements of state administration to report and announce their wealth before and after their terms of office, and consent to examination of their wealth before and after their terms of office.

Policy on State Administration Wealth Report

In accordance with Article 2 of Law No. 28 of 1998, elements of state administration obliged to present a State Administration Wealth Report are state officials as stipulated in applicable laws and regulations and officials who exercise strategic functions. Based on the policy, the following structural officials at INDRA KARYA are obligated to present a State Administration Wealth Report:

1. Board of Commissioners;
2. Board of Directors;
3. Corporate Secretary;
4. Head of the Internal Monitoring Unit;
5. GM of Risk Control and Management;
6. GM of Human Resources, General Affairs, and IT;
7. GM of Technical Affairs and Marketing;
8. GM of Finances and Accounting.

Report Presentation

In the 2018 fiscal year, all of the aforementioned officials at PT Indra Karya (Persero) presented their compulsory State Administration Report.



06

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



Konsep Pembangunan Berkelanjutan telah berkembang di berbagai negara dan muncul sebagai bagian dari keinginan banyak pihak tentang keseimbangan antara *people*, *profit* dan *planet*. Konsep ini hanya dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat dari seluruh pihak, khususnya entitas usaha yang selama ini hanya bersandar pada orientasi keuntungan dan cenderung mengabaikan dampak jangka panjang atas kegiatan yang dilakukan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen Perseroan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan serta menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa terimakasih masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. CSR juga menjadi salah satu strategi perusahaan yang dapat meningkatkan keberlanjutan perusahaan serta dapat meningkatkan citra perusahaan kepada masyarakat.

The concept of Sustainable Development is on the rise in many countries and sparked as part of the desire for a balance between people, profit, and the planet. This concept can only manifest through a strong commitment from all relevant parties, especially business entities with a reputation for being profit-oriented and ignoring the long-term impact of their activities.

Corporate Social Responsibility (CSR) is part of the Company's commitment to accounting for its operational impact in terms of social, economic, and environmental dimensions and to ensuring that the said impact contributes positively to the community and environment. A consistent implementation of CSR in the long run will result in gratitude from the community for the Company's presence and activities. CSR is also part of the Company's strategy to improve its sustainability and public image.

Pelaksanaan CSR di perusahaan BUMN adalah program pemberdayaan masyarakat, yang disebut Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PT Indra Karya (Persero) melaksanakan Program tersebut dalam upaya menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan pelanggan. Dimensi ekonomi dipilih karena merupakan dimensi yang sangat vital yang bersentuhan dengan masyarakat. Dimensi ekonomi dalam Program PKBL yang diterapkan di Perseroan adalah program pemberian kredit dengan angsuran dan bunga lunak, diberikan kepada para pengusaha kecil atau pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ingin mengembangkan usahanya akan tetapi kekurangan modal. Sementara itu untuk program Bina Lingkungan (BL) Perseroan memberikan bantuan terkait dengan lingkungan dan fasilitas sosial.

Kebijakan Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai sebuah BUMN, Perseroan melaksanakan program CSR berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 jo. PER-03/MBU/12/2016 jo. PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

In State-owned Enterprises, CSR is implemented through community development programs called Partnership and Community Development Programs (PKBL). PT Indra Karya (Persero) executes such programs in order to maintain a good relationship with the community and customers. The economic dimension is chosen due to its vital status and immediate impact on the community. The Company touches upon this dimension in its PKBL program by providing low-interest loans that can be paid in installments to small business owners or Small and Medium Enterprises (SMEs) that would like to develop their businesses but lack the necessary capital. In terms of Community Development, the Company provides aid in the form of environmental and social facilities.

Policy on Corporate Social Responsibility As a State-owned Enterprise, the Company implements its CSR programs in accordance with Regulation of the Minister of State-owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 jo. PER-03/MBU/12/2016 jo. PER-02/MBU/07/2017 on Partnership and Community Development Programs in State-owned Enterprises.



PEMBIAYAAN CSR

Pada tahun 2019 PT Indra Karya (Persero) terus melakukan pembinaan kepada pengusaha kecil dan koperasi sebagai tanggung jawab dan kewajiban Perseroan sebagai BUMN sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri BUMN. Perseroan sudah menjalankan Program Kemitraan (PK) dan telah memberikan bantuan modal kerja kepada 9 (sembilan) mitra binaan baru sebesar Rp. 51.500.000 di wilayah Jabodetabek. Sedangkan untuk program Bina Lingkungan (BL), Perseroan pada tahun 2019 telah memberikan bantuan sebesar Rp. 233.781.499.

CSR FINANCING

In 2019 PT Indra Karya (Persero) consistently fostered small businesses and cooperatives as part of its responsibility and obligation as a State-owned Enterprise in accordance with the Minister of State-owned Enterprise's regulation. Through its Partnership Program, the Company provided Rp. 51,500,000 worth of working capital to 9 (nine) new partners in the Greater Jakarta area, whereas in terms of the Community Development Program the Company provided Rp. 233,781,499 worth of aid.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG EKONOMI:

Pada tahun 2019 program kemitraan telah merealisasikan penyaluran pinjaman untuk modal kerja sebesar Rp. 51.500.000,- kepada 9 (sembilan) mitra binaan baru di daerah Jabodetabek. Dari anggaran Program Kemitraan (PK) tersalur sebesar Rp. 24.349.259,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Warung Makan Kastono, Bekasi Jawa Barat Sebesar Rp. 10.000.000,-
2. Warung Kelontong Kokom, Kemanggisan Jakarta Barat Sebesar Rp. 5.000.000,-
3. Warung Kelontong Dini, Kemanggisan Jakarta Barat Sebesar Rp. 5.000.000,-

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN ECONOMY

In 2019, the Company's Partnership Program realized Rp. 51,500,000 in working capital loans for 9 (nine) new partners in the Greater Jakarta area. From the Company's budget for its Partnership Program, Rp. 24,349,259 was disbursed for the following small businesses:

1. Kastono's Food Stall in Bekasi, West Java with Rp. 10,000,000
2. Kokom's Corner Shop in Kemanggisan, West Jakarta with Rp. 5,000,000
3. Dini's Corner Shop in Kemanggisan, West Jakarta with Rp. 5,000,000



4. Warung Makan dan Minuman Indah, Buaran Duren Sawit Jakarta Timur sebesar Rp. 5.000.000,-
5. Warung Kelontong Tri, Komplek Kostrat, Jakarta Selatan sebesar Rp. 5.000.000,-
6. Warung Kelontong Nina, Cawang, Jakarta Timur Rp. 5.000.000,-
7. Kantin Teratai, Ciracas, Jakarta Timur sebesar Rp. 5.000.000,-

4. Indah's Food & Beverages Stall in Buaran, Duren Sawit, East Jakarta with Rp. 5,000,000
5. Tri's Corner Shop in the Army Strategic Reserve Corps Complex, South Jakarta with Rp. 5,000,000
6. Nina's Corner Shop in Cawang, East Jakarta with Rp. 5,000,000
7. Teratai Canteen in Ciracas, East Jakarta with Rp. 5,000,000

- | | |
|--|--|
| <p>8. Warung Kelontong Jadi, Bojong Kulur, Bogor sebesar Rp. 5.000.000,-</p> <p>9. Warung Bakmi Ayam "34" Jakarta Timur, Sebesar Rp. 6.500.000,-</p> | <p>8. Jadi's Corner Shop in Bojong Kulur, Bogor with Rp. 5,000,000</p> <p>9. "34" Chicken Noodle Shop in East Jakarta with Rp. 6,500,000</p> |
|--|--|



TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN

Untuk Program Bina Lingkungan (BL) pada tahun 2019 PT. Indra Karya (Persero) telah merealisasikan pemberian bantuan sebesar Rp. 233.781.400,- dari anggaran BL sebesar Rp. 232.904.369,- disalurkan untuk bidang berikut:

1. Untuk Pembangunan Sarana Mandi Cuci Kakus (MCK), Penyediaan Sarana Air Bersih, Renovasi tempat wudhu mushola di Seuseupan Kulon, Desa Gobang Kec. Rumpin Bogor sebesar Rp. 60.735.000,-

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN ENVIRONMENT

For its 2019 Community Development Program, PT Indra Karya (Persero) disbursed Rp. 233,781,400 worth of aid from a budget of Rp. 232,904,369 for the following:

1. Development of a public bathing, washing, and toilet facility; a clean water facility; and an ablution facility at a musalla in Seuseupan Kulon, Gobang Village, Rumpin Subidstrict, Bogor worth Rp. 60,735,000.

2. Penebaran Bibit Ikan (Pelestarian alam) di Pintu Air Malakasari Banjir Kanal Timur Jakarta Timur (10.000) ikan dan seremonial dalam rangka BHUN tahun 2019 sebesar Rp. 38.940.000,-.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG SOSIAL, KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN

Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial bidang sosial, keagamaan dan pendidikan dengan menyalurkan bantuan untuk:

1. Bantuan sosial untuk santunan Anak Yatim Piatu dan Dhuafa dalam rangka HUT INKINDO DKI yang ke 37 sebesar Rp. 5.000.000,-.
2. Safari Ramadhan PT. Indra Karya (Persero) dengan memberikan santunan pada anak yatim dan piatu sebanyak 50 (lima puluh) anak dan pemberian 50 (lima puluh) Al-quran untuk Yayasan Cahaya Alam Bitara Bekasi, Masjid Nurul Fathon Lenteng Agung Jakarta Selatan dan Mushola Ya Mujiba Sailin di Ciracas Jakarta Timur sebesar Rp. 17.000.000,-.
3. Bersama dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT. Boma Bisma Indra (Persero) dan PT. Indra Karya (Persero) merenovasi Masjid Al-Barokah di Desa Cikahuripan Lembang Bandung Jawa Barat sebesar Rp. 16.306.400,-.
4. Bantuan Sosial berupa Air Minum Dalam Kemasan (*Infresh*) untuk masjid Al-Hikmah Utama Karya sebesar Rp. 7.800.000,-.
5. Bantuan Buku Bacaan untuk Taman Bacaan Kelompok Pengawas Masyarakat di Tambakrejo Tanjungmas, RT. 04 RW. 16, Semarang Utara, Kota Semarang sebesar Rp. 20.000.000,-.
6. Bantuan Buku, peralatan dan Pelatihan/Pendampingan untuk Taman Bacaan di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung sebesar Rp. 68.000.000,-.

2. Stocking of fish seeds at Malakasari Floodgate, East Flood Canal in East Jakarta with 10,000 stocked ceremonially to celebrate State-owned Enterprises for the Country Day in 2019, worth Rp. 38,940,000.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL AND RELIGIOUS AFFAIRS AND EDUCATION

In 2019, the Company engaged in corporate social responsibility in social and religious affairs and education by distributing aid for the following:

1. Donations to orphaned children and the poor to celebrate the 37th anniversary of the Indonesian National Institute of Consultants' Jakarta chapter; worth Rp. 5,000,000.
2. Ramadan Safari by PT Indra Karya (Persero) by giving donations to 50 (fifty) orphaned children and donating 50 (fifty) copies of the Koran to Cahaya Alam Foundation in Bintara, Bekasi; Nurul Fathon Mosque in Lenteng Agung, South Jakarta; and Ya Mujiba Sailin Musalla in Ciracas, East Jakarta; worth Rp. 17,000,000.
3. Along with PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero) and PT Indra Karya (Persero) renovated Al-Barokah Mosque in Cikahuripan Village, Lembang, Bandung, West Java; worth Rp. 16,306,400
4. Social aid in the form of Infresh bottled drinking water for Al-Hikmah Utama Karya Mosque; worth Rp. 7,800,000
5. Donation of books for the Community Watchdog Group's Reading Garden in Tambakrejo Tanjungmas, RT 04, RW 16, North Semarang, City of Semarang; worth Rp. 20,000,000
6. Donation of books and equipment and training for a reading garden in Jati Indah Village, Tanjung Bintang Subdistrict, South Lampung Regency, Lampung; worth Rp. 68,000,000



07

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL REPORT

PT INDRA KARYA (PERSERO)

LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Dan Laporan Auditor Independen/

FINANCIAL STATEMENT

*As of December 31, 2019 and
For the Year Then Ended
And Independent Auditors' Report*





PT INDRA KARYA (PERSERO)
ENGINEERING, DEVELOPER and INDUSTRY

SAFER, STRONGER AND FASTER

INKINDO 0183/P/0083.DKI

Kantor Pusat : Jalan Biru Laut X Kav. 9 Cawang Jakarta Timur 13340 Telp.: (021) 8192636 Fax.: (021) 8192179 Website : www.indrakarya.co.id, E-mail : indrakarya@indrakarya.co.id

BUMN
Hadir untuk negeri



PT INDRA KARYA (Persero)

LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Dan Laporan Auditor Independen

FINANCIAL STATEMENT

*As of December 31, 2019 and
and For the Year Then Ended
And Independent Auditor's Report*

PT INDRA KARYA (PERSERO)

LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

PT INDRA KARYA (PERSERO)

FINANCIAL STATEMENT

As of December 31, 2019

and For the Year Then Ended

**Halaman /
Page**

Daftar isi

Table of contents

Surat Pernyataan Direksi		<i>Board of Director's Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan.....	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain.....	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas.....	3	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas.....	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan.....	5 – 41	<i>Notes to the Financial Statements</i>



PT INDRA KARYA (PERSERO)

ENGINEERING, DEVELOPER and INDUSTRY

SAFER, STRONGER AND FASTER

INKINDO 0183/P/0083.DKI

Kantor Pusat : Jalan Biru Laut X Kav. 9 Cawang Jakarta Timur 13440 Telp. : (021) 8354237 Fax. : (021) 8280120 Website : www.indrakarya.co.id, E-mail : indrakarya@indrakarya.co.id

BUMN
Hadir untuk negeri



CCMS - 3417553
CCMS - 3417664
CCMS - 3417627

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN**

**STATEMENT OF DIRECTORS '
RESPONSIBILITY TO FINANCIAL**

PT INDRA KARYA (PERSERO)

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019**

**FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2019**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

We, the undersigned :

Nama / Name

: Ir. Milfan Rantawi, MM

Alamat Kantor / Office Address

: Jl. Biru Laut X Kav. 9, Cawang, Jakarta

Nomor Telepon / Telephone Number

: (021) 8192636

Jabatan / Tittle

: Direktur Utama / President Director

Nama / Name

: Ir. Eko Budiono

Alamat Kantor / Office Address

: Jl. Biru Laut X Kav. 9, Cawang, Jakarta

Nomor Telepon / Telephone Number

: (021) 8192636

Jabatan / Tittle

: Direktur / Director

Menyatakan bahwa :

Declare that :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Indra Karya (Persero) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
3. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern PT. Indra Karya (Persero).

1. Responsible for the preparation and presentation of financial statements of PT. Indra Karya (Persero) ended December 31, 2019;
2. Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesia Financial Accounting Standards;
3. All information has been published in the Financial Statements are complete and correct;
4. Financial statements do not contain information or material facts are not true, and does not eliminate any information or material fact;
5. Responsible for internal control systems PT. Indra Karya (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

This statement was made with actual

Jakarta, 27 Maret 2020 / March 27, 2020





Ir. Milfan Rantawi, MM

Direktur Utama / President Director

Ir. Eko Budiono

Direktur / Director

Branch Office :

Sentra Bisnis Harapan Indah Blok SS 11 No. 6-7

Jl. Harapan Indah Raya, Bekasi 17132 - Indonesia

Phone : (62-21) 88866199 (Hunting)

Fax : (62-21) 88865750

Email : admin@kapdbdsda-bekasi.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No: 00016/3.0291/AU.1/03/0824-1/1/III/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi,
PT Indra Karya (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT Indra Karya (Persero)** terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Head Office :

Menara Kuningan 11th floor

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5

Jakarta 10210

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No: 00016/3.0291/AU.1/03/0824-1/1/III/2020

The Shareholders, Board of Commissioners and
Directors, **PT Indra Karya (Persero)**

We have audited the accompanying financial statements of **PT Indra Karya (Persero)**, which comprise of statement of financial position as of December 31, 2019, and statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

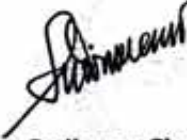
Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **PT Indra Karya (Persero)** tanggal 31 Desember 2019, kinerja keuangan, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan keuangan **PT Indra Karya (Persero)** tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut dengan No. 00006/2.0376/AU.1/11/089-2/1/III/2019 tanggal 27 Maret 2019.

DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI



Sudirman Simangunsong, MSi, CPA

Izin Akuntan Publik / License of Public Accountant No. 0824

27 Maret 2020 / March 27, 2020

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, financial position of **PT Indra Karya (Persero)** as at December 31, 2019, the financial performance, and their cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

Other matter

*The accompanying financial statements of **PT Indra Karya (Persero)** as of December 31, 2018 and for the year then ended were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion on such financial statements With No. 00006/2.0376/AU.1/11/089-2/1/III/2019 dated March 27, 2019.*

PT INDRA KARYA (Persero)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019
(Dalam Rupiah)

PT INDRA KARYA (Persero)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2019
(In Rupiah)

	Catatan / Note	2019	2018	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Bank	4	42.355.149.791	25.308.022.120	Cash and Bank
Piutang Usaha	5	6.239.764.321	7.717.070.838	Account Receivables
Piutang Lain-lain	6	12.803.971.356	2.667.575.934	Others Receivables
Tagihan Bruto Pengguna Jasa	7	53.697.225.165	41.578.596.161	Gross Amount Due from Customers
Uang Muka dan Jaminan	8	4.526.691.841	3.109.134.572	Advances and Guarantee
Biaya Dibayar dimuka	9	5.677.740.305	5.269.318.961	Prepaid Expenses
Uang Muka Pajak	10	439.641.453	912.324.793	Prepaid Taxes
Penugasan Jasa Konsultansi dalam Pelaksanaan	11	1.828.880.098	2.292.556.218	Assignment Consultant in Implementation
Jumlah Aset Lancar		127.569.064.330	88.854.599.597	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON CURRENT ASSETS
Aset Ventura Bersama	12	22.162.899.726	3.826.367.898	Joint Ventures Asset
Aset Tetap	13	91.670.799.729	87.852.238.760	Property, plant and equipment
Aset Lain - lain		186.313.729	237.053.999	Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		114.020.013.184	91.915.660.657	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		241.589.077.514	180.770.260.254	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS LANCAR				CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha	14	10.071.775.737	19.343.058.298	Trade account payables
Utang Pajak	10	7.299.981.537	6.118.116.806	Taxes payables
Uang Muka Proyek	15	16.767.488.788	14.879.810.409	Advance From Customers
Beban Yang Masih Harus Dibayar	16	46.575.998.843	22.096.972.732	Accrued expenses
Liabilitas Lainnya	17	39.347.221.725	12.794.935.902	Others payables
Jumlah Liabilitas Lancar		120.062.466.630	75.232.894.147	Total current liabilities
LIABILITAS TIDAK LANCAR				NON CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Imbalan Kerja	18	15.849.094.339	14.441.522.264	Employees Benefit Liabilities
Liabilitas Lainnya	17	23.499.475.578	18.154.736.649	Others payable
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar		39.348.569.917	32.596.258.913	Total non current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		159.411.036.547	107.829.153.060	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham				Capital stock
Nilai nominal Rp. 1.000.000,-				Capital stock Rp 1.000.000/share
Modal dasar - 8000 lembar saham				Authorized - 8.000 shares
Modal ditempatkan dan -				Capital issued and
disetor penuh 2000 lembar	19	2.000.000.000	2.000.000.000	and paid-up 2.000 shares
Saldo Laba	20	22.870.313.907	12.150.580.621	Retained earnings
Pendapatan Komprehensif Lainnya	21	57.307.727.060	58.790.526.573	Other Comprehensive Income
Jumlah Ekuitas		82.178.040.967	72.941.107.194	Total equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		241.589.077.514	180.770.260.254	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT INDRA KARYA (Persero)
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
 KOMPREHENSIF LAINNYA
 UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR
 TANGGAL 31 DESEMBER 2019
 (Dalam Rupiah)

PT INDRA KARYA (Persero)
 STATEMENTS OF PROFIT (LOSS) AND OTHERS
 COMPREHENSIVE INCOME
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2019
 (In Rupiah)

	Catatan / Note	2019	2018	
Pendapatan Usaha	22	191.112.636.414	164.747.962.138	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	23	(136.372.450.177)	(113.646.901.302)	Cost of Revenues
Laba Kotor		54.740.186.237	51.101.060.836	Gross Profit
Pendapatan bersih Ventura Bersama	24	506.319.130	1.476.357.940	Net Revenue of Joint Ventures
Laba Bruto setelah Ventura Bersama		55.246.505.367	52.577.418.776	Gross Profit after Joint Operations
Beban Usaha				Operating Expenses
Beban Umum dan Administrasi	25	(42.284.967.327)	(36.524.362.880)	General and Administrative Expenses
Laba Rugi Usaha		12.961.538.040	16.053.055.896	Operating Income
Pendapatan (Beban) Lain - lain				Other gains and losses
Beban Pinjaman		(56.378.482)	(32.458.760)	Finance Cost
Pendapatan Bunga Deposito		119.110.343	106.192.538	Interest Income
Laba (Rugi) selisih kurs		(164.765)	-	Foreign Exchange
Beban Penurunan Nilai Piutang		(306.481.713)	(467.485.461)	Allowance for Impairment
Lain - lain Bersih		3.128.421.482	(651.793.831)	Others - Net
Jumlah Penghasilan (beban) Lain		2.884.506.865	(1.045.545.514)	Total other gains and losses
Laba sebelum Pajak Penghasilan		15.846.044.905	15.007.510.382	Income Before Tax
Beban Pajak Penghasilan	9	(4.936.821.711)	(4.989.664.845)	Income Tax Expenses
Laba bersih tahun berjalan		10.909.223.194	10.017.845.537	Net profit for the Year
Pendapatan Komprehensif Lain :				Other Comprehensive Income:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi				The items that may be not Reclassified to Profit and Loss
Selisih Aktuarial atas Program Manfaat Pasti		(1.482.799.513)	(1.508.039.680)	Actuarial Difference on Employees Benefits Program
LABA KOMPREHENSIF		9.426.423.681	8.509.805.857	COMPREHENSIVE INCOME
LABA BERSIH PER SAHAM		4.713.212	4.254.903	NET EARNING PER SHARE

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT INDRA KARYA (Persero)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
(Dalam Rupiah)

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT INDRA KARYA (Persero)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019
(In Rupiah)

	Pendapatan Komprehensif Lainnya / Others Comprehensive Income							
	Modal disetor / fully paid capital	Laba ditahan / Retained earnings		Selisih Aktuarial / Actuarial Difference		Jumlah Ekuitas / Total equity		
		Telah ditentukan penggunaanya / Appropriated	Belum ditentukan penggunaanya / Unappropriated	Jumlah / Total	Imbalan Kerja / Employee Benefit	Revaluasi Aset / Revaluation assets	Jumlah / Total	
Saldo per 31 Desember 2017	2.000.000.000	886.557.833	1.246.177.251	2.132.735.084	(10.432.433.747)	70.731.000.000	60.298.566.253	64.431.301.337
Tambahan Modal Disetor	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Kemitraan	-	-	-	-	-	-	-	-
Bina Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan Bertujuan	-	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba Komprehensif	-	-	10.017.845.537	10.017.845.537	-	-	-	10.017.845.537
Pendapatan komprehensif lainnya	-	-	-	-	(1.508.039.680)	-	(1.508.039.680)	(1.508.039.680)
Saldo per 31 Desember 2018	2.000.000.000	886.557.833	11.264.022.788	12.150.580.621	(11.940.473.427)	70.731.000.000	58.790.526.573	72.941.107.194
Tambahan Modal Disetor	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividen	-	-	(189.489.908)	(189.489.908)	-	-	-	(189.489.908)
Program Kemitraan	-	-	-	-	-	-	-	-
Bina Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan Bertujuan	-	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan Lain	-	9.516.953.260	(9.516.953.260)	-	-	-	-	-
Laba Komprehensif	-	-	10.909.223.194	10.909.223.194	-	-	-	10.909.223.194
Pendapatan komprehensif lainnya	-	-	-	-	(1.482.799.513)	-	(1.482.799.513)	(1.482.799.513)
Saldo per 31 Desember 2019	2.000.000.000	10.403.511.093	12.466.802.814	22.870.313.907	(13.423.272.940)	70.731.000.000	57.307.727.060	82.178.040.967

Balance as of December 31, 2017

Additional paid in capital
Dividend
Funding for small scale business
Community Development
Appropriation of General Reserve
Other Reserve
Comprehensive Income
Other Comprehensive Income

Balance as of December 31, 2018

Additional paid in capital
Dividend
Funding for small scale business
Community Development
Appropriation of General Reserve
Other Reserve
Comprehensive Income
Other Comprehensive Income

Balance as of December 31, 2019

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT INDRA KARYA (Persero)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
(Dalam Rupiah)

PT INDRA KARYA (Persero)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019
(In Rupiah)

	2019	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	182.358.992.306	146.439.264.740	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(162.423.733.994)	(147.516.700.834)	Payment for suppliers and employee
Pembayaran beban pinjaman	(56.378.482)	(32.458.760)	Payment for financial cost
Penghasilan bunga deposito dan jasa giro	119.110.343	106.192.538	Deposit Interest Receipt
Pembayaran pajak	(4.936.821.711)	(4.989.664.845)	Payment for taxes
Penerimaan (pembayaran) lain - lain	(6.605.097.166)	992.610.566	Receipts (payment) - Others
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	8.844.805.096	(5.000.756.595)	Net cash flows provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penambahan aset tetap	(4.934.242.176)	(1.593.964.696)	Addition of fixed assets
Penerimaan (pembayaran) Ventura Bersama	(18.336.531.828)	808.560.508	Receipts (payment) – Joint Operation
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(23.270.774.004)	(785.404.188)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman pihak III	32.096.268.644	3.085.078.034	Receipt the third-party loan
Pembayaran Dividen, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	(423.928.173)	(100.740.400)	Payment of Dividend and PKBL
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	31.473.096.579	2.984.337.634	Net cash flows from financing activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	17.047.127.671	(2.801.823.149)	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA :			CASH AND CASH EQUIVALENTS
AWAL TAHUN	25.308.022.120	28.109.845.269	BEGINNING OF YEAR
AKHIR TAHUN	42.355.149.791	25.308.022.120	END OF YEAR
Kas dan Setara Kas pada akhir tahun terdiri dari :			Cash and Cash Equivalents at End of the Year consist of :
Kas	666.751.528	224.833.809	Cash on Hand
Bank	41.688.398.263	25.083.188.311	Cash in Bank
Jumlah	42.355.149.791	25.308.022.120	Total

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan.

PT Indra Karya (Persero) selanjutnya disebut "Perseroan" didirikan di Jakarta pada tahun 1972 sebagai kelanjutan dari PN Indra Karya, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pemborongan dengan Akta Notaris Dian Paramita Nomor. 108 tanggal 20 Desember 1972 dan diperbaiki dengan Akta Notaris Kartini Muljadi, SH Nomor 107 tanggal 17 April 1973 serta telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Nomor. Y.A.5/165/11 tanggal 8 Mei 1973.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 123 tanggal 31 Maret 1998. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No C-872 HT.01.04-Th.99, tertanggal 11 Januari 1999.

Pada Tanggal 14 Oktober 2009 PT Indra Karya (Persero) mengalami perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Notaris Marsudi SH No 7 serta telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-16237.AH.01.02. Tahun 2009, tertanggal 28 April 2009.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan alamat di HK Tower Lt. 9, Jl. Letjen. Haryono MT Kav. 8, Cawang, Jakarta Timur.

b. Bidang Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 3, maksud dan tujuan pendirian Perseroan adalah melakukan usaha dibidang Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Jasa Konsultasi, Jasa Penelitian dan Pengembangan, Jasa Konsultasi Pengembangan Wilayah / Lingkungan, Pengembangan Institusi / Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Layanan Jasa Konsultasi, Layanan Jasa Penyusunan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Layanan Jasa Manajemen, Mengusahakan nilai tambah untuk peningkatan dan pemanfaatan asset untuk menghasilkan Barang dan/atau Jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan / mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai tujuan tersebut Perseroan melaksanakan bidang usaha sebagai berikut :

- Melaksanakan Layanan Jasa Konsultasi dalam arti yang seluas-luasnya meliputi pekerjaan identifikasi, survei dan investigasi, studi, perancangan, perencanaan, pengawasan, pengelolaan, manajemen untuk konstruksi, pelaksanaan proyek;
- Melaksanakan layanan jasa informasi yang meliputi sistem informasi manajemen dan pengolahan data komputer serta Teknologi Informasi;
- Melaksanakan Jasa Manajemen, meliputi manajemen keuangan, Sumber Daya Manusia, Perasuransian, Alih Teknologi, Audit Teknik;
- Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kawasan, rancang bangun dan perekayasaan, produksi, penjualan.

1. GENERAL

a. The Company's Establishment

PT Indra Karya (Persero) hereinafter called "the Company" was founded in Jakarta in 1972 as a continuation of the PN Indra Karya, a company which is engaged in chartering the Deed No. Dian Paramita. 108 dated December 20, 1972 and corrected by Deed Kartini Muljadi, SH No. 107 dated 17 April 1973 and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in number. Y.A.5/165/11 dated May 8, 1973.

Articles of Association have been amended several times, last amended by the Deed of Imas Fatimah, SH No. 123 dated March 31, 1998. The amendment has been approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. C-872-Th.99 HT.01.04, dated January 11, 1999.

On October 14, 2009 Date of PT Indra Karya (Persero) Statutes amended by Deed Marsudi SH No. 7 and has been approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No.. AHU-16237.AH.01.02. 2009, dated 28 April 2009.

The Company is domiciled at Jakarta at HK Tower 9th, Jl. Letjen. Haryono MT Kav 8, Cawang, Jakarta Timur.

b. Business Sectors

In accordance with Article 3 of the Articles of Association, the Company's intent and purpose of establishment is doing business in Industrial Construction, Industrial Manufacturing, Consulting, Services Research and Development, Regional Development Consulting Services / Environment, Development Institutions / Institutional and Human Resources Consulting Services, Formulation and Implementation Services Education and Training, Management Services, Ensuring added value for the improvement and utilization of assets to produce goods and / or services of high quality and strong competitive to get / pursuit of profit in order to increase the value of the company by applying the principles of Company Limited.

In order to achieve the objectives, the Company is engaged in following activities :

- *Implement Consulting Services in the broadest sense includes the identification work, the survey and investigations, studies, design, planning, supervision, management, construction management, project implementation;*
- *Implement information services which include management information systems and computer data processing and Information Technology;*
- *Implement Service Management, covering financial management, Human Resources, Insurance, Technology Transfer, Technical Audit;*
- *Implementation of the research and development area, design and engineering, production, sales.*

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Perseroan yang berlaku per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

- Kantor Pusat, Jakarta
- Divisi Engineering I, Malang – Jawa Timur
- Divisi Engineering II, Semarang – Jawa Tengah
- Divisi Engineering III, Jakarta
- Divisi Survey & investigasi di Malang – Jawa Timur
- Divisi Khusus & Investasi di Jakarta

d. Susunan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang saham PT Indra Karya (Persero) Nomor : SK-39/MBU/02/2019 tanggal 4 Februari 2019 dan SK-250/MBU/09/2018 tanggal 28 September 2018, susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama
Komisaris

Jarot Widyoko
Teddy Poernama

President Commissioner
Commissioner

Susunan Direksi pada tanggal 31 Desember 2019, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Nomor : KEP-199/MBU/06/2018, tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian, perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Indra Karya (Persero), adalah sebagai berikut :

Direktur Utama
Direktur

Ir. Milfan Rantawi, MM
Ir. Eko Budiono

President Director
Director

Komite Audit
Ketua SPI
Sekretaris Perusahaan

Seno Winardi, SE, Ak.
T.E. Purnomo
Okky Suryono

Audit Committee
Head of Internal Control
Corporate Secretary

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpelasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI).

Perusahaan telah menerapkan PSAK No.1 (Revisi 2013), tentang "Penyajian Laporan Keuangan". PSAK No. 1 (Revisi 2013) mengatur mengenai penyajian laporan keuangan, yang meliputi antara lain, tujuan pelaporan, komponen laporan keuangan, penyajian secara wajar, materialitas dan agregasi, saling hapus, perbedaan antara aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, informasi komparatif, konsistensi penyajian dan memperkenalkan pengungkapan baru, antara lain mengenai sumber estimasi ketidakpastian, pengelolaan permodalan, pendapatan komprehensif lainnya, penyimpangan dari standar akuntansi keuangan, dan pernyataan kepatuhan.

1. GENERAL (continued)

c. Working Areas

The Companys working areas as of December 2019 and 2018 are as follows :

- Head Office, Jakarta
- Engineering Division I, Malang, East Java
- Engineering Division II Semarang, Central Java.
- Engineering Division III at Jakarta
- Survey & Investigation Division in Malang, East Java
- Special & Investment Division in Jakarta

d. Boards of Commissioners and Directors

The composition of the Board of Commissioners by the Decree of the Minister of State Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Indra Karya (Persero) No.: SK-39/MBU/02/2019 dated February 04, 2019 and No.: SK-250/MBU/09/2018 dated September 28, 2018, the Board of Commissioners on December 31, 2019 are as follows:

The composition of the Board of Directors at December 31, 2019 and 2018 in accordance with the Decree of the State Minister for State Owned Enterprises, No. KEP-199/MBU/06/2008, dated June 28, 2018 on Termination, change Nomenclature Position and Appointment of Directors Members of a Limited Liability Company PT Indra Karya (Persero) is as follows :

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. The Statements of Compliance

The financial statements have been prepared in accordance Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards and interpellation of Financial Accounting Standards issued by the Financial Accounting Standards Board Indonesian Institute of Accountants.

The Company has adopted PSAK 1 (Revised 2013) , about the " Presentation of Financial Statements " . PSAK No. 1 (Revised 2013) governing the presentation of financial statements, which include, among others, the objective, the components of financial statements, fair presentation, materiality and aggregation, offsetting, the difference between current and non-current assets and liabilities are short-term and long-term, information comparability, consistency of presentation and introduces new disclosures, among others, the sources of estimation uncertainty, capital management, other comprehensive income, a deviation from accounting standards, and a statement of compliance.

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pernyataan Kepatuhan

Dalam kaitannya dengan PSAK No.1 (Revisi 2013) tersebut, Perusahaan telah memilih untuk menyajikan laporan laba rugi komprehensif dalam satu laporan dan pengklasifikasian beban dalam laba rugi komprehensif berdasarkan sifat. Adapun seluruh aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan disajikan berdasarkan urutan likuiditas.

Dasar penyajian laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai perolehan (historical cost), kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing – masing akun tersebut.

Perusahaan telah menerapkan PSAK No.2 (Revisi 2009) tentang "Laporan Arus Kas" dan penerapan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan arus kas Perusahaan. Laporan arus kas tersebut disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method) dimana arus kas dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah yang juga sekaligus merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

b. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, bank dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang. Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas.

c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 10 (revisi 2010) tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing, yang mewajibkan perusahaan untuk menentukan mata uang fungsional dan mengukur hasil operasi dan posisi keuangannya dalam mata uang tersebut.

Perseroan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Konversi kurs pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing – masing sebesar Rp 13.901,- dan Rp 14.481,-

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. The Statements of Compliance

In connection with PSAK 1 (Revised 2013), the Company has elected to present the statement of comprehensive income in one statement and classification of expense in comprehensive income by their nature. As for all assets and liabilities in the statement of financial position presented in order of liquidity.

Basis of preparation of financial statements, except for cash flow statement is an accrual basis. The financial statements have been prepared based on the acquisition value (historical cost), except for certain accounts which are measured on the basis described in accounting policy - each account.

The Company has adopted PSAK 2 (Revised 2009) on "Cash Flow Statements" and the application does not have a significant impact on the Company's cash flow statement. Cash flow statement is prepared using the direct method (direct method) in which the cash flows are classified into operating, investing and financing.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is the Rupiah which will also be the Company's functional currency.

b. Cash and cash equivalent

Cash and cash equivalents include cash, bank and short-term investments with original maturities of three months or less. Cash and cash equivalents appropriated or that can not be used freely does not belong in cash and cash equivalents.

c. Foreign Currency Transactions and Balances

Effective January 1, 2012, the Company applied PSAK No. 10 (Revised 2010) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates. PSAK No. 10 (Revised 2010) requires the Company to determine its functional currency and measure the results of operations and financial position in that currency.

Company keep books of account in Rupiah. Transactions in foreign currencies are translated into dollars using currency exchange rates prevailing at the transaction date. At balance sheet date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into dollars using the currency exchange rate of Bank Indonesia. Conversion rate on the date of December 31, 2019 and 2018 respectively - each amounting to Rp 13.901,- and Rp.14.481, -

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Perusahaan yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode presentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (progress) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal neraca.

e. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan beban yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar dimuka, bunga dibayar dimuka, dan sewa dibayar dimuka. Beban dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

f. Aset tetap

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (amandemen 2015), "Aset Tetap", yang menggantikan PSAK No. 16 (revisi 2007), "Aset Tetap", dan PSAK No. 47, "Akuntansi Tanah". Selain itu Perusahaan juga menetapkan ISAK No. 25, "Hak atas Tanah".

Aset tetap dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model biaya dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda dan garis lurus (untuk gedung dan bangunan) dengan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut :

	<u>Tahun / Years</u>	
Gedung	5%	Property
Kendaraan	25%	Vehicles
Inventaris Kantor dan Komputer	25% - 50%	Office equipment
Peralatan Survey dan investigasi	25% - 50%	Survey and investigation equipment

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut, sedangkan pengeluaran dalam jumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap akan ditambah (kapitalisasi) pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan.

Apabila suatu aset tetap tidak dipergunakan lagi atau dilepas, nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang timbul dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Gross Amount Due From Customers

Gross amount due from customers represent the Company's receivable originated from construction contract in progress. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.

Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference of time between the signing date of the certificate and the date of invoice billed on balance sheet date.

e. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are costs that have been paid but will be incurred future periods, such as prepaid insurance premiums, prepaid interest and rent paid in advance. Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

f. Property, Plant, Equipment

Effective January 1, 2012, the Company applied PSAK No. 16 (amendment 2015), "Fixed Assets", which replaced PSAK No. 16 (revised 2007), "Fixed Assets" and PSAK No. 47, "Accounting fo Land". In Addition, the Company also implemented ISAK no. 25, "Land Right".

Fixed assets are accounted for using cost model and stated at acquisition cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Fixed assets, except for land, are depreciated using the double-declining and straight-line method (for plants and buildings) with the estimated economic life of the assets as follows:

Cost of repairs and maintenance is charged to the current statements of income as incurred, while the significant expenditures for renewals and improvements are capitalized. All expenditures subsequent to the purchasing of fixed assets would be capitalized.

When assets are not used or otherwise disposed of, the carrying costs and its' related accumulated depreciation are removed from the fixed assets account and any resulting gain or loss is recorded or charged in current year statements of income.

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Aset tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada periode/tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada akhir periode/tahun buku pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

g. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Yang Berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK No.7 (penyesuaian 2015): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Standar ini menyempurnakan panduan untuk pengungkapan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen. Standar juga memberikan penjelasan bahwa anggota personil manajemen kunci adalah pihak berelasi, sehingga mengharuskan pengungkapan atas kompensasi personil manajemen kunci untuk masing-masing kategori.

Perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan memastikan laporan keuangan telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi :

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Fixed Assets (continued)

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the interim statements of comprehensive income in the period/year the asset is derecognized.

At the end of reporting period/year end, the Company periodically reviews the useful lives of the assets, asset's residual value, depreciation method and the remaining usage expectation based on technical evaluation.

g. Transaction With Related Parties

The Company applies PSAK 7 (Improvement 2015): Related Party Disclosures. This standard improves the guidelines for disclosure of the relationship, transactions and balances including commitments between the related parties. This standard also state that the member of key management persons are related parties, so that it requires the disclosure of the compensations for key management personnels for each categories.

The Company has evaluated the relationship between the related parties and ensure that the financial statements have been prepared in accordance with the revised disclosure requirements :

- a) The person or immediate family member has a relationship with a reporting entity if the person is :
 - i. Has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. Has significant influence over the reporting entity; or,
 - iii. Key management personnel of the reporting entity or parent entity reporting.
- b) One entity is related to the reporting entity if it fulfill one of the following :
 - i. The entity and the Company are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Yang Berelasi (lanjutan)

- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Entitas Berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini didefinisikan dalam ruang lingkup Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

h. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Transaction With Related Parties (continued)

- iii. both entities are joint ventures of the same third party.
- iv. One entity is a joint venture of the three entities and other entities that are associates of a third entity.
- v. The entity is a retirement benefit plan or employee benefits from one of any reporting entity or entities associated with the reporting entity. If the reporting entity is the entity that organizes the plans, the entity shall sponsor also relate to the reporting entity.
- vi. Entity controlled or joint controlled by the person identified in subparagraph (a).
- vii. Person identified in subparagraph (a) (i) has significant influence of the entity or the entity key management personnel (or the parent entity of the entity).

The transactions are made based on terms agreed by both parties, in which such terms are the same as those of transactions between unrelated parties.

Related parties to the government are entities controlled, are controlled together or significantly influenced by the Government. The Government in this case is defined within the scope of the Ministry of Finance or the District Government is a shareholder of the entity and the SOE's Ministry on behalf of the shareholder.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements herein.

h. Impairment of Non-Financial Assets

The Company assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Units (CGU)'s fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. If the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori beban yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun.

Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

i. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perusahaan menerapkan PSAK No. 23 (revisi 2010) tentang "Pendapatan" dan PSAK 34 (revisi 2010) tentang "Akuntansi Kontrak Konstruksi" yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012. PSAK revisi ini mengidentifikasi kriteria agar pendapatan dapat diakui, dan mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu, serta memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria mengenai pengakuan pendapatan. Penerapan PSAK yang direvisi tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Pendapatan dan beban diakui dan dicatat atas dasar akrual yaitu, pendapatan dan beban dicatat pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan.

Pendapatan Konsultan diakui berdasarkan prosentase penyelesaian yang didasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat pihak internal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Impairment of Non-Financial Assets (lanjutan)

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used by the Company to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

An assessment is made at each reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased.

If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on this asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

i. Revenue and Expense Recognition

The Company adopted PSAK No. 23 (revised 2010) on "Income" and PSAK 34 (revised 2010), "Accounting for Construction Contracts" in force since 1 January 2012. This revised PSAK identify criteria that can be recognized revenue, and prescribes the accounting treatment of revenue arising from certain transactions and events, as well as practical guidance on the application of criteria on revenue recognition. Implementation of the revised PSAK does not have a significant impact on the Company's financial statements.

Revenues and expenses are recognized and recorded on the accrual basis, namely, income and expenses are recorded at the time of the relevant transaction.

Consultants revenue is recognized based on the percentage of completion is based on the work progress report is made internal parties.

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan atas pekerjaan tambah diakui pada saat diterbitkan Berita Acara Persetujuan Pekerjaan Tambah yang ditandatangani bersama.

Beban diakui dan dicatat pada saat suatu pengeluaran memberikan manfaat ekonomis terhadap pendapatan, termasuk beban yang dialokasikan secara periodik sesuai masa manfaatnya. Beban diakui pada periode yang sama dengan diakui pendapatan.

Pendapatan bunga yang timbul dari bank dan deposito yang dimiliki oleh Perusahaan diakui pada saat terjadinya.

j. Pajak Penghasilan

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No 46 (Revisi 2010) Akuntansi Pajak Penghasilan. Penerapan standar tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan.

Beban pajak final diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan pada perhitungan laba rugi, diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak. Bila penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final, perbedaan antara nilai tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset dan liabilitas tangguhan.

Pajak kini diakui berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan, yakni pajak yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

k. Aset dan Liabilitas Keuangan

Efektif 1 Januari 2012, Perusahaan telah menerapkan secara prospektif PSAK No. 50 (revisi 2013) tentang Instrumen Keuangan; "Penyajian" yang menggantikan PSAK No. 50 (revisi 2010), Instrumen Keuangan : "Penyajian dan Pengungkapan".

PSAK No. 60 memperkenalkan pengungkapan baru untuk meningkatkan informasi mengenai instrumen keuangan. PSAK ini mewajibkan pengungkapan secara luas mengenai signifikansi pengaruh instrumen keuangan terhadap posisi keuangan dan kinerja Perusahaan, dan pengungkapan kuantitatif dan kualitatif atas risiko yang timbul dari instrumen keuangan, serta menentukan pengungkapan minimum mengenai risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar.

PSAK ini juga mewajibkan pengungkapan terkait dengan pengukuran nilai wajar menggunakan tingkat hirarki nilai wajar dimana mencerminkan signifikansi input yang digunakan dalam mengukur nilai wajar dan memberikan arahan dalam bentuk pengungkapan kualitatif mengenai pengukuran nilai wajar dan mewajibkan informasi yang diungkapkan dalam formal tabel, kecuali terdapat lain yang sesuai. Penerapan PSAK No. 60 memiliki dampak pada pengungkapan laporan keuangan (catatan 25).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Revenue and Expense Recognition (continued)

Revenue from additional work recognized at the time of publication approval Minutes of Works Add signed together.

Expenses are recognized and expenditure are recorded when an economic benefit to earnings, including periodic expense is allocated over the periods benefited. Expenses are recognized in the same period with the recognition of revenue.

Interest income arising from the banks and deposits held by the Company are recognized when earned.

j. Income Tax

Effective January 1, 2012, the Company applied PSAK No. 46 (Revised 2010) Accounting for Income Taxes. The application of these standards did not have a material impact on the financial statements.

Final tax expense is recognized in proportion with the revenue according to recognized accounting practices during the current year. The difference between the total final income tax paid and the amount charged to the profit and loss calculation is recognized as prepaid taxes or tax payable. When income has been subject to final tax, the difference between the carrying value of assets and liabilities and the tax bases are not recognized as deferred assets and liabilities.

Current tax is recognized based on the taxable income for the year, computed in accordance with the current tax regulation.

k. Financial Assets and Liabilities

Effective on January 1, 2012 the Company applied PSAK No.50 (Revised 2013), Financial Instruments: "Presentation", which replaced PSAK No. 50 (Revised 2010), Financial Instruments: "Presentation and Disclosure".

PSAK No. 60 introduces new disclosures to improve the information about financial instruments. This PSAK requires extensive disclosure of the significance of financial instruments influence on the Company's financial position and performance, qualitative and quantitative disclosures on the risks arising from financial instruments, and determine the minimum disclosures about credit risk, liquidity risk and market risk.

This PSAK also requires disclosures related to fair value measurements using a fair value hierarchy levels which reflect the significance of the inputs used in measuring fair value and provides guidance in the form of quantitative disclosures about fair value measurements and requires information that is disclosed in tabular format unless there is another appropriate. The application of PSAK No. 60 had an impact on the disclosure of financial statements (Note 25).

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan

Aset keuangan diakui apabila Perusahaan memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan yaitu tanggal di mana Perusahaan berketetapan untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Biaya transaksi antara lain meliputi fee dan komisi yang dibayarkan kepada para agen, konsultan, perantara/pedagang efek, pungutan wajib dari pihak regulator serta pajak dan bea yang dikenakan. Adapun aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal juga akan diukur sebesar nilai wajar namun biaya transaksi yang timbul seluruhnya langsung dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Aset Keuangan dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori berikut :

- (i) **Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif** adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada 31 Desember 2019, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi komprehensif.

- (ii) **Pinjaman yang diberikan dan piutang** adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada 31 Desember 2019 Perusahaan mempunyai kas dan setara kas, piutang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Assets and Liabilities (Continued)

Financial Assets

Financial assets are recognized when the Company has a contractual right to receive cash or another financial asset from another entity. Purchases or sales of financial assets are recognized on a regular basis accounting trade date is the date on which the Company committed to purchase or sell a financial asset.

At the time of initial recognition, financial assets are measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable, except for financial assets at fair value through profit or loss. Transaction costs include the following fees and commissions paid to agents, consultants, broker / dealer securities, mandatory fees from regulators as well as tax and duty charged. The financial assets at fair value through profit or loss upon initial recognition will also be measured at fair value but the transaction costs directly charged entirely to the comprehensive income statement.

Subsequent measurement of financial assets can be classified into the following four categories:

- (i) **Financial assets at fair value through profit or loss** are financial assets which are held for trading. Financial assets is classified as held for trading if it is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing in near term and there is evidence of a recent actual pattern at short term profit taking. Derivatives are also categorized as held for trading unless they are designated and effective as hedging instruments.

As of December 31, 2019, the Company does not have assets which are classified as financial assets at fair value through the statement of comprehensive income.

- (ii) **Loans and receivables** are non-derivative financial assets with fixed payments or determinable payments that are not quoted in an active market. At initial recognition, loans and receivables are recognized at fair value plus transaction cost and subsequently measured at amortized cost using effective interest rate method.

As of December 31, 2019, the Company has cash and cash equivalent, other receivables which were classified as loans and receivables.

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

- (iii) **Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo** adalah investasi non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada 31 Desember 2019, Perusahaan tidak mempunyai aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo.

- (iv) **Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual** adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba rugi yang sebelumnya diakui pada bagian ekuitas akan diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Sedangkan pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Pada 31 Desember 2019, Perusahaan tidak mempunyai aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Assets and Liabilities (Continued)

Aset Assets (Continued)

- (iii) **Held-to-maturity financial assets** are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities for which the Company's management has positive intention and ability to hold to maturity.

At initial recognition, held to maturity financial assets are recognized on fair value plus transaction cost and subsequently measured at amortized cost using effective interest rates method.

As of December 31, 2019, the Company does not have financial assets which were classified as held to maturity financial assets.

- (iv) **Available-for-sale financial assets** are non-derivative financial assets that are intended to be held for indefinite period of time, which might be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or that are not classified as loans and receivables, held-to-maturity financial assets or financial assets at fair value through profit or loss.

Available-for-sale financial assets are initially recognized at fair value, plus transaction costs, and measured subsequently at fair value with gains and losses being recognized in the statement of changes in equity, except for impairment losses and foreign exchanges gains and losses, until the financial assets is derecognized. If an available-for-sale financial asset is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously recognized in the equity section will be recognized in the statements of comprehensive income.

Interest income is calculated using the effective interest method, and foreign currency gain or losses on monetary assets classified as available-for-sale is recognized in the statements of comprehensive income.

As of December 31, 2019, the Company does not have aset assets classified as aset assets available for sale.

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

Penghentian Pengakuan atas Aset Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada saat penghentian aset keuangan, selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari 1) pembayaran yang diterima (termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi liabilitas baru yang ditanggung) dan 2) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam ekuitas, harus diakui sebagai laba atau rugi.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, (ii) melalui laporan laba rugi komprehensif dan Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

- (i) **Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif** adalah Liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai Liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.

- (ii) **Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi** adalah Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada 31 Desember 2019, Perusahaan memiliki liabilitas keuangan berupa utang usaha, utang pembiayaan dan utang lain-lain yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Assets and Liabilities (Continued)

Aset Assets (Continued)

Derecognition of Aset Assets

Company terminates the recognition of aset assets if and only if the contractual rights to the cash flows from the aset expire, or transfer the Company's aset assets and transferred substantially all the risks and rewards of ownership of the aset to another entity. If the Company does not transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred aset, the Company recognizes its retained interest in the aset and an associated liability for amounts which may be paid. If the Company has substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred aset aset, the Company recognizes a aset aset and also recognizes a collateralised borrowing for the proceeds received.

At the time of termination of the financial aset, the difference between the carrying amount and the sum of 1) the payment is received (including new assets acquired net of liabilities assumed new) and 2) the cumulative gain or loss that had been recognized in equity, should be recognized in profit or loss.

Financial Liabilities

Financial liabilities are classified into (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

- (i) **Financial liabilities at fair value through profit or loss** are those financial liabilities which are held for trading. Financial liabilities are classified as held for trading if it is acquired primarily for the purpose of selling or repurchasing in near term and there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking. Derivatives are also categorized as held for trading unless they are designated and effective as hedging instruments.

As of December 31, 2019, the Company does not have liabilities at fair value through the statement of comprehensive income.

- (ii) **Financial liabilities measured at amortized cost** are those financial liabilities which are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, are categorized and measured at amortized cost using the effective interest rate method.

On December 31, 2019, the Company has a financial liabilities in the form of accounts payable, lease payables, and other payable which were calculated by amortized cost.

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen keuangan merupakan instrumen ekuitas, jika dan hanya jika, tidak terdapat liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Saling Hapus Antar Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, 1) Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada laporan posisi keuangan. Investasi pada efek ekuitas yang nilai wajarnya tidak tersedia dicatat sebesar biaya perolehan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan lain yang tidak diperdagangkan di pasar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu.

Aset keuangan dan Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, disajikan sebesar nilai tercatat yang nilainya mendekati nilai wajar pada 31 Desember 2019.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Assets and Liabilities (Continued)

Financial Liabilities (Continued)

Derecognition of Financial Liabilities

The Company's financial liabilities stop the recognition, if and only if, the contractual obligations have been removed or canceled or expired.

When a financial liability exchanged with other financial liabilities from the same lender over the terms of which are substantially different, or if the terms of the financial liabilities substantially modified, such an exchange or modification of the terms of the note as a derecognition of financial liabilities and the recognition of the beginning of a new financial liability and the difference between the carrying amount of each financial liabilities are recognized in profit or loss.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company after deducting all of its liabilities. Financial instrument is an equity instrument if, and only if, there is no contractual obligation to deliver cash or another financial asset to another entity. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Offsetting Assets and Financial Liabilities

Financial assets and liabilities can be offset and the net amount presented in the statement of financial position, if and only if, 1) the Company currently has a legally enforceable right to offset the recognized amounts and 2) an intention to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Estimation

Fair value for financial instruments traded in active market is determined based on market value applicable on the statements of financial position. Investments on equity on which their fair value are not available will be recorded at their cost.

Fair values of other financial instruments which are not traded in market are determined using certain valuation techniques.

Financial assets and liabilities are measured using amortized acquisition cost are presented based on recorded values which are close to fair value as of December 31, 2019.

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai dan Tidak Tertagihnya Aset Keuangan

Sesuai dengan PSAK No.55 (Revisi 2013), seluruh aset keuangan, kecuali yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Dalam kaitannya dengan itu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan manajemen mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa merugikan, yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan atau kelompok aset keuangan, yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dimana dapat diestimasi secara andal.

Bukti objektif penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam memiliki kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan dan pada saat data yang dapat di observasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau suatu kondisi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Sebagaimana diungkapkan di dalam ikhtisar kebijakan akuntansi instrumen keuangan, seluruh aset keuangan Perusahaan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi untuk aset keuangan tersebut, kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif pada saat pengakuan awal dari aset tersebut.

Manajemen pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, terlepas aset tersebut signifikan ataupun tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya diakui secara individual, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Assets and Liabilities (Continued)

Impairment of Financial Assets and Uncollectible

In accordance with PSAK No. 55 (Revised 2013), all financial assets, except those measured at fair value through profit or loss, are evaluated for possible impairment. In relation to that, at each balance sheet date management assesses whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

Impaired and an impairment loss is recognized, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more adverse events, which occurred after the initial recognition of the financial asset or group of financial assets, which have an impact on the estimated future cash flows over the financial asset or group of financial assets which can be estimated reliably.

Objective evidence of impairment may include indications of the borrower or borrower group has significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, it is probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization and and at the time of observation data can indicate measurable decrease in the estimated future cash flows, such as an increase in arrears or conditions that correlate with defaults.

As disclosed in the accounting policies for financial instruments, the Company's financial assets measured throughout the amortized cost of the asset, an impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the asset with the present value of estimated future cash flows are discounted using the effective interest rate on initial recognition of the asset.

Management first time will determine the objective evidence of impairment individually for financial assets that are individually significant. If there is objective evidence of impairment of individual financial assets, regardless of the significant assets or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk and determine collective impairment. Asset impairment recognized individually, are not included in a collective assessment value scaling.

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai dan Tidak Tertaqihnnya Aset Keuangan (Lanjutan)

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos penyisihan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Aset keuangan beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Perusahaan. Jika pada tahun berikutnya nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan penurunan nilai. Jika dimasa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, jumlah pemulihan tersebut diakui pada laba atau rugi.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur untuk membayar seluruh utang yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual atas aset-aset di dalam kelompok tersebut dan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat di observasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis, namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau;
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Assets and Liabilities (Continued)

Impairment of Financial Assets and Uncollectible (Continued)

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of post allowance and the amount of the loss is recognized in the statement of comprehensive income. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of financial assets. Financial assets are eliminated along with the associated backup if there is a realistic possibility in the future of the recovery and all collateral has been realized or transferred to the Company. If the following year the estimated value of a financial asset impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment increased or reduced by adjusting the allowance for impairment. If in the future the deletion can be recovered, the recovery amount is recognized in profit or loss.

For the purposes of a collective evaluation of impairment, financial assets are grouped based on similar characteristics of credit risk. The characteristics chosen are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such assets that indicates the ability of the debtor to pay entire debt maturing appropriate contractual terms of the assets being evaluated.

Future cash flows from a group of financial assets that are collectively evaluated for impairment, estimated based on contractual cash flows of the assets in the group and in the historical loss experienced for assets that have similar characteristics of credit risk with credit risk characteristics the group. Historical loss experience is adjusted based on the most recent available observation to reflect current conditions do not affect the period on which the historical loss, and to remove the effects of conditions in the historical period, but it is no longer current.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- in the principal market for the asset or liability, or;
- if in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company.

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar atas aset non-keuangan mempertimbangkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan keuntungan ekonomi dengan penggunaan aset pada kemampuan tertinggi dan terbaik aset atau dengan menjualnya ke pelaku pasar yang lain yang akan menggunakan aset di kemampuan tertinggi dan terbaik.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

- Level 1: Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2: Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- Level 3: Input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terjadi transfer antara tingkat di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

m. Liabilitas Imbalan Kerja

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No.24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang menggantikan PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja". Selain itu, Perusahaan juga menerapkan ISAK No. 15, "PSAK 24: Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya".

Perusahaan menghitung liabilitas imbalan pasca kerja dengan metode projected unit credit, sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2013). Biaya jasa kini diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Biaya jasa lalu sebagai dampak perubahan asumsi aktuarial bagi karyawan aktif diakui langsung dalam laporan laba rugi. Imbalan kerja atas pemutusan hubungan kerja diakui sebagai liabilitas dan beban pada saat terjadi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Fair Value Measurement

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participant act in their best economic interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest able input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1: Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2: Input other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset either directly (as prices) or indirectly (derived from prices); and
- Level 3: Inputs for the assets and liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

m. Employee Benefits Liabilities

The company has not adopted PSAK No. 24 (2015 amendment), "Employee Benefits", which replaces PSAK No. 24 (revised 2013), "Employee Benefits".

Based on PSAK 24 (Revised 2013), the Company has calculated the liability for other employee benefits using the projected unit credit method. Current service cost is recognized as an expense in the current year. Past service cost, actuarial adjustments and the effect of changes in actuarial assumptions for active employees are directly recognized in statements of income. Employee benefits for terminations are recognized as liabilities and expenses when these occur.

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Akuntansi untuk Ventura Bersama

Dalam melaksanakan pemberian jasa konsultan, Perusahaan juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak sebagaimana tersebut pada masing-masing perjanjian, dengan membentuk pengelola proyek secara bersama-sama untuk melaksanakan pekerjaan proyek dari pemberi kerja. Bentuk kerjasama operasi (KSO) yang dilakukan Perusahaan dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- Proyek kerja sama operasi Integrated di mana masing-masing partisan memiliki kendali yang signifikan atas aset dan operasi KSO (integrated).
- Proyek kerja sama operasi Job Allocation di mana masing-masing partisan memiliki pembagian yang tegas atas aset dan operasi KSO.

Bagian Perusahaan atas aset bersih dan laba bersih KSO Integrated yang mempunyai masa kontrak lebih dari satu tahun dibukukan berdasarkan metode ekuitas. Bagian Perusahaan atas aset bersih dibukukan dalam akun "Aset Ventura Bersama" dan bagian atas laba/(rugi) bersih dalam akun "Pendapatan Bersih dari Ventura Bersama".

Pendapatan dan biaya yang timbul dalam kelompok KSO Alokasi diakui secara bruto sesuai porsi pekerjaan Perusahaan dan sepenuhnya diakui sebagai pendapatan dan beban Perusahaan.

Setiap aset atau liabilitas yang timbul selama operasi dicatat oleh Perusahaan dalam pos tersendiri yaitu "Utang/Piutang Usaha Bersama".

o. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah akhir periode yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi Perusahaan pada tanggal pelaporan tercermin dalam laporan keuangan.

Peristiwa setelah akhir periode yang tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam laporan keuangan apabila material.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Accounting for Joint Venture

In delivering consultancy services, the Company is engaged in cooperations with other parties as stipulated in each agreement, by forming a joint operations to execute the project from the project owner. The type of joint operations (JO) made by the Company are divided into two categories as follows :

- Joint operations Integrated project where each party has significant control over assets and operations of the JO (integrated).
- Joint operations Job Allocation project where each party has a clear segregation of assets and operations of the JO.

The Company's share in net assets and net income of integrated JO which has contract period more than one year is recognized based on the equity method. The Company's share in net asset is recorded into "Joint Venture Assets" account and share in net income (loss) is recorded into "Net Revenue from Joint Venture".

Assets or liabilities arising from operation are recorded by the Company as "Joint Operation Payables/ Receivables".

Assets or liabilities arising from operation are recorded by the Company as "Joint Operation Payables/ Receivables".

o. Events After the Reporting Date

Events after the period end which require adjustment and provides information on the Company at the reporting date are reflected in the financial statements.

Events after the end of the period which does not require adjustment are disclosed in the financial statements if it is material.

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following decisions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer tempat Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi penjualan dan beban dari produk yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penilaian Instrumen Keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan.

Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Classification of Financial Instruments

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2014).

Determination of Functional Currency

The Company's functional currency are currency from primary economic environment in which the Company operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of given product. Based on the Company's management assessment, the Company's functional currency is Indonesian Rupiah.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below.

The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Valuation of Financial Instruments

The Company carries certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Company utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets and liabilities would affect directly the Company's profit or loss.

Impairment of Nonfinancial Assets

The review for impairment is performed if there are indications of impairment of certain assets. Determination of fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continuous use and disposal of the asset. Significant changes in the assumptions used to determine fair value can have a significant impact on the recoverable amount and the amount of impairment loss occurs, that may materially affect recoverable amount the Company's results of operations.

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

4. Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri atas:

	2019
Kas	
Kas IDR	666.751.528
	666.751.528
Bank IDR	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	38.596.504.980
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.002.312.556
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	76.112.437
PT Bank Bukopin Tbk	5.526.176
PT Bank Jateng	5.361.429
PT Bank Jatim Tbk.	2.250.938
PT Bank Syariah Mandiri	329.747
	41.688.398.263

Jumlah Kas dan setara kas

42.355.149.791

Tidak terdapat saldo bank yang dibatasi penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2019.

4. Cash and Banks

Cash and bank consist of :

	2018
Cash	
Cash IDR	224.833.809
	224.833.809
Cash in bank	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	23.641.438.461
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.005.951.116
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	229.522.813
PT Bank Bukopin Tbk	677.399
PT Bank Jateng	202.268.478
PT Bank Jatim Tbk	2.743.938
PT Bank Syariah Mandiri	586.106
	25.083.188.311

25.308.022.120

There are no restricted banks balance as of December 31, 2019.

Total Cash and cash equivalent

5. Piutang Usaha

Saldo piutang usaha per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah terdiri dari :

	2019
Piutang Usaha Jasa Konsultasi	8.079.332.614
Penyisihan Penurunan Piutang	(1.839.568.293)
Jumlah Piutang Usaha	6.239.764.321

Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (hari), adalah sebagai berikut :

	2019
1 bulan - 6 bulan	5.195.568.210
> 6 bulan - 12 bulan	17.800.988
> 12 bulan	2.865.963.416
	8.079.332.614

Rincian piutang usaha Jasa Konsultansi adalah sebagai berikut :

	2019
Pihak yang berelasi	
SNVT Pelaksana Jaringan SDA	1.040.499.925
PT Utama Karya (Persero)	162.371.292
Dirjen Bina Marga	134.995.681
PT PAL Indonesia (Persero)	-
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	-
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	-
Jumlah piutang pihak berelasi	1.337.866.898

Pihak Ketiga

PP-ADHI KSO	988.000.000
PT Wahana Prakarsa Utama	805.327.500
PT Bumi Raya Perkasa Nusantara	618.750.000
PT Indonesia Power	343.375.555
PT Perdana Prima Sejahtera	312.363.636
Survei S/D Pertambangan Batubara	302.960.001
PT Krakatau Industrial	248.500.000
PT Gapura Angkasa	244.552.727
Jumlah dipindahkan	3.863.829.419

5. Account Receivable

The balance of account receivable trade as of December 31, 2019 and 2018 are as follows :

	2018
Piutang Usaha Jasa Konsultasi	9.493.210.735
Penyisihan Penurunan Piutang	(1.776.139.897)
Jumlah Piutang Usaha	7.717.070.838

Total trade receivables by age (days), are as follows:

	2018
1 up to 6 months	7.556.181.674
> 6 up to 12 months	46.555.874
> 12 months	1.890.473.187
	9.493.210.735

Consultancy Services Details of accounts receivable are as follows:

	2018
SNVT Pelaksana Jaringan SDA	1.311.419.128
PT Utama Karya (Persero)	385.821.385
Dirjen Bina Marga	-
PT PAL Indonesia (Persero)	1.788.845.744
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	817.842.200
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	134.068.500
Jumlah piutang pihak berelasi	4.437.996.957

Related Parties

SNVT Pelaksana Jaringan SDA	
PT Utama Karya (Persero)	
Dirjen Bina Marga	
PT PAL Indonesia (Persero)	
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	
Total Related Parties	

Third Parties

PP-ADHI KSO	
PT Wahana Prakarsa Utama	
PT Bumi Raya Perkasa Nusantara	
PT Indonesia Power	
PT Perdana Prima Sejahtera	
Survei S/D Pertambangan Batubara	
PT Krakatau Industrial	
PT Gapura Angkasa	
Total transferred	

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

5. Piutang Usaha (lanjutan)

	2019
Jumlah pindahan	3.863.829.419
PT Wahana Adyakarya	241.600.000
PT Brantas Cakrawala	225.900.000
PT Tata Guna Patria	166.165.100
PT Rancang Mandiri	136.000.000
PT Geo Survey Barokah Jaya Prasasti	127.125.000
PT Brantas Hydro Energi	116.695.000
Consia Consultants - Denmark	111.873.100
SMEC International PTY, Ltd	8.683.800
PT Oriental Consultant Indonesia	-
PT Waskita Bumi Wira	-
PT AB OmahGeo	-
Lain - lain < 100 jt	1.743.594.297
Jumlah piutang pihak ketiga	6.741.465.716
Jumlah Piutang Usaha	8.079.332.614
Penyisihan Penurunan Nilai	(1.839.568.293)
Jumlah Piutang Usaha	6.239.764.321

6. Piutang Lain – lain

Saldo piutang lain - lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah terdiri dari :

	2019
Piutang Pegawai	8.453.780
Piutang Lainnya	12.795.517.576
Jumlah	12.803.971.356

Berdasarkan penelaahan atas status masing-masing piutang pada akhir tahun dan estimasi nilai tidak terpulihkan secara individual dan kolektif, manajemen Perusahaan memutuskan bahwa tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas kredit dan jumlah tersebut masih dapat dipulihkan sehingga tidak diadakan penyisihan piutang ragu-ragu.

7. Tagihan Bruto Pengguna Jasa

Saldo tagihan bruto pengguna jasa per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah terdiri dari :

	2019
Biaya konsultan pekerjaan dalam proses	136.372.450.177
Laba yang diakui	54.740.186.237
Pendapatan yang diakui	191.112.636.414
Tagihan termin	131.580.332.544
Tagihan Bruto Pengguna Jasa	59.532.303.870

Jumlah tagihan bruto pengguna jasa berdasarkan umur (hari), adalah sebagai berikut :

	2019
1 bulan - 6 bulan	40.117.967.673
> 6 bulan - 12 bulan	10.354.041.168
> 12 bulan	9.060.295.029
Jumlah	59.532.303.870

5. Account Receivable (continued)

	2018
Total of transfer	615.323.637
PT Wahana Adyakarya	241.600.000
PT Brantas Cakrawala	-
PT Tata Guna Patria	166.165.100
PT Rancang Mandiri	367.185.000
PT Geo Survey Barokah Jaya Prasasti	-
PT Brantas Hydro Energi	-
Consia Consultants - Denmark	111.873.100
SMEC International PTY, Ltd	199.723.800
PT Oriental Consultant Indonesia	1.164.596.000
PT Waskita Bumi Wira	884.591.667
PT AB OmahGeo	117.125.000
Others < 100jt	1.187.030.474
Total third parties	5.055.213.778
Total Account Receivable	9.493.210.735
Allowance for Impairment	(1.776.139.897)
Total Account Receivable	7.717.070.838

6. Others Receivable

The balance of others receivable as of December 31, 2019 and 2018 are as follows :

	2018
Receivables from employees	12.473.980
Other receivables	2.655.101.954
Total	2.667.575.934

Based on a review of the status of each receivable at the end of the year and the estimated value of unrecoverable individually and collectively, the Company's management decided that there was no significant change in credit quality and the amount can still be recovered so it is not held allowance for doubtful accounts.

7. Gross Amount Due from Customers

The balance of gross amount due from customers as of December 31, 2019 and 2018 are as follows :

	2018
Consultant fees for work in progress	113.646.901.302
Recognized profit	51.101.060.836
Recognized income	164.747.962.138
Termination bill	117.334.296.272
Gross amount due from customers	47.413.665.866

Total of gross amount due from customers by age (days), are as follow :

	2018
1 up to 6 months	24.302.130.898
>6 up to 12 months	2.686.186.228
>12 months	5.865.977.952
Total	32.854.295.078

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

7. Tagihan Bruto Pengguna Jasa (lanjutan)

7. Gross Amount Due from Customers (continued)

	2019	2018	
Pihak Berelasi			Related Parties
SATKER BWS Nusteng I, II & III	10.730.548.586	2.130.494.210	SATKER BWS Nusteng I, II & III
SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air	10.349.084.424	1.801.414.408	SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air
Balai Wilayah Sungai Maluku	5.324.528.046	1.423.612.525	Balai Wilayah Sungai Maluku
Kementrian Pekerjaan Umum	4.966.357.495	2.842.045.415	Kementrian Pekerjaan Umum
PT Kawasan Berikat Nusantara	2.272.406.056	2.399.173.704	PT Kawasan Berikat Nusantara
PT Brantas Abipraya (Persero)	1.984.994.674	1.984.994.674	PT Brantas Abipraya (Persero)
Perum Jasa Tirta II	1.945.373.430	2.449.819.853	Perum Jasa Tirta II
Center of Dams	1.490.516.719	3.337.822.394	Center of Dams
PT Waskita Karya (Persero)	1.379.222.939	2.451.971.313	PT Waskita Karya (Persero)
PT Angkasa Pura I	1.112.961.275	-	PT Angkasa Pura I
Dep.PU Dirjen Sumber Daya Air	1.087.016.125	1.087.016.125	Dep.PU Dirjen Sumber Daya Air
DPU Pemkab Tanah Bumbu	710.000.000	6.256.267.741	DPU Pemkab Tanah Bumbu
PT Utama Karya (Persero)	548.196.657	548.196.657	PT Utama Karya (Persero)
Balai Wilayah Sungai Sumatera I	400.144.416	-	Balai Wilayah Sungai Sumatera I
Kementrian Perhubungan	358.925.000	-	Kementrian Perhubungan
PT Pelabuhan Indonesia III	346.073.335	688.399.631	PT Pelabuhan Indonesia III
PT Perumnas (Persero)	301.743.874	-	PT Perumnas (Persero)
Perum BULOG	248.417.622	248.417.622	Perum BULOG
PT Indah Karya (Persero)	236.479.809	-	PT Indah Karya (Persero)
PT Banda Graha Reksa	220.000.000	-	PT Banda Graha Reksa
SNVT Pembangunan Bendungan BBWS	243.166.940	4.848.576.092	SNVT Pembangunan Bendungan BBWS
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	114.250.000	114.250.000	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Adhi Karya (Persero)	52.000.000	260.000.000	PT Adhi Karya (Persero)
PT Berdikari (Persero)	21.922.731	100.545.454	PT Berdikari (Persero)
PT Antam (Persero)Tbk	-	1.304.457.383	PT Antam (Persero)Tbk
Jumlah piutang pihak berelasi	46.444.330.153	36.277.475.201	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Vale Indonesia	3.307.046.097	1.078.968.237	PT Vale Indonesia
PT Geo Survey Barokah	736.650.000	-	PT Geo Survey Barokah
PT Indonesia Power	733.317.948	1.186.205.318	PT Indonesia Power
PT Bumi Raya Perkasa Nusantara	646.990.000	-	PT Bumi Raya Perkasa Nusantara
PT Brantas Energi	636.363.637	-	PT Brantas Energi
PT Brantas Cakrawala	517.081.021	260.252.262	PT Brantas Cakrawala
Design Santan River	493.750.000	493.750.000	Design Santan River
PT Oriental Consultant Indonesia	480.332.924	595.757.968	PT Oriental Consultant Indonesia
PT Setyawan Mahakarya	477.272.728	477.272.728	PT Setyawan Mahakarya
PT Wahana Prakarsa Utama	431.347.500	-	PT Wahana Prakarsa Utama
PT Minahasa Brantas Energi	361.485.001	361.485.001	PT Minahasa Brantas Energi
PT Brantas Nipah Jaya Energi	356.472.103	138.844.369	PT Brantas Nipah Jaya Energi
Hydrology/Hydrogeologi Study	324.993.750	324.993.750	Hydrology/Hydrogeologi Study
PT HK Realtindo	275.076.563	317.259.375	PT HK Realtindo
PT Berlian Manyar Sejahtera	244.684.606	-	PT Berlian Manyar Sejahtera
PT Rancang Mandiri	238.000.000	112.545.000	PT Rancang Mandiri
PT Gapura Angkasa	138.502.700	-	PT Gapura Angkasa
PT Waskita Bumi Wira	-	1.397.300.000	PT Waskita Bumi Wira
PT Ika Adya Perkasa	-	542.129.523	PT Ika Adya Perkasa
PT Jakarta Industrial Estate	-	361.072.922	PT Jakarta Industrial Estate
PT Yachiyo Engineering Co. Ltd	-	324.980.000	PT Yachiyo Engineering Co. Ltd
PT Citra Multi Energi	-	208.050.000	PT Citra Multi Energi
Korea Rural Community	-	142.966.667	Korea Rural Community
Lainnya	2.688.607.139	2.812.357.545	Others
Jumlah piutang pihak ketiga	13.087.973.717	11.136.190.665	Total third parties
Jumlah	59.532.303.870	47.413.665.866	Total
Penyisihan penurunan piutang	(5.835.078.705)	(5.835.069.705)	Allowance for Impairment
Jumlah	53.697.225.165	41.578.596.161	Total

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

7. Tagihan Bruto Pengguna Jasa (lanjutan)

Tagihan bruto pemberi jasa adalah jasa konsultan yang telah diberikan perusahaan kepada pemberi kerja namun belum dapat ditagihkan karena dokumen penagihannya belum lengkap.

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai tagihan bruto adalah cukup untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya tagihan bruto di kemudian hari.

7. Gross Amount Due from Customers (continued)

Gross amount due from customers are consulting services company that has been given to the employer but not yet charged for the billing document is not complete.

Management believes that allowance for impairment losses of gross amount due from customers is sufficient to cover the possible losses on the uncollectible gross amount due from customers in the future.

8. Uang Muka dan Uang Jaminan

Saldo uang muka per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah terdiri dari :

	2019
Panjar kerja	3.518.228.041
Uang muka sub konsultansi	792.847.800
Uang Muka Pembelian	-
Jaminan tender	-
Jaminan pelaksanaan	35.000.000
Jaminan lainnya	180.616.000
Jumlah	4.526.691.841

8. Advances and Guarantee

The balance of advance as of December 31, 2019 and 2018 are as follows :

	2018	
	1.950.296.719	Temporary of payment
	394.391.763	Cash Advance sub consultancy
	287.560.000	Prepaid Purchase
	158.270.090	Tender bond
	138.000.000	Performance bond
	180.616.000	Other advances
Total	3.109.134.572	Total

9. Biaya Dibayar Dimuka

Saldo biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah terdiri dari :

	2019
Sewa rumah / mess dibayar dimuka	134.545.382
Biaya dibayar dimuka	5.543.194.923
Jumlah	5.677.740.305

9. Prepaid Expenses

The balance of prepaid expenses as of December 31, 2019 and 2018 are as follows :

	2018	
	626.712.036	Prepaid rent
	4.642.606.925	Prepaid expenses
Total	5.269.318.961	Total

10. Perpajakan

a. Uang muka pajak

	2019
PPN Masukan	338.171.325
PPh Pasal 21	2.000.000
PPh Pasal 23	99.470.128
439.641.453	

10. Taxes

a. Prepaid tax

	2018
	909.186.293
	-
	3.138.500
912.324.793	

VAT - In
PPh art 21
PPh art 23

b. Utang pajak

	2019
PPN Keluaran	2.959.231.649
PPh ps.21	1.528.478.616
PPh ps.23 pihak lain	1.466.601.429
PPN Pihak lain	903.460.985
PPh ps. 4 ayat 2	442.208.858
7.299.981.537	

b. Tax payable

	2018
	1.999.491.714
	1.290.561.427
	1.477.885.808
	901.256.383
	448.921.474
6.118.116.806	

VAT - Out
PPh art 21
PPh art 23 third parties
VAT third parties
PPh art 4 paragraph 2

c. Beban pajak

Jumlah beban pajak untuk tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar **Rp 4.936.821.711,-** dan **Rp 4.989.664.845,-**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tanggal 20 Juli 2008 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2008 tentang pajak penghasilan dari usaha konsultansi, semua pendapatan perusahaan jasa konsultansi dikenakan pajak final.

c. Tax expense

Total tax expense for 2019 and 2018 was **Rp 4.936.821.711,-** dan **Rp 4.989.664.845,-**

Based in the Government Regulation No. 51 dated July 20, 2008 which effective on January 1, 2008 concerning to income tax from consultancy services, all revenue from consultancy service companies is subject to final tax.

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

11. Penugasan Jasa Konsultansi Dalam Pelaksanaan

Penugasan jasa konsultasi dalam pelaksanaan (calon karya) merupakan biaya pelaksanaan pekerjaan yang telah dikeluarkan tapi perjanjian kontraknya masih dalam proses sehingga produksinya baru akan diakui setelah kontrak ditandatangani, saldo penugasan jasa konsultansi dalam pelaksanaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp 1.828.880.098,- dan Rp 2.292.556.218,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019
Beban Pegawai	762.801.813
Beban Pemasaran	45.301.125
Beban Perjalanan Dinas	666.723.654
Beban Kendaraan	18.567.894
Beban Umum	335.485.612
Jumlah	1.828.880.098

11. Assignment of Consulting Services in Execution

Assignment of consulting services in the implementation of (prospective's project) is the cost of implementation of the work that has been issued but the contract terms are still in the process so that the new production will be recognized after the contract is signed, the balance of consultancy assignments in the implementation by December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp 1.828.880.098,- and Rp 2.292.556.218,- with the following details:

	2018	
	844.891.030	Employee expenses
	72.995.012	Marketing expense
	292.358.045	Official Travel expenses
	104.356.579	Transportation expenses
	977.955.552	General expenses
Total	2.292.556.218	

12. Aset Ventura Bersama

Aset ventura bersama merupakan piutang yang timbul atas pencatatan bagian pendapatan dan biaya dari kegiatan ventura bersama. Saldo aset ventura bersama per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah terdiri dari :

	2019
Seluna River Basin Flood Management	7.568.063.642
Proyek DOWIS Central Java	5.494.950.169
Proy.Bend. Lolak	2.554.659.448
Cimanuk-Cisanggarung River Basin	1.384.087.698
Bendungan Beringinsila	1.116.086.211
Irigasi Kewenangan Kabupaten Jember	875.134.496
Proyek Bendungan Keuliling	727.914.918
Flood Management in River Basins	614.574.965
Proyek Tol Manado Bitung	583.140.425
Proyek Rotiklot	-
Lainnya	1.244.287.754
Jumlah	22.162.899.726

12. Joint Venture Assets

Joint venture assets are receivables arising from the recording of income and expenses of joint venture activities. The balance of Joint venture assets as of December 31, 2019 and 2018, are as follows :

	2018	
	-	Seluna River Basin Flood Management
	-	DOWIS Central Java Project
	2.339.605.348	Bend. Lolak Project
	-	Cimanuk-Cisanggarung River Basin
	-	Bendungan Beringinsila Project
	-	Irigasi Kewenangan Kabupaten Jember
	-	Bendungan Keuliling Project
	-	Flood Management in River Basins
	283.437.354	Manado Bitung Toll Road Project
	947.233.021	Rotiklot Project
	256.092.175	Others
Total	3.826.367.898	

13. Aset Tetap

13. Property, plant and equipment

	2019				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir Ending Balance	
Harga Perolehan					Acquisition cost
Tanah	83.708.200.000	-	-	83.708.200.000	Land
Bangunan	3.136.900.000	1.977.132.600	-	5.114.032.600	Building
Kendaraan	4.352.799.161	1.349.476.673	288.341.283	5.413.934.551	Vehicle
Peralatan Kantor	4.184.869.539	1.322.874.185	-	5.507.743.724	Office Equipment
Alat S & I	427.611.317	573.100.000	-	1.000.711.317	S & I Equipment
	95.810.380.017	5.222.583.458	288.341.283	100.744.622.192	
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	1.771.853.212	156.845.000	-	1.928.698.212	Building
Kendaraan	2.039.896.157	668.913.828	288.341.283	2.420.468.702	Vehicle
Peralatan Kantor	3.859.166.534	519.876.102	-	4.379.042.636	Office Equipment
Alat S & I	287.225.354	60.096.474	-	347.321.828	S & I Equipment
	7.958.141.257	1.115.681.206	-	9.073.822.463	
Nilai Buku	87.852.238.760			91.670.799.729	Book Value

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

13. Aset Tetap (lanjutan)

13. Property, plant and equipment (continued)

	2018				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir Ending Balance	
Harga Perolehan					Acquisition cost
Tanah	83.708.200.000	-	-	83.708.200.000	Land
Bangunan	3.136.900.000	-	-	3.136.900.000	Building
Kendaraan	2.969.615.466	2.008.133.894	624.950.199	4.352.799.161	Vehicle
Peralatan Kantor	3.990.088.538	194.781.001	-	4.184.869.539	Office Equipment
Alat S & I	411.611.317	16.000.000	-	427.611.317	S & I Equipment
	94.216.415.321	2.218.914.895	624.950.199	95.810.380.017	
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	1.615.008.212	156.845.000	-	1.771.853.212	Building
Kendaraan	2.170.118.811	485.559.105	615.781.759	2.039.896.157	Vehicle
Peralatan Kantor	3.780.602.455	78.564.079	-	3.859.166.534	Office Equipment
Alat S & I	245.763.387	38.006.802	(3.455.165)	287.225.354	S & I Equipment
	7.811.492.865	758.974.986	612.326.594	7.958.141.257	
Nilai Buku	86.404.922.456			87.852.238.760	Book Value

Penyusutan pada tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp 1.115.681.206,- dan Rp 758.974.986,- seluruhnya dibebankan sebagai beban usaha dan administrasi umum.

Depreciation in 2019 and 2018 amounting to Rp 1.115.681.206,- and Rp 758.974.986,- fully charged as operating expenses and general administration.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga manajemen tidak melakukan penyisihan penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2019 dan 2018.

Based on management's evaluation, no events or changes in circumstances indicate impairment of fixed assets, so that the management did allowance for impairment of fixed assets at December 31, 2019 and 2018.

14. Utang Usaha

14. Account Payable

Saldo utang usaha per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

The balance of account payable at December 31, 2019 and 2018 are as follows :

	2019	2018	
Utang Subkonsultansi	9.305.247.594	10.853.125.593	Sub Consultant payable
Utang Kepada Asosiasi	75.375.141	59.936.586	Association payable
Utang Kepada Pemasok	691.153.002	8.429.996.119	Trade account payables
Jumlah	10.071.775.737	19.343.058.298	Total

15. Uang Muka Proyek

15. Advance From Customers

Saldo uang muka diterima per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

The balance of prepaid sales at December 31, 2019 and 2018 are as follows :

	2019	2018	
Satker BWS Nusteng	6.546.030.239	1.832.821.326	Satker BWS Nusteng
Balai Wilayah Sungai Maluku	3.895.668.836	1.818.181.818	Balai Wilayah Sungai Maluku
Kementrian PUPR	1.672.439.211	-	Ministry of Public Works & HS
SNVT Pembangunan Bendungan BBWS	1.496.176.036	2.016.434.639	SNVT Pembangunan Bendungan BBWS
Kementrian Kelautan dan Perikanan	1.043.865.500	-	Ministry Marine and Fisheries
PT Bumi Raya Perkasa Nusantara	495.000.000	-	PT Bumi Raya Perkasa Nusantara
Pemkab Tanah Bumbu	355.000.000	1.283.422.459	Pemkab Tanah Bumbu
PT Brantas Abipraya	280.080.401	280.080.401	PT Brantas Abipraya
Perum Jasa Tirta II	263.418.200	-	Perum Jasa Tirta II
PT Brantas Prospek Energi	127.272.727	-	PT Brantas Prospek Energi
Yantok Wahyudi Setiawan	127.155.000	-	Yantok Wahyudi Setiawan
PT Minahasa Brantas Energi	90.371.250	90.371.250	PT Minahasa Brantas Energi
Satker BWS Sulawesi	85.674.261	554.929.499	Satker BWS Sulawesi
PT Brantas Total Energi	36.000.000	180.000.000	PT Brantas Total Energi
Center of Dams	-	2.507.240.000	Center of Dams
Jumlah dipindahkan	16.514.151.661	10.563.481.392	Total trasferred

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

15. Uang Muka Proyek (lanjutan)

	2019
Jumlah pindahan	16.514.151.661
Satker BBWS Brantas	-
PT Waskita Karya Div II	-
SNVT Pelaksana Jaringan Sumber	-
DI Kalibawang	-
PT Waskita Bumi Wira	-
Bendahara Pengeluaran (Wil. III)	-
SNVT Sumber Air Bramtas	-
PT Oriental Consultance Indonesia	-
Supervisi Rehabilitasi Jaringan Air	-
Lainnya	253.337.127
Jumlah	16.767.488.788

16. Beban yang masih harus dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	2019
Beban gaji / honorarium	7.889.741.113
Beban cadangan penyelesaian proyek	7.397.804.172
Beban Lainnya	30.493.504.858
Beban Bunga	13.500.000
Beban sewa	781.448.700
Jumlah	46.575.998.843

Beban yang masih harus dibayar merupakan pencatatan pendahuluan atas biaya – biaya yang telah terjadi, terdiri dari prestasi sub konsultan, pemakaian bahan, biaya umum lapangan dan jasa pihak ketiga yang berita acaranya masih dalam proses.

17. Liabilitas Lainnya

Saldo utang lain - lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	2019
Jangka pendek	38.990.676.144
Jangka panjang	24.055.265.051
Jumlah	63.045.941.195

Rincian utang lain - lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	2019
Liabilitas lainnya jangka pendek	
Kementrian PU	12.121.676.231
Satker BWS Nusa Tenggara	6.947.375.236
Directorate of Irrigation	5.533.589.483
KSO DE II	4.276.499.659
PT CEC	1.850.352.210
BWS Maluku	873.269.297
PT Jiwasraya Putera (Persero)	444.293.391
CV Defari Multi Karya	434.815.341
PT Tunas Mandiri Finance	414.164.847
Sanjaya	353.343.294
Centre of Dams	338.000.000
Jumlah dipindahkan	33.587.378.989

15. Advance From Customers (continued)

	2018
Total transfer	10.563.481.392
Satker BBWS Brantas	839.213.760
PT Waskita Karya Div II	832.854.177
SNVT Pelaksana Jaringan Sumber	642.589.206
DI Kalibawang	382.956.553
PT Waskita Bumi Wira	354.536.633
Bendahara Pengeluaran (Wil. III)	342.697.050
SNVT Sumber Air Bramtas	229.544.004
PT Oriental Consultance Indonesia	162.356.475
Supervisi Rehabilitasi Jaringan Air	131.497.236
Lainnya	398.083.923
Total	14.879.810.409

16. Accrued expenses

The balance of accrued expenses at December 31, 2019 and 2018 are as follows :

	2018
Salaries and honorarium	7.313.045.723
Overhead project	7.705.551.232
Others	6.392.078.877
Interest expences	40.500.000
Rent	645.796.900
Total	22.096.972.732

Accrued expenses is a preliminary listing of costs that have occurred, consisting of sub-consultants achievement, use of materials, the cost of common ground and third-party service official report is still in progress.

16. Others Liabilities

The balance of others payable at December 31, 2019 and 2018 are as follows :

	2018
Short Term	12.794.935.902
Long Term	18.154.736.649
Total	30.949.672.551

The details of others payable at December 31, 2019 and 2018 are as follows :

	2018
Others payable sort term	
Kementrian PU	1.421.809.830
Satker BWS Nusa Tenggara	3.533.675.930
Directorate of Irrigation	-
KSO DE II	773.349.171
PT CEC	-
BWS Maluku	873.269.297
PT Jiwasraya Putera (Persero)	434.965.489
CV Defari Multi Karya	-
PT Tunas Mandiri Finance	-
Sanjaya	353.343.294
Centre of Dams	425.000.000
Total transfered	7.815.413.011

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

17. Liabilitas Lainnya (lanjutan)

16. Others Liabilities (continued)

	2019	2018	
Jumlah pindahan	33.587.378.989	7.815.413.011	Total transfer
Liabilitas lainnya jangka pendek			Others payable sort term
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	335.111.049	335.111.049	PT Pembangunan Perumahan (Persero)
SNVT Sumber Air Brantas	335.000.000	-	SNVT Sumber Air Brantas
Endah Wahyu Winarsih	300.000.000	-	Endah Wahyu Winarsih
PT Oto Credit	232.420.131	288.992.502	PT Oto Credit
PT Brantas Abipraya	200.000.000	200.000.000	PT Brantas Abipraya
PT PJB	190.000.000	190.000.000	PT PJB
Ir. Moedjiarto	180.000.000	-	Ir. Moedjiarto
PT Sampulu Adijaya Prakarsa	160.000.000	-	PT Sampulu Adijaya Prakarsa
CV Akurasi Misi Survey	153.750.000	-	CV Akurasi Misi Survey
Subiiyanto, SE	116.000.000	116.000.000	Subiiyanto, SE
PT Waskita Karya Divisi II	105.000.000	105.000.000	PT Waskita Karya Divisi II
Andry Yuniar Suroso	105.000.000	-	Andry Yuniar Suroso
BCA Finance	102.789.674	158.856.794	BCA Finance
Satker BWS Sulawesi I	38.200.000	351.546.838	Satker BWS Sulawesi I
SKE Sidharta	-	202.000.000	SKE Sidharta
Lain - lain < 100 Juta	2.850.026.301	3.032.015.708	Others < 100 Juta
	38.990.676.144	12.794.935.902	
Liabilitas lainnya jangka panjang			Others payable long term
PT Utama Karya Realtindo	16.000.000.000	16.000.000.000	PT Utama Karya Realtindo
PT Bringin Indotama Sejahtera	3.500.000.000	-	PT Bringin Indotama Sejahtera
Gratifikasi, tantiem & bonus	1.361.918.975	1.361.918.975	Gratifikasi, tantiem & bonus
Kementrian Kelautan dan Perikanan	1.043.865.500	-	Kementrian Kelautan dan Perikanan
PT Jamsostek	537.432.067	537.432.067	PT Jamsostek
DPLK Jiwasraya	368.441.362	255.385.607	DPLK Jiwasraya
Dir Irigasi Dep. PU	339.090.109	-	Dir Irigasi Dep. PU
DPU Pemkab Sumbawa	153.382.500	-	DPU Pemkab Sumbawa
Lain - lain < 100 Juta	751.134.721	-	Others < 100 Juta
Sub jumlah	24.055.265.051	18.154.736.649	Sub total
Jumlah	63.045.941.195	30.949.672.551	Total

Utang kepada PT Utama Karya Realtindo sebesar Rp 16.000.000.000,- merupakan penerimaan dimuka atas kompensasi Kerjasama Operasi optimalisasi aset tanah yang terletak di Jl. Letjen Haryono MT, Kav.9, Cawang Jakarta Timur.

Utang kepada PT Bringin Indotama Sejahtera sebesar Rp 3.500.000.000,- merupakan pinjaman untuk keperluan pendanaan pembangunan pabrik pengolahan air minum dalam kemasan.

Utang Tantien dan Gratifikasi merupakan kewajiban perseroan kepada karyawan dan mantan direksi serta komisaris untuk pembayaran insentif dan tantien atas hasil usaha tahun 2002.

Debt to PT Utama Karya Realtindo in the amount of Rp 16,000,000,000 is an upfront receipt of compensation for the Joint Operation optimization of land assets located on Jl. Letjen Haryono MT, Kav.9, Cawang East Jakarta

The debt to PT Bringin Indotama Sejahtera amounting to Rp 3,500,000,000 is a loan to finance the construction of a bottled water treatment plant.

Bonus and Gratuity debt on an obligation of the company to employees and former directors and commissioners for incentive payments and annual bonus based on the results of operations in 2002.

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

18. Liabilitas Imbalan Kerja

Saldo Imbalan paska kerja per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	2019
Kewajiban Tunjangan hari tua	308.929.059
Kewajiban Imbalan pasca kerja	15.540.165.280
Jumlah	15.849.094.339

Kewajiban Jaminan Hari Tua tersebut merupakan hutang Dana Past Service Liability (PSL) jangka panjang kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Jiwasraya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kerja karyawan (program imbalan pasti) sesuai Undang – Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, dengan usia pensiun normal adalah 55 tahun. Terdapat pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan manfaat karyawan tersebut yaitu DPLK. Perusahaan telah melakukan perhitungan dan pengakuan kewajiban diestimasi berdasarkan PSAK 24 (rev). Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut pada akhir Desember 2019 adalah sebanyak 106 karyawan dan 111 karyawan pada akhir Desember 2018. Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan biaya manfaat pensiun pada tahun 2019 oleh aktuaris independen PT Jasa Aktuarial Praptasentosa Gunajasa No. 977/LV/PSGJ/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 dan 2019 oleh aktuaris independen PT Jasa Aktuarial Praptasentosa Gunajasa No.489/LV/PSGJ/II/2020 tanggal 04 February 2020 adalah sebagai berikut :

	2019
Metode Penelitian	Projected Unit Credit
Tingkat Mortalitas	TMI 2011
Tingkat Diskonto	8,0%
Tingkat Proyeksi kenaikan gaji	7,0%
Tingkat Cacat dan Sakit	5% TMI 2011
Tingkat Pengunduran Diri	5,00%
Proporsi pengembalian pensiun dini	N/A
Proporsi pengembalian pensiun normal	100%
Tingkat PHK karena alasan lain	NIL

Besarnya kewajiban dan beban yang timbul sehubungan dengan program imbalan karyawan tersebut adalah, sebagai berikut :

	2019
Kewajiban yang diakui di Neraca	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	13.226.719.776
Nilai wajar aset program imbalan karyawan	2.313.445.504
Status Pendanaan	15.540.165.280
Beban masa lalu yg belum diakui (non vested)	-
Keuntungan (Kerugian) aktuarial yg belum diakui	-
Kewajiban yang diakui di Neraca	15.540.165.280

18. Post Employment Benefits

The balance of Debt employment benefits at December 31, 2019 and 2018 are as follows :

	2018	
	1.214.802.488	Retirement benefits obligations
	13.226.719.776	Post-employment benefits obligation
	14.441.522.264	Total

The Old Age Security obligations are payable Past Service Liability Fund (PSL) to the long term Jiwasraya Pension Fund on December 31, 2019 and 2018.

The Company provides employee benefit plan (defined benefit plan) in accordance Law - Labour Law. 13/2003, the normal retirement age is 55 years. There is funding made in connection with the employee benefits is Pension Fund. The Company has computed the estimated liability and the recognition is based on PSAK 24 (rev). The number of employees who are entitled to such benefits at the end of December 2019 was as much 106 employees and 111 employees at the end of December 2018. Actuarial assumptions used in determining the cost of retirement benefits in 2019 by independent aktuaris PT Jasa Aktuarial Praptasentosa Gunajasa No. 977/LV/PSGJ/I/2019 dated January 21, 2019 and 2019 by independent aktuaris PT Jasa Aktuarial Praptasentosa Gunajasa No.489/LV/PSGJ/II/2020 dated February 04, 2020 is as follows:

	2018	
Projected Unit Credit		Research Methods
TMI 2011		Mortality
8,0%		Discount Rate
7,0%		Projected level of salary increase
5% TMI II		Level of Disability and Pain
5,00%		Resignation Level
N/A		Proportion of early retirement returns
100%		Proportion of return to normal retirement
NIL		The rate of layoffs for other reasons

The amount of liabilities and expenses incurred in connection with employee benefit plans are as follows:

	2018	
		Obligation recognized in the Balance Sheet
	10.868.264.618	Current Value - Defined Benefit Obligation
	2.358.455.158	Fair value of plan assets
	13.226.719.776	Financing Status
	-	Unrecognized Past Service Cost (Non Vested)
	-	Unrecognized Actuarial Gain (loss)
	13.226.719.776	Liability recognized in the Balance Sheet

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

18. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

	2019
Beban yang diakui di Laporan Laba (Rugi)	
Biaya jasa kini	754.794.579
Biaya bunga	1.036.346.025
Hasil yang diharapkan dari aset program	-
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui	-
Biaya Jasa Lalu yang divested	-
Amortisasi biaya jasa lalu yang belum divested	-
Total beban imbalan karyawan	1.791.140.604

Rekonsiliasi perubahan Kewajiban yang diakui di neraca

Kewajiban (aset) yang diakui di Neraca pada akhir periode lalu	13.226.719.776
Pembayaran imbalan	(960.494.613)
Luran bersih yang dibayarkan ke Aset program (2/3 bagian)	-
Beban imbalan pada tahun berjalan	1.791.140.604
Beban pada OCI	1.482.799.513
Kewajiban yang diakui di Neraca	15.540.165.280

18. Post Employment Benefits (continued)

	2018	
Expense recognized in the Income Statement		
712.320.230		Current service cost
706.437.200		Interest expense
778.123.234		Expected Return on Plan Asset
-		Recognized Actuarial Loss (Gain)
-		Recognized Past Service Cost (Vested)
-		Amortization of past service costs non-vested
2.196.880.664		Total employee benefits expense

Reconciliation of changes in Liabilities recognized in the balance sheet

10.868.264.618		Obligation (asset) recognized in Balance at the end of the period
(2.671.480.884)		Benefit payment
-		Net Contributions are paid to Plan assets (2/3 parts)
2.196.880.664		Benefits expense in the current year
2.833.055.378		Expense to OCI
13.226.719.776		Obligation recognized in the Balance Sheet

19. Modal Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 123 tanggal 31 Maret 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH, mengenai modal dasar Perseroan terdiri dari 8.000 lembar saham dengan nominal Rp. 1.000.000,- per lembar, yang terpecah dalam 6.000 lembar saham yang belum ditempatkan dan 2.000 lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Modal saham Perusahaan seluruhnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Jumlah modal saham per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	2019
Modal Dasar 8.000 lembar dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 per lembar	8.000.000.000
Modal belum ditempatkan dan belum disetor penuh 6.000 lembar dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 per lembar	(6.000.000.000)
Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.000 lembar dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 per lembar	2.000.000.000

19. Capital Stock

Based on the Deed and Amendment No. Statutes. 123 dated March 31, 1998, made before Notary Imas Fatimah, SH, the Company's authorized capital consists of 8,000 shares with a nominal value of Rp. 1.000.000, - per share, which is divided in 6,000 shares that have not been issued and 2,000 shares issued and fully paid amounting to Rp. 2.000.000.000, -. Company's total share capital (100%) owned by the Government of the Republic of Indonesia. Amount of capital stock per December 31, 2019 and 2018, are as follows:

	2018	
8.000.000.000		Authorized Capital 8,000 share with a nominal value of Rp. 1,000,000 per share.
(6.000.000.000)		Capital has not yet issued and fully paid up 6,000 share with a nominal value of Rp. 1,000,000 per share.
2.000.000.000		Issued and fully paid 2,000 shares with a nominal value of Rp. 1,000,000 per share.

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

20. Saldo Laba

Saldo laba per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	2019
Ditentukan Penggunaannya :	
Saldo Laba Awal Tahun	886.557.833
Penambahan (pengurangan) :	
Deviden	9.516.953.260
Program Bina Lingkungan	-
Saldo Akhir Tahun	10.403.511.093
Belum Ditentukan Penggunaannya :	
Saldo Awal Tahun	11.264.022.788
Penambahan (pengurangan) :	
Deviden	(9.706.443.168)
Laba (rugi) Bersih Tahun Berjalan	10.909.223.194
Saldo Akhir Tahun	12.466.802.814
Jumlah	22.870.313.907

20. Retained Earning

The balance of Retained earning at December 31, 2019 and 2018 are as follows :

	2018	
	886.557.833	Appropriated :
	-	Retained Earnings at Beginning of Year
	-	Additions (reductions)
	-	Devident
	-	Community Development Program
	886.557.833	Balance at End of Year
		Unappropriated
	1.246.177.251	Retained Earnings at Beginning of Year
	-	Additions (reductions)
	-	Devident
	10.017.845.537	Current Year Net Income (loss)
	11.264.022.788	Balance at End of Year
Jumlah	12.150.580.621	Total

21. Pendapatan Komprehensif Lainnya

Jumlah pendapatan usaha untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	2019
Selisih aktuarial Program Manfaat Pasti	(13.423.272.940)
Selisih aktuarial atas Revaluasi Aset	70.731.000.000
Jumlah	57.307.727.060

21. Others Comprehensive Income

The balance of others comprehensive income at December 31, 2019 and 2018 are as follows :

	2018	
	(11.940.473.427)	Actuarial diff. on Employees Benefits
	70.731.000.000	Actuarial diff. on Revaluation Assets
	58.790.526.573	Total

22. Pendapatan Usaha

Jumlah pendapatan usaha untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	2019
Design	65.678.982.325
Survey & Investigasi	16.237.932.820
Supervisi	74.518.247.236
Study Kelayakan	22.471.048.225
Lainnya	12.206.425.808
Jumlah	191.112.636.414

22. Operating Revenue

The number of operating revenues for the period ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2018	
	53.751.515.504	Design
	14.188.279.447	Survey & Investigation
	72.371.791.141	Supervision
	12.551.434.765	Feasibility Study
	11.884.941.281	Others
	164.747.962.138	Total

23. Beban Pokok Pendapatan

Jumlah beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	2019
Tenaga Kerja	58.620.984.728
Sub Konsultansi	31.888.779.990
Operasional Lapangan	23.739.830.397
Perjalanan Dinas	12.715.373.934
Kendaraan / Peralatan	8.381.162.088
Pemasaran	1.026.319.040
Jumlah	136.372.450.177

23. Cost of Revenue

Amount of cost of revenues for the period ended December 31, 2019 and 2018 are as follows :

	2018	
	49.506.339.295	Labour
	26.575.207.754	Consultant
	16.283.823.646	Overhead
	11.072.713.781	Travelling
	8.630.463.741	Equipment
	1.578.353.085	Marketing
	113.646.901.302	Total

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

24. Pendapatan Bersih Ventura Bersama

Jumlah pendapatan bersih ventura bersama untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	2019	2018
Proyek Tol Manado - Bitung	322.203.070	261.387.354
Proyek Banjir Kanal Timur	150.000.000	-
Proyek Jembatan Musi VI	34.116.060	29.874.055
Proyek Bendungan Lolak	-	1.090.789.660
Proyek Bendungan Rotiklot	-	54.099.058
Proyek Sudetan Ciliwung	-	22.500.000
Proyek Rel Depo Cipinang	-	17.707.813
Jumlah	506.319.130	1.476.357.940

24. Net Revenue Joint Ventures

Details of net revenue of joint ventures in 2019 and 2018 are as follows:

Jembatan Air Komerling Project
Banjir Janal Timur Project
Jembatan Musi VI Project
Bendungan Lolak Project
Bendungan Rotiklot Project
Sudetan Ciliwung Project
Rel Depo Cipinang Project
Total

25. Beban Usaha

Jumlah beban usaha untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	2019	2018
Pegawai	30.822.622.202	27.932.395.048
Umum dan Administrasi	7.777.060.990	5.852.783.684
Penyusutan	1.404.022.489	758.974.986
Kendaraan	999.565.642	783.335.584
Perjalanan Dinas	988.344.522	754.631.426
Pemasaran	293.351.482	442.242.152
Jumlah	42.284.967.327	36.524.362.880

25. Operating Expenses

Total operating expenses for the period ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:

Salaries, allowances and bonus
General & Administration
Depreciation
Transportation
Travelling
Marketing
Total

26. Manajemen Risiko Keuangan

Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (yaitu risiko mata uang asing dan tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan risiko yang mencakup toleransi risiko dalam strategi mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan harga pasar. Perusahaan dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama resiko tingkat suku bunga.

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan bank, deposito yang dibatasi penggunaannya, utang bank jangka pendek dan utang pembiayaan.

Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perusahaan secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan swap suku bunga saat ini.

26. Financial Risk Management

Potential risks arising from the Company's financial instruments relates to market risk (foreign currency exchange and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. Policies of the importance of managing the risk level has increased significantly considering changes of several parameters and volatility of financial markets both in Indonesia and international. The Company's Director reviews and approves risk policies covering the risk tolerance in the strategy to manage the risks which are summarized below

Interest Rate Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. The Company is affected by interest risk.

Interest rate risk is the risk in terms of fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. Exposure of the Company to interest rate risk is mainly related to banks, restricted deposit, short-term bank loans and financing payable.

The Company closely monitor fluctuations in market interest rates and market expectations so that they can take the most profitable steps for the Company in a timely manner. Management does not consider the need for interest rate swaps at this time.

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

26. Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko tingkat suku bunga:

26. Financial Risk Management (continued)

The following table sets out the carrying amount, by maturity, of the Company's financial assets and liabilities that are exposed to interest rate risk:

2019				
	Belum Jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai / Neither past due not impaired	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai / Past due but not impaired	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai / Past due and impaired	Total
Bank/ Bank	41.688.398.263	-	-	41.688.398.263
Piutang Usaha/ Account Receivable	-	6.239.764.321	1.839.568.293	8.079.332.614
Piutang Lainnya/ Others Receivable	-	12.803.971.356	-	12.803.971.356
Tagihan Bruto/ Gross Amount	-	53.697.225.165	5.835.078.705	59.532.303.870
Jumlah	41.688.398.263	72.740.960.842	7.674.646.998	122.104.006.103

2018				
	Belum Jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai / Neither past due not impaired	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai / Past due but not impaired	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai / Past due and impaired	Total
Bank/ Bank	25.083.188.311	-	-	25.083.188.311
Piutang Usaha/ Account Receivable	-	7.717.070.838	1.776.139.897	9.493.210.735
Piutang Lainnya/ Others Receivable	-	2.667.575.934	-	2.667.575.934
Tagihan Bruto/ Gross Amount	-	41.578.596.161	5.835.078.705	47.413.674.866
Jumlah	25.083.188.311	51.963.242.933	7.611.218.602	84.657.649.846

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dalam hal pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi dan dari aktivitas pendanaan, termasuk deposito pada bank, transaksi valuta asing dan instrumen keuangan lainnya. Risiko kredit terutama berasal dari kas di bank, piutang lainnya.

Risiko kredit yang berasal dari piutang usaha - pihak ketiga dan piutang lain-lain - pihak ketiga dikelola oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan pengendalian dari Perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan dan piutang lain-lain. Batasan kredit ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Saldo piutang pelanggan dimonitor secara teratur oleh manajemen dan untuk bank, Perusahaan meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan pada lembaga keuangan yang bereputasi.

Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai maksimum kredit yang dihadapi oleh Perusahaan pada 31 Desember 2019 dan 2018 :

	2019	2018	
Bank	41.688.398.263	25.083.188.311	Bank
Piutang Usaha	6.239.764.321	7.717.070.838	Account Receivable
Piutang Lainnya	12.803.971.356	2.667.575.934	Others Receivables
Tagihan Bruto Pengguna Jasa	53.697.225.165	41.578.596.161	Gross Amount Due from Customers
Jumlah	47.928.162.584	32.800.259.149	

Credit Risk

Credit risk is the risk that a third party failed to discharge its obligation based on financial instrument or customer contract, which will incurred a financial loss. The Company is exposed to credit risk arising from its operating activities and from its financing activities, including deposits with banks, foreign exchange transactions and other financial instruments. Credit risk arises mainly from cash on banks, other receivables.

Credit risk arise from trade receivables - third parties and other receivables - third parties managed by the management of the Company in accordance with the policies, procedures, and control of the Company relating to customer credit risk management and other receivables. Credit limits are determined for all customers based on internal assessment criteria. The balance of customer receivables is monitored regularly by the management and for banks, the Company minimizes the credit risk by placement of funds with reputable financial institutions.

The following table provides information regarding the maximum credit risk exposure of the Company as of December 31, 2019 and 2018 :

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

26. Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan analisis umur aset keuangan Perusahaan sesuai dengan peringkat kredit debitur Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 :

26. Financial Risk Management (continued)

The following table provides the credit quality and age analysis of the Company's financial assets according to the Company's credit ratings of counterparties as of December 31, 2019 and 2018 :

31 Desember 2019 / December 31, 2019						
	Rata-rata suku bunga efektif/ Average effective Interest rate	Jatuh tempo dalam satu (1) tahun/ within one (1) year	Jatuh tempo pada tahun ke-2/ In the 2nd Year	Jatuh tempo pada tahun ke-3/ In the 3rd Year	Jatuh tempo pada tahun ke-4/ In the 4th Year	Total/ Total
Bank/ Banks	4,25%	41.688.398.263	-	-	-	41.688.398.263
Piutang Usaha/ Account Receivable		8.079.332.614	-	-	-	8.079.332.614
Piutang Lainnya/ Others Receivable		12.803.971.356	-	-	-	12.803.971.356
Tagihan Bruto/ Gross Amount		59.532.303.870	-	-	-	59.532.303.870

31 Desember 2018 / December 31, 2018						
	Rata-rata suku bunga efektif/ Average effective Interest rate	Jatuh tempo dalam satu (1) tahun/ within one (1) year	Jatuh tempo pada tahun ke-2/ In the 2nd Year	Jatuh tempo pada tahun ke-3/ In the 3rd Year	Jatuh tempo pada tahun ke-4/ In the 4th Year	Total/ Total
Bank/ Banks	4,00%	25.083.188.311	-	-	-	25.083.188.311
Piutang Usaha/ Account Receivable		9.493.210.735	-	-	-	9.493.210.735
Piutang Lainnya/ Others Receivable		2.667.575.934	-	-	-	2.667.575.934
Tagihan Bruto/ Gross Amount		47.413.674.866	-	-	-	47.413.674.866

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko dalam hal Perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (cash-in) dan kas keluar (cash-out) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.

Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 :

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk when the Company is unable to meet its obligations when it is due. The management evaluates and monitors cash-in flows and cash-out flows to ensure the availability of fund to settle the due obligation. In general, the fund needed for settlement of current and long-term liabilities is obtained from sales activities to customers.

The tables below summarize the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of December 31, 2019 and 2018 :

31 Desember 2019 / December 31, 2019						
	<= 1 Tahun <= 1 Year	1-2 Tahun/ 1-2 Year	2-5 Tahun/ 2-5 Year	>= 5 Tahun / >= 5 Year	Total / Total	Nilai Wajar/ Fair Value
Utang Usaha/ Account Payable	10.071.775.737	-	-	-	10.071.775.737	10.071.775.737
Utang Lainnya/ Others Payable	47.045.941.195	-	-	16.000.000.000	63.045.941.195	63.045.941.195
Uang Mukal/ Advance from customer	16.767.488.788	-	-	-	16.767.488.788	16.767.488.788

31 Desember 2019 / December 31, 2019						
	<= 1 Tahun <= 1 Year	1-2 Tahun/ 1-2 Year	2-5 Tahun/ 2-5 Year	>= 5 Tahun / >= 5 Year	Total / Total	Nilai Wajar/ Fair Value
Utang Usaha/ Account Payable	19.343.058.298	-	-	-	19.343.058.298	19.343.058.298
Utang Lainnya/ Others Payable	14.949.672.551	-	-	16.000.000.000	30.949.672.551	30.949.672.551
Uang Mukal/ Advance from customer	14.879.810.409	-	-	-	14.879.810.409	14.879.810.409

Manajemen Modal

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Capital Management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure credit rating and healthy capital ratios are maintained in order to support its business and maximize shareholder value. The Company is not required to meet any capital requirements.

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

26. Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Manajemen Modal (lanjutan)

Manajemen Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan atau proses selama periode yang disajikan.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Perusahaan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio pinjaman terhadap modal (gearing ratio) yang dihitung melalui pembagian antara pinjaman bersih dengan modal. Pinjaman bersih adalah jumlah liabilitas berbunga sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan dikurangi dengan jumlah kas dan bank serta deposito yang dibatasi penggunaannya.

Sedangkan modal meliputi seluruh komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2019, perhitungan rasio adalah sebagai berikut:

	2019
Total liabilitas	159.411.036.547
Dikurangi bank	(41.688.398.263)
Liabilitas bersih	117.722.638.284
Total ekuitas	82.178.040.967
Rasio liabilitas bersih terhadap modal	143,25

26. Financial Risk Management (continued)

Capital Management (continued)

The Company's management manages its capital structure and make adjustments, based on changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods presented.

As generally accepted practice, the Company evaluates its capital structure through debt-to-equity ratio (gearing ratio), which is calculated as net liabilities divided by total capital. Net debt is total interest bearing liabilities as presented in the statements of financial position less cash and banks as well as restricted deposits.

Whereas, total equity is all components of equity in the statements of financial position. As of December 31, 2019, the ratio calculation are as follows:

	2018	
Total liabilitas	107.829.153.060	Total liabilities
Dikurangi bank	(25.083.188.311)	Less bank
Liabilitas bersih	82.745.964.749	Net liabilities
Total ekuitas	72.941.107.194	Total Equity
Rasio liabilitas bersih terhadap modal	113,44	Net liabilities to equity ratio

27. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar atau disajikan dalam jumlah tercatat (ketika nilai tercatatnya mendekati nilai wajar atau karena nilai wajar tidak tersedia dan/atau tidak dapat diukur secara handal). Perbedaan antara nilai wajar dengan nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak signifikan.

Tabel di bawah ini adalah perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan keuangan:

	2019	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan		
Kas dan Bank	42.355.149.791	42.355.149.791
Piutang Usaha	8.079.332.614	6.239.764.321
Piutang Lain - lain	12.803.971.356	12.803.971.356
Aset Keuangan Lainnya	59.532.303.870	53.697.225.165
	122.770.757.631	115.096.110.633
Liabilitas Keuangan		
Utang Usaha	10.071.775.737	10.071.775.737
Utang Lainnya	62.846.697.303	62.846.697.303
Beban Akrua	46.575.998.843	46.575.998.843
Liabilitas Keuangan Lainnya	16.767.488.788	16.767.488.788
	136.261.960.671	136.261.960.671

27. Financial Instrument

Financial instruments are presented in the statement of financial position are carried at fair value or the carrying amount is presented in (when approaching the carrying value or fair value because fair value is not available and / or can not be measured reliably). The difference between the fair value and the carrying amount at the date of December 31, 2019 and 2018, were not significant.

The table below is a comparison of the carrying amount and fair value of the Company's financial instruments recorded in the financial statements:

	2018		
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	
Financial Asset			
Cash and Bank	25.308.022.120	25.308.022.120	
Account Receivable	9.493.210.735	7.717.070.838	
Others Receivable	2.667.575.934	2.667.575.934	
Others Financial Asset	32.854.295.078	27.173.196.381	
	70.323.103.867	62.865.865.273	
Financial Liabilities			
Account Payable	19.343.058.298	19.343.058.298	
Others Payable	30.949.672.551	30.949.672.551	
Accrued Expense	22.096.972.732	22.096.972.732	
Others Financial Liabilities	14.879.810.409	14.879.810.409	
	87.269.513.990	87.269.513.990	

Aset dan liabilitas keuangan lancar yang jatuh tempo dalam jangka pendek, nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan lancar telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Current financial assets and liabilities maturing in the short term, the carrying amount of financial assets and liabilities have been approaching the estimated current fair value.

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

27. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap dan variabel nilai wajarnya ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

Seluruh instrumen keuangan telah mencerminkan nilai wajar yang bersangkutan. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dengan nilai tercatatnya.

27. Financial Instrument (continued)

Long-term financial assets and liabilities with fixed and variable interest rate fair value is determined by discounting future cash flows using current interest rates from observable current market transactions for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

All financial instruments have reflected the fair value is concerned. There was no significant difference between the fair value of financial assets and liabilities and their carrying values.

28. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

Sifat hubungan dengan pihak – pihak yang berelasi adalah sebagai berikut :

- Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Kementerian BUMN merupakan pemegang saham Perseroan dan BUMN lain memiliki hubungan berelasi melalui penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
- Perseroan yang menempatkan dana dan memiliki pinjaman dana pada bank yang dimiliki oleh pemerintah atau dari bank yang dimiliki oleh BUMN dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
- Perseroan mengadakan perjanjian dalam rangka usaha, dengan BUMN-BUMN lain serta Badan atau Lembaga pemerintah yang berwenang.

Ikhtisar pihak – pihak yang berelasi adalah sebagai berikut :

28. Nature and Related Party Transactions

The nature of the relationship with the party related parties are as follows:

- The Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of Enterprise is a shareholder of the Company and other state-owned enterprises have a relationship to relate through the capital of the Government of the Republic of Indonesia.
- The company that puts money and have a loan at a bank owned by the government or of a bank owned by the state with the normal terms and interest rate as applicable to third-party customers.
- The Company entered into an agreement in order to attempt, with state-owned companies as well as the agency or other authorized government body.

Overview parties related parties are as follows:

Pihak - pihak berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Transaksi / Transaction
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Kepemilikan Sama / The Same Ownership	Kas dan bank / Cash and bank
PT Bank BNI (Persero) Tbk.	Kepemilikan Sama / The Same Ownership	Kas dan bank / Cash and bank
PT Bank BRI (Persero) Tbk.	Kepemilikan Sama / The Same Ownership	Kas dan bank / Cash and bank
PT Brantas Abipraya (Persero)	Kepemilikan Sama / The Same Ownership	Jasa Konsultan / Consulting Services
PT Hutama Karya (Persero)	Kepemilikan Sama / The Same Ownership	Jasa Konsultan / Consulting Services
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Kepemilikan Sama / The Same Ownership	Jasa Konsultan / Consulting Services
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Kepemilikan Sama / The Same Ownership	Jasa Konsultan / Consulting Services
PT Angkasa Pura II (Persero)	Kepemilikan Sama / The Same Ownership	Jasa Konsultan / Consulting Services
PT Perumnas (Persero)	Kepemilikan Sama / The Same Ownership	Jasa Konsultan / Consulting Services
PT Indah Karya (Persero)	Kepemilikan Sama / The Same Ownership	Jasa Konsultan / Consulting Services
DEP.PU Dirjen Sumber Daya Air	Kepengurusan / Stewardship	Jasa Konsultan / Consulting Services
DEP.PU Dirjen Bina Marga	Kepengurusan / Stewardship	Jasa Konsultan / Consulting Services
DPU Pemkab Sumbawa	Kepengurusan / Stewardship	Jasa Konsultan / Consulting Services
SATKER BBWS Brantas	Kepengurusan / Stewardship	Jasa Konsultan / Consulting Services
SATKER BBWS Nusa Tenggara	Kepengurusan / Stewardship	Jasa Konsultan / Consulting Services
SATKER BBWS Ciliwung - Cisadane	Kepengurusan / Stewardship	Jasa Konsultan / Consulting Services
SATKER NON VERTIKAL P2JN NTT	Kepengurusan / Stewardship	Jasa Konsultan / Consulting Services
SNVT PEL Jaringan Sumber Air Bali	Kepengurusan / Stewardship	Jasa Konsultan / Consulting Services

Dalam kegiatan usahanya perseoran melakukan transaksi dengan pihak – pihak yang berelasi, adalah sebagai berikut :

In the normal course of business transactions with the company related parties, is as follows:

Kas dan bank

Cash and bank

Pihak - pihak berelasi / Related Parties	2019	% dari Total Aset	2018	% dari Total Aset
PT Bank BRI (Persero) Tbk.	38.596.504.980	15,9761	23.641.438.461	13,0782
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	3.002.312.556	1,2427	1.005.951.116	0,5565
PT Bank BNI (Persero) Tbk.	76.112.437	0,0315	229.522.813	0,1270
	3.078.424.993	1,2742	1.235.473.929	0,6834

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

28. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (lanjutan)

Piutang Usaha & Tagihan Bruto Pengguna Jasa

28. Nature and Related Party Transactions (continued)

Account Receivable and Gross Amount due from to Customer

Pihak - pihak berelasi / Related Parties	2019	% dari Total Aset	2018	% dari Total Aset
SNVT Pelaksana Jaringan SDA	11.389.584.349	4,7144	1.801.414.408	0,9965
SATKER BWS Nusteng I, II & III	10.730.548.586	4,4417	-	0,0000
Balai Wilayah Sungai Maluku	5.324.528.046	2,2040	-	0,0000
Kementrian Pekerjaan Umum	4.966.357.495	2,0557	-	0,0000
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	2.272.406.056	0,9406	2.399.173.704	1,3272
PT Brantas Abipraya (Persero)	1.984.994.674	0,8216	1.984.994.674	1,0981
Perum Jasa Tirta II	1.945.373.430	0,8052	2.449.819.853	1,3552
Center of Dams	1.490.516.719	0,6170	3.337.822.394	1,8464
PT Waskita Karya (Persero)	1.379.222.939	0,5709	2.451.971.313	1,3564
PT Angkasa Pura I (Persero)	1.112.961.275	0,4607	-	0,0000
DEP.PU Dirjen Sumber Daya Air	1.087.016.125	0,4499	1.087.016.125	0,6013
PT Hutama Karya (Persero)	710.567.949	0,2941	934.018.042	0,5167
DPU Pemkab Tanah Bumbu	710.000.000	0,2939	6.256.267.741	3,4609
Balai Wilayah Sungai Sumatera I	400.144.416	0,1656	-	0,0000
Kementrian Perhubungan	358.925.000	0,1486	-	0,0000
PT Pelindo III	346.073.335	0,1432	-	0,0000
PT Perumnas (Persero)	301.743.874	0,1249	-	0,0000
Perum Bulog	248.417.622	0,1028	248.417.622	0,1374
Balai Besar Wil Sungan Cidanau-Ciujung	243.166.940	0,1007	-	0,0000
PT Indah Karya (Persero)	236.479.809	0,0979	36.029.905	0,0199
PT Banda Graha Reksa	220.000.000	0,0911	-	0,0000
DEP.PU Dirjen Bina Marga	134.995.681	0,0559	-	0,0000
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	114.250.000	0,0473	114.250.000	0,0632
PT Adhi Karya (Persero)	52.000.000	0,0215	-	0,0000
PT Berdikari (Persero)	21.922.731	0,0091	-	0,0000
PT PAL Indonesia	-	0,0000	1.788.845.744	0,9896
DPU Pemkab Sumbawa	-	0,0000	260.000.000	0,1438
SNVT Pembangunan Bendungan BBWS	-	0,0000	3.236.502.912	1,7904
SATKER BBWS Brantas	-	0,0000	172.038.810	0,0952
SNVT Sumber Air Brantas	-	0,0000	1.440.034.370	0,7966
SATKER BWS Nusteng I, II & III	-	0,0000	2.130.494.210	1,1786
	47.782.197.051	19,7783	32.129.111.827	17,7735

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

28. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (lanjutan)

Utang Lainnya

Pihak - pihak berelasi / Related Parties	2019	% dari Total Aset	2018	% dari Total Aset
Kementrian PU	12.121.676.231	5,0175	1.421.809.830	0,7865
Satker BWS Nusa Tenggara	6.947.375.236	2,8757	3.533.675.930	1,9548
Directorate of Irrigation	5.533.589.483	2,2905	-	-
BWS Maluku	873.269.297	0,3615	873.269.297	0,4831
PT Jiwasraya Putera (Persero)	444.293.391	0,1839	434.965.489	0,2406
Centre of Dams	338.000.000	0,1399	425.000.000	0,2351
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	335.111.049	0,1387	335.111.049	0,1854
SNVT Sumber Air Brantas	335.000.000	0,1387	-	-
PT Brantas Abipraya	200.000.000	0,0828	200.000.000	0,1106
PT Waskita Karya Divisi II	105.000.000	0,0435	105.000.000	0,0581
Satker BWS Sulawesi I	38.200.000	0,0158	351.546.838	0,1945
	27.271.514.687	11,2884	7.680.378.433	4,2487

Uang muka proyek

Pihak - pihak berelasi / Related Parties	2019	% dari Total Aset	2018	% dari Total Aset
Satker BWS Nusteng	6.546.030.239	2,7096	1.832.821.326	1,0139
Balai Wilayah Sungai Maluku	3.895.668.836	1,6125	1.818.181.818	1,0058
Kementrian PUPR	1.672.439.211	0,6923	-	-
SNVT Pembangunan Bendungan BBWS	1.496.176.036	0,6193	2.016.434.639	1,1155
Kementrian Kelautan dan Perikanan	1.043.865.500	0,4321	-	-
Pemkab Tanah Bumbu	355.000.000	0,1469	1.283.422.459	0,7100
PT Brantas Abipraya	280.080.401	0,1159	280.080.401	0,1549
Perum Jasa Tirta II	263.418.200	0,1090	-	-
Satker BWS Sulawesi	85.674.261	0,0355	554.929.499	0,3070
Center of Dams	-	-	2.507.240.000	1,3870
Satker BBWS Brantas	-	-	839.213.760	0,4642
PT Waskita Karya Div II	-	-	832.854.177	0,4607
SNVT Pelaksana Jaringan Sumber	-	-	642.589.206	0,3555
SNVT Sumber Air Brantas	-	-	229.544.004	0,1270
	15.638.352.684	6,4731	12.837.311.289	7,1015

29. Komitmen dan Perikatan

- a) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Lahan No. 008-I/SPJ/IKA/2017, PBI/EP.859/S.Perj.8.1/III/2017 dan 21.2/DU/AG/PERJ.1.2/III/2017 tanggal 22 Maret 2017, Perusahaan telah melakukan perjanjian kerjasama optimalisasi lahan PT Hutama Karya (Persero) dan PT Indra Karya (Persero) di Jalan Letjen Haryono MT Kav. 8 dan 9 Cawang, Jakarta Timur, antara PT Indra Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero) dengan PT HK Realtindo, dengan penjelasan sebagai berikut :

28. Nature and Related Party Transactions (continued)

Others Payable

Advance from Customer

29. Commitment and Agreement

- a) Based on the Land Optimization Cooperation Agreement No. 008-I / SPJ / IKA / 2017, PBI / EP.859 / S.Perj.8.1 / III / 2017 and 21.2 / DU / AG / PERJ.1.2 / III / 2017 dated March 22, 2017, the Company has entered into an optimization cooperation agreement land PT Hutama Karya (Persero) and PT Indra Karya (Persero) on Jalan Letjen Haryono MT Kav. 8 and 9 Cawang, East Jakarta, between PT Indra Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero) and PT HK Realtindo, with the following explanation:

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

29. Komitmen dan Perikatan (lanjutan)

- Perusahaan menyewakan lahan kepada PT HK Realtindo seluas 2.245m2 selama 30 tahun, dengan tujuan dioptimalisasi untuk didirikan bangunan Gedung HK Tower.
 - Perusahaan mendapatkan space/ruang dengan luasan kantor seluas 1000 m3 selama masa pengelolaan 30 tahun, dengan sistem sewa kepada PT HK Realtindo.
 - Setelah masa pengelolaan 30 tahun, Perusahaan akan mendapatkan space/ruang kantor seluas 2.245 m2.
- b) Pada tanggal 17 Desember 2018, Perusahaan memperoleh komitmen dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja dengan nilai maksimum Rp 10.000.000.000,- dan fasilitas Bank Garansi maksimum Rp 8.000.000.000,-.

Sampai dengan berakhirnya laporan ini, fasilitas tersebut belum digunakan oleh Perusahaan.

- c) Pengelola proyek yang berasal dari Pemberi Kerja (Owner) dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan tersebut termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan proyek kepada masing – masing pihak yang melakukan perjanjian kerjasama.

Perjanjian kerjasama antara lain, sebagai berikut :

No	Nama / Name
1	Proyek Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Lolak, PT IKA - PT MTN - Barunadri KSO
2	Pengawasan Teknis Jembatan Musi IV (Paket 28), IKA-WMA-CDE-CNC-HWIK KSO
3	Supervisi Pengawasan Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung, BA-EII-IKA KSO
4	Supervisi Pengawasan Pembangunan Jalan Tol Cismudawu Phase II, CECI-CNS-DCM-IKA-PKM-SEECONS KSO
5	Supervisi Pembangunan Bendungan Bano, Kab. Sumbawa Barat, PT IKA - PT IAP KSO
6	Supervisi Pembangunan Bendungan Napin Gete, Kab. Sika, PT IKA - PT IIK - PT VK KSO
7	Supervisi Pembangunan Bendungan Way Apu, Kab. Buru, IKA-RK-MH-IIK KSO
8	Supervisi Pembangunan Bendung Pengalih Rababaka, IKA-CEC KSO
9	SID Rehabilitasi DI Kewenangan Pusat, Lombok, IKA-IAP KSO
10	Supervisi Pembangunan Bendung Meninting, IKA-BK-BSI KSO
11	Flood Management in selected River Basin Sector Project, IKA-SE-CEC-MH-KH KSO
12	SID Rehabilitasi DI Kewenangan Pusat, Jember-Lumajang, IKA-IAP KSO
13	Supervisi Pembangunan Bendung Beringinsila, IKA-BK-TAA KSO
14	PPC - DOWIS in the Central of Java Province, IKA-SEC-CEC-Wapcos-RL-BK KSO
15	Consultan Perparation of Seluna River Basin Flood Management in Central Java

29. Commitment and Agreement (continued)

- The company leases 2,245m2 of land to PT HK Realtindo for 30 years, with the aim of optimizing the construction of the HK Tower Building.
- The company obtained space with an office area of 1000 m3 over a 30-year management period, with a lease system to PT HK Realtindo.
- After a management period of 30 years, the Company will obtain 2,245 m2 of office space.

- b) On December 17, 2018, the Company obtained a commitment from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the form of a Working Capital Credit facility with a maximum value of Rp 10,000,000,000, - and Bank Guarantee facility with a maximum of Rp. 8,000,000,000.

Until the end of this report, the facility has not been used by the Company.

- c) Project managers from Employer (Owner) and fully responsible for all activities that include financial accountability reports for each project each party to perform a cooperation agreement.

Cooperation agreements, among others, as follows:

Porsi / Portion	Nilai / Amount	Kondisi / Condition
60,00%	26.830.050.000	Berjalan / On going
25,00%	15.067.104.318	Berjalan / On going
10,00%	20.009.480.000	Berjalan / On going
14,00%	59.260.110.000	Berjalan / On going
70,00%	33.430.444.545	Berjalan / On going
50,00%	31.568.550.000	Berjalan / On going
40,00%	76.223.072.000	Berjalan / On going
60,00%	16.683.168.700	Berjalan / On going
70,00%	5.077.130.000	Berjalan / On going
50,00%	48.477.110.000	Berjalan / On going
36,00%	71.440.000.000	Berjalan / On going
70,00%	6.593.822.000	Berjalan / On going
50,00%	57.219.501.900	Berjalan / On going
32,00%	37.863.067.190	Berjalan / On going
40,00%	25.550.446.400	Berjalan / On going

PT INDRA KARYA (Persero)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDRA KARYA (Persero)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019

and for the year ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

30. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2018 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2019

- PSAK 24 : Imbalan Kerja : Amandemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program;
- PSAK 22 (Penyesuaian Tahunan 2018) : Kombinasi Bisnis
- PSAK 26 (Penyesuaian Tahunan 2018) : Biaya Pinjaman
- PSAK 46 (Penyesuaian Tahunan 2018) : Pajak Penghasilan
- PSAK 66 (Penyesuaian Tahunan 2018) : Pengaturan Bersama
- ISAK 33 : Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
- ISAK 34 : Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2020

- PSAK 71 : Instrumen Keuangan
- PSAK 72 : Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73 : Sewa
- Amandemen PSAK 15 : Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- Amandemen PSAK 62 : Kontrak Asuransi menerapkan PSAK 71 : Instrumen Keuangan dengan PSAK 62 : Kontrak Asuransi
- Amandemen PSAK 71 : Instrumen Keuangan tentang fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif.

Perusahaan sedang melakukan analisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut, yang relevan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

31. Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Timbulnya COVID-19 sejak awal tahun 2020 telah membawa ketidakpastian untuk kegiatan operasi Perusahaan dan berdampak pada hasil operasi Perusahaan serta posisi keuangannya pada periode setelah akhir tahun keuangan. Perusahaan menyadari akan tantangan yang timbul dari kejadian ini dan dampak potensial untuk sektor bisnis Perusahaan. Perusahaan akan meninjau situasi secara berkelanjutan, bekerjasama dengan pihak berwenang untuk mendukung mereka dalam menahan penyebaran COVID-19 dan berusaha untuk meminimalkan dampak terhadap bisnis Perusahaan. Dikarenakan terus berkembangnya situasi ini, dampak sepenuhnya dari penyebaran COVID-19 masih menjadi ketidakpastian dan belum dapat ditentukan.

32. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang selesai disusun dan diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2020.

30. New Financial Accounting Standards

Adoption of New and Revised Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of PSAK (ISAK)

New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2018 that may have certain impact on the financial statements are as follows :

Effective on or after January 1, 2019 :

- *PSAK 24 ; Employee benefits : Amendment, Curtailment, or Program Settlement;*
- *PSAK 22 (Annual Improvement 2018) :Business Combination*
- *PSAK 26 (Annual Improvement 2018) : Borrowing Cost*
- *PSAK 46 (Annual Improvement 2018) : Income Tax*
- *PSAK 66 (Annual Improvement 2018) : Joint Operations*
- *ISAK 33 : Foreign Currency Transaction and Advance Consideration*
- *ISAK 34 : Uncertainty over Income Tax Treatments*

Effective on or after January 1, 2020 :

- *PSAK 71 : Financial Instrument*
- *PSAK 72 : Revenue from Contracts with Customers*
- *PSAK 73 : Leases*
- *Amendments to PSAK 15 : Investments in Associates and Joint Ventures Long -term Interests in Associates and Joint Ventures;*
- *Amendments to PSAK 62 : Insurance Contracts : Applying PSAK 71 Financial Instruments with PSAK 62 Insurance Contracts*
- *Amendments to PSAK 71 : Financial Instruments Prepayment Features with Negative Compensation*

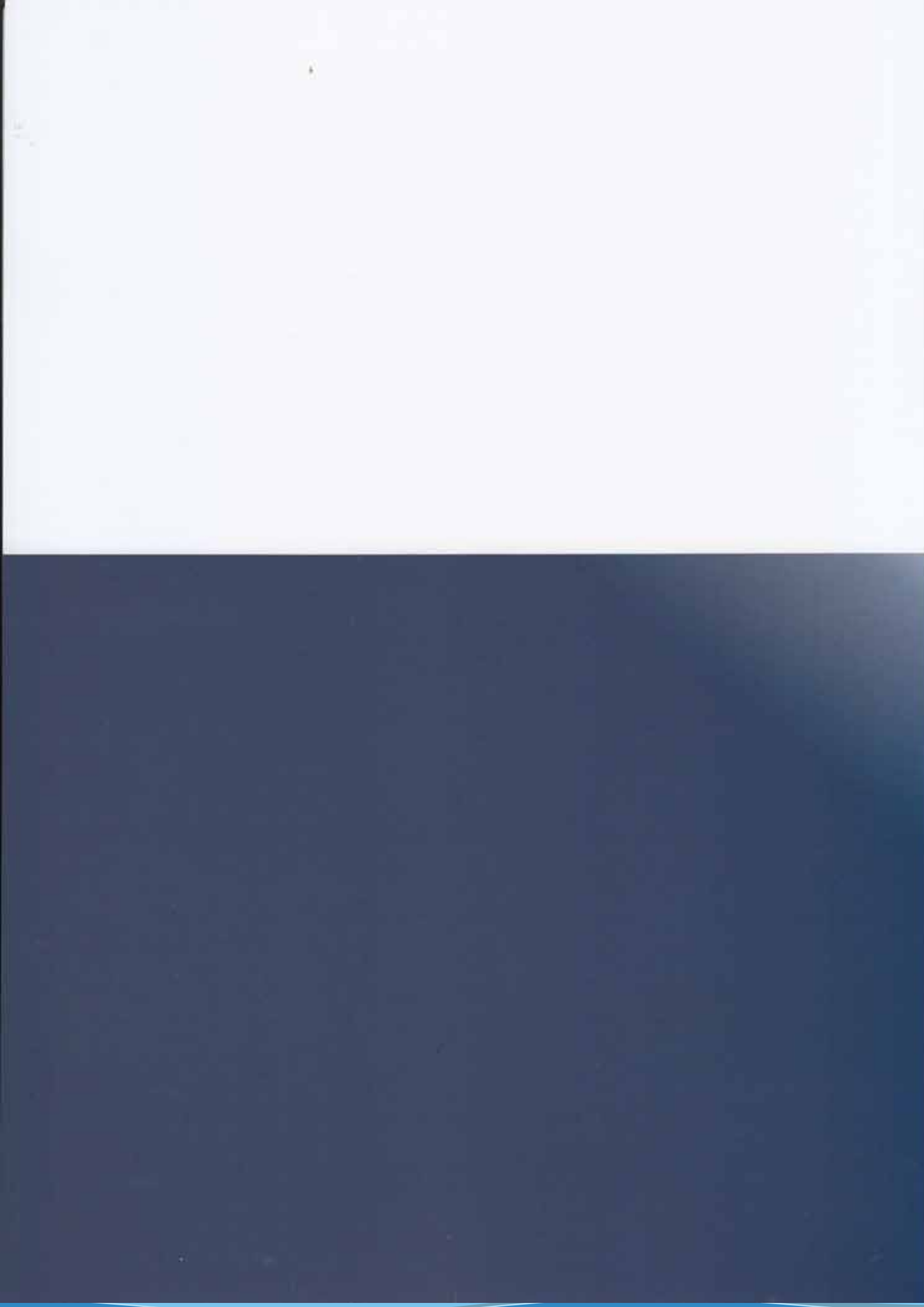
The Company is conducting an analysis of the impact of applying the accounting standards and interpretations, which are relevant to the Company's financial statements.

31. Event After The Reporting Period

The emergence of COVID-19 since early 2020 has brought about uncertainties to the Company operating environment and has impacted the Company results of operations and its financial position subsequent to the financial year end. The Company is cognizant of the challenges posed by these developing events and the potential impact they have on the Company business sector. The Company will continuously assess the situation, work closely with the local authorities to support their efforts in containing the spread of COVID-19 and put in place measures to minimize impact to the Company business. As the situation is still evolving, the full effect of the COVID-19 outbreak is subject to uncertainty and could not be ascertained yet.

32. Completion of Financial Statements

The Company's management is responsible for the preparation of financial statements completed and authorized for issue by the Board of Directors on March 27, 2020.







KANTOR PUSAT
HK Tower Lantai 9
Jl. Biru Laut X Kav.9 Cawang, Jakarta Timur, 13340 Indonesia
Telepon : +62 21 8192636
Fax : +62 21 8192179
Email : indrakarya@indrakarya.co.id



ISO 9001:2015
Quality



ISO 14001 : 2015
Environmental



OHSAS 18001 : 2007
Health and Safety

www.indrakarya.co.id



Balai Pustaka